



**PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT**



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(RKPD)**

**TAHUN 2023**

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



# **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

## **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR 42 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap tahunnya Pemerintah Daerah wajib menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
  - b. bahwa rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan disusun dalam suatu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa Jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah periode 1 (satu) tahun.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## BAB II

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 2

RKPD Tahun 2023 merupakan hasil penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musrenbang.

#### Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan dalam penyusunan KUA dan PPAS Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.

#### Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program prioritas yang akan dilaksanakan Tahun 2023 dan menjadi acuan dalam penyusunan RKA SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 8 (delapan) Bab, meliputi:
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
  - d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - e. Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
  - f. Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
  - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - h. Bab VIII Penutup.
- (2) Penjabaran RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

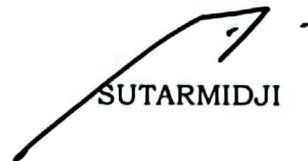
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak pada  
tanggal 30 Juni 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

  
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 42

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	1
	1.3. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD .....	3
	1.4. Maksud dan Tujuan .....	4
	1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	4
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>	<b>7</b>
	2.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	7
	2.1.1. Aspek Kesejahteraan.....	7
	2.1.2. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	7
	2.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	21
	2.2.1. Aspek Pelayanan Umum.....	21
	2.2.1.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar .....	21
	2.2.1.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar .....	25
	2.2.1.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan .....	35
	2.2.2. Aspek Daya Saing Daerah.....	42
	2.2.2.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	42
	2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .....	42
<b>BAB III</b>	<b>KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....</b>	<b>91</b>
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat.....	91
	3.1.1. Perkembangan Ekonomi Global .....	91
	3.1.2. Perkembangan Ekonomi Nasional.....	92
	3.1.3. Perkembangan Ekonomi Kalimantan Barat Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	95
	3.1.4. Perkiraan Perekonomi Kalimantan Barat di tahun 2021 dan 2022 .....	101
	3.1.4.1. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021 .....	101
	3.1.4.2. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi 2022 .....	102
	3.1.4.3. Asumsi Makro Ekonomi.....	104
	3.1.4.4. Sasaran Makro Ekonomi .....	105
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	106
	3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....	107
	3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	108
	3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	110
	3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	112
<b>BAB IV</b>	<b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN.....</b>	<b>114</b>
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	114
	4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2022 .....	116

4.2.1.	Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur .....	117
4.2.2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas dengan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> .....	118
4.2.3.	Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Inovatif ..	120
4.2.4.	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera .....	120
4.2.5.	Mewujudkan Masyarakat yang Tertib .....	128
4.2.6.	Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan .....	129
<b>BAB V</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA .....</b>	<b>131</b>
5.1.	Arah Kebijakan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota .....	131
5.2.	Arah Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota	133
5.3.	Arah Kebijakan Penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota .....	136
5.4.	Arah Kebijakan Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota .	138
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....</b>	<b>140</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	<b>141</b>
7.1.	Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 .....	141
7.2.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	141
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>153</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Perkembangan Capaian Indeks Infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2021 .....	7
<b>Tabel 2.2</b>	Persentase Rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti dalam Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Daerah .....	8
<b>Tabel 2.3</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Kalimantan Barat .....	9
<b>Tabel 2.4</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat .....	9
<b>Tabel 2.5</b>	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota dengan nilai Reformasi Birokrasi 60 ke atas .....	9
<b>Tabel 2.6</b>	Persentase Kelembagaan Provinsi Yang Efektif Dan Efisien Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Kemampuan Keuangan Daerah .....	10
<b>Tabel 2.7</b>	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 – 2021 .....	10
<b>Tabel 2.8</b>	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat Tahun 2018-2021 .....	11
<b>Tabel 2.9</b>	Perkembangan Perekonomian Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2018-2020 .....	14
<b>Tabel 2.10</b>	Indeks Gini Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2020 .....	15
<b>Tabel 2.11</b>	Perkembangan Status Kemandirian Desa di Provinsi Kalimantan Barat 2018-2020 ....	16
<b>Tabel 2.12</b>	Perkembangan Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) Kabupaten dan Kota se Kalimantan Barat 2019-2021 .....	17
<b>Tabel 2.13</b>	PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2021 .....	17
<b>Tabel 2.14</b>	Sarana Sosial di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2021 .....	18
<b>Tabel 2.15</b>	Perkembangan Kemiskinan Kalimantan Barat .....	18
<b>Tabel 2.16</b>	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin September 2020 - September 2021 .....	19
<b>Tabel 2.17</b>	Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) Di Kalimantan Barat Menurut Daerah, September 2020-September 2021 .....	19
<b>Tabel 2.18</b>	Perkembangan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2021 .....	20
<b>Tabel 2.19</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pendidikan Tahun 2019-2021 .....	21
<b>Tabel 2.20</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kesehatan Tahun 2018-2020 .....	21
<b>Tabel 2.21</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2020 .....	22
<b>Tabel 2.22</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2018-2020 .....	23
<b>Tabel 2.23</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2018-2020 .....	23
<b>Tabel 2.24</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Sosial Tahun 2018-2020 .....	24

<b>Tabel 2.25</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018-2020 .....	25
<b>Tabel 2.26</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2020 .....	26
<b>Tabel 2.27</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pangan Tahun 2018-2021 .....	28
<b>Tabel 2.28</b>	Target dan Realisasi Kegiatan Legalisasi Aset melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) .....	28
<b>Tabel 2.29</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2020 .....	29
<b>Tabel 2.30</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018-2021 .....	30
<b>Tabel 2.31</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2020 .....	30
<b>Tabel 2.32</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2020 .....	30
<b>Tabel 2.33</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perhubungan Tahun 2019-2021 .....	31
<b>Tabel 2.34</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2020 .....	31
<b>Tabel 2.35</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Penanaman Modal Tahun 2018-2020 .....	33
<b>Tabel 2.36</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018-2020 .....	33
<b>Tabel 2.37</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Statistik Tahun 2018-2020 .....	33
<b>Tabel 2.38</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Persandian Tahun 2018-2020 .....	34
<b>Tabel 2.39</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kebudayaan Tahun 2019-2021 .....	34
<b>Tabel 2.40</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan Tahun 2018-2020 .....	34
<b>Tabel 2.41</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan Tahun 2018-2020 .....	35
<b>Tabel 2.42</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2021 .....	36
<b>Tabel 2.43</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pariwisata Tahun 2018-2021 .....	36
<b>Tabel 2.44</b>	Target dan Capaian Sektor Tanaman Pangan Tahun 2019-2021 .....	37
<b>Tabel 2.45</b>	Target dan Capaian Sektor Tanaman Hortikultura Tahun 2019-2021 .....	38
<b>Tabel 2.46</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Sub Urusan Perkebunan Tahun 2018-2021 .....	38
<b>Tabel 2.47</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Sub Urusan Peternakan Tahun 2018-2020 .....	39
<b>Tabel 2.48</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kehutanan Tahun 2019-2021 .....	40
<b>Tabel 2.49</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya	

	Mineral Tahun 2018-2020 .....	40
<b>Tabel 2.50</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perdagangan Tahun 2019-2021 .....	41
<b>Tabel 2.51</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perindustrian Tahun 2019-2021 .....	41
<b>Tabel 2.52</b>	Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Transmigrasi Tahun 2018-2020 .....	41
<b>Tabel 2.53</b>	Target dan Capaian Nilai Tukar Petani Tahun 2018-2021 (tahun Dasar = 2018) .....	42
<b>Tabel 2.54</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2021 .....	43
<b>Tabel 2.55</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2020 .....	44
<b>Tabel 2.56</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 .....	48
<b>Tabel 2.57</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2020 .....	48
<b>Tabel 2.58</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2020 .....	50
<b>Tabel 2.59</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2021 .....	50
<b>Tabel 2.60</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2020 .....	51
<b>Tabel 2.61</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020 .....	53
<b>Tabel 2.62</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 .....	53
<b>Tabel 2.63</b>	Capaian Indikator Program Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2021 .....	55
<b>Tabel 2.64</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 .....	57
<b>Tabel 2.65</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 .....	57
<b>Tabel 2.66</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 .....	58
<b>Tabel 2.67</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun 2021 .....	59
<b>Tabel 2.68</b>	Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Komunikasi dan Informatika 2021 .....	59
<b>Tabel 2.69</b>	Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Koperasi Tahun 2021 .....	60
<b>Tabel 2.70</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun 2021 .....	60
<b>Tabel 2.71</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 .....	62
<b>Tabel 2.72</b>	Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Statistik Tahun 2020 .....	62
<b>Tabel 2.73</b>	Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Persandian Tahun 2020 .....	62
<b>Tabel 2.74</b>	Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kebudayaan Tahun 2021 .....	63
<b>Tabel 2.75</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun 2020 .....	63
<b>Tabel 2.76</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2020 .....	64
<b>Tabel 2.77</b>	Capaian Indikator Program Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 .....	65
<b>Tabel 2.78</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun 2020 .....	66
<b>Tabel 2.79</b>	Capaian Indikator Program Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2021 .....	68

<b>Tabel 2.80</b>	Capaian Indikator Program Pertanian Tanaman Hortikultura Tahun 2021 .....	68
<b>Tabel 2.81</b>	Capaian Indikator Program Perkebunan Tahun 2021 .....	69
<b>Tabel 2.82</b>	Capaian Indikator Program Peternakan Tahun 2018-2021 .....	70
<b>Tabel 2.83</b>	Capaian Indikator Program Kehutanan Tahun 2021 .....	71
<b>Tabel 2.84</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 .....	72
<b>Tabel 2.85</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun 2021 .....	73
<b>Tabel 2.86</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian Tahun 2021 .....	74
<b>Tabel 2.87</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Transmigrasi Tahun 2020 .....	75
<b>Tabel 2.88</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perencanaan Tahun 2020 .....	75
<b>Tabel 2.89</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Keuangan Tahun 2021 .....	77
<b>Tabel 2.90</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pendapatan Daerah Tahun 2021 .....	77
<b>Tabel 2.91</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kepegawaian Tahun 2020 .....	78
<b>Tabel 2.92</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 .....	78
<b>Tabel 2.93</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020 .....	79
<b>Tabel 2.94</b>	Capaian Sasaran Pengelolaan Perbatasan Tahun 2018-2021 .....	80
<b>Tabel 2.95</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 .....	80
<b>Tabel 2.96</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat Tahun 2020 .....	81
<b>Tabel 2.97</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2020 .....	81
<b>Tabel 2.98</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021 .....	82
<b>Tabel 2.99</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Hukum Tahun 2020 .....	82
<b>Tabel 2.100</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020 .....	83
<b>Tabel 2.101</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Organisasi Tahun 2020 .....	84
<b>Tabel 2.102</b>	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Tahun 2021 pada Biro Organisasi .....	84
<b>Tabel 2.103</b>	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Tahun 2021 pada Urusan Wajib Sosial .....	85
<b>Tabel 2.104</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Umum Tahun 2020 .....	86
<b>Tabel 2.105</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan Tahun 2020 .....	86
<b>Tabel 2.106</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Perekonomian Tahun 2021 .....	87
<b>Tabel 2.107</b>	Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021 .....	88
<b>Tabel 2.108</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 .....	88
<b>Tabel 2.109</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kalimantan Barat Tahun 2020 .....	89
<b>Tabel 3.1</b>	Laju PDB Lapangan Usaha ADHK 2020 .....	92
<b>Tabel 3.2</b>	Laju PDB Lapangan Usaha ADHK 2020 .....	93
<b>Tabel 3.3</b>	Distribusi PDRB ADHK Sisi Pengeluaran .....	98

<b>Tabel 3.4</b>	Distribusi PDRB ADHK Sisi Produksi .....	98
<b>Tabel 3.5</b>	Realisasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat dari Sisi lapangan Usaha (Sektoral) .....	102
<b>Tabel 3.6</b>	Realisasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat dari Sisi Pengeluaran.....	103
<b>Tabel 3.7</b>	Asumsi Makro Ekonomi.....	105
<b>Tabel 3.8</b>	Target Indikator Makro Pembangunan .....	105
<b>Tabel 3.9</b>	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 dan 2020.....	109
<b>Tabel 3.10</b>	Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Tahun 2021 s/d 2023 .....	109
<b>Tabel 3.11</b>	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 dan 2020.....	111
<b>Tabel 3.12</b>	Proyeksi/Target Belanja Daerah Tahun 2021 s/d 2023.....	112
<b>Tabel 3.13</b>	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019 dan 2020 .....	112
<b>Tabel 3.14</b>	Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2021 s/d 2023 .....	113
<b>Tabel 4.1</b>	Tujuan dan Sasaran .....	114
<b>Tabel 4.2</b>	Sasaran dan Program Pangan Tahun 2023 .....	123
<b>Tabel 4.3</b>	Sasaran dan Program Pertanian Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tahun 2023.....	124
<b>Tabel 4.4</b>	Sasaran dan Program Perikanan Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tahun 2023.....	126
<b>Tabel 4.5</b>	Sasaran dan Program Kehutanan pendukung pertumbuhan ekonomi sektoral Tahun 2023.....	126
<b>Tabel 4.6</b>	Sasaran dan Program Pertanian pendukung NTP Tahun 2023 .....	127
<b>Tabel 4.7</b>	Sasaran dan Program Perikanan pendukung NTP Tahun 2023 .....	128
<b>Tabel 5.1</b>	Kategori Capaian LPE Kabupaten/Kota.....	131
<b>Tabel 5.2</b>	Kategori Capaian IPM Kabupaten/Kota .....	133
<b>Tabel 5.3</b>	Pembagian Peran dalam Peningkatan IPM di Kalimantan Barat.....	134
<b>Tabel 5.4</b>	Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota.....	136
<b>Tabel 5.5</b>	Kategori Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota.....	138
<b>Tabel 6.1</b>	Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 .....	140
<b>Tabel 7.1</b>	Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.....	141
<b>Tabel 7.2</b>	Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	142

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	Hubungan dan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan .....	3
<b>Gambar 2.1</b>	Pertumbuhan Ekonomi (%) kuartal Provinsi Kalimantan Barat .....	12
<b>Gambar 2.2</b>	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional .....	13
<b>Gambar 2.3</b>	Struktur Perekonomian Kalimantan Barat Menurut Lapangan Usaha kumulatif 3 kuartal Tahun 2021 .....	13
<b>Gambar 2.4</b>	Struktur Perekonomian Kalimantan Menurut Pengeluaran kumulatif 3 kuartal Tahun 2021 .....	14
<b>Gambar 2.5</b>	Peta Perkembangan Status Kemandirian Desa di Kalimantan Barat 2018-2020 .....	15
<b>Gambar 2.6</b>	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Barat 2018-2020 .....	16
<b>Gambar 2.7</b>	Perkembangan Koperasi Tahun 2018-2021 .....	32
<b>Gambar 3.1</b>	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2014 – 2020) .....	93
<b>Gambar 3.2</b>	Pertumbuhan Ekonomi Seluruh Provinsi Indonesia .....	94
<b>Gambar 3.3</b>	Series Pertumbuhan Ekonomi 2011-2020 .....	95
<b>Gambar 3.4</b>	Pertumbuhan (%) PDRB ADHK Pengeluaran tahun 2020 .....	96
<b>Gambar 3.5</b>	Pertumbuhan PDRB Produksi Tahun 2020 .....	97
<b>Gambar 3.6</b>	Realisasi Nilai PMDN .....	99
<b>Gambar 3.7</b>	Realisasi Nilai PMA .....	100
<b>Gambar 3.8</b>	Inflasi Kalimantan Barat dan Indonesia Tahun 2016-2020 .....	100
<b>Gambar 3.9</b>	Inflasi di Tiga Kota Kalimantan Barat Sepanjang Tahun 2020 .....	101
<b>Gambar 3.10</b>	Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat 2021-2022 .....	102
<b>Gambar 4.1</b>	Tujuan dan Sasaran Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dengan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> .....	119
<b>Gambar 5.1</b>	Analisis Kuadran Capaian LPE dan Perubahan LPE (2020-2021) Kabupaten/Kota ..	132
<b>Gambar 5.2</b>	Analisis Kuadran Capaian IPM dan Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota .....	134
<b>Gambar 5.3</b>	Analisis Kuadran Capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan Kemiskinan Kabupaten/Kota .....	137
<b>Gambar 5.4</b>	Analisis Kuadran Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka dan Laju Perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota .....	139

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun, yang merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas *Plafond* Anggaran Sementara selanjutnya menjadi acuan perangkat daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran.

Penyusunan RKPD dimulai melalui tahapan penyusunan rancangan awal dengan mempedomani RPJMD Provinsi, RKP, Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD guna menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program daerah, sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD provinsi.

Rancangan awal berisikan analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah, penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap sasaran dan arah kebijakan RPJMD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, perumusan prioritas pembangunan daerah dan perumusan rencana kerja program.

Rancangan awal RKPD dibahas dalam konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan yang diselenggarakan oleh Bappeda dengan melibatkan Kepala Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan. Hasil masukan dan saran penyempurnaan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah serta Perwakilan Masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

Berita Acara kesepakatan selanjutnya digunakan oleh Bappeda untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan dan disampaikan melalui surat edaran Kepala Daerah sebagai pedoman perangkat daerah menyempurnakan rancangan awal menjadi rancangan rencana kerja.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 berbeda dengan RKPD Tahun sebelumnya yang berfokus pada antisipasi dampak penyebaran virus serta dampaknya terhadap berbagai sektor penting, tetapi pada RKPD Tahun 2023 ini semakin difokuskan pada keberlanjutan proses perbaikan perekonomian dan target-target capaian di tahun 2023 terutama peningkatan kualitas hidup manusia.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;

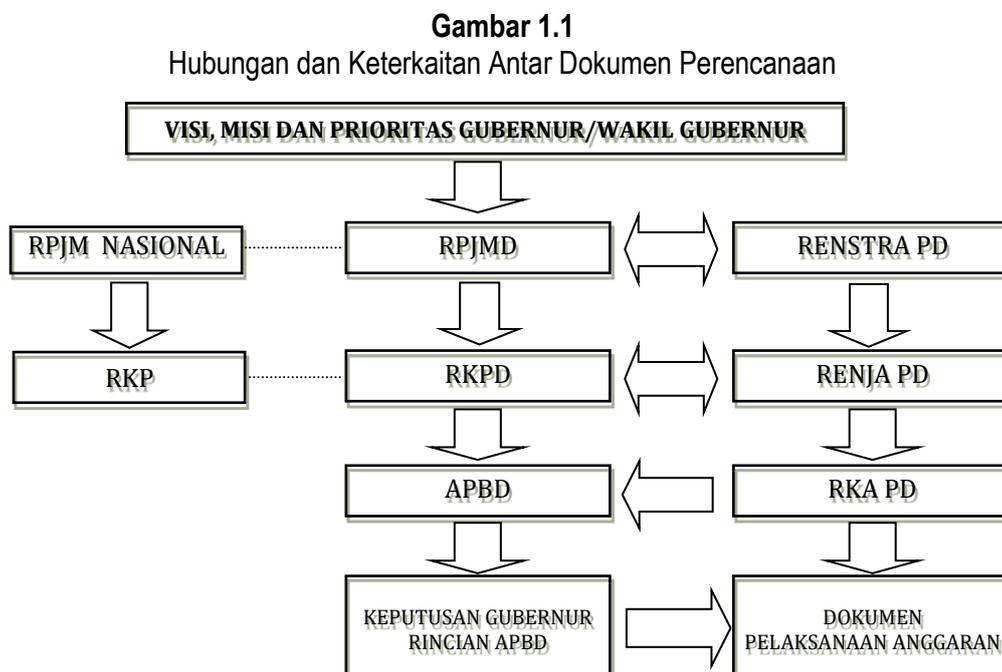
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
17. Keputusan Menteri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
20. Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; dan
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD ini merupakan tahapan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2023 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota di Kalimantan Barat sehingga terwujud sinergi perencanaan. Hubungan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dapat diilustrasikan seperti pada gambar 1.1 berikut:



Sumber : Bappeda Prov. Kalbar Tahun 2022

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 adalah untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan rencana strategis perubahan Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan kebijakan pada RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, antara kebijakan makro dan mikro, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Tujuan penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar bidang pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, maka RKPD Tahun 2023 menjadi dasar penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.

#### **1.5. Sistematika Dokumen RKPD**

Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 dibagi menjadi enam bab dan beberapa sub bab sebagai berikut:

##### **BAB I       Pendahuluan**

###### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun 2023 dalam RPJMD 2018-2023, keterkaitan antar dokumen RKPD dengan RPJMD, Renstra PD dan Renja PD serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan APBD.

###### **1.2. Dasar Hukum**

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD baik yang berskala nasional maupun lokal.

###### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

###### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Mengemukakan maksud dan tujuan penyusunan RKPD serta menguraikan fungsi RKPD dalam proses implementasi pembangunan tahun 2023 di daerah.

###### **1.5. Sistematika Dokumen RKPD**

Mengemukakan organisasi penyusunan RKPD terkait dengan pengaturan Bab serta garis besar isi setiap Bab.

##### **BAB II       Gambaran Umum Kondisi Daerah**

###### **2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah**

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

###### **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD**

Memuat uraian dari hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu menurut urusan wajib dan pilihan.

### 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Menjelaskan mengenai isu permasalahan daerah menurut urusan pemerintah daerah dan permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

## BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan mencakup kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang memuat indikator pertumbuhan ekonomi daerah. Bab ini ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Bab ini membahas proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 guna mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan daerah Kalimantan Barat.

## BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan Prioritas Pembangunan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai Tahun 2023.

## BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Mengemukakan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 lingkup provinsi pada masing-masing Kabupaten/Kota, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan.

## BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan program pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu dan masalah mendesak pembangunan daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023.

## BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Mengemukakan Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023 yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja

tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

## BAB VIII Penutup

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

##### 2.1.1 Aspek Kesejahteraan

##### 2.1.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tujuan pembangunan Kalimantan Barat selama periode 2018-2023 diarahkan guna mewujudkan visi pembangunan yang termuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yakni **“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan.”** Guna mengukur pencapaian visi tersebut telah ditetapkan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah. Perkembangan capaian IKU dimaksud yang telah berjalan selama periode 2019-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Indeks Infrastruktur

Indeks infrastruktur merupakan gabungan dari beberapa sektor atau bidang, baik itu perumahan dan permukiman, Bina Marga, Sumber Daya Air maupun energi listrik. Indeks infrastruktur merupakan salah satu cermin dari pada kondisi daya saing daerah, semakin daya saing tinggi maka kondisi infrastruktur akan semakin baik, namun apabila daya saing rendah maka kondisi infrastrukturnya semakin terbatas.

Sebagaimana diketahui bahwa kondisi infrastruktur Kalimantan Barat pada dasarnya masih relatif terbatas, baik itu di sektor jalan dan jembatan, air bersih, sanitasi, energi listrik, sumber daya air, serta infrastruktur pendukung lainnya. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian *Asia Competitiveness Institute Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore*, bahwa Daya Saing Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 menduduki peringkat 31 dari 34 Provinsi di Indonesia. Kondisi tersebut disebabkan oleh terbatasnya penyediaan infrastruktur, yang mana akan berpengaruh dalam upaya penyelesaian beberapa permasalahan, baik itu penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur.

**Tabel 2.1**

Perkembangan Capaian Indeks Infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2021

No	Indikator Kinerja	2019		2020		2021	
		Komponen Pembentuk	Indeks Infrastruktur	Komponen Pembentuk	Indeks Infrastruktur	Komponen Pembentuk	Indeks Infrastruktur
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>INDEKS INFRASTRUKTUR</b>		<b>63,41</b>		67,28		67,00
1.	Rasio Elektrifikasi	96,68%	19,34	92,00%	18,40	93,00	18,60
2.	Persentase kemantapan jalan provinsi	56,81%	11,36	60,05%	12,01	66,94	13,39

No	Indikator Kinerja	2019		2020		2021	
		Komponen Pembentuk	Indeks Infrastruktur	Komponen Pembentuk	Indeks Infrastruktur	Komponen Pembentuk	Indeks Infrastruktur
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Persentase irigasi Provinsi dalam kondisi baik	51,31%	10,26	53,68	10,74	55,84	11,17
4.	Persentase rumah tangga berakses air minum	60,75%	12,15	66,30	13,26	68,79	13,76
5.	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	51,51%	10,3	64,35	12,87	50,42	10,08

Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, diolah

Selama periode 2018-2020 capaian indeks infrastruktur terus menunjukkan peningkatan seiring peningkatan capaian komponen pembentuk. Nilai Indeks Infrastruktur sendiri dibentuk atas rasio elektrifikasi, persentase.

Kemantapan jalan provinsi, persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik, persentase rumah tangga berakses air minum dan persentase rumah tangga berakses sanitasi. Capaian setiap komponen pembentuk kemudian dikali dengan pembobot 0,2 selanjutnya hasil perkalian pembobotan dijumlahkan secara total untuk mendapatkan nilai Indeks Infrastruktur.

#### b. Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP

##### b.1. Indeks Reformasi Birokrasi

##### b.1.1. Persentase Rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti dalam Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.

**Tabel 2.2**

Persentase Rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti dalam Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Daerah

No	Indikator	Capaian (Jumlah)	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4
1.	Persentase Rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti dalam Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Daerah	90%	95,56%

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Kalbar, Tahun 2022

Persentase Rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti dalam Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Daerah tercapai 100% pada tahun 2021 dan melebihi target pada tahun yang sama yaitu sebesar 90%. Adapun capaian tersebut didukung oleh empat (4) Program yaitu : (1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan yang di sampaikan kepada Pemerintah Pusat Provinsi dan Kabupaten/ Kota dengan target dan capaian 100%, yang ke-dua (2) dari Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan indikator pertama yaitu Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang sosial dan kependudukan dengan target 100% dan capaian 100%, dan dari indikator program yang kedua yaitu Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota dengan target 100% dan capaian sebesar 100%. (3) program Penelitian dan Pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan indikator Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan bidang

Ekonomi dan Pembangunan dengan target 100% serta capaian 100%, serta indikator yang kedua Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat Provinsi dan Kabupaten/ Kota dengan target 100% dan capaian 100% dan program yang ke (4) yaitu Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan indikator Persentase hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi dari target 100% dan tercapai 100%.

#### b.1.2. IKM Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 2.3**  
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4
1.	IKM Provinsi Kalimantan Barat.	83,82	84,61

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar, Tahun 2022

IKM Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,79 poin jika di bandingkan dengan capaian pada tahun 2020.

**Tabel 2.4**  
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4
1.	IKM Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.	84,18	85,01

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar, Tahun 2022

IKM Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,83 dibandingkan capaian tahun 2020. dengan target pada tahun 2021 sebesar 84,00 dengan capaian 85,01. Capaian ini di tunjang melalui capaian indikator program yaitu Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM sangat baik sebesar 20,29% dari target sebesar 20%.

#### b.1.3. Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota dengan nilai Reformasi Birokrasi 60 ke atas

**Tabel 2.5**  
Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota dengan nilai Reformasi Birokrasi 60 ke atas

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4
1.	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota dengan nilai Reformasi Birokrasi 60 ke atas	100%	100%

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar, Tahun 2022

Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota dengan nilai Reformasi Birokrasi 60 ke atas tercapai 100% dari target 100% pada tahun yang sama. Capaian ini di tunjang dari capaian indicator program Penataan Organisasi dengan indicator programnya yaitu (1) Persentase Perangkat Daerah Provinsi dengan nilai RB meningkat dengan target 100% dan capaian 100% (2) Persentase Kab/Kota dengan nilai RB meningkat dengan target 100% dan capaian 100%.

#### b.1.4. Persentase Kelembagaan Provinsi Yang Efektif Dan Efisien Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Kemampuan Keuangan Daerah

**Tabel 2.6**  
 Persentase Kelembagaan Provinsi Yang Efektif Dan Efisien Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Kemampuan Keuangan Daerah

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4
1.	persentase kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah	N/A	100 %

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar, Tahun 2021.

Persentase kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah tercapai 100% pada tahun 2021 didukung melalui capaian indikator Program Penataan Organisasi yakni (1) Jumlah perangkat daerah yang dilakukan penataan sesuai peraturan perundang-undangan dengan target 5 Perangkat Daerah dan tercapai sebanyak 47 Perangkat Daerah dan Biro (2) persentase dokumen manajemen SDMA PD yang terverifikasi dengan capaian 327% dari target 100% (3) persentase kabupaten/kota yang difasilitasi penataan kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan tercapai sebesar 100% dari target 100%.

b.2. Nilai SAKIP

**Tabel 2.7**  
 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 – 2021

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai		
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,55	21,73	21,98
2.	Pengukuran Kinerja	25	14,44	15,07	15,38
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,52	10,70	10,83
4.	Evaluasi Internal	10	6,62	6,76	6,76
5.	Capaian Kinerja	20	12,72	12,90	13,09
	Nilai Hasil Evaluasi	100	65,85	67,16	68,04
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B

Sumber : (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Tahun 2021).

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa **Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan upaya perbaikan dimana pada tahun 2019 dengan nilai hasil evaluasi sebesar 65,85 dengan predikat B dan pada tahun 2020 memperoleh nilai 67,16 atau predikat B**, mengalami peningkatan nilai sebesar 1,31. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat **menunjukkan hasil yang baik**.

Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,18 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 10,52 dan pada tahun 2020 sebesar 10,70. Capaian ini di tunjang melalui program Penataan Organisasi dengan indicator programnya Persentase LKj PD yang memuat informasi kinerja dengan target dan capaiannya 100%.

c. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka Panjang.

Selama periode 2018-2021, IPM Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 IPM Kalimantan Barat sebesar 66,98 poin meningkat sebesar 0,92 poin atau 1,13 persen pada tahun 2021 menjadi sebesar 67,90 poin. Meskipun terus mengalami peningkatan, status pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat masih berstatus sedang. Jika dibandingkan capaian IPM Nasional maka capaian IPM Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2018-2021 masih dibawah capaian nasional.

**Tabel 2.8**

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat Tahun 2018-2021

No	Wilayah	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1.	Sambas	66,61	67,02	67,03	67,1
2.	Bengkayang	66,85	67,57	67,87	68,04
3.	Landak	65,45	65,96	65,98	66,21
4.	Mempawah	64,90	65,50	65,74	66,03
5.	Sanggau	65,15	65,67	65,77	66,2
6.	Ketapang	66,41	67,16	67,17	67,43
7.	Sintang	66,07	66,70	66,88	66,93
8.	Kapuas Hulu	65,03	65,65	65,69	65,75
9.	Sekadau	63,69	64,34	64,76	64,93
10.	Melawi	65,05	65,54	65,55	65,87
11.	Kayong Utara	61,82	62,66	62,68	62,9
12.	Kubu Raya	67,23	67,76	67,95	68,16
13.	Kota Pontianak	78,56	79,35	79,44	79,93
14.	Kota Singkawang	71,08	71,72	71,94	72,11
<b>Kalimantan Barat</b>		<b>66,98</b>	<b>67,65</b>	<b>67,66</b>	<b>67,90</b>
<b>Nasional</b>		<b>71,39</b>	<b>71,92</b>	<b>71,94</b>	<b>72,29</b>

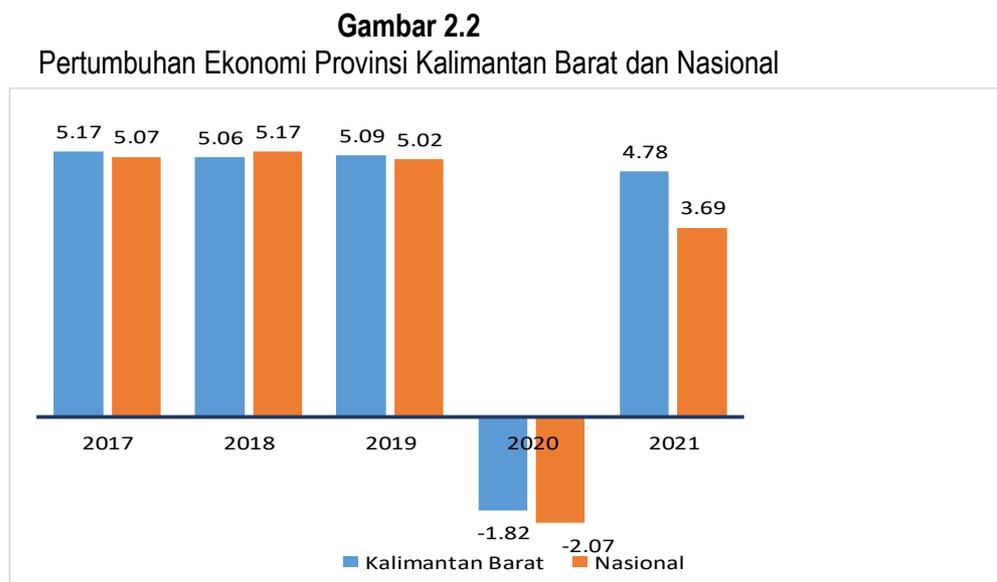
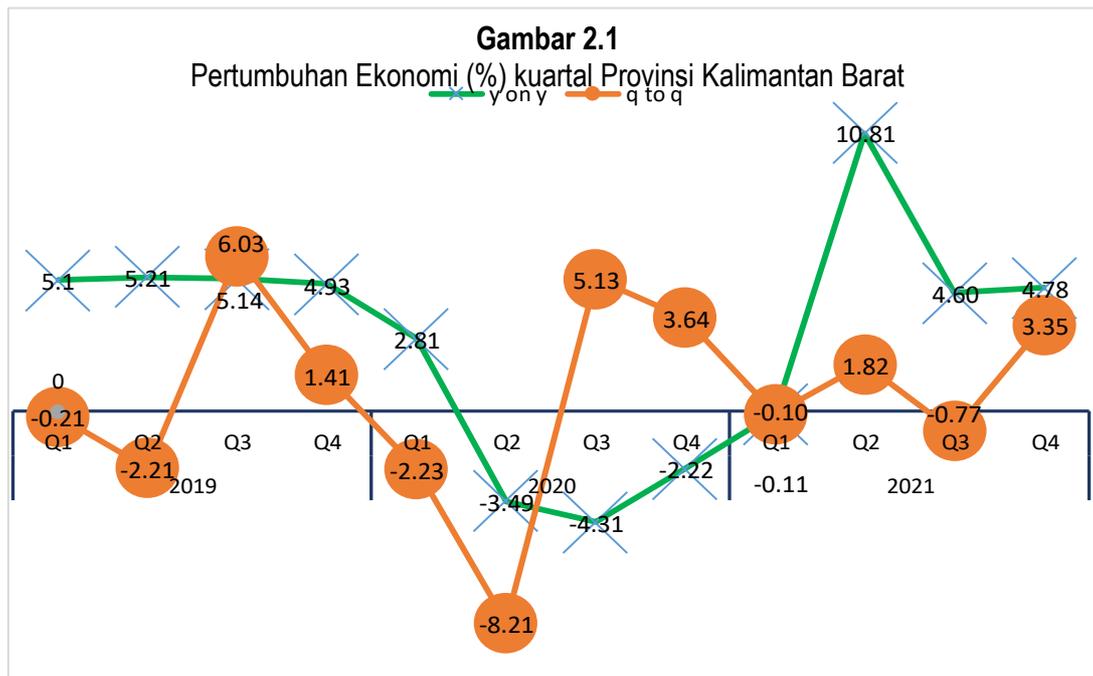
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2021, diolah

Untuk IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat selama kurun waktu 2018 hingga 2021 secara keseluruhannya mengalami peningkatan dengan status pembangunan manusianya keseluruhannya telah masuk kategori sedang, terkecuali untuk Kota Pontianak dan Kota Singkawang yang status pembangunan manusianya masuk kategori tinggi.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak awal tahun 2020 hingga saat ini telah memberikan dampak negatif terhadap perekonomian baik pada tingkat nasional maupun daerah. Pada triwulan I tahun 2021 secara y-y perekonomian Kalimantan Barat sudah kelihatan perbaikan yaitu sebesar -0,10 persen dan terus tumbuh 10,81 persen pada triwulan II hingga

triwulan III tumbuh melambat 4,60 persen. Jika dilihat secara triwulan ke triwulan di tahun 2021 (q-q), pada triwulan I tahun 2021 perekonomian Kalimantan Barat berkontraksi sebesar 0,11 persen dan triwulan II-2021 tumbuh 1,82 persen yang mengartikan kondisi perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan II sudah mulai menunjukkan kondisi yang lebih baik bahkan disbanding dengan triwulan yang sama ditahun 2020 sangat signifikan pertumbuhannya, meskipun triwulan III agak turun baik secara q to q dan y on y. Secara kumulatif tahunan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan 4,78 persen (c to c) yang tentunya telah sesuai dari target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat (4,51 – 5,25 persen) untuk tahun 2021.

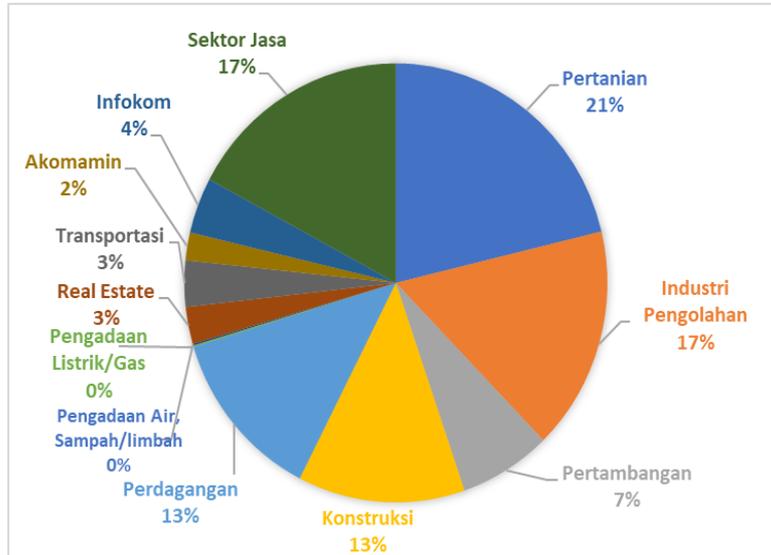


Sementara itu struktur perekonomian Kalimantan Barat pada tahun 2021 secara masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 21,24 persen, sektor industri pengolahan 16,49 persen dan sektor perdagangan besar dan eceran,

reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi sebesar 12,77 persen. Selain itu aktivitas pembangunan infrastruktur juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian di Kalimantan Barat meskipun ditengah kondisi pandemi Covid-19 dengan kontribusi sebesar 12,77 persen.

**Gambar 2.3**

Struktur Perekonomian Kalimantan Barat Menurut Lapangan Usaha kumulatif 3 kuartal Tahun 2021

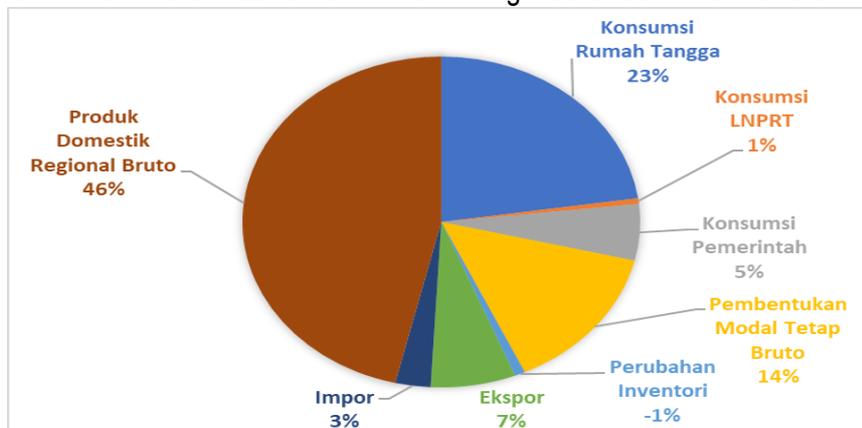


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022, diolah

Pada sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi sektor yang paling dominan dalam membentuk perekonomian di Kalimantan Barat selama tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 48,17 persen. Selain itu investasi yang digambarkan melalui pembentukan modal tetap bruto berkontribusi sebesar 30,44 persen terhadap perekonomian Kalimantan Barat. Upaya pemerintah menjaga perekonomian daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19 juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian dengan nilai kontribusi sebesar 11,66 persen. Sementara dari sektor perdagangan luar negeri kinerja Ekspor memberikan kontribusi bagi perekonomian Kalimantan Barat sebesar 14,64 persen sedangkan kinerja Impor memberikan kontribusi sebesar 6,09 persen.

**Gambar 2.4**

Struktur Perekonomian Kalimantan Menurut Pengeluaran kumulatif 3 kuartal Tahun 2021



Sumber : Berita Resmi Statistik Februari 2022 (diolah)

**Tabel 2.9**

Perkembangan Perekonomian Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2018-2020

No	Kabupaten/Kota	2019		2020		2021	
		PDRB Per Kapita ADHB (Ribu Rupiah)	Pertumbuhan (%)	PDRB Per Kapita ADHB (Ribu Rupiah)	Pertumbuhan (%)	PDRB Per Kapita ADHB (Ribu Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sambas	38.326	4,76	38.496	-2,02	34.948	4,37
2.	Bengkayang	33.873	5,14	33.710	-1,99	32.029	4,33
3.	Landak	27.961	4,89	28.308	-0,67	28.956	4,89
4.	Mempawah	31.406	5,78	32.168	0,19	29.720	4,10
5.	Sanggau	40.810	3,89	42.162	0,70	44.376	4,19
6.	Ketapang	53.677	6,72	54.400	-0,50	53.302	5,23
7.	Sintang	35.072	5,01	34.919	-2,19	37.173	3,80
8.	Kapuas Hulu	38.791	3,85	38.784	-2,43	43.635	4,43
9.	Sekadau	31.911	5,45	32.433	-0,98	33.506	4,31
10.	Melawi	24.680	4,53	24.948	-1,10	24.332	4,54
11.	Kayong Utara	36.683	5,01	37.070	-0,74	35.268	4,59
12.	Kubu Raya	50.249	5,72	49.587	-2,43	50.772	5,18
13.	Kota Pontianak	59.943	4,14	57.865	-3,97	60.569	4,60
14.	Kota Singkawang	45.915	4,47	45.132	-2,43	45.726	4,82
Kalimantan Barat		41.851	5,09	41.677	-1,82	42.283	4,78

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022, diolah

## e. Gini Rasio

Gini rasio atau indeks gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Apabila nilai Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna sedangkan apabila bernilai 1 berarti terjadi ketimpangan sempurna.

Selama periode 2018-2020, nilai Indeks Gini Kalimantan Barat menunjukkan perbaikan dilihat dari nilai indeks yang bergerak menjauh dari angka 1. Sementara itu indeks gini perkotaan menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan indeks gini perdesaan. Namun jika dilihat *trend* 2018-2020 nilai indeks gini perdesaan sempat menunjukkan peningkatan pada tahun 2018 namun pada tahun kondisi maret 2020 mengalami perbaikan.

**Tabel 2.10**

Indeks Gini Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2020

Semesteran	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maret	0,377	0,341	0,335	0,277	0,281	0,272	0,339	0,327	0,317
September	0,351	0,344	n/a	0,278	0,279	n/a	0,325	0,318	n/a

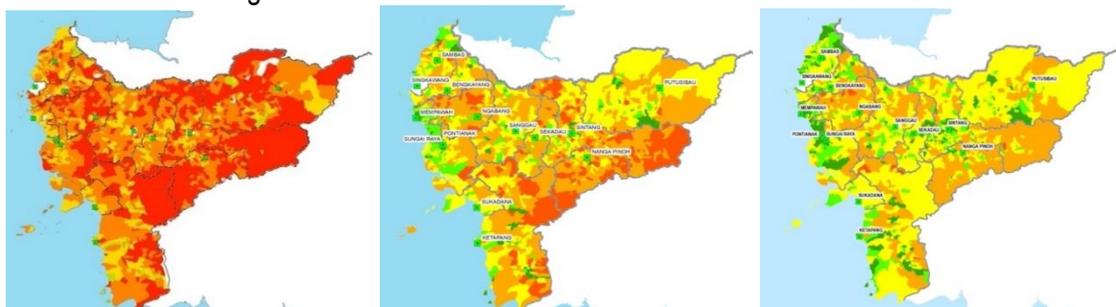
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2020, diolah

## f. Desa Mandiri

Pembangunan pedesaan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat. Guna meningkatkan status kemajuan pembangunan desa yang diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan kebijakan Percepatan Peningkatan Status Kemandirian Desa melalui Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019. IDM mengelompokkan desa-desa menjadi desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Pada tahun 2018 di Kalimantan Barat didominasi oleh desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan proporsi 79,30 persen dengan desa mandiri hanya terdapat 1 (satu) desa.

**Gambar 2.5**

Peta Perkembangan Status Kemandirian Desa di Kalimantan Barat 2018-2020



Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, diolah

Pada tahun 2019 proporsi dan jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal berkurang menjadi 48,70 persen dan desa mandiri meningkat dari sebelumnya 1 desa menjadi 87 desa. Kemudian pada tahun 2020 proporsi desa sangat tertinggal dan tertinggal jauh berkurang menjadi 28,46 persen dengan desa mandiri meningkat menjadi 214 desa atau sebesar 10,54 persen dari 2.031 desa di Kalimantan Barat.

**Tabel 2.11**

Perkembangan Status Kemandirian Desa di Provinsi Kalimantan Barat 2018-2020

Status Desa	2018		2019		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7
Mandiri	1	0,05	87	4,28	214	10,54
Maju	53	2,61	188	9,26	332	16,35
Berkembang	372	18,32	767	37,76	907	44,66
Tertinggal	928	45,69	781	38,45	566	27,87
Sangat Tertinggal	677	33,33	208	10,24	12	0,59
<b>Total</b>	<b>2.031</b>	<b>100,00</b>	<b>2.031</b>	<b>100,00</b>	<b>2.031</b>	<b>100,00</b>

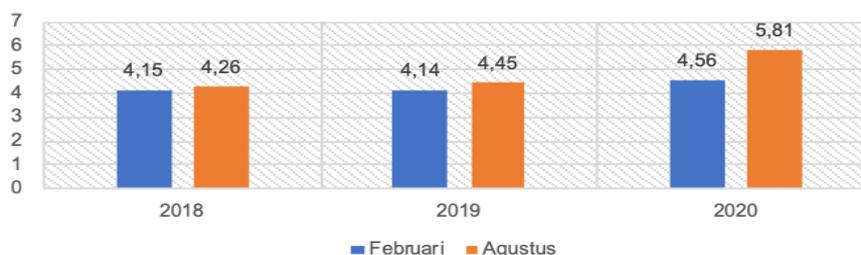
Sumber: Kementerian Desa, PDT RI, 2020, diolah

g. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja. TPT Kalimantan Barat pada bulan Februari 2019 mengalami penurunan sebesar 0,01 poin dibandingkan Februari 2018 menjadi 4,14 persen. Kondisi berbeda terjadi pada Agustus 2019 dimana nilai TPT mengalami peningkatan dari sebelumnya 4,26 persen menjadi 4,45 persen. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga saat ini telah menyebabkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan menjadi 4,56 persen pada Februari 2020 dan 5,81 persen pada Agustus 2020.

**Gambar 2.6**

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Barat 2018-2020



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2020, diolah

Sementara itu, selama periode 2019 dan 2020 Kota Pontianak merupakan daerah dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi sebesar 9,13 persen pada tahun 2019 dan 12,36 persen pada tahun 2020 Sedangkan Kabupaten Melawi merupakan kabupaten dengan tingkat pengangguran terendah pada tahun 2019 dan 2020.

**Tabel 2.12**

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten dan Kota se Kalimantan Barat 2019-2021

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1.	Sambas	3.58	3.71	3.97
2.	Bengkayang	2.71	3.91	4.42
3.	Landak	2.75	3.38	3.22
4.	Mempawah	5.19	7.55	7.71
5.	Sanggau	3.07	3.52	3.45
6.	Ketapang	4.53	7.3	6.94
7.	Sintang	3.2	4.5	3.95
8.	Kapuas Hulu	2.46	4.02	4.18
9.	Sekadau	3.14	3.39	2.92
10.	Melawi	2.45	2.7	2.66
11.	Kayong Utara	4	3.71	3.78
12.	Kubu Raya	5.62	7.14	7.02
13.	Kota Pontianak	9.13	12.36	12.38
14.	Kota Singkawang	6.44	8.78	9.16

#### h. Angka Kemiskinan

h.1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan dan pemberdayaan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (**PPKS**) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial.

**Tabel 2.13**

PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2021

No	Uraian	Jumlah PPKS Terdata		Jumlah Penanganan		Ket
		2020	2021	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Anak Balita Telantar	9				
2.	Anak Terlantar	1727		14 LKSA	250	paket
3.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	291			18	anak
4.	Anak Jalanan	346				
5.	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	792				
6.	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah					

No	Uraian	Jumlah PPKS Terdata		Jumlah Penanganan		Ket
		2020	2021	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
7.	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	53				
8.	Lanjut Usia Telantar / dalam panti		3727	420	250	paket
9.	Penyandang Disabilitas	4,626		564	802	paket
10.	Tuna Susila	214				
11.	Gelandangan	133				
12.	Pengemis	5				
13.	Pemulung	84				
14.	Kelompok Minoritas					
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	687				
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	1,838				
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	716			40	paket
18.	Korban Trafficking / Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	14			963	orang
19.	Korban Tindak Kekerasan	141				
20.	Penanganan/Pemulangan Orang Terlantar				263	orang
21.	Korban Bencana Alam			169,328	182.264	
22.	Korban Bencana Sosial	69				
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	40411				
24.	Fakir Miskin			201	1512	orang
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	277				
26.	Keluarga berumah tidak layak huni	2552				
27.	Komunitas Adat Terpencil	10646		2540		orang

Sumber : Dinas Sosial, 2022

**Tabel 2.14**  
Sarana Sosial di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun		Keterangan
			2020	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	Panti Asuhan Anak	Unit	139	136	Swasta
2.	Panti Asuhan Disabilitas	Unit	5	6	5 milik swasta, 1 milik pemerintah oprasional th 2022
3.	Panti Jompo	Unit	9	10	Swasta
4.	Rumah Rehabilitasi NAPZA	Unit	5	7	Swasta
5.	Rumah Singgah	Unit	0	0	Swasta
6.	Panti Sosial Anak	Unit	1	1	Pemerintah
7.	Panti Sosial Lanjut Usia	Unit	2	1	Pemerintah
	Jumlah seluruh sarana sosial	Unit	161	161	

Sumber : Dinas Sosial 2022

## h.2. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin merupakan persentase penduduk suatu wilayah yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

**Tabel 2.15**  
Perkembangan Kemiskinan Kalimantan Barat

Bulan/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
1	2	3
Maret 2020	361.075	7,17
Sept 2020	362.874	7,24

Bulan/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
1	2	3
Maret 2021	370.423	7,15
Sept 2021	387.342	6,84

Sumber: BRS-BPS-Kalbar 2022

**Tabel 2.16**

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin September 2020 - September 2021

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
1	2	3
<b>Perkotaan</b>		
September 2020	89.100	4.86
Maret 2021	86.900	4.68
September 2021	89.040	4,72
<b>Perdesaan</b>		
September 2020	281.610	8.57
Maret 2021	280.990	8.54
September 2021	264.960	8,05
<b>Perkotaan + Perdesaan</b>		
September 2020	370.710	7.24
Maret 2021	367.890	7.15
September 2021	354.000	6,84

Sumber: BRS-BPS-Kalbar 2022

### h.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

**Tabel 2.17**

Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) Di Kalimantan Barat Menurut Daerah, September 2020-September 2021

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
1	2	3	4
<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan (<math>P_1</math>)</b>			
September 2020	0,807	1,310	1,130
Maret 2021	0,586	1,277	<b>1,027</b>
September 2021	0,622	1,241	1,016
<b>Indeks Keparahan Kemiskinan (<math>P_2</math>)</b>			
September 2020	0.213	0.369	0.313
Maret 2021	0,116	0,300	0,233
September 2021	0,122	0,312	0,243

Sumber: BRS-BPS-Kalbar 2022

### i. Konflik Sosial

Dalam rangka mendukung program pembangunan di daerah guna mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang sejahtera dibutuhkan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Meskipun selama tahun 2020 Provinsi Kalimantan Barat menjadi daerah yang terdampak adanya Pandemi Covid-19 serta di saat bersamaan berlangsung Pemilihan Kepala

Daerah Tahun 2020 pada 7 (tujuh) Kabupaten di Kalimantan Barat, kondisi keamanan dan ketertiban umum cukup terjaga dengan baik yang dapat dilihat dari tidak adanya konflik sosial yang berdampak luas di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini didorong kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, TNI, POLRI dan masyarakat Kalimantan Barat secara luas. (tambah narasi skala konflik).

j. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan maka aspek kelestarian lingkungan hidup harus terus ditingkatkan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPI. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah: (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter: SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Kehutanan Ri nomor 5.23/PPKU/SET/RENO/2/2021 tanggal 2 Februari 2021 hal Capaian IKLH Kalimantan Barat Tahun 2020, terlihat bahwa capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 54,22 yang dihitung dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). Adanya perubahan data ini menyebabkan adanya perubahan data pada tabel 2.11 sehingga data IKTL hanya sampai pada tahun 2019 dan tahun 2020 menggunakan IKL.

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2021 terus ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.18**

Perkembangan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2021

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00	51,67	54,35
2.	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	-	73,25	77,83
3.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,04	88,88	90,71
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	-	54,22	59,35
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	59,76	59,49	n/a
5.	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	-	74,26	n/a
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,92	70,07	72,9

Sumber: LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas LHK Prov. Kalbar 2021

## 2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

### 2.2.1 Aspek Pelayanan Umum

### 2.2.1.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

#### a. Pendidikan

Capaian kinerja pembangunan di bidang pendidikan selama tahun 2021 dapat dilihat dari capaian rata-rata lama sekolah yang mengalami peningkatan dari 7,37 tahun menjadi 7,45 tahun. Namun nilai rata-rata lama sekolah ini masih tergolong rendah dengan interpretasi bahwa rata-rata pendidikan penduduk Kalimantan Barat usia 25 tahun ke atas adalah kelas VII tingkatan sekolah menengah pertama. Sementara Harapan Lama Sekolah terus menunjukkan peningkatan dari 12,60 tahun menjadi 12,65 tahun pada tahun 2021. Perkembangan indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.19**  
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pendidikan Tahun 2019-2021

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)*	7,31	7,37	7,45
2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)*	12,58	12,60	12,65
3.	Angka Melek Aksara**	98,30	99,86	99,87
4.	Skor Mutu Pendidikan Sekolah Menengah**	5,35	n/a	5,26
5.	Skor Mutu Pendidikan SMA	5,47	n/a	n/a
6.	Skor Mutu Pendidikan SMK	5,24	n/a	n/a

Sumber: \*BPS Provinsi Kalimantan Barat, \*\* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat

#### b. Kesehatan

Pada tahun 2020 capaian kinerja pembangunan urusan kesehatan yang digambarkan melalui angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup mengalami peningkatan dari 130 kematian per 100.000 kelahiran hidup menjadi 131 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi dan balita per 1000 kelahiran hidup juga mengalami peningkatan dari sebelumnya 7 kematian bayi dan 7 kematian balita per 1000 kelahiran hidup menjadi 8 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dan 9 kematian balita per 1000 kelahiran hidup. Sementara itu indikator angka harapan hidup terus mengalami peningkatan dari 70,56 tahun menjadi 70,69 tahun pada tahun 2020. Capaian positif lainnya ditunjukkan oleh prevalensi stunting pada Balita yang terus mengalami penurunan dari 27,3 pada tahun 2019 menjadi 21,46 pada tahun 2020.

**Tabel 2.20**  
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kesehatan Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1.076/5.422.814	1.169/5.440.030	1.169/5.472.310	
2.	Prevalensi Stunting	28,40	27,30	22,15	
3.	Prevalensi Wasting	9,6	10,03	8,69	
4.	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Pada Usia 12-23 Tahun	70	71	72	
5.	Jumlah Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria	3	3	3	
6.	Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	98	130	131	
7.	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	7	7	8	

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
8.	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	8	7	9	
9.	Angka Harapan Hidup	70,18	70,56	70,69	
10.	Jumlah Griya Sehat di Kab/Kota	17	17	56	
11.	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan perizinan	1%	1%	1%	

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalbar, 2021

#### c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun 2020 terus mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Capaian persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap meningkat dari 56,81 persen tahun 2019, menjadi 60,50 persen pada tahun 2020. Kondisi irigasi provinsi dalam kondisi baik juga mengalami peningkatan dari 51,31 persen tahun 2019, menjadi 53,68 persen pada tahun 2020. Sementara indikator persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang mengalami penurunan dari 70 persen menjadi 68,60 persen pada tahun 2020. Perkembangan indikator lainnya dapat dilihat pada tabel 2.14 sebagai berikut:

**Tabel 2.21**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Mantap	49,71	56,81	60,5	
2.	Persentase irigasi Provinsi dalam kondisi baik	46,76	51,31	53,68	
3.	Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir	46,76	50,64	51,18	
4.	Persentase Berkurangnya pantai kritis.	59,53	59,53	-	
5.	Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat	67,92	0	71,53	
6.	Persentase data yang tersedia di SIPJAKI	21,43	42,86	35,71	
7.	Persentase pelayanan mutu jasa konstruksi	66	66	78	
8.	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang		70	68,60	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar, 2021

#### d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Indikator capaian tahun 2020 urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman merupakan indikator RJMD perubahan sehingga data kondisi capaian masih belum tergambar.

**Tabel 2.22**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase pengajuan proposal rumah korban bencana/relokasi program provinsi/Rumah Khusus/Rumah Susun/Rumah Swadaya dan PSUnya yang tertangani	n/a	n/a	n/a	

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2.	Jumlah pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	14,39	18,56	n/a	
3.	Jumlah Ketersediaan PSU di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Sesuai RTRW Provinsi Kalimantan Barat	55,2	60,75	n/a	
4.	Persentase rumah tangga berakses air minum	54,69	66,62	66.3	
5.	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	47,36	61,23	64.35	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Prov. Kalbar, 2021

#### e. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kinerja pembangunan urusan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan positif. Indeks Risiko Bencana Kalimantan Barat cenderung tetap sejak tahun 2018 hingga Tahun 2020 masih pada angka 138,49 dengan kategori risiko sedang. Sementara Persentase masyarakat mendapat pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (%) juga terus mengalami peningkatan dari ..... persen menjadi ..... persen pada tahun 2021. Untuk Indeks Pemahaman terhadap kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel 2.16 sebagai berikut :

**Tabel 2.23**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Risiko Bencana	138,49	138,49	138,49	n.a
2.	Persentase masyarakat mendapat pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (%)				
3.	Indeks Pemahaman terhadap kesatuan Bangsa dan Politik				

Sumber: 1,2,3,4 BPBD Prov. Kalbar, 6 Satpol PP Prov. Kalbar, 7 Badan Kesbangpol Prov. Kalbar

#### f. Sosial

Kinerja pembangunan urusan sosial pada tahun 2020 menunjukkan kecenderungan terjadi peningkatan terutama pada indikator cakupan pelayanan dan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan fakir miskin. Koordinasi dalam sinergitas Program Kesejahteraan Sosial kabupaten/kota juga meningkat. Namun di sisi lain terdapat indikator kinerja pembangunan sosial tahun 2020 yang tidak tercapai target diantaranya Persentase PSKS yang diberdayakan lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun 2018 dan 2019. Capaian tahun 2018 dan 2019 masing-masing 12,77% dan 13,2%, namun tahun 2020 menurun hanya sebesar 5%. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi dalam pengelolaan potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial yang ada. Sedangkan capaian indikator kinerja urusan sosial yang lain rata-rata sesuai dengan yang ditetapkan. Perkembangan indikator lainnya dapat dilihat pada tabel 2.17 sebagai berikut:

**Tabel 2.24**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Sosial Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1.	Persentase PSKS yang diberdayakan	12,77	13,2	5

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
2.	Persentase Cakupan Layanan Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	49,6	49,85	49,93
3.	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi sosial	0,98	1,4	9,02
4.	Persentase peningkatan PPKS (tertentu) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	3,05	3,13	3,12
5.	Cakupan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin	0,0033	0,018	0,38
6.	Persentase Peningkatan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilaksanakan	0,23	0,24	0,23
7.	Persentase Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Provinsi.	12,5	12	11,5
8.	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapatkan penanganan	100	100	100
9.	Persentase Kabupaten /Kota yang Terkoordinir dalam Sinergitas Program Kesejahteraan Sosial	66,67	66,67	73,8
10.	Persentase Cakupan Layanan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100	100	100
11.	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial (UPT PSRLU Mulia Dharma)	100	100	100
12.	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (UPT PSRLU Mustika Dharma)	100	100	100
13.	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial (UPT PSRLU Mustika Dharma)	100	100	100
14.	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	68%	69%	71,28%
15.	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial (UPT Panti Sosial Anak)	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Prov. Kalbar, 2021

### 2.2.1.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

#### a. Tenaga Kerja

Kinerja pembangunan urusan tenaga kerja pada tahun 2020 ditandai dengan beberapa indikator. Capaian kinerja urusan tenaga kerja tahun 2020 menunjukkan kondisi fluktuatif. Hal ini perlu dipahami sebagai dampak terjadinya pandemi covid-19 terutama pada dunia usaha dan tenaga kerja. Indikator tenaga kerja yang bersertifikat dan berkualitas tidak tercapai dan turun drastis dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan tidak terlaksananya program/kegiatan pendukung baik karena pemangkasan anggaran maupun adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sedangkan indikator kinerja lainnya terkait tenaga kerja menunjukkan hasil yang positif. Indikator tersebut terkait perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan pada tahun 2020 meningkat menjadi 99,13 %. Demikian pula indikator terkait Pelanggaran Perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan turun menjadi 42,8%. Perkembangan indikator kinerja pembangunan urusan tenaga kerja Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada table 2.25.

**Tabel 2.25**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1.	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	55,75	60,73	2,62
2.	Persentase Kualitas dan ketersediaan tenaga kerja	N/A	57,14	52,27
3.	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	83,66	93,09	99,13
4.	Persentase Pelanggaran Perusahaan terhadap aturan ketenaga kerjaan	41,22	63,4	42,8

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar, 2021

## b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus cara menghitung IPG telah berubah, yaitu tidak lagi menggunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG. Selain itu, rumusan IPG juga berubah yaitu membandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki dikali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kalimantan Barat tahun 2020 sebesar 86,87 lebih besar dibandingkan tahun 2019. Kondisi ini dapat diartikan bahwa tahun 2020 kesetaraan dan keadilan gender lebih baik dibandingkan tahun 2019 (naik sebesar 0,06 poin).

Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan ukuran untuk melihat keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Adapun capaian 2020 sama dengan capaian 2019 yaitu sebesar 68,07. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan tahun 2019-2020 cenderung meningkat sebesar 3,6 % dari IDG tahun 2018 (nilai sebesar 64,47). Perkembangan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kalimantan Barat tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 2.26.

**Tabel 2.26**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,74	86,81	86,87
2.	indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,47	68,07	68,07

Sumber: BPS Prov. Kalbar, 2021

## c. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari, sedang ketahanan pangan adalah jaminan bagi manusia untuk hidup sehat dan bekerja secara produktif. Ketahanan pangan telah menjadi isu sentral dalam kerangka pembangunan pertanian dan pembangunan nasional, ditunjukkan antara lain dengan

dijadikannya isu ketahanan pangan sebagai salah satu fokus kebijaksanaan operasional pembangunan pertanian.

Peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia sehingga pangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada tahun 2021, target Sasaran Pembangunan Indeks Ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 57,69 dengan capaian sebesar 71,32 atau telah tercapai. Namun demikian, yang perlu menjadi perhatian adalah kemandirian pangan masih belum mampu diwujudkan secara total yang terlihat dengan masih besarnya ketergantungan pangan dari daerah lain. Untuk itu diperlukan upaya berbagai sektor dalam mewujudkan kemandirian pangan di Kalimantan Barat.

Ketahanan pangan diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu. Dengan demikian ketahanan pangan mencakup tingkat rumah tangga dan tingkat nasional. Ketahanan pangan menyangkut ketersediaan, aksesibilitas (keterjangkauan), dan stabilitas pengadaannya. Di samping aspek produksi, ketahanan pangan mensyaratkan pendapatan yang cukup bagi masyarakat untuk mengakses bahan pangan, keamanan pangan, serta aspek distribusi.

Adanya kelebihan ketersediaan pangan di tingkat wilayah (nasional, regional) tidak menjamin adanya ketahanan pangan di tingkat individu atau rumah tangga. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya kasus-kasus kurang gizi dan rawan pangan sejak terjadinya krisis ekonomi. Oleh karena itu, faktor akses individu dalam menjangkau kebutuhan pangan yang diperlukan merupakan faktor kunci ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Akses individu terhadap pangan yang dibutuhkan sangat dipengaruhi oleh daya beli, tingkat pendapatan, harga pangan, proses distribusi pangan, kelembagaan di tingkat lokal dan faktor sosial lainnya.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Penilaian menggunakan IKP mempunyai nilai strategis untuk mengevaluasi ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota) dan memberikan gambaran peringkat (rangking) pencapaian ketahanan pangan wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. IKP juga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan terutama pada prioritas daerah dan intervensi program.

Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan serangkaian indikator. Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan.

Dimensi ketahanan pangan sangat luas mencakup dimensi waktu, dimensi sasaran dan dimensi sosial-ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan banyak indikator untuk mengukurnya. Pengukuran ketahanan pangan dilakukan di berbagai tingkatan dari tingkat global, nasional, regional sampai tingkat rumah tangga dan individu. Pada tingkat global, nasional dan regional indikator ketahanan pangan yang dapat digunakan adalah tingkat ketersediaan pangan dengan memperhatikan variabel tingkat kerusakan tanaman/ternak/perikanan, rasio stok dengan

konsumsi pangan; skor PPH; keadaan keamanan pangan; kelembagaan pangan dan pemerintah; dan harga pangan.

Pola konsumsi pangan penduduk Kalimantan Barat masih terdapat ketimpangan hal ini dikarenakan masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras dan masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah. Pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal seperti umbi, jagung, dan sagu masih rendah dan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan. (PPH) masih belum mencapai kondisi ideal. Untuk itu diperlukan upaya untuk menganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat menuju skor PPH yang ideal agar hidup sehat, aktif, dan produktif. Hal – hal yang dapat dilakukan antara lain yaitu mendorong substitusi pangan non beras, peningkatan konsumsi pangan hewani, sayur, buah, kacang – kacangan, serta buah atau biji yang mengandung minyak.

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan.

Skor pola pangan Harapan Kalimantan Barat pada tahun 2021 ditarget sebesar 79,40 dengan capaian sebesar 81,10 atau telah mencapai target. Nilai PPH pada tahun 2021 naik sebesar 1,7 poin bila dibandingkan dengan Nilai PPH pada tahun 2020.

Pola konsumsi pangan penduduk Kalimantan Barat belum mencapai skor ideal (PPH=100) yang disebabkan ketimpangan konsumsi antar kelompok pangan. Skor Angka Kecukupan energi (AKE) padi-padian mencapai 27,6 masih melebihi skor maksimum (25,00), sedangkan beberapa kelompok pangan lainnya belum mencapai skor maksimum, seperti Umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, dan kelompok sayur dan buah dengan selisih skor 0,8 – 11,5. Pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal seperti umbi, jagung, dan sagu, serta meningkatkan konsumsi sayur dan buah lokal adalah strategi yang paling tepat mengungkit skor Pola Pangan Harapan dan juga berdampak kepada peningkatan kesejahteraan petani/peternak lokal. Untuk itu diperlukan upaya mempromosikan dan mengedukasi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal menuju skor PPH yang ideal agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.

**Tabel 2.27**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pangan Tahun 2018-2021

No	Indikator Kinerja	Target 2021	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Ketahanan Pangan	57,69	n.a	55,17	71,13	71,32*
2.	Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	79,40	82,86	76,25	76,40	81,10**

Sumber : Dinas ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat 2021,

\* Data Sementara Olahan Indeks Badan Ketahanan Pangan

\*\* Proyeksi Baseline Susenas 2020

#### d. Pertanian

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2018-2023 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun, kinerja yang dapat terpantau saat ini adalah pelaksanaan Redistribusi Tanah melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai berikut:

**Tabel 2.28**

Target dan Realisasi Kegiatan Legalisasi Aset melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

No	Kabupaten/ Kota	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)					
		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kota Pontianak	500	500	453	453	0	0
2.	Kota Singkawang	1.500	1.500	1.187	1.187	1.399	1.399
3.	Mempawah	3.750	3.750	2.500	2.500	920	920
4.	Sambas	9.000	9.000	2.900	2.900	12.288	12.288
5.	Sanggau	2.216	2.216	4.500	4.500	10.734	10.734
6.	Sintang	6.250	6.250	3.667	3.667	13.798	13.798
7.	Kapuas Hulu	6.100	6.100	400	400	10.983	10.983
8.	Ketapang	9.500	9.500	4.492	4.492	10.331	10.331
9.	Landak	8.500	8.500	4.000	4.000	10.662	10.662
10.	Bengkayang	2.700	2.700	2.900	2.900	5.539	5.539
11.	Sekadau	2.775	2.775	2.930	2.930	7.344	7.344
12.	Melawi	2.709	2.709	1.500	1.500	6.105	6.213
13.	Kayong Utara	4.700	4.700	2.730	2.730	5.735	5.735
14.	Kubu Raya	10.964	10.964	1.666	1.666	9.233	9.233
<b>Total</b>		<b>71.164</b>	<b>71.164</b>	<b>35.825</b>	<b>35.825</b>	<b>105.071</b>	<b>105.179</b>

Sumber : Kanwil. ATR/ BPN Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

e. Lingkungan Hidup

Capaian pembangunan urusan lingkungan hidup pada tahun 2020 dapat dilihat dari beberapa indikator sebagaimana termuat dalam tabel 2.21. Untuk Indeks Kualitas Air mengalami peningkatan dari 50,00 pada tahun 2019 menjadi 51,67 pada tahun 2020. Sementara Indeks Kualitas Udara mengalami penurunan dari 90,07 pada tahun 2019 menjadi 88,88 pada tahun 2020 yang disebabkan masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2020.

**Tabel 2.29**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1.	Indeks Kualitas Air	69,38	50,00	51,67
2.	Indek Kualitas Air Laut (IKAL)	n/a	n/a	73,25
3.	Indeks Kualitas Udara	88,68	90,07	88,88
4.	Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	64,19	59,76	DBR
5.	Indek Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	n/a	n/a	n/a
6.	Indek Kualitas lahan (IKL)	n/a	n/a	54,22

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja pembangunan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 terus mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Semua indikator kinerja

menunjukkan trend naik dibandingkan tahun 2018 dan tahun 2019 serta tahun 2020. Capaian Persentase indikator kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahkan ada yang melebihi target seperti Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 145,09 persen, Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Yang dilaporkan sebesar 128,8 persen, dan Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan sebesar 175,4 persen. Ada penambahan dua indikator kinerja, yaitu Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk dengan capaian melebihi target sebesar 123,71 persen dan Persentase Capaian Penyusunan Profil Kependudukan dengan target capaian 100 persen. Tetapi ada yang indikator kinerja pada tahun 2021 tidak dilaksanakan, ialah Persentase kepemilikan dokumen kependudukan, akurasi data kependudukan, kerjasama dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Kalbar. Perkembangan indikator lainnya dapat dilihat pada tabel 2.30 sebagai berikut:

**Tabel 2.30**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018-2021

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan, akurasi data kependudukan, kerjasama dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Kalbar	38,99%	48,66%	61,32%	n/a
2.	Persentase kepemilikan KTP-el	69,8%	84%	100%	97,6%
3.	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	2%	18%	50%	145,09%
4.	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk	Indikator dan target mulai tahun 2021			123,71
5.	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun	82%	85,62%	89,21%	99,6%
6.	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Yang dilaporkan	20%	25%	30%	128,8%
7.	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Yang dilaporkan				84,81%
8.	Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan				175,4%
9.	Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	80%	83%	90%	95,8%
10.	Persentase Capaian Penyusunan Profil Kependudukan	Indikator dan target mulai tahun 2021			100%
11.	Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalbar	9,09%	30%	50%	78,57%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar 2022

#### g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 terus mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 dan 2019. Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dari Status perkembangan Desa/Kelurahan, dimana tahun 2020 telah tercapai sebesar 80,47%, sedangkan awal perencanaan (2018) hanya sebesar 33,42%. Selain itu indikator keberhasilan pembangunan desa adalah Indeks Desa Membangun. Capaian tahun 2020 sebesar 65,75% meningkat dibandingkan tahun 2019 hanya sebesar 60,20%. Perkembangan kinerja pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel 2.31 sebagai berikut:

**Tabel 2.31**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1.	Persentase Status Perkembangan Desa/Kelurahan	33,42%	54,86%	80,47%
2.	Persentase Indeks Desa Membangun	54,86%	60,20%	65,75%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar 2021

#### h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja pembangunan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dari Persentase fasilitasi penyelenggaraan program KB, KS dan Pengendalian Penduduk. Pada tabel 2.25 dapat dilihat perkembangan capaian pada tahun 2018, 2019, dan 2020, dapat dilihat bahwa fasilitasi penyelenggaraan program KB, KS dan Pengendalian Penduduk terus meningkat. Capaian pada tahun 2020 sebesar 30%.

**Tabel 2.32**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1.	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program KB, KS dan Pengendalian Penduduk	3,33%	15%	30%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar 2021

#### i. Perhubungan

Dalam RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 seluruh indikator kinerja pembangunan urusan perhubungan mengalami perubahan. Indikator terlampir digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.33**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perhubungan Tahun 2019-2021

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1.	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat (IKU1)	n/a	n/a	52%
2.	Persentase Jumlah Terminal Terhadap Penumpang Angkutan Umum (IKU3)	n/a	n/a	90%
3.	Persentase Jumlah Pelabuhan Terhadap Penumpang Angkutan SDP (IKU4)	n/a	n/a	98%

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Kalbar 2021

#### j. Komunikasi dan Informatika

Kondisi capaian pembangunan urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Capaian Persentase OPD dengan Zona hijau dalam keterbukaan Informasi Publik mengalami peningkatan dari 57,45 persen pada tahun 2020 meningkat menjadi 94,92 persen pada tahun 2021. Sedangkan persentase total bobot domain evaluasi SPBE juga mengalami peningkatan dari 3,23 persen pada tahun 2020 menjadi 3,26 persen pada tahun 2021.

**Tabel 2.34**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase OPD dengan Zona Hijau / nilai 85 - 100	23,26	48,89	57,45	94,92
2.	Persentase total bobot domain evaluasi SPBE	2,65	2,41	3,23	3,26

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 2021

#### k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pengukuran capaian pembangunan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada tahun 2021 mengalami perubahan sejalan dengan pemutakhiran Pemerdagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Sehingga capaian kinerja Urusan Koperasi dan UKM, belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perubahan indikator dan besaran target.

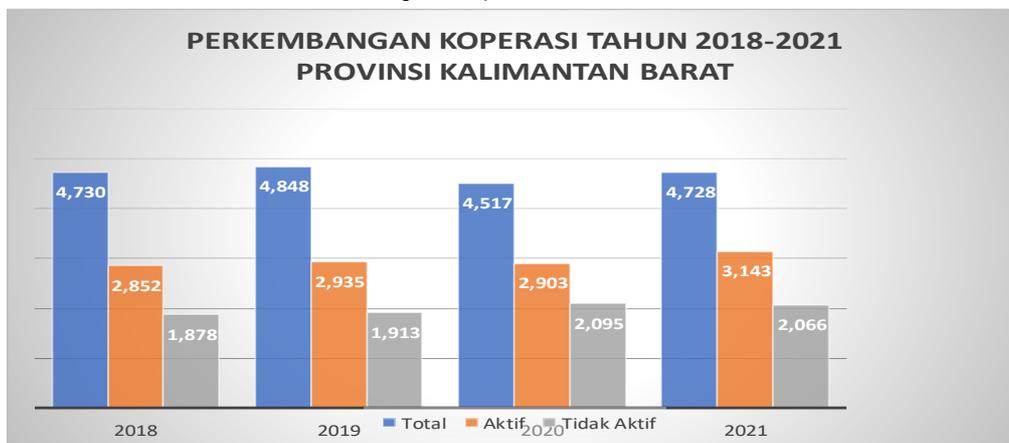
Melihat dari trend capaian kinerja koperasi tahun 2017 - 2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan indikator kinerja prosentase koperasi berkualitas pada tahun 2017 adalah 17,46 %, realisasi tahun 2018 adalah 21,72 %, meningkat 4,26 %, realisasi tahun 2019 adalah 23,85 %, meningkat 2,13 %.

Koperasi Aktif tahun 2021 sebanyak 3.143 unit koperasi atau sebesar 65,5 persen dari total koperasi sebanyak 4.728 unit dan telah dilakukan pembubaran koperasi sebanyak 481 unit koperasi. Volume usaha Koperasi Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan sektor usaha koperasi tahun 2021 sebesar Rp.9.560.114.356.873 terdiri dari 14 jenis usaha koperasi.

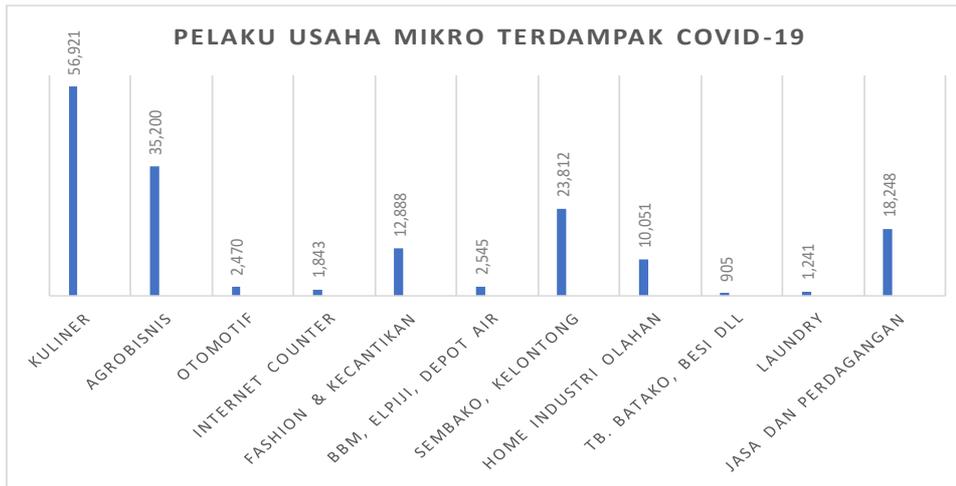
Perkembangan koperasi aktif dari tahun 2018 hingga tahun 2021 berfluktuasi, pada tahun 2020 mengalami perlambatan akibat dampak dari pandemi Covid-19, pada akhir 31 Desember 2021 menunjukkan peningkatan kembali dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi koperasi aktif dan koperasi tidak aktif juga menunjukkan kondisi cenderung meningkat sebagaimana gambar dibawah ini.

**Gambar 2.7**

Perkembangan Koperasi Tahun 2018-2021



Sumber data : Online Data System Koperasi KUKM Tahun 2021



#### I. Penanaman Modal

Peran swasta dibidang investasi sangatlah diperlukan oleh Pemerintah untuk mendukung pembangunan. Pemerintah berusaha mendorong pihak swasta untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal. Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal baik untuk swasta domestik (PMDN) maupun asing (PMA), tujuannya adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan untuk mendorong pengembangan ekonomi potensial, meningkatkan lapangan kerja dan penguatan daya saing perekonomian.

**Tabel 2.35**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Penanaman Modal Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	Target 2021	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Nilai Investasi	20,09 T	13,18 T	15,68 T	20,19 T	17,54 T
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	A	A	A	B

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Kalbar 2021

#### m. Kepemudaan dan Olahraga

Pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Pemuda mengalami peningkatan sebesar 0,04 poin dibandingkan capaian pada tahun 2019. Sementara Angka Harapan Hidup saat lahir juga mengalami peningkatan dari 70,56 tahun pada tahun 2019 menjadi 70,69 tahun pada tahun 2020.

**Tabel 2.36**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1.	Indeks pembangunan pemuda	47,5	48,2	48,6
2.	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,18	70,56	70,69

Sumber: 1 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar, 2 BPS Prov. Kalbar

#### n. Statistik

Capaian pembangunan urusan statistik digambarkan melalui indikator persentase data statistik sektoral perangkat daerah yang terintegrasi dengan portal satu data. Pada tahun 2021 nilai capaian sebesar 100 persen meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 95,74 persen.

**Tabel 2.37**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Statistik Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1.	Persentase data statistik sektoral OPD yang terintegrasi	87,78	95,74	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 2021

## o. Persandian

Capaian pembangunan urusan persandian tahun 2020 digambarkan melalui indikator persentase perangkat daerah kategori baik sebesar 0 persen, cukup 4 persen, perlu perbaikan 22 persen dan tidak layak sebesar 73 persen.

**Tabel 2.38**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Persandian Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1.	Persentase OPD dengan kategori baik, cukup, perlu baik dan tidak layak.	Baik 0% Cukup 2% Perlu Perbaikan 51% Tidak Layak 47%	Baik 0% Cukup 4% Perlu Perbaikan 22% Tidak Layak 73%	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar 2021

## p. Kebudayaan

Capaian pembangunan urusan kebudayaan digambarkan melalui indikator sebagaimana tabel 2.33 berikut. Untuk data Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2021 adalah sebesar 49,72 sedangkan jumlah peningkatan warisan budaya benda dan tak benda yang diapresiasi data belum tersedia.

**Tabel 2.39**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kebudayaan Tahun 2019-2021

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1.	Jumlah peningkatan warisan budaya benda dan tak benda yang diapresiasi	9	7	n/a
2.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	47,86	n/a	49,72

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar 2022

## q. Perpustakaan

Pada tahun 2020 capaian pembangunan urusan perpustakaan digambarkan melalui indikator cakupan kunjungan perpustakaan mengalami penurunan sebagai akibat adanya pembatasan aktivitas masyarakat guna mencegah penyebaran Covid 19. Sedangkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2020 dan nilai budaya literasi mengalami peningkatan. Koleksi daerah yang dilestarikan juga mengalami peningkatan dari 498 judul menjadi 1.063 judul. Sementara itu, Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan masih dalam kategori Baik.

**Tabel 2.40**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1	Cakupan Kunjungan Perpustakaan	87.906 orang	84.534 orang	46.650 orang

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1	Cakupan Kunjungan Perpustakaan	87.906 orang	84.534 orang	46.650 orang
2	Koleksi Daerah yang dilestarikan	637 judul	498 judul	1.063 judul
3	Nilai Budaya Literasi	n/a	52,42%	53,39%
4	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)
5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	n/a	12,26%	14,04%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar 2021

#### r. Kearsipan

Pada tahun 2020 persentase perangkat daerah yang pengelolaan kearsipan dengan kategori cukup tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2019 yakni sebesar 6,52 persen. Sementara penerapan e-arsip terintegrasi juga masih 0 persen.

**Tabel 2.41**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1.	Persentase Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Arsip dengan Kategori Cukup	2,17%	6,52%	6,52%
2.	Persentase Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Kearsipan dengan Kategori Cukup	14,28%	78,57%	7,14%
3.	Nilai pengawasan kearsipan kategori B ke atas	0	4 LKD	4 LKD
4.	Jumlah Penggunaan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	600 orang	600 orang	601 orang
5.	Jumlah Pemanfaatan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	28.176 arsip	28.376 arsip	28.576 arsip
6.	Penerapan e-arsip terintegrasi	0	0	0
7.	Persentase Penerapan e-Arsip Terintegrasi	0	0	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar 2021

### 2.2.1.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

#### a. Kelautan dan Perikanan

Sektor Perikanan merupakan yang salah satu sumber daya alam yang memberikan manfaat terhadap kehidupan manusia dalam menyediakan sumber protein, mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pemanfaatan sumberdaya perikanan, baik melalui kegiatan penangkapan maupun budidaya, harus tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan. Mengingat perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian daerah, serta untuk mewujudkan manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya perikanan maka dilakukan pengelolaan perikanan.

Pada tahun 2021 total produksi perikanan sebesar 228.186,57 ton atau mengalami penurunan total produksi sekitar 4.631,14 ton dari tahun sebelumnya. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan produksi perikanan ini adalah belum optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya

Laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan pada tahun 2021 sebesar 3,59 % naik dari tahun lalu, dimana tahun 2020 laju pertumbuhan PDRB subsektor perikanan hanya sebesar 1,89 %. Capaian laju pertumbuhan PDRB perikanan pada tahun 2021 tidak bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi sektor perikanan sebagaimana yang ditargetkan sebesar antara 3,73 % - 4,29 %.

Adapun untuk NTP Perikanan pada tahun 2021 meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai angka 102,23 atau meningkat sekitar 2,87 poin. NTP Perikanan ini di atas target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 102,00. Perolehan nilai NTP pada tahun 2021 salah satunya disebabkan adanya perubahan tahun dasar perhitungan NTP yaitu menjadi tahun 2018. Di lain pihak, membaiknya NTP Perikanan menandakan indeks yang diterima nelayan lebih besar dari indeks yang harus dibayarkan nelayan untuk konsumsi rumah tangga maupun konsumsi terhadap barang /jasa produksi perikanan.

**Tabel 2.42**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2021

INDIKATOR	TARGET (RENSTRA/ RPJMD)	REALISASI CAPAIAN			
	2021	2018	2019	2020	2021
Produksi Perikanan (Ton)	259.698	248.699	246.178	234.216	228.187*
NTP Perikanan (%)	102,00	104,9	109,12	102,23	105,10

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov dan BPS Kalbar 2022 (diolah),

\* Data Sementara

#### b. Pariwisata

Pada tahun 2021 laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata berkontraksi sebesar -0,29% dari Tahun 2020 sebesar -18.65%. Sedangkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB sebesar 3,84%. Nilai tersebut menurun 0,9 poin dibandingkan tahun lalu. Penurunan kontribusi pariwisata ke PDRB dikarenakan berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Dari 17 (tujuh belas) kategori menurut lapangan usaha dalam struktur PDRB, nilai Sektor Pariwisata dihitung berdasarkan Sub Kategori Transportasi dan Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

**Tabel 2.43**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pariwisata Tahun 2018-2021

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	7,63	4,17	-18,65	-0,29
2.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	5,77	5,72	4,74	4,51

Sumber : BPS Prov. Kalbar, 2022

#### c. Pertanian

Sasaran pembangunan urusan pertanian pada RPJMD Perubahan 2018 – 2023 terbagi menjadi dua yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan. Sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan mempunyai indikator laju pertumbuhan PDRB per subsektor pada urusan pangan sedangkan pada sasaran meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan indikatornya yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) per subsektor.

Sasaran pembangunan ini nantinya pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah menjadi Tujuan Perangkat Daerah (Tujuan Renstra). Dari tujuan ini, perangkat daerah kemudian menyusun Sasaran Strategis Perangkat Daerah. Sasaran Strategis ini menyesuaikan dengan tugas dan fungsi, program yang mendukung pencapaian tujuan perangkat daerah.

#### 1) Sub Sektor Tanaman Pangan

Pada subsektor Tanaman Pangan terdapat dua indikator sasaran RPJMD Perubahan 2018 – 2023 yaitu pertumbuhan PDRB dan NTP subsektor tanaman pangan.

Sasaran RPJMD pada sub sektor tanaman pangan pada tahun 2021 mempunyai target laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan antara 4,13% - 4,81% dan capaian pertumbuhan sesuai dengan rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat pada publikasi Kalimantan Barat Dalam Angka 2022 sebesar – 5,55 atau masih di bawah target yang ditetapkan.

Target Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan pada tahun 2021 sebesar 95,11 dengan realisasi sebesar 94,17 atau masih belum mencapai target. Nilai NTP Tanaman Pangan menurun sebesar 2,75 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima petani (It) pada tahun 2021 sebesar 100,97 yang menurun 1,22 poin dari tahun sebelumnya sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) pada tahun yang sama sebesar 107,12 atau meningkat 1,68 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya penurunan pendapatan dan peningkatan pengeluaran oleh petani tanaman pangan pada tahun 2021.

Produksi tanaman pangan yang menjadi Sasaran RPJMD 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2020, pada tahun 2021 menjadi sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan nomenklatur sasaran baru yaitu Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan indikator Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura dengan target sebesar 1.619.100 ton. Realisasi sementara pada tahun 2021 ini sebesar 1.463.516 ton karena masih belum finalnya data produksi sub sektor hortikultura.

**Tabel 2.44**  
Target dan Capaian Sektor Tanaman Pangan Tahun 2019-2021

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI CAPAIAN		
		2021	2019	2020*	2021**
RPJMD PERUBAHAN 2018 - 2023					
<b>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan</b>	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Tanaman Pangan (%)	1,43 - 3,46	4,58	(5,91)	(5,55)
<b>Meningkatnya Kesejahteraan Petani &amp; Nelayan</b>	NTP Tanaman Pangan	95,11	100,11	96,92	94,17
RENSTRA PD PERUBAHAN 2018 - 2023					
<b>Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	1.619.100	996.517	1.087.207	1.463.516
<b>Meningkatnya pendapatan petani padi dan palawija</b>	Indeks Harga yang diterima Petani Padi dan Palawija	102,37	102,33	102,19	100,97

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi & BPS Kalimantan Barat 2022 (diolah), \* Data Sementara, \*\*Data Sementara

#### 2) Sub Sektor Tanaman Hortikultura

Pada subsektor Tanaman Pangan terdapat dua indikator sasaran RPJMD Perubahan 2018 – 2023 yaitu pertumbuhan PDRB dan NTP subsektor tanaman hortikultura.

Sasaran RPJMD pada sub sektor tanaman hortikultura pada tahun 2021 mempunyai target laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Hortikultura antara 6,42 - 8,68 % dan capaian pertumbuhan sesuai dengan rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat pada publikasi Kalimantan Barat Dalam Angka 2022 sebesar 1,92 % atau masih belum mencapai target.

Target Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Hortikultura pada tahun 2021 sebesar 101,4 dengan realisasi sebesar 104,87 atau telah melebihi target. Nilai NTP Tanaman Hortikultura menurun sebesar 5,82 poin bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima petani tanaman hortikultura (It) pada tahun 2021 sebesar 111,79 yang meningkat 7,66 poin dari tahun sebelumnya sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) pada tahun yang sama sebesar 106,61 atau meningkat 1,48 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan yang signifikan dan peningkatan pengeluaran yang tidak terlalu tinggi oleh petani tanaman hortikultura pada tahun 2021.

**Tabel 2.45**  
Target dan Capaian Sektor Tanaman Hortikultura Tahun 2019-2021

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI CAPAIAN		
		2021	2019	2020*	2021**
RPJMD PERUBAHAN 2018 - 2023					
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Tanaman Hortikultura (%)	6,42 - 8,68	5,47	6,16	1,92
Meningkatnya Kesejahteraan Petani & Nelayan	NTP Tanaman Hortikultura	101,40	99,44	99,05	104,87

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi & BPS Kalimantan Barat 2022 (diolah), \* Data Sementara, \*\*Data Sementara

### 3) Sub Sektor Perkebunan

Komoditi perkebunan merupakan produk unggulan Kalimantan Barat yang memiliki nilai ekspor seperti sawit, Karet, Kelapa dan Pinang. Pada masa pandemi Covid-19 sub sektor perkebunan masih bertahan, sehingga perlu kiranya produksi perkebunan harus lebih ditingkatkan kembali melalui upaya strategi, inovasi dan kreativitasnya sehingga produk perkebunan Kalimantan Barat dapat bersaing di pasar internasional. Total produksi perkebunan pada tahun 2021 sebesar 5.266.360 ton atau mengalami penurunan produksi sekitar 64.966 ton dari tahun sebelumnya sebesar 5.331.326 Ton. Produksi perkebunan telah mencapai target tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 3.702.418 ton. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi pada perkebunan besar yang mencapai 1.563.942 ton atau meningkat sebesar 44 persen bila dibandingkan dengan target.

Laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan pada tahun 2021 sebesar 7,38% telah tumbuh kembali dari tahun 2020 sebelumnya yang hanya 2,37%. Laju pertumbuhan PDRB perkebunan ini sudah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu antara 5,79 - 8,9 %.

NTP perkebunan pada tahun 2021 sebesar 146,95 atau meningkat 18,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya atau meningkat 32,29. Capaian NTP sub sektor perkebunan tahun 2021 sudah melewati target 97,78, dan capaian 146,95 atau 49,17 point. Perolehan Nilai NTP pada tahun 2021 diantaranya karena adanya peningkatan harga jual Sawit dan karet yang sudah membaik.

**Tabel 2.46**

Perkembangan Indikator Kinerja Sub Urusan Perkebunan Tahun 2018-2021

Indikator	Target Capaian (Renstra/RPJMD)	Realisasi Capaian			
	2021	2018	2019	2020	2021*
Pertumbuhan PDRB Sektor Perkebunan ADHK (%)	5,79 - 8,9	7,75	7,54	2,37	7,38
NTP PR	97,78	94,4	89,4	114,7	147

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi &amp; BPS Kalimantan Barat 2021 (diolah)

\* data sementara

## 4) Sub Sektor Peternakan

Urusan Sub Sektor peternakan mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana peningkatan populasi dan produksi serta kesehatan hewan. Produksi peternakan terbagi menjadi produksi daging dan telur dan pada tahun 2021 total produksi daging mencapai 76.030ton atau menurun sekitar 4.092,40 ton dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 80.122,40 Ton. Namun berbeda dengan produksi telur yang mengalami peningkatan produksi yang sangat signifikan dimana pada tahun 2020 produksinya 36.142,99 ton kemudian pada tahun 2021 produksi telur meningkat mencapai 87.532 ton atau sekitar 142 persen. Kondisi ini sangat kontradiktif dengan produksi daging yang mengalami penurunan yang disebabkan oleh menyebabkan distribusi dan aktivitas peternakan mengalami hambatan karena banyak yang terhenti, akibat covid – 19.

Laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan pada tahun 2021 sebesar 4,14 % atau naik dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB peternakan masih dibawah rentang target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu antara 5,77 – 6,71 %. NTP peternakan pada tahun 2021 sebesar 98,89 atau meningkat 1,34 poin bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. NTP peternakan ini telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 97,58. Perolehan nilai NTP pada tahun 2021 salah satunya disebabkan adanya perubahan harga jual daging maupun telur yang menyebabkan meningkatnya nilai yang diterima peternak.

**Tabel 2.47**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Sub Urusan Peternakan Tahun 2018-2020

Indikator	Target Capaian (Renstra/RPJMD)	Realisasi Capaian			
	2021	2018	2019	2020*	2021
Pertumbuhan PDRB Sektor Peternakan ADHK (%)	5,77 – 6,71	5,51	5,02	2,37	4,14
NTP Peternakan	97,58	94,26	94,92	97,55	98,89

Sumber : Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat dan BPS Tahun 2021 (diolah), \* Data Sementara

## d. Kehutanan

Pada urusan kehutanan yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat terdapat dua indikator sasaran RPJMD Perubahan 2018 – 2023 yaitu pertumbuhan PDRB Kehutanan dan Tutupan Lahan.

Sasaran RPJMD pada sektor kehutanan pada tahun 2021 mempunyai target laju pertumbuhan PDRB Sektor Kehutanan antara -0,92 - (-1,06) % dan sesuai dengan rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat pada Kalimantan Barat Dalam Angka 2022, capaian pertumbuhan 2021 sebesar 0,29 % atau melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan 2018 – 2023 Provinsi Kalimantan Barat.

Target Indeks Tutupan Kualitas Lahan pada tahun 2021 sebesar 65,04 dan realisasi masih menunggu data dari Kementerian LHK.

Produksi hasil hutan yang menjadi Sasaran RPJMD 2018 – 2023 sampai dengan tahun 2020, pada tahun 2021 menjadi sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomenklatur sasaran yaitu Meningkatnya Produksi Hasil Hutan dengan indikator Produksi Hasil Hutan (m3) dengan target sebesar 1.150.000 m3 dengan realisasi sebesar m3 atau masih belum mencapai target yang ditetapkan.

**Tabel 2.48**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kehutanan Tahun 2019-2021

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI CAPAIAN		
		2021	2019	2020*	2021**
RPJMD PERUBAHAN 2018 - 2023					
<b>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan</b>	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Kehutanan (%)	-0,92 - (-1,06)	- 0,88	- 1,49	0,27
<b>Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan</b>	Indeks Tutupan Kualitas Lahan	65,04	59,76	59,49	n/a Merupakan komponen penghitung nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)
RENSTRA PD PERUBAHAN 2018 - 2023					
<b>Meningkatnya Produksi Hasil Hutan</b>	Produksi Hasil Hutan (m3)	1.150.000	1.114.280	826.332	905.598,88

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan BPS Prov. Kalbar 2022 (diolah)

\* Data Sementara, \*\*Data Sangat Sementara

Catatan, Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Prov. Kalbar termasuk pembangunan HTI dan Hasil kegiatan BPDAS Kapuas

e. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada tahun 2021, capaian urusan energi dan sumber daya mineral yang digambarkan melalui rasio elektrifikasi mengalami peningkatan menjadi 98,98 persen. Daya mampu listrik di Kalimantan Barat juga mengalami penurunan menjadi 712 MW pada tahun 2021. Di tengah kondisi Pandemi Covid-19 sektor pertambangan pada tahun 2020 mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dengan pertumbuhan sektor pertambangan sebesar 21,23 persen.

**Tabel 2.49**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1.	Rasio Elektrifikasi (%)	98.68 %	98,74%	98,98 %
2.	Daya Mampu Listrik di Kalbar (MW)	670 MW	725 MW	712 MW
3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan ADHK (Persen)	5.7 %	21,23 %	2,25%
4.	PDRB ADHK Sub Sektor Ketenagalistrikan (Milyar)	132,02	152,12	153,97

Sumber: 1, 2 PLN Wilayah V Kalbar, 3 BPS Prov. Kalbar

#### f. Perdagangan

Kinerja Perdagangan pada Tahun 2021 tumbuh 4,16 persen (Y-onY) dibanding Tahun 2020 yang berkontraksi -9,40 persen akibat pandemi Covid-19. Dari 17 (tujuh belas) kategori menurut lapangan usaha dalam struktur PDRB, nilai pertumbuhan sektor Perdagangan dihitung berdasarkan sub kategori Perdagangan Besar dan sub kategori Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor Perdagangan memiliki kontribusi sebesar 13,64 persen terhadap total PDRB Kalimantan Barat dan merupakan salah satu sektor unggulan setelah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan.

**Tabel 2.50**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perdagangan Tahun 2019-2021

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	5,72	-9,40	4,16

Sumber: BPS Prov. Kalbar 2022

#### g. Perindustrian

Kinerja Perindustrian pada Tahun 2021 tumbuh 5,23 persen (Y-onY) dibanding Tahun 2020 yang berkontraksi -2,41 persen akibat pandemi Covid-19. Dari 17 (tujuh belas) kategori menurut lapangan usaha dalam struktur PDRB, nilai pertumbuhan sektor Perindustrian dihitung berdasarkan Kategori Industri Pengolahan. Kategori Industri Pengolahan strukturnya didominasi oleh Industri Makanan dan Minuman sekitar 70 s.d 80 persen dari total Kategori Industri Pengolahan dimana Industri Makan berupa *Crude Palm Oil* (CPO) menjadi komoditas utama yang diolah. Sektor Perindustrian memiliki kontribusi sebesar 16,10 persen terhadap total PDRB Kalimantan Barat dan merupakan yang terbesar memberikan kontribusi setelah sektor pertanian.

**Tabel 2.51**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perindustrian Tahun 2019-2021

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	7,61	-2,41	5,23

Sumber: BPS Prov. Kalbar 2022

#### h. Transmigrasi

Indikator urusan transmigrasi digambarkan melalui persentase luas lahan transmigrasi yang *clear and clean* pada UPT Bina dengan capaian tahun 2020 sebesar 7,76 persen. Capaian 2020 sesuai dengan target yang ditetapkan. Selama periode perencanaan (Tahun 2019-2023) ditargetkan 100% luas lahan transmigrasi telah *clear and clean*. Adapun pembinaan dilakukan pada lokasi transmigrasi (penempatan tahun 2015-2018) tersebar di 5 kabupaten (Kayong Utara, Sanggau, Kapuas Hulu, Sintang dan Bengkayang) dengan total jumlah jiwa transmigran sebanyak 2649 orang atau 681 KK, terdiri dari 1955 jiwa (488 KK) penduduk setempat dan 694 jiwa (193 KK) penduduk adri luar. Transmigran penduduk luar berasal dari Jawa Timur, Yogyakarta, Lampung, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat, Banten, dan Jawa Barat.

**Tabel 2.52**

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Transmigrasi Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1	Persentase Luas Lahan Transmigrasi Yang Clear and Clean pada UPT Bina	32,04	32,69	7,76

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar 2021

**2.2.2 Aspek Daya Saing Daerah****2.2.2.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

## a. Nilai Tukar Petani

Kondisi nilai tukar petani sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani (It), dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani (Ib) dari proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga. Nilai Tukar Petani pada tahun 2021 adalah sebesar 128,69 poin yang mengalami peningkatan sebesar 20,24 poin bila dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 108,45 poin. Perolehan nilai NTP pada tahun 2021 salah satunya disebabkan adanya perubahan tahun dasar perhitungan NTP yaitu menjadi tahun 2018 disamping itu meningkatnya Nilai NTP seluruh Sektor Pertanian dan Sektor Kehutanan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020, (lihat tabel NTP).

**Tabel 2.53**

Target dan Capaian Nilai Tukar Petani Tahun 2018-2021 (tahun Dasar = 2018)

URAIAN	TARGET CAPAIAN (RENSTRA/RPJMD)	REALISASI				
	2021	2018	2019	2020	2021	
Nilai Tukar Petani Pangan (NTPP)	95,11	95,42	100,11	96,92	94,17	
Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	101,40	100,76	99,44	99,05	104,87	
Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	97,78	94,44	104,45	114,66	146,95	
Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	97,58	94,26	99,11	97,55	98,89	
Nilai Tukar Petani Perikanan (NTPN)	102,00	104,91	102,00	98,22	105,10	
NTP	-	95,72	102,87	108,45	128,63	

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2021 (diolah)

\* Data Sementara

**2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 disajikan berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut:

## 1. Pendidikan

Secara umum Capaian Program diatas target ada beberapa yang masih dibawah target Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ Paket C karena Ujian Nasional ditiadakan dan kelulusan ditentukan oleh nilai raport yang merupakan akumulasi penilaian pembelajaran oleh Guru. Sehingga capaian, Angka Partisipasi Kasar PAUD yang dibawah target Data 2018 di Naraca Pendidikan Daerah terdata 250.000 PAUD secara nasional. Data 2019 setelah dilakukan croscheck ternyata 70 ribu PAUD yg terdaftar tidak beroperasi lagi. Jadi tinggal 180 ribu lagi se Indonesia, sehingga realisasi Angka Partisipasi Kasar PAUD tahun 2019 menjadi turun sebesar

19,48 dengan capaian kinerja sebesar 31,91. Namun angka ini perlahan meningkat pada Tahun 2020 menjadi 29.50 persen, sedangkan Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket A capaian dibawah target dikarenakan Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin mendekati angka 100 persen, maka semakin baik APK suatu wilayah. Pada Tahun 2020, peningkatan yang negatif terjadi pada APK Provinsi Kalbar. Artinya semakin banyak penduduk yang bersekolah di SMP/ sederajat tidak sesuai dengan usia sekolah (13 sd 15 Tahun). Hal ini bisa disebabkan usia masuk sekolah lebih muda ataupun angka mengulang yang tinggi. Pada Tahun 2020, APK ditargetkan sebesar 104,2 persen dengan realisasi 107.46 persen sehingga capaian realisasi di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 96.97 persen. Realisasi APK semakin menjauhi angka 100 persen dibandingkan Tahun 2019.

**Tabel 2.54**  
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2021	Capaian 2021	Realiasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ Paket C	81,96	85,21	103
		Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ Paket C	60,2	51,77	85,9
		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/ Paket C	60,2	69,38	11,5
		Angka Putus Sekolah SMA/SMK	0,42	0,07	16
		Skor Mutu Pendidikan SMA	5,79	5,26	90,8
		Skor Mutu Pendidikan SMK	5,56	-	-
		Persentase Sekolah SMA/SMK yang terakreditasi	94,65	73,84	78,01
2.	Pengembangan Kurikulum	Persentase Pengajuan Program baru yang diverifikasi	100%	100%	100
3.	Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Pengajuan Sekolah yang diproses	100%	100%	100
4.	Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru terhadap Siswa SMA/SMK	1:17	1:18,72	110,1
		Rasio guru terhadap siswa SLB	1:6	1:7,2	120
		Persentase Guru bersertifikat pendidik	67	72	107,46
		Rata-rata Nilai Ujian Kompetensi Guru (UKG)	54,25	-	-

## 2. Kesehatan

Persentase Penduduk Kalimantan Barat yang memiliki Jaminan Kesehatan masih dibawah target karena Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN tidak Optimal, Masih ada Puskesmas yang ragu memanfaatkan dana Kapitasi JKN, SDM terbatas, Persentase FKTP yang memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai standar dibawah target karena Adanya Keterbatasan Sarana dan Prasarana di sebagian FKTP, SDM yang tidak merata, Kompetensi SDM yang Masih Kurang,

Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional masih dibawah target karena Tidaksemua Penyehat Tradisional terpapar regulasi pelayanan Kesehatan, Persentase FKTP yang terakreditasi masih dibawah target karena Belum Optimalnya Pendampingan di FKTP, Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi masih dibawah target karena Manajemen Internal RS,Keterbatasan SDM dan Sarana dan Prasarana, Persentase Ketersediaan Infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan dibawah target karena Masih rendahnya Komitmen dan perlu perencanaan untuk pelatihan SIK di Kab/Kota, Persentase Instalasi Farmasi melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai dibawah target karena Palaporan Data Masih Manual,SDM yang terbatas.

**Tabel 2.55**  
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)/100000 KH	91	131	143,9
		Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 KH	6	8	133,3
		Angka Kematian Balita (AkaBa)/1000 KH	8	9	112,5
		Prevalensi Stunting Pada Balita	23%	22,15%	96,3
2.	Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan	Persentase Posyandu Aktif	40%	58,9%	147,25
		Persentase Kab/Kota yang memiliki Kebijakan Publik yang berwawasan Kesehatan dan atau Mendukung PHBS	100%	100%	100
		Pesan/tema melalui media dalam komunikasi dan edukasi bidang kesehatan	50%	100%	200
		Persentase Desa yang merupakan Desa Siaga	85%	100%	117,6
		Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM	100%	60%	60
		Persentase Desa/Kelurahan yang ODF	20%	10,2%	51
		Persentase Sarana Air	69%	53,1%	76,9

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
		Minum yang dilakukan Pengawasan			
		Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan	72%	26,7%	37,08
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar	54%	38,8%	71,85
		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	44%	41,1%	93,4
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan kerja dasar	80%	67%	83,75
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Olahraga pada Kelompok Masyarakat di wilayah kerjanya	90%	53%	58,8
3.	Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	Prevalensi TB per 100000	232/100000	130/100000	56,03
		Prevalensi penderita HIV/AIDS usia 18-24 tahun	0,25%	0,16	64
		Jumlah Kab/Kota Mencapai Eliminasi Malaria	8 Kab/Kota	3 Kab/Kota	37,5
		Persentase Kab/Kota Endemis Filaria yang berhasil menurunkan Angka Mikrofilia menjadi <1%	100%	76%	76
		Persentase Kab/Kota dengan IR DBD < 49 Per 100000 Penduduk	100%	65%	65
		Persentase Kab/Kota yang Eliminasi Rabies	29%	0	0
		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan	58%	93%	160,34

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
		kegiatan deteksi dini hepatitis B pada kelompok beresiko			
		Persentase Cakupan Balita dengan Pneumonia yang ditangani	30%	11,09%	36,96
		Persentase Baduta yang mendapatkan Imunisasi DPT/HB/Hib dan Campak Rubella	78%	44,9%	57,56
		Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini yang direspon oleh Kab/Kota	85%	43,64%	51,34
		Persentase Calon Jamaah Haji mendapatkan pemeriksaan kesehatan	100%	93,7%	93
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu	85%	57,32%	65,43
		Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM	60%	56,88%	94,8
		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Minimal 50% sekolah	100%	0,1%	0,1
		Persentase Perempuan Usia 30-50 Tahun yang dideteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara	22%	9,96%	45,27
		Jumlah Kab/Kota yang 5% Puskesmasnya melakukan penanganan gangguan indera dan fungsional	14 Kab/Kota	5 kab/kota	35,7
		Persentase	50%	20%	40

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
		Puskesmas yang melakukan deteksi dini dan rujukan kasus katarak			
		Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 20% Puskesmas yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA	14 Kab/kota	7 Kab/Kota	50
4.	Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase Penduduk Kalimantan Barat yang memiliki Jaminan Kesehatan	100%	73,94%	e
		Persentase FKTP yang memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	82%	34,9%	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	27%	23%	
		Persentase FKTP yang terakreditasi	85%	48,04%	
		Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi	100%	83,33%	
5.	Data dan Informasi Kesehatan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan	85%	60%	
6.	Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan disarana Pelayanan Kesehatan	94%	96,75%	
		Persentase Instalasi Farmasi melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar	92%	83,61%	
		Persentase Alkes dan PKRT yang memenuhi standar	100%	100%	

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian indikator kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2020 pada umumnya telah mengalami kenaikan, akan tetapi kenaikan indikator tersebut ada yang sudah melampaui target dan ada beberapa yang belum mencapai target sesuai dengan apa yang ditergetkan RPJMD Tahun 2018-2023.

Belum tercapainya target indikator kinerja tersebut disebabkan oleh adanya pengalihan anggaran penanganan beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya refofusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 untuk penanganan COVID-19. Adapun capaian indikator kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

**Tabel 2.56**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase kemantapan jalan provinsi	62,38%	60,05	96,26%
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentasae irigasi provinsi dalam kondisi baik	49,83%,	53,68%,	107,73%
		Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir	52,46%	51,18%,	97,56%
3.	Program Bina Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan pelayanan mutu jasa konstruksi	78,00%	78,00%	100 %
4.	Program Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian		69,29%	71,53%	103,23
5.		Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	60,00%	68,60%	114,33%

### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan urusan wajib pelayanan dasar, dimana pemerintah daerah wajib untuk melaksanakannya, mengingat urusan tersebut yang mengurus pelayanan dasar dari pada kehidupan manusia sehari hari, seperti kebutuhan air bersih/minum serta sanitasi serta pelayanan dasar lainnya.

**Tabel 2.57**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Rumah Tidak Layak huni (RTLH) yang tertangani	0	0	-

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6
2.	Program Peningkatan Dan Penataan Prasarana Sarana Dan Utilitas (Psu) Permukiman	Jumlah Ketersediaan Permukiman yang terfasilitasi dengan PSU	2 lok	2 lok	100%
3.	Program Penyediaan Dan Fasilitasi Rumah Layak Huni Dan Relokasi	Jumlah Proposal Pengajuan Unit Rumah yang dibangun dalam Penanganan Pasca Bencana Tingkat Provinsi	1	-	-
4.	Program Perencanaan Dan Pembinaan Bidang Perumahan	Persentase Perencanaan Pembinaan Bidang Perumahan dan Pemukiman	21.41	14,29	66,75%
5.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan	Luas bangunan yang dibangun dan ditata	20.338,72	20.308,06	99,85%
6.	Program Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang berkakses air minum	61,40	65,67	106,95%
7.	Program Pembangunan Kawasan Permukiman Perkotaan Dan Pedesaan	Panjang jalan yang dibangun di Kawasan Permukiman Perdesaan	301.879	302.308,52	100,14%
		Panjang jalan yang dibangun di Kawasan Permukiman Perkotaan	66.797	76.465,53	114,47%

Capaian Indikator Kinerja pada urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman pada tahun 2020 pada dasarnya ada yang sudah mencapai target, dan ada yang belum. Untuk indikator kinerja yang belum mencapai target seisi apa yang direncanakan dalam RPJMD hal ini disebabkan oleh adanya pengalihan anggaran untuk refofusing dalam penanganan covid-19, sehingga ada beberapa kegiatan yang anggrannya dipotong atau dikurangi, hal ini berpengaruh pada pencapain indikator kinerja pembangunan daerah.

#### 5. Ketentraman dan Ketertiban Umum

##### a. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pada Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum terdapat 3 program yang dilaksanakan dengan jumlah indikator sebanyak 3 indikator. Dari indikator tersebut terdapat 1 (satu) indikator yang tidak tercapai target, yaitu Persentase Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada, dari target 100% tercapai sebesar 20%. Tidak tercapainya sasaran program ini disebabkan refofusing anggaran, sehingga tidak semua kegiatan pendukung dapat

terlaksana. Indikator, target, capaian dan realisasi program Sub Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.58**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat, Deteksi Dini Dan Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Prosentase rekomendasi pencegahan kewaspadaan dini	100	100	100 %
2.	Program Penciptaan, Pemeliharaan Serta Pengendalian Kondusifitas Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Di Kalbar Dan Pengamanan Objek Vital Daerah	Rata-rata kejadian pelanggaran trantibum di Kalbar (Kejadian)	130	130	100 %
3.	Program Penegakan Perda Dan Perkada Provinsi Di Kalimantan Barat	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada	100	20	20 %

b. Sub Urusan Penanggulangan Bencana

Pada Sub Urusan Penanggulangan Bencana terdapat 2 program dengan jumlah indikator sebanyak 5 indikator. Dimana terdapat 1 program yang tidak dapat dilaksanakan akibat Refocussing Anggaran pada tahun 2021 yaitu Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran.

Capaian indikator kinerja program Penanggulangan Bencana tahun 2021 Prosentase Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) sebesar 37,54% dengan tambahan kinerja pembentukan 2 Desa Tangguh Bencana, Prosentase Masyarakat yang mendapat pengetahuan/ keterampilan/ pelatihan telah mencapai dari rencana sebesar 61,20% terealisasi sebesar 249,42%, Rata-rata waktu respon time ke lokasi kejadian bencana (14 Kab/ Kota) terlaksana sebesar 100% dengan rata-rata capaian 11 jam dan Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana tercapai sebesar 100%. Indikator, target, capaian dan realisasi program Sub Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.59**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Kondisi Awal 2018	Capaian 2019	2020		2021		Realisasi
					Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)	9.80%	18,77%	45,88 %	23,53%	63,92 %	37,54%	58,72 %
		Prosentase Masyarakat yang mendapat	3.01%	22.40%	61.20 %	249,42%	61.20 %	249,42%	407,54 %

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Kondisi Awal 2018	Capaian 2019	2020		2021		Realisasi
					Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pengetahuan/ keterampilan/ pelatihan							
		Rata-rata waktu respon time ke lokasi kejadian bencana (14 Kab/ Kota)	11 Jam	11 Jam	11 Jam	11 Jam	11 Jam	11 Jam	100%
		Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Program Pencegahan Penanggulan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Presentase Penanggulangan Kebakaran di Provinsi Kalimantan Barat	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

## 6. Sosial

Pembangunan Urusan Sosial dilaksanakan melalui 7 program dengan indikator keberhasilan sebanyak 9 indikator. Dari 9 target indikator terdapat 7 indikator yang mencapai/melebihi target yang ditetapkan, dan terdapat 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target. Indikator yang tidak dapat mencapai target yaitu Persentase Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Provinsi dan indikator program Rehabilitasi Sosial di Panti Sosial Anak. Penyebab tidak tercapainya sasaran program disebabkan refocusing anggaran dan dampak pandemi covid-19. Indikator, target, capaian dan realisasi program Urusan Sosial Kalimantan Barat Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.60**  
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan	2,5	5	200 %
2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Dinas)	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	9,02	9,02	100 %
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Provinsi	100	11,5	11,5 %
4.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin	Cakupan layanan Pemberdayaan Fakir Miskin	0,18	0,38	211 %
5.	Program Pengembangan dan Kereserian Kebijakan	Persentase Kabupaten/Kota yang terkoordinir dalam	73,8	73,8	100 %

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Kessos	Sinergitas Program Kesejahteraan Sosial			
6.	Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan	Persentase Cakupan Layanan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100	100	100 %
7.	Program Rehabilitasi Sosial (UPT Panti Sosial Anak)	Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	71,28	71,4 %
8.	Program Rehabilitasi Sosial (UPT PSRLU Mulia Dharma)	Persentase Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (Mulia Dharma)	100	100	100 %
9.	Program Rehabilitasi Sosial (UPT PSRLU Mustika Dharma)	Persentase Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (Mustika Dharma)	100	100	100 %

Adapun permasalahan yang dihadapi pada urusan sosial adalah:

1. Jangkauan pelayanan program perlindungan dan jaminan sosial belum seluruhnya menyentuh pada wilayah pedalaman, perbatasan dan kepulauan terluar untuk diharapkan dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap kelompok marjinal dan miskin yang luput dari sasaran program;
2. Cakupan penanganan PSKS masih rendah. Hal ini disebabkan jumlah PSKS yang ditangani jauh lebih rendah jika dibandingkan jumlah PSKS yang seharusnya ditangani;
3. Kapasitas SDM dan Sarana pendukung petugas belum berfungsi optimal ;
4. Terbatasnya jumlah SDM untuk menangani masalah PPKS;
5. Data PPKS dan PSKS yang belum valid dari Kab/Kota;
6. Jenis bufferstock sering tidak sesuai hasil assessment di lapangan;
7. Pemenuhan SPM sesuai kriteria terbatas pada ketersediaan anggaran;
8. Kualitas SDM Tagana yang belum optimal;
9. Permasalahan penyandang eks Psikotik di Kalimantan Barat antara lain disebabkan tidak diterima kembali oleh keluarga, alamat tidak jelas, menjadi gelandangan. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan adanya sarana Panti Sosial Rehabilitasi Eks Psikotik;
10. Peningkatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana sosial yang telah ada diantaranya Taman Makan Pahlawan maupun Makam Juang Mandor, Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Panti Sosial Anak perlu segera mendapatkan perhatian mengingat kondisinya yang kurang memadai serta berbagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan.

#### 7. Tenaga Kerja

Pembangunan Urusan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 dilaksanakan melalui 2 program dengan indikator keberhasilan sebanyak 2 indikator. Ke-2 indikator tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan. Penyebab tidak tercapainya sasaran program disebabkan refocusing anggaran dan dampak pandemi covid-19. Pada kondisi pandemi terjadi penurunan lowongan pekerjaan yang terdaftar pada aplikasi Sisnaker yang diolah Disnakertrans Prov.

Kalbar, sehingga dari 4744 orang yang terdaftar sebagai pencaker hanya 985 orang yang dapat ditempatkan. Indikator, target, capaian dan realisasi program Urusan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.61**  
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Tenaga Kerja	Angka Kasus Hubungan Industrial yang terdaftar (Kasus)	284	266	93,66 %
2.	Program Penempatan Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang bekerja di sektor formal dan informal (Orang)	3000	985	32,83 %

#### 8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 dilaksanakan melalui 5 program dengan indikator keberhasilan sebanyak 12 indikator. Dari 12 indikator tersebut dapat mencapai target sebanyak 9 indikator, sedangkan 3 indikator lainnya pada Program Pemenuhan Hak Dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tidak terealisasi. Hal ini disebabkan refocusing anggaran yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan pendukung. Indikator, target dan capaian kinerja urusan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2.62**  
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	75	78	104 %
		Persentase jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan pembangunan ketahanan keluarga	65	83,3	128,15 %
2.	Program Keadilan dan Kesetaraan Gender	Persentase Perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya	20	23,75	118,75 %
3.	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang memiliki kapasitas SDM dan Sarana	100	100	100 %

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
		Prasarana pendukung sesuai dengan standar, termasuk KIE			
4.	Program Data Dan Partisipasi Masyarakat	Persentase perangkat daerah yang memiliki data anak	75	75	100 %
		Persentase Lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	33,33	33,33	100 %
5.	Program Pemenuhan Hak Dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar (Forum anak Kab/Kota)	100	100	100 %
		Persentase Lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang memiliki sarana pendukung sesuai dengan standar	55	50	90,91 %
		Persentase ketersediaan kebijakan afirmatif peningkatan pemenuhan hak anak	25	15	60 %
		Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative (restorative justice)	80	80	100 %
		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan anggaran responsive anak	17,64	16	90,70 %
		Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar	78	78	100 %

## 9. Pangan

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat melalui 4 (empat) program dengan jumlah indikator sebanyak 10 indikator program dalam rangka mendukung tercapainya sasaran Pola Pangan Harapan daerah Kalimantan Barat. Pada pencapaian target tahun 2021, dari 10 indikator terdapat 7 (tujuh) indikator realisasinya melebihi target dan 3 (tiga) indikator program yang realisasinya dibawah 85% yaitu indikator ketersediaan energi dan ketersediaan protein serta tingkat kerawanan pangan. Realisasi kinerja ketersediaan energi dapat terealisasi sebesar 73,62% dari target ditetapkan, sementara capaian indikator kinerja ketersediaan protein terealisasi sebesar 82,06% dari target yang ditetapkan. Sedangkan indikator program tingkat kerawanan pangan, dari target sebesar 14%, namun capaian masih terjadi tingkat kerawanan pangan sebesar 19%. Kondisi ini menggambarkan bahwa distribusi dan

konsumsi energi dan protein di Kalimantan Barat masih belum dapat memenuhi harapan serta masih terdapat penduduk/daerah rawan pangan. Data tersebut menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat Kalimantan Barat masih cenderung mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok sedangkan konsumsi protein baik protein hewani atau nabati malah cenderung turun. Hal ini juga memperlihatkan bahwa diversifikasi pangan masih belum mencapai hasil yang memuaskan di Kalimantan Barat. Sedangkan pandemi COVID pada tahun 2021 masih berdampak pada peningkatan jumlah penduduk yang rawan pangan baik akibat produksi maupun distribusi bahan pangan yang terkendala. Adapun indikator dan capaian kinerja program pada urusan urusan bidang pangan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.63**  
Capaian Indikator Program Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Program	Target 2021	Capaian 2021	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Indeks Ketersediaan Pangan	79,00	80,52	101,92 %
2.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi energi penduduk (Kkal/kap/hari)	1.917	1.927	100,52 %
		Konsumsi Protein Penduduk (gr.prot/kap/hari)	56,5	56,00	99,12 %
		Konsumsi Beras Penduduk (kg/kap/tahun)	93,14	92,30	99,10 %
		Coefisient Varian (CV) harga beras di tingkat konsumen*	5,00	1,73	165,4 %
		Penguatan Cadangan Pangan Provinsi (Persen)	40,00	56,20	140,50 %
		Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari)	3.131	2.305	73,62 %
		Ketersediaan Protein (gr.prot/kap/hari)	79,6	65,3	82,06 %
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tingkat Kerawanan Pangan	14,00	19,60	140 %
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tingkat Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan	84,00	100,00	119,05 %

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalbar, 2021

\* Data Sementara

#### 10. Pertanian

Permasalahan pada urusan Pertanian yakni belum dapat dilaksanakannya Program Pengelolaan Izin Lokasi, Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, Program Penetapan Tanah Ulayat, Program Pengelolaan Tanah Kosong, Program Penatagunaan Tanah, Program Pengurusan Hak-Hak atas Tanah, Program Survei, Pengukuran dan Pemetaan, Program Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian, Program Pengaturan Pertanian di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau, Program Pembangunan Sistem Informasi Pertanian, dan Program Penanganan Konflik,

Sengketa, dan Perkara Pertanahan. Hal ini mengingat Perangkat Daerah pengampu urusan baru dibentuk setelah penetapan perubahan RPJMD.

#### 11. Lingkungan Hidup

Permasalahan pada urusan Lingkungan Hidup antara lain adalah:

- a. Belum optimalnya penanganan pengaduan permasalahan lingkungan hidup oleh masyarakat yang disampaikan;
- b. Belum optimalnya pengawasan kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh unit manajemen;
- c. Belum optimalnya perencanaan dan penataan lingkungan hidup;
- d. Kecenderungan penurunan indeks kualitas udara sebagai bagian dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Barat;
- e. Menurunnya kualitas air sungai dengan semakin tumbuhnya usaha/kegiatan skala kecil / menengah / besar yang berpotensi menimbulkan pencemaran air;
- f. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- g. Belum optimalnya pelayanan dan prasarana pengelolaan sampah;
- h. Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan serta prasarana pengelolaan sampah;
- i. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengendalian perubahan iklim di Kabupaten / kota.

#### 12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dilaksanakan melalui empat program, yaitu Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan. Dari keempat program tersebut hanya satu program yang terealisasi 100 persen, yaitu Program Pengelolaan Profil Kependudukan dan satu program dibawah 75 persen, yaitu Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar 58.33 persen. Penyebab tidak tercapainya sasaran program disebabkan refocusing anggaran akibat dampak pandemi covid-19. Indikator, target, capaian dan realisasi program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.64**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2021	Capaian 2021	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Pendaftaran Penduduk	Jumlah administrasi pendaftaran penduduk se Kalimantan Barat	733 Orang, 5 Kab/Kota, 1 Dokumen	104 Orang, 3 Kab/Kota, 2 Dokumen, 2000 Keping	83.3 %
2.	Program Pencatatan Sipil	Jumlah Administrasi pencatatan sipil di Kalimantan Barat	335 Orang, 4 Kab/Kota	260 Orang, 3 Dokumen	79.15%
3.	Program	Jumlah sistem informasi	323 Orang, 14	4 Dokumen, 6	58.33%

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2021	Capaian 2021	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	dan pelaporan administrasi kependudukan di Provinsi Kalimantan Barat yang berkualitas	Dokumen, 1 Website, 1 Unit Server, 2 Kabupaten	Laporan, 1 Website	
4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah buku profil kependudukan untuk perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan	225 Buku	225 Buku	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar 2022

### 13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 dilaksanakan melalui 3 program dengan indikator keberhasilan sebanyak 4 indikator. Dari 4 target indikator tersebut, terdapat 3 indikator terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan, sedangkan 1 indikator (Jumlah Kawasan perdesaan yang dibina) tidak bisa terealisasi sesuai target. Penyebab tidak tercapainya sasaran program disebabkan refocusing anggaran akibat dampak pandemi covid-19 dan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga pembinaan terhadap Kawasan perdesaan tidak semua dapat dilaksanakan. Adapun 3 indikator program lainnya terealisasi lebih dari target yang ditetapkan. Indikator, target, capaian dan realisasi program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.65**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Pengelolaan Pemerintah Desa	Jumlah Desa Cepat Berkembang	175	568	324,57%
2.	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Indeks Ketahanan Sosial	67,91	75,43	110,07%
		Persentase Indeks Ketahanan Ekonomi	49,98	55,73	113,51%
3.	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan perdesaan yang dibina	33	26	78,78%

### 14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui dua program, yaitu Program Pengendalian Penduduk dengan satu indikator sasaran program yang capaiannya tidak mencapai 100%, yakni sebesar 57,78 persen. Selanjutnya, program kedua yaitu Program Pembinaan Keluarga Berencana dengan satu indikator sasaran program yang realisasinya nol persen. Kedua program tersebut tidak terealisasi 100 persen karena adanya

pandemi COVID 19 dan refocusing anggaran sehingga kegiatan pendukung tidak dapat dilaksanakan. Indikator, target, capaian dan realisasi pelaksanaan Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2.66**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2021	Capaian 2021	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Pengendalian Penduduk	Jumlah laju pertumbuhan penduduk yang stabil	180 Orang	120 Orang	66.66 %
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah penduduk yang terbina melalui Keluarga Berencana	65 Orang	0	0 %

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar 2022

#### 15. Perhubungan

- Belum semua jalan provinsi dilengkapi oleh Fasilitas Keselamatan dan di beberapa titik yang telah dipasang fasilitas keselamatan terjadi pencurian/perusakan.
- Belum memadainya kapasitas angkutan terhadap orang dan barang.
- Masih ada 9 terminal dari 13 terminal Tipe B yang belum dilakukan serah terima dari kabupaten, mengingat terbatasnya personil dan anggaran.
- Belum optimalnya transportasi sungai antar Kabupaten di Kalimantan Barat.
- Masih terbatasnya fasilitas keselamatan sungai dimana belum semua alur sungai dilengkapi oleh Fasilitas Keselamatan.
- Fasilitas sarana dan prasarana di beberapa pelabuhan/dermaga masih terbatas dan belum memenuhi standar.
- Fasilitas di armada sungai belum memenuhi standar.

Adapun capaian indikator kinerja Urusan Perhubungan sebagai berikut:

**Tabel 2.67**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2021	Capaian 2021	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	52%	60%	115,38%
2.		Persentase Jumlah Penumpang Angkutan Umum Terhadap Kapasitas Terminal	90%	87%	96,67%
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Jumlah Penumpang Angkutan SDP Terhadap Kapasitas Pelabuhan SDP	98%	95%	96,94%

Sumber: Analisa Data Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, 2022.

#### 16. Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan melalui 3 (tiga) program dengan 3 (tiga) indikator. Pada

tahun 2021 hanya terdapat 1 (satu) indikator yang capaian 2021 memenuhi target yang ditetapkan. Sedangkan 2 (dua) indikator program lainnya masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

**Tabel 2.68**  
Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Komunikasi dan Informatika 2021

No	Program	Indikator Program	Target 2021	Capaian 2021	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Layanan Informasi Publik	Peringkat Keterbukaan Informasi	Kategori Informatif / Zona Hijau 90-100	Menuju Informatif/ Zona Biru 85,43	94,92 %
2.	Program Layanan Komunikasi Publik	Nilai Indeks SPBE Penilaian dari Kemenpan RB	2,60-3,50	3,26	100%
3.	Program Pengembangan Teknologi Informatika	Jumlah Desa Terlayani Informasi dan Komunikasi	79*	48*	60,75%

Keterangan : \* data sementara 2021

#### 17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian target Urusan Koperasi pada tahun 2021 dengan 5 (lima) program, terdapat beberapa indikator program yang belum mampu mencapai target yang ditentukan dalam RPJMD. Kondisi ini akibat dampak dari pandemi Covid-19 dan refocusing anggaran sehingga pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi sangat terbatas dan terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak bisa dilakukan.

**Tabel 2.69**  
Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Koperasi Tahun 2021

No	Program	Indikator Program	Target	Capaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Prosentase Meningkatnya Koperasi Bergerak di Bidang Sektor Jasa Keuangan yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	61,38 %	62,26 %	101,43 %
2.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Prosentase Tingkat Kepatuhan Koperasi	2,00 %	1,27 %	63,5 %
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Prosentase penilaian kesehatan KSP/USP	5,00 %	1,27 %	25,4 %
4.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Prosentase Koperasi yang meningkat jumlah Omzet	3,00 %	12,20 %	406,66 %
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Prosentase Peserta Pelatihan Koperasi yang Meningkatkan Pemahamannya	83,33 %	84,85 %	101,82 %

Capaian terhadap program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) dengan indikator presentase volume usaha kecil yang meningkat target RPJMD tahun 2021 sebesar 1,37 persen dengan realisasi 0,01 persen belum mampu mencapai target.

Program pengembangan UMKM dengan indikator persentase Usaha Kecil yang berkembang target 0,33 % pada RPJMD dan realisasi sebesar 0,34 % lebih baik dari yang ditargetkan.

Sektor yang paling terdampak akibat penyebaran Covid-19 adalah sektor UMKM yaitu sangat dominan terhadap pelaku usaha mikro. Pelaku usaha mikro tahun 2021 tercatat berjumlah sebanyak 167.743 orang dan terdampak sebanyak 164.124 orang terhadap 11 bidang usaha. Kelompok usaha mikro yang terdampak Covid-19 kelompok pelaku usaha terbesar adalah pelaku usaha kuliner sebesar 56.921 orang, kelompok usaha Agrobisnis sebanyak 35.200 orang, pelaku usaha dagang sembako sebanyak 23.812 orang, pelaku usaha Fashion dan Kecantikan sebanyak 12.888 orang, pelaku usaha jasa dan perdagangan 18.248 orang, pelaku usaha Home Industri Olahan 10.051 orang.

#### 18. Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, serta kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan perundang-undangan. Pada tahun anggaran 2021, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Kalbar melaksanakan 5 Program dengan 12 indikator dengan rincian realisasi pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.70**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2021	Capaian 2021	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kebijakan yang mendukung investasi	3 kebijakan	-	-
		Data potensi investasi	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen penyusunan strategi promosi penanaman modal	1 dokumen	-	-
		Jumlah promosi melalui media komunikasi publik	4 buah	-	-
		Jumlah pengelolaan dan pemeliharaan media promosi elektronik	2 jenis	2 jenis	100%
		Jumlah penyiapan dan penyusunan bahan promosi dan investasi	3 jenis	1 jenis	33,33%
3.	Program	Mutu	A	B	-

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2021	Capaian 2021	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Pelayanan Penanaman Modal	penyelenggaraan pelayanan perizinan			
		Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan	1.350 izin dan nonizin	2.193 izin dan nonizin	162,44%
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dipantau dan dibina	13 perusahaan	18 perusahaan	138,46%
		Jumlah laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	1.376 LKPM	3.780 LKPM*	274,71%
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah rekonsiliasi data dan informasi PMA dan PMDN	4 dokumen	4 dokumen	100%
		Jumlah buku yang dicetak	2 buku	2 buku	100%

\*Periode Januari-September 2021

Untuk Program Promosi Penanaman Modal (2), ada 2 indikator program/kegiatan yang tidak ada realisasinya. Hal tersebut dikarenakan adanya refocusing anggaran, sehingga ada 2 indikator program/kegiatan yang tidak tercapai yaitu penyusunan strategi penanaman modal dan promosi melalui media komunikasi publik.

#### 19. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga yang diampu oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan melalui 2 (dua) program dengan 2 (dua) indikator program. Pada tahun 2020, capaian kedua indikator program tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan.

**Tabel 2.71**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Pengembangan dan Pembinaan Olahraga	Prosentase Pengembangan dan Pembinaan Olahraga	100	100	100
2.	Kepemudaan dan Pramuka	Prosentase Peningkatan Upaya Kepemudaan dan Pramuka	100	100	100

#### 20. Statistik

Urusan statistik yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan melalui 1 (satu) program dengan 1 (satu) indikator program. Pada tahun 2020, capaian indikator program tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan.

**Tabel 2.72**

Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Statistik Tahun 2020

No	Program	Indikator Program	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Pengelolaan Statistik Sektoral Kalimantan Barat	Persentase OPD yang data statistik sektoralnya terintegrasi dalam Kalbar Satu Data	80%	95,74%	119%

## 21. Persandian

Urusan persandian yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan melalui 1 (satu) program dengan 1 (satu) indikator program. Pada tahun 2020, capaian indikator program tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan.

**Tabel 2.73**

Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Persandian Tahun 2020

No	Program	Indikator Program	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Peningkatan Layanan Persandian	Persentase OPD yang memanfaatkan / menerapkan layanan persandian	50%	100%	200%

## 22. Kebudayaan

Urusan kebudayaan yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan melalui 4 (empat) program dengan 7 (tujuh) indikator program. Pada tahun 2021, capaian kedua indikator program tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan.

**Tabel 2.74**

Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kebudayaan Tahun 2021

No	Program	Indikator Program	Target 2021	Capaian 2021	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Pengembangan Kebudayaan	Jumlah warisan budaya benda dan tak benda yang apresiasi	5	11	220
		Jumlah Tenaga budaya yang bersertifikat	3	3	100
2.	Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Sanggar yang dibina	28	28	100
		Jumlah Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan	3	3	100
		Jumlah Fasilitas Komunitas Kesenian	14	14	100
3.	Pembinaan Sejarah	Data Sejarah yang diinventarisasi	2	2	100
		Even Sejarah yang difasilitasi	3	3	100
4.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar	Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang	2	7	350

No	Program	Indikator Program	Target 2021	Capaian 2021	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Budaya	ditetapkan			
		Cagar Budaya yang direvitalisasi	2	1	50
		Cagar Budaya yang dilestarikan	7	47	671,4
5.	Pengelolaan Permuseuman	Even Cagar Budaya dan Museum yang diapresiasi masyarakat	5	5	100

### 23. Perpustakaan

Urusan perpustakaan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan melalui 2 (dua) program dengan 2 (dua) indikator program. Pada tahun 2020, terdapat 1 (satu) indikator program yang telah memenuhi target yang ditetapkan sementara target cakupan kunjungan perpustakaan tidak mencapai target hal ini disebabkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dalam mencegah penyebaran covid-19 menyebabkan kunjungan perpustakaan juga dibatasi mengikuti ketentuan peraturan tim Satgas Covid-19.

**Tabel 2.75**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Pengembangan, Pembinaan dan Pelayanan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	Baik	Baik	100
2.	Program Pengembangan, Pembinaan dan Pelayanan Perpustakaan	Cakupan Kunjungan Perpustakaan	106.365 orang	46.650 orang	43,85

### 24. Kearsipan

Urusan kearsipan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan melalui 1 (satu) program dengan 1 (satu) indikator program. Pada tahun 2020, capaian indikator program tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan.

**Tabel 2.76**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	Prosentase Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Arsip dengan Kategori Cukup	20%	6,52%	32,6

## 25. Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dan dilaksanakan melalui 5 (lima) program dengan jumlah indikator sebanyak 9 indikator program. Pada tahun 2021 terdapat beberapa indikator program yang berubah akibat diberlakukannya Pemendagri No. 90 tahun 2019. Dari hasil evaluasi tahun 2021. Dari 9 indikator terdapat 7 indikator program dapat memenuhi target yang ditetapkan diantaranya jumlah produksi perikanan tangkap, jumlah produksi perikanan yang didaratkan di pelabuhan melebihi target yang ditetapkan. Selain itu, target produksi perikanan budidaya dan benih/benur juga mencapai target yang ditetapkan. Pada program pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau terpencil, kinerjanya dapat melebihi target yang ditetapkan. Demikian juga dengan produksi hasil olah perikanan mengalami pencapaian diatas target sekitar 35,09 %. Kondisi ini dikarenakan adanya upaya bimbingan usaha pengolahan ikan skala rumah tangga melalui dukungan pemberian modal usaha bagi kelompok masyarakat nelayan tangkap dan budidaya.

Indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu pada program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dimana kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku hanya sebesar 45,69 persen dari 55 persen yang ditargetkan. Kondisi ini terjadi disebabkan karena belum optimalnya kinerja pengawas sumberdaya ikan dan pengawas kapal ikan karena terbatasnya kapasitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana pengawasan dan penegakan hukum di laut, serta masih maraknya illegal, unreported dan unregulated fishing di Kalimantan Barat. Adapun indikator dan capaian kinerja program pada urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.77**  
Capaian Indikator Program Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

No	Program	Indikator Program	Target 2021	Capaian 2021	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	150.380	150.625	100,16 %
		Jumlah Produksi Perikanan yang didaratkan di pelabuhan (Ton)	4.850	8.858	182,64 %
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	77.245	77.562	100,41 %
		Jumlah Produksi Benih/ Benur Unggul Komoditas Ikan Air Payau dan Laut (ekor)	4.537.500	6.200.000	136,64 %
3.	Program Pengolahan, dan	Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	16.037	21.665	135,09 %

No	Program	Indikator Program	Target 2021	Capaian 2021	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah layanan uji mutu hasil perikanan yang diberikan kepada unit pengolahan ikan dan masyarakat	345	850	246,38 %
4.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Kawasan Ruang Laut Dan Konservasi Yang Dikelola	30	30,34	101,1 %
		Persentase Desa Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil Yang Di Berdayakan	20	20,89	104,45 %
5.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	55	45,69	83,07 %

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar, 2022

## 26. Pariwisata

Evaluasi Urusan Pariwisata pada Tahun 2021 adalah melalui Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (2 Indikator Kinerja Program), Program Pemasaran Pariwisata (1 Indikator Kinerja Program), Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (1 Indikator Kinerja Program) dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (1 Indikator Kinerja Program). Dari keempat program pada urusan pariwisata, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melampaui target yang ditentukan, dari 143 dengan capaian 198 atau 138,46%. Secara umum hampir seluruh indikator kinerja terlaksana namun ada beberapa yang tidak mencapai target atau bahkan tidak dilaksanakan karena anggaran di Refocusing untuk penanganan Covid-19. Salah satunya adalah kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri dengan Indikator Kinerja Jumlah Pusat Informasi Pariwisata Kalbar (TIC). TIC di Aruk Sambas tidak dilaksanakan karena penutupan PLBN pada masa pandemi Covid-19, sedangkan TIC Bandara Supadio tidak dilaksanakan karena refocusing Tahun 2021. Pada Tahun 2021 ada sedikit pelanggaran kebijakan terkait pembatasan pergerakan orang mengingat kondisi Covid-19 yang semakin kondusif (penurunan tingkat keterjangkitan orang). Hal ini tidak bisa dipungkiri karena Pemerintah berkomitmen memberikan vaksin kepada masyarakat untuk mencapai Herd Imunity atau upaya menghentikan laju penyebaran virus dengan cara membiarkan imunitas alami tubuh. Sehingga, daya tahan atau imunitas diharapkan akan muncul dan virus akan reda dengan sendirinya. Banyak tempat wisata,

restoran, hotel yang sudah dibuka kembali dengan tujuan agar perekonomian masyarakat kembali membaik. Namun demikian, masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan dan belum sepenuhnya bisa melakukan perjalanan wisata ke luar daerah maupun luar negeri dengan leluasa.

**Tabel 2.78**  
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun 2020

No	Program	Indikator Program	Target 2021	Capaian 2021	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Jumlah Usaha yang dibina	94,59 %	92,44%	9,9
		Persentase jumlah Destinasi Wisata Unggulan Yang Dikelola	15,29 %	9,41%	61,54
2.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	1.520.000	564.207	37,11
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina	130	40	30,76
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pelaku Ekraf dan Pariwisata yang Mendapat Pengembangan Kompetensi	143	198	138,46

*\*data warna merah masih menunggu release BPS 2022*

## 27. Pertanian

Urusan pertanian secara garis besar terbagi menjadi beberapa sub sektor seperti pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan. Dari ketiga sektor tersebut telah ditentukan indikator – indikator kinerjanya masing-masing dan diemban oleh OPD yang melaksanakan urusan tersebut.

### a. Sub Urusan Tanaman Pangan

Urusan pertanian subsektor tanaman pangan diemban oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang pada tahun 2021 dilaksanakan melalui lima program yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian dengan jumlah indikator program sebanyak 14 yang merupakan indikator khusus subsektor tanaman pangan dan juga

indikator gabungan subsektor lainnya. Dari 14 indikator tersebut masih terdapat 5 indikator yang belum mencapai target dan 2 indikator yang masih belum ada realisasi.

Program di atas sesuai dengan RPJMD Perubahan 2018 – 2023 Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan peraturan pendukungnya sehingga program tersebut di atas baru diimplementasikan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 Provinsi Kalimantan Barat yang menyebabkan capaian tidak adanya capaian pada tahun 2020.

**Tabel 2.79**  
Capaian Indikator Program Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2021

PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI CAPAIAN	
			2021	2020	2021*
1.	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Persentase peredaran pestisida yang Kadaluarsa, palsu dan ilegal (%)	35	-	-
		Persentase Peningkatan Produksi Benih Sumber Tanaman Pangan (%)	10	-	20,90
		Produktivitas Padi (Ku/Ha)	30,43	-	31,38
		Persentase Luas Panen Tanaman Pangan (%)	97,34	-	95,34
		Persentase Peningkatan Benih Tanaman Pangan Yang Diawasi (%)	6,5	-	38,06
2.	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Persentase Peningkatan Luas Lahan Sawah Ditanami 2x (%)	1,79	-	8,84
		Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Melalui Pengembangan Komoditas (%)	2	-	(0,20)
		Angka Produktivitas Benih Sumber Tanaman Padi (Ku/Ha)	21,9	-	24,70
3.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Persentase Luas Serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (%)	3,17	-	3,40
4.	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Persentase Peningkatan Penggunaan Benih Bermutu (%)	2	-	1,43
		Jumlah Kelembagaan Pertanian (Unit)	175	-	359,00
		Persentase Peningkatan Kelompok Tani Kelas Lanjut (%)	10	-	4,87
		Persentase Peserta Diklat Pertanian Dengan Kategori Baik (%)	60	-	70
5.	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	Persentase Peningkatan Pertimbangan Teknis untuk Usaha Pertanian yang Diterbitkan (%)	10	-	0

#### b. Sub Urusan Tanaman Hortikultura

Urusan pertanian subsektor tanaman pangan diemban oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang pada tahun 2021 dilaksanakan melalui lima program yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Perizian Usaha Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian dengan jumlah indikator program sebanyak 11 yang merupakan indikator khusus subsektor tanaman hortikultura dan juga indikator gabungan subsektor lainnya. Dari 11 indikator tersebut masih terdapat 5 indikator yang belum mencapai target dan 2 indikator yang masih belum ada realisasi.

Program di atas sesuai dengan RPJMD Perubahan 2018–2023 Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan peraturan pendukungnya sehingga program tersebut di atas baru diimplementasikan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 Provinsi Kalimantan Barat yang menyebabkan capaian tidak adanya capaian pada tahun 2020.

**Tabel 2.80**  
Capaian Indikator Program Pertanian Tanaman Hortikultura Tahun 2021

PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI CAPAIAN	
			2021	2020	2021*
1.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peredaran pestisida yang Kadaluarsa, palsu dan ilegal (%)	35	-	-
		Persentase Peningkatan Luas Panen Hortikultura (%)	2	-	(2,15)
		Persentase Peningkatan Benih Hortikultura Yang Diawasi (%)	6,5	-	7,06
		Persentase Peningkatan Produksi Benih Sumber Hortikultura Bermutu (%)	3,5	-	4,55
2.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Melalui Pengembangan Komoditas (%)	2	-	(0,20)
3.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (%)	3,17	-	3,40
4.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penggunaan Benih Bermutu (%)	2	-	1,43
		Jumlah Kelembagaan Pertanian (Unit)	175	-	359,00
		Persentase Peningkatan Kelompok Tani Kelas Lanjut (%)	10	-	4,87
		Persentase Peserta Diklat Pertanian Dengan Kategori Baik (%)	60	-	70
5.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pertimbangan Teknis untuk Usaha Pertanian yang Diterbitkan (%)	10	-	-

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar 2022 (diolah)

\* data sementara

c. Sub Urusan Perkebunan

Urusan perkebunan diemban oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat dan dilaksanakan melalui dua program yaitu Program Peningkatan Produksi Perkebunan dan Peningkatan Kesejahteraan Pekebun dengan jumlah indikator program sebanyak 5 indikator dengan 7 indikator. Data ini memperlihatkan bahwa kinerja perkebunan meningkat cukup tajam pada tahun 2021 yang ditopang utamanya oleh perkebunan kelapa sawit, karet dan kelapa dalam. Peningkatan kinerja sub sektor perkebunan dipengaruhi oleh membaiknya harga sawit dan karet dipasar dunia.

**Tabel 2.81**  
Capaian Indikator Program Perkebunan Tahun 2021

PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR PROGRAM	TARGET REALISASI CAPAIAN				
			2021	2018	2019	2020*	2021
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat	1.403.608	1.338.326	1.668.924	1.794.481	1.890.666
		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan Yang Disertifikasi	950.000	3.859.815	1.788.519	6.135.060	6.726.306
2.	Program Pengembangan Prasarana Pertanian	Tingkat Produktivitas Perkebunan Rakyat	1.677	1.501	1.676	1.799	1.900
3.	Program Pengendalian Dan	Penurunan Luas Serangan	0,5	N/A	N/A	N/A	0,45

PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET REALISASI CAPAIAN				
		2021	2018	2019	2020*	2021
Penanggulangan Bencana Pertanian	Organisme Pengganggu Tanaman Komoditi Perkebunan					
	Penurunan Luas Lahan Perkebunan yang mengalami Dampak Perubahan Iklim	2.000	N/A	N/A	N/A	
4. Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Peningkatan Pertimbangan Teknis untuk Usaha Pertanian yang Diterbitkan	25	N/A	N/A	N/A	14
5. Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penggunaan Benih Bermutu	84	N/A	N/A	N/A	54

d. Sub Urusan Peternakan

Urusan peternakan diemban oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat dan dilaksanakan melalui enam program dengan jumlah indikator program sebanyak 19 indikator pada tahun 2020. Pencapaian target tahun 2020 masih memperlihatkan bahwa terdapat beberapa indikator program yang tidak mencapai target. Pada Program Pengendalian dan Penanggulangan terdapat 14 indikator. Dari 6 program terdapat salah satunya program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian yang belum mencapai target yaitu peningkatan jumlah populasi ternak. Hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya aktivitas peternakan terutama pada jalur distribusi sehingga pemasukan bibit, pakan dan obat serta pemasaran ternak terhambat yang disebabkan kondisi yang belum menentu akibat pandemi covid-19.

**Tabel 2.82**  
Capaian Indikator Program Peternakan Tahun 2018-2021

PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET REALISASI CAPAIAN				
		2021	2018	2019*	2020**	2021
1. Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Jenis Penyakit Ternak/ Hewan Yang Dikendalikan	7	7,00	7,00	7,00	7,00
	Tingkat Keamanan Pangan Produk Hewan Dan Olahannya	80	n/a	n/a	80,05	82,44
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Populasi Sapi (Ekor)	159.810	143.418	154.425	158.357	159078
	Populasi Kambing (ekor)	167.246	155.444	148.086	144.276	147.018
	Populasi Babi (ekor)	561.267	493.786	465.530	463.570	450.643
	Populasi Ayam Buras (ekor)	6.335.659	5.920.669	5.790.527	6.025.606	6.070.223
	Populasi Ayam Ras Petelur (ekor)	2.437.724	5.558.408	8.169.293	4.732.795	5.681.160
	Populasi Ayam Ras	58.342.631	57.169.216	53.568.877	50.600.958	51.803.032

PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET REALISASI CAPAIAN					
		2021	2018	2019*	2020**	2021	
	Pedaging (ekor)						
	Populasi Itik/ Itik Manila (Ekor)	598.676	592.151	580.057	577.388	564.595	
	Persentase Pakan Yang Memenuhi Standar Mutu (%)	80,0	N / A	N / A	N / A		
3.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jenis Kawasan Peternakan yang ditumbuh kembangkan	1	N / A	N / A	N / A	1
4.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanggulangan Hewan Terdampak Bencana	N/A	N / A	N / A	N / A	N / A
5.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan Berizin	50	N / A	N / A	N / A	50
6.	Program Penyuluhan Pertanian	Jenis Teknologi Pengembangan Peternakan Yang Didiseminasi ke Kelompok Ternak	1	N / A	N / A	N / A	1

## 28. Kehutanan

Urusan kehutanan diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan dilaksanakan melalui 4 program yaitu Program Pengelolaan Hutan, Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan jumlah indikator program pada tahun 2021 sebanyak 11. Dari 11 indikator tersebut masih terdapat 2 indikator yang belum mencapai target yaitu indikator Industri pengolahan hasil hutan kapasitas <6.000 m<sup>3</sup> yang beroperasi dan Petugas pelaksana penyuluh kehutanan yang meningkatnya Kapasitas.

Program di atas sesuai dengan RPJMD Perubahan 2018 – 2023 Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan peraturan pendukungnya sehingga program tersebut diatas baru diimplementasikan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 Provinsi Kalimantan Barat yang menyebabkan capaian tidak adanya capaian pada tahun 2020. Sebelum RPJMD Perubahan, urusan kehutanan dilaksanakan melalui 5 program.

**Tabel 2.83**  
Capaian Indikator Program Kehutanan Tahun 2021

PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI CAPAIAN
		2021	2020
1. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rencana Tata Hutan KPH (Unit)	19	22
	Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan (Ha)	1.860.000	2.178.405
	Lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	1000	2.472,26
	Perlindungan pada HP dan HL (Kab)	3	12

PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI CAPAIAN	
		2021	2020	
	Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (%)	90	100	
	Industri pengolahan hasil hutan kapasitas <6.000 m <sup>3</sup> yang beroperasi (unit)	53	45	
	Penyediaan Perbenihan Tanaman Hutan (unit)	1	1	
2.	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Petugas pelaksana penyuluh kehutanan yang meningkatnya Kapasitas (orang)	26	21
3.	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	Tumbuhan dan Satwa Liar kewenangan daerah (jenis)	5	5
		Kawasan bernilai ekosistem penting (Ha)	20.000	20.000
4.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	Pengelolaan kegiatan pada Daerah Aliran Sungai lintas daerah kab/kota	2	2

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar 2022 (diolah)

\* data sementara

#### 29. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan energi dan sumber daya mineral yang diampu oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan melalui 6 (enam) program dengan 8 (delapan) indikator program. Pada tahun 2020, capaian 8 (delapan) indikator program tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan.

**Tabel 2.84**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Pengembangan Dan Pengendalian Ketenagalistrikan	Persentase Badan Usaha penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik non PLN yang memiliki perizinan di bidang ketenagalistrikan	41,20	55,67	135,12
		Prosentase Desa Berlistrik	83	84,5	101,8
2.	Program Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Energi	Persentase Kontribusi Bauran Energi berbasis EBT	0,71	5,2	732,39
3.	Program Penelitian, Pengembangan Geologi Air Tanah	Prosentase cakupan penelitian di cekungan Air Tanah prioritas	20	20	100
		Zona konservasi air tanah yang ditetapkan	-	20	20

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
4.	Program Pembinaan, Pengembangan dan pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah	Total pendapatan daerah di sektor air tanah (Juta Rupiah)	300	628,262	209,42
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara	Total pendapatan daerah di sektor Mineral dan Batubara (Milyar Rupiah)	110	607,5	552,27
6.	Program Pembinaan Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara	Persentase wilayah pertambangan yang sudah direklamasi	0,12	60	500

### 30. Perdagangan

Evaluasi Urusan Perdagangan Tahun 2021 adalah melalui 6 (enam) Program Kerja Pembangunan yaitu Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting; Program Pengembangan Ekspor; Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; dan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Secara umum urusan perdagangan memiliki kinerja yang sangat baik di Tahun 2021 hanya terdapat 2 (dua) Program yang tidak terealisasi dikarenakan tidak dapat dilaksanakan akibat dari *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19. Kinerja Urusan Perdagangan yang baik juga mendorong pertumbuhan sektor perdagangan naik dari Tahun sebelumnya (4,16%). Hal ini dikarenakan beberapa komoditi unggulan yang menjadi penopang utama dalam kinerja Ekspor Kalimantan Barat seperti CPO, Karet, Bauksit, Kelapa Bulat dan lainnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan di Tahun 2021 dapat dilihat dari kinerja ekspor non migas yang naik cukup tinggi dari target yang ditetapkan 161,60%. Kinerja Inflasi Bahan Makanan dengan capaian 3,5% cukup baik dan masih dalam batas normal (normal  $\pm 3\%$ ) akan tetapi tetap perlu untuk diawasi beberapa komoditi yang rentan bergejolak terkait ketersediaan dan permintaan tinggi seperti cabean, bawang, daging ayam ras, telur ayam ras serta sayur dan buah-buahan. Perlindungan Konsumen juga perlu untuk terus ditingkatkan melalui tertib niaga sehingga meningkatkan Indeks Keberdayaan Konsumen yang masih menunjukkan trend positif setiap tahunnya.

**Tabel 2.85**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun 2021

No	Program	Indikator Program	Target 2021	Capaian 2021	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perzinan dan Pendaftaran Perusahaan yang difasilitasi	100%	100%	100%
2.	Program Peningkatan	Persentase Peta Spasial	35%	0	0%

No	Program	Indikator Program	Target 2021	Capaian 2021	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan			
		Kebijakan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (laporan)	1 Dokumen	0	0%
3.	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Inflasi Bahan Makanan (%)	3,6%	3,5%	102,86% (bersifat negatif)
4.	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Non Migas (US\$ Juta)	US\$ 1.000	US\$ 1.616	161,60%
5.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen	40 IKK	48,24 IKK	120,60%
		Persentase kabupaten/kota yang terlayani perlindungan konsumen	14 %	14%	100%
		Jumlah ruang Inklusif layanan	4 Layanan	4 Layanan	100%
6.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah perjanjian kerjasama antar daerah (Provinsi)	1 Dok Kerjasama	1 Dok Kerjasama	100%
		Pengelolaan Sistem Informasi dan Promosi Perdagangan	1 Sistem	1 Sistem	100%

### 31. Perindustrian

Evaluasi Urusan Perindustrian Tahun 2021 adalah melalui 3 (tiga) Program Pembangunan yaitu Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; Program Pengendalian Izin Usaha Industri; dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). Kinerja urusan perindustrian secara umum sangat baik di Tahun 2021 dengan ketercapaian keseluruhan target kinerja 100%.

**Tabel 2.86**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian Tahun 2021

No	Program	Indikator Program	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Regulasi Perencanaan Industri Yang Disusun Kabupaten dan Provinsi	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
		Persentase Kontribusi Industri Unggulan (RPIP) Kalbar	90%	93,43%	103,81%

No	Program	Indikator Program	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
		Terhadap Total Kontribusi Industri			
2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Laporan pengendalian ijin usaha industri	1 Laporan	1 Laporan	100%
3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Sistem data dan informasi yang dikelola	1 Sistem	1 Sistem	100%

### 32. Transmigrasi

Program Pembangunan Urusan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 dilaksanakan melalui 1 program (Program Peningkatan Kualitas Permukiman Transmigrasi) dengan 1 indikator keberhasilan yaitu Luasan Lahan Transmigrasi yang dimanfaatkan (ha). Realisasi program (100 %) sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu seluas 1.199,28 Ha. Indikator, target, capaian dan realisasi program Urusan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.87**  
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Transmigrasi Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Peningkatan Kualitas Permukiman Transmigrasi	Luasan Lahan Transmigrasi yang dimanfaatkan (ha)	1.199,28	1.199,28	100 %

### 33. Perencanaan

Urusan Perencanaan Kalimantan Barat Tahun 2020 dilaksanakan melalui 5 program dengan jumlah indikator program sebanyak 9 indikator. Secara umum, semua indikator program dapat mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Indikator, target, capaian dan realisasi program Urusan Perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.88**  
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perencanaan Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan	Persentase Tingkat Capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah	85	100	117,65%
2.		Prosentase Data yang termanfaatkan dalam dokumen perencanaan Pembangunan	45	100	222,22%
3.	Program Penyusunan Rencana	Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan	100	100	100,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Pembangunan	Daerah dan Perangkat Daerah yang wajib disusun			
4.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Wilayah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD pada bidang pembangunan sarana dan prasarana wilayah	100	100	100,00%
5.		Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	100	100	100,00%
6.		Persentase Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Wilayah Se Kalimantan yang di Akomodir Dalam Dokumen Perencanaan	30	100	333,33%
7.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi	Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Pembangunan Ekonomi	100	100	100,00%
8.		Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Pembangunan Ekonomi	100	100	100,00%
9.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Manusia, Sosial Dan Pemerintahan	Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan (PMSP)	95	97,53	102,66%
10.		Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan (PMSP)	67,47	97,90	145,10%

### 34. Keuangan

#### a. Sub Urusan Keuangan Daerah

Urusan Keuangan Tahun 2021 melaksanakan 2 Program dengan 3 Indikator, Evaluasi capaian tahun 2021 pada Program/kegiatan telah mencapai target capaian.

**Tabel 2.89**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Keuangan Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2021	Capaian 2021	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	PROGRAM PENGELOLAAN	Presentase Penyusunan Anggaran SKPD sesuai	100 %	75%	75 %

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2021	Capaian 2021	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	KEUANGAN DAERAH	ketentuan.			
2.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan BMD yang sesuai ketentuan.	100 %	95%	95 %
		Persentase Penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan BMD yang sesuai ketentuan.	100 %	95%	95 %

#### b. Sub Urusan Pendapatan Daerah

Urusan Pendapatan Daerah Tahun 2021 dilaksanakan melalui 1 Program yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki 4 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan pendapatan daerah, Persentase Kontribusi Realisasi Retribusi terhadap Realisasi PAD, Persentase Kontribusi Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah terhadap Realisasi PAD dan Persentase Kontribusi Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD. Untuk capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase Kontribusi Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD capaiannya melebihi target yang ditetapkan namun untuk indikator Persentase Kontribusi Realisasi Retribusi terhadap Realisasi PAD dan Persentase Kontribusi Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah terhadap Realisasi PAD tidak mencapai target hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya disebabkan oleh Pandemi Covid -19 dan Adanya peralihan objek penyewaan bangunan dari Objek Retribusi ke Objek Pemanfaatan asset dan menjadi Pendapatan lain-lain.

**Tabel 2.90**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pendapatan Daerah Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2021	Capaian 2021	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan pendapatan daerah	80,2	83,94	104,67%
		Persentase Kontribusi Realisasi Retribusi terhadap Realisasi PAD	1,80%	1,20%	66,67%
		Persentase Kontribusi Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah terhadap Realisasi PAD	10,5%	10,26%	97,71%
		Persentase Kontribusi Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	84%	84,63%	101%

#### 35. Kepegawaian

Urusan kepegawaian yang diampu oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan melalui 3 (tiga) program dengan 3 (tiga) indikator program. Pada tahun 2020, capaian 3 (tiga) indikator program tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan.

**Tabel 2.91**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kepegawaian Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Layanan Administrasi Dan Informasi Aparatur Sipil Negara	Persentase Layanan Administrasi dan Informasi ASN	100	98,69	98,69
2.	Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Prosentase Pembinaan ASN	100	98,75	98,75
3.	Program Pengembangan Dan Peningkatan Kapasitas Sdm Aparatur Sipil Negara	Persentase Pengembangan dan Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas SDM ASN	100	94,08	94,08

**36. Pendidikan dan Pelatihan**

Urusan pendidikan dan pelatihan yang diampu oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan melalui 3 (tiga) program dengan 3 (tiga) indikator program. Pada tahun 2020, capaian 1 (satu) indikator program tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan. Sedangkan untuk 2 (dua) indikator lainnya belum memenuhi target yang ditetapkan dengan 1 (satu) Program dan 1 (satu) indikator tidak dilaksanakan sebagai akibat pengalihan anggaran untuk penanggulangan Covid-19.

**Tabel 2.92**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintahan Daerah	Persentase SDM Pemerintahan Daerah yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	100	91,71	91,71
2.	Program Sertifikasi Kompetensi ASN	Persentase SDM Pemerintahan Daerah yang mengikuti Kompetensi ASN	100	0	0
3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Institusi Pengembangan Kompetensi	Persentase SDM Pemerintahan Daerah yang mengikuti Pengembangan Kapasitas Kelembagaani	100	107,78	107,78

**37. Penelitian dan Pengembangan**

Urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 dilaksanakan melalui 3 program dengan jumlah indikator program sebanyak 6 indikator. Secara umum dari 6 indikator tersebut dapat mencapai target (realisasi 100%). Indikator, target, capaian dan realisasi program Urusan Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.93**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya	Jumlah Publikasi Penelitian, Perekayasaan dan Inovasi Daerah (Terbitan)	11	11	100 %
2.		Jumlah Kerjasama Kelitbangan (Perjanjian)	2	2	100 %
3.	Program Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Inovasi dan Tekonologi	1	1	100 %
4.		Jumlah Rekomendasi Inovasi Daerah yang diusulkan oleh Bidang Inovasi dan Teknologi	3	3	100 %
5.	Program Penelitian Dan Pngembangan Ekonomi Dan Pembangunan	Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Ekonomi dan Pembangunan	9	9	100 %
6.		Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Sosial dan Pemerintahan	6	6	100 %

### 38. Pengelola Perbatasan

Kinerja Pengelolaan Perbatasan relatif membaik dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari Ratio Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal Wilayah Perbatasan terhadap seluruh Desa Wilayah Perbatasan yang nilainya terus berkurang dari tahun 2018 ke tahun 2021.

**Tabel 2.94**

Capaian Sasaran Pengelolaan Perbatasan Tahun 2018-2021

Indikator Sasaran	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
Ratio Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal Wilayah Perbatasan	0,4096	0,2108	0,1506	0,1084

### 39. Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 dilaksanakan melalui 3 program dengan jumlah indikator program sebanyak 8 indikator. Dari 8 indikator, terdapat 6 indikator dapat mencapai/melebihi target yang ditetapkan. Adapun 2 indikator program, tidak dapat mencapai target. Target yang tidak tercapai yaitu indikator Persentase Penanganan Konflik Sosial, dari target 100% penanganan, hanya terealisasi 93,60%. Selain itu, target tidak tercapai terkait pembinaan kelembagaan politik, dari target 100%, hanya terealisasi sebesar 93,86%. Penyebab tidak tercapainya sasaran program disebabkan refocusing anggaran akibat dampak pandemi covid-19 dan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga pembinaan kelembagaan politik dan penanganan konflik social tidak dapat

dilaksanakan secara optimal. Indikator, target, capaian dan realisasi program Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.95**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = $\frac{5}{4} \times 100$
1.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase pemahaman ketahanan ekonomi dan sosial budaya masyarakat.	90	91,86	102,07 %
2.		Persentase tingkat pemahaman wawasan kebangsaan para pemuda	90	91,86	102,07 %
3.		Jumlah Organisasi yang melapor dan ber - SKT	32	42	131,25 %
4.		Persentase pengawasan dan pembinaankelompok sasaran OKP, ORMAS dan LSM	19	91,86	483,47 %
5.	Program Pemeliharaan Ketentraman, Pencegahan Tindak Kriminal Dan Aght (Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan)	Persentase penanganan Konflik sosial	100	93,60	93,60 %
6.		Persentase kelembagaan politik yang dibina	100	93,86	93,86 %
7.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase pemuda/masyarakat dalam partisipasi pemilu	70	93,12	133,09 %
8.		Persentase generasi muda dan organisasi masyarakat yang memahami budaya dan etika politik	75	91,12	121,49 %

40. Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat  
 Urusan Koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat dilaksanakan oleh Badan Layanan Penghubung. Program yang dilaksanakan sebanyak 2 program dengan 2 indikator keberhasilan. Dari 2 indikator tersebut terealisasi sebesar 100%. Indikator dan capaian Badan Layanan Penghubung tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2.96**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = $\frac{5}{4} \times 100$
1.	Program Peningkatan Partisipasi Dan Kemitraan Antar Sektor Dan Pemda	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pemda	100	100	100 %
2.	Program Peningkatan Layanan	Persentase	100	100	100 %

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Penghubung	penyelenggaraan layanan penghubung sesuai standar			

#### 41. Sekretariat Daerah

##### a. Biro Administrasi Pimpinan

Biro Administrasi Pimpinan melaksanakan urusan Kesekretariatan Daerah melalui 2 program dengan indikator kinerja sebanyak 2 indikator. Capaian indikator tersebut tahun 2020 terealisasi sebesar 100%. Indikator dan capaian Biro Administrasi Pimpinan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.97**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Prosentase Informasi publikasi pemberitaan Melalui media cetak, Media elektronik dan media online, media luar ruang	93	100	100 %
2.	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Prosentase layanan Tamu dan Pendampingan Pimpinan sesuai SOP (%)	93	100	100

##### b. Biro Administrasi Pembangunan

Biro Administrasi Pembangunan melaksanakan urusan Kesekretariatan Daerah melalui 1 program dengan indikator kinerja sebanyak 3 indikator, yaitu (1) *Indikator Persentase Perangkat Daerah dalam ketepatan sasaran pelaksanaan pembangunan Daerah*, (2) *Persentase Kab/Kota dalam ketepatan sasaran pelaksanaan pembangunan wilayah* dan (3) *Persentase Perangkat Daerah dalam tingkat kepatuhan pada sistem pelaporan pelaksanaan pembangunan*. Capaian indikator tersebut pada tahun 2021 terealisasi masing-masing sebesar 90% untuk Indikator (1), 90% untuk Indikator (2) dan 96% untuk Indikator (3). Indikator dan capaian Biro Administrasi Pimpinan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.98**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2021	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	<i>Persentase Perangkat Daerah dalam ketepatan sasaran pelaksanaan pembangunan Daerah</i>	n/a	90	90 %
		<i>Persentase Kab/Kota dalam ketepatan sasaran pelaksanaan pembangunan wilayah</i>	n/a	90	90 %
		<i>Persentase Perangkat Daerah dalam tingkat kepatuhan pada sistem pelaporan pelaksanaan pembangunan</i>	n/a	96	96 %

Sumber : <https://rpjmd.simdalrenbang.kalbarprov.go.id/>

c. Biro Hukum

Biro Hukum melaksanakan urusan Kesekretariatan Daerah melalui 4 (empat) program dengan indikator kinerja sebanyak 4 (empat) indikator. Capaian 4 (empat) indikator tersebut tahun 2020 terealisasi sebesar 100%. Indikator dan capaian Biro Administrasi Pimpinan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.99**  
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Hukum Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum Dan Ham	Persentase pelayanan bantuan Hukum dan HAM yang berkualitas	100	100	100 %
2.	Program Peningkatan Kualitas Pembinaan Dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Se-Kalbar	Persentase produk hukum Kabupaten/Kota yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan	100	100	100 %
3.	Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum	Persentase produk hukum daerah yang harmonis	100	100	100 %
4.	Program Penataan Kualitas Dokumentasi Dan Informasi Hukum	Persentase dokumentasi produk hukum daerah dan sosialisasi produk hukum (%)	100	100	100

d. Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Kesejahteraan Rakyat melaksanakan urusan Kesekretariatan Daerah melalui 4 (empat) program dengan indikator kinerja sebanyak 4 (empat) indikator. Capaian 4 (empat) indikator tersebut tahun 2020 terealisasi sebesar 100%. Indikator dan capaian Biro Administrasi Pimpinan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.100**  
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan Dan Monev Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan Dan Monev Kebijakan Bidang Sosial	100	100	100 %
2.	Fasilitasi Koordinasi Pembinaan Dan Monev Kebijakan Bidang Kesehatan Dan Keluarga Berencana	Persentase Peningkatan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan Dan Monev Kebijakan Bidang Kesehatan Dan Keluarga Berencana	100	100	100 %

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
3.	Program Fasilitasi Koordinasi Pembinaan Dan Monev Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Di Kalbar	Persentase Peningkatan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan Dan Monev Kebijakan Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan	100	100	100 %
4.	Program Pembinaan Dan Peningkatan Pelestarian Kerukunan Umat Beragama	Persentase Pembinaan Dan Peningkatan Pelestarian Kerukunan Umat Beragama	100	100	100

e. Biro Organisasi

Biro Organisasi melaksanakan urusan Kesekretariatan Daerah melalui 6 (enam) program dengan indikator kinerja sebanyak 6 (enam) indikator. Pada tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) indikator telah mencapai target yang ditetapkan sementara 3 (tiga) indikator program lainnya masih belum memenuhi target yang ditetapkan.

**Tabel 2.101**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Organisasi Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Bahan Pustaka	Presentase Peningkatan Pengelolaan Bahan Pustaka	100	75	75 %
2.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Ikml Pemerintah Provinsi Kalbar	87	87	100 %
3.	Program Penataan Ketatalaksanaan	Jumlah Kebijakan Penerapan Standarisasi, Sistem Dan Prosedur	4	1	25 %
4.	Program Peningkatan Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Prosentase Perangkat Daerah Yang Telah Dilakukan Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	40	30	75 %
5.	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Ditata	19	20	105,26 %
6.	Program Pengembangan Pengawasan Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase Laporan Kinerja Dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Yang Telah Direviu	100	100	100

**Tabel 2.102**

Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Tahun 2021 pada Biro Organisasi

Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021	Realisasi			Interprestasi
			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR</b>	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM sangat baik	20.29%	100%	232043550	100%	Sangat Tinggi
	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dengan nilai RB meningkat	100%	100%	222370550	100%	Sangat Tinggi
	Persentase Kab/Kota dengan nilai RB meningkat	100%	100%			
	Persentase LKj PD yang memuat informasi kinerja	100%	100%	199620850	99,92%	Sangat Tinggi
	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan penataan sesuai peraturan perundang-undangan	47 PD/ Biro	100%	181835700	99,99%	Sangat Tinggi
	persentase dokumen manajemen SDMA PD yang terverifikasi	327%	100%	144959350	99,87%	Sangat Tinggi
	persentase kabupaten/kota yang difasilitasi penataan kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	181857686	100%	Sangat Tinggi

**Tabel 2.103**

Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Tahun 2021 pada Urusan Wajib Sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja	Interprestasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pemberdayaan PSKS	Persentase Peningkatan PSKS	25%	19%	75 %	Sedang
2.	Terlaksananya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	50%	49%	98,08%	Sangat Tinggi
3.	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS (Lansia, Disabilitas, Anak terlantar, Gepeng, lainnya diluar napza) yang mendapatkan	6,5%	7,28%	112,08%	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja	Interprestasi
1	2	3	4	5	6	7
		Rehabilitasi Sosial				
4.	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilaksanakan	70,2%	71.12%	101,32%	Sangat Tinggi
5.	Terlaksananya Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana	15%	11.22%	74.81%	Sedang

Dari 5 (Lima) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan IKU Dinas Sosial Prov. Kalbar Tahun 2021, terdapat 2 indikator yang menunjukkan capaian diatas 100% dan 2 indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan serta 1 indikator yang hampir mencapai target. Tingkat ketercapaian ini merupakan dampak dari refocusing anggaran, penyempurnaan anggaran dalam bentuk hibah yang bergeser ke perangkat daerah dan tingginya korban bencana terutama pada akhir tahun 2021.

f. Biro Umum

Biro Umum melaksanakan urusan Kesekretariatan Daerah melalui 4 (empat) program dengan indikator kinerja sebanyak 4 (empat) indikator. Pada tahun 2020 4 (empat) indikator dimaksud telah mencapai target yang ditetapkan.

**Tabel 2.104**  
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Umum Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Penertiban Aset Di Lingkungan Sekretariat Daerah Dan Rumah Jabatan	Persentase Penertiban Aset Di Lingkungan Sekretariat Daerah Dan Rumah Jabatan	100	100	100 %
2.	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda	Persentase Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda	100	100	100 %
3.	Program Pelayanan Kelistrikan, Sound System Dan Telekomunikasi	Persentase Penanganan Gangguan Kelistrikan, Sound System Dan Telekomunikasi Lingkup Komplek Kantor Gubernur Dan Rumah Jabatan	100	100	100 %
4.	Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan Dan Institusi Pemerintah	Persentase Perkuatan Kapasitas Kelembagaan Dan Institusi Pemerintah	100	100	100

g. Biro Pemerintahan

Biro Pemerintahan melaksanakan urusan Kesekretariatan Daerah melalui 4 (empat) program dengan indikator kinerja sebanyak 4 (empat) indikator. Pada tahun 2020 sebanyak 3

(tiga) indikator telah mencapai target yang ditetapkan sementara 1 (satu) indikator program lainnya masih belum memenuhi target yang ditetapkan.

**Tabel 2.105**  
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Penataan Daerah	Jumlah Pemendagri Batas Antar Daerah	3	100	100 %
2.	Program Penataan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Persiapan Pembentukan Provinsi Kapuas Raya Sesuai Kewenangan/Peraturan	40	100	100 %
3.	Program Penataan Daerah	Persentase Kesiapan Dokumen Persiapan Pembentukan Kabupaten Baru Sesuai Kewenangan Atau Peraturan (%)	100	70	70 %
4.	Program Peningkatan Pembangunan Wilayah Perbatasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Wilayah Perbatasan	3	100	100

h. Biro Perekonomian

Program yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian yaitu 2 (Dua) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) Sub Kegiatan. Program utama yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian terdiri dari 1 (Satu) Program yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan, 3 (Tiga) Kegiatan yaitu Pengelola Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian, Pengelola Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD, 8 (Delapan) Sub Kegiatan yaitu Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro, Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro, Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BLUD dengan 3 Indikator yaitu Persentase Pengelolaan Kebijakan Perekonomian, Persentase pengelolaan kebijakan perekonomian di Bidang Sumber Daya Alam dan Persentase pengelolaan kebijakan perekonomian di Bidang BUMD dan BLUD.

Untuk Program Perekonomian dan Pembangunan dan Indikator Program/Kegiatan seluruhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut tabel Program, Indikator, Target, Capaian dan Realisasi Biro Perekonomian T.A. 2021:

**Tabel 2.106**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Perekonomian Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2021	Capaian 2021	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	80%	80 %	100%
		Persentase pengelolaan kebijakan perekonomian di Bidang Sumber Daya Alam	80%	80 %	100%
		Persentase pengelolaan kebijakan perekonomian di Bidang BUMD dan BLUD	80%	80 %	100%

## i. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa merupakan unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan salah satu unit kerja administratif yang bertugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan bidang pengadaan barang dan jasa. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa tidak terpaku pada salah satu ataupun beberapa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib/Pilihan saja, namun sebagai pendukung semua Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan. Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun anggaran 2021 melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja melalui 1 (satu) program strategis dengan 4 (empat) indikator, ada dua indikator yang targetnya tidak tercapai yaitu target indikator Persentase Penggunaan SPSE dan Persentase UKPBJ di Kalimantan Barat yang memenuhi level kematangan minimal 3 (Pro Aktif), dua indikator lainnya melampaui target.

**Tabel 2.107**

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2021	Capaian 2021	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Capaian Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	75%	84,82%	113,1%
		Persentase Capaian Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6%	10,53%	175,5%
		Persentase penggunaan SPSE	75%	34,08%	45,44%
		Persentase UKPBJ di Kalimantan Barat yang memenuhi level kematangan minimal 3 (Pro Aktif)	20%	13,33	66,65%

## 42. Pengawasan

Urusan Pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 dilaksanakan melalui 5 program dengan jumlah indikator program sebanyak 10 indikator. Secara umum dari 10

indikator tersebut, sebanyak 8 indikator dapat mencapai target (realisasi 100%) dan 2 indikator tidak tercapai target yaitu Program Penegakan Integritas, dengan indicator jumlah kegiatan pencegahan anti korupsi yang dilaksanakan dari target 5 kegiatan, hanya terlaksana 3 kegiatan (60%). Demikian juga dengan Program Peningkatan Kapasitas APIP, dari target sebesar 19,7% hanya tercapai 15% (76,14%). Indikator, target, capaian dan realisasi program Urusan Pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.108**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Penegakan Integritas	Jumlah Kegiatan Pencegahan Anti Korupsi Yang Dilaksanakan	5	3	60 %
2.	Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Persentase Peningkatan Kapabilitas Apip	19,7	15	76,14 %
3.	Program Peningkatan Kinerja Rutin Pengawasan	Presentase Tingkat Kesesuaian Dokumen Laporan Kinerja Dengan Ketentuan, Standar, Rencana Atau Norma Yang Ditetapkan (%)	100	100	100 %
		Presentase Kontribusi Perbaikan Terhadap Sasaran Pemeriksaan Kinerja (%)	100	100	100 %
		Presentase Peningkatan Maturitas Spip (%)	7,6	7,6	100 %
		Persentase Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan Dan Anggaran Dengan Ketentuan, Standar, Rencana Atau Norma Yang Ditetapkan	100	100	100 %
4.	Program Pengawasan Reformasi Birokrasi	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	7,05	7,05	100 %
5.	Program Pengawasan Prioritas Nasional	Persentase Tingkat Kesesuaian Kegiatan PPRG Dengan Ketentuan, Standar, Rencana Atau Norma Yang Ditetapkan (%)	100	100	100 %
		Presentase Tingkat Kesesuaian Kegiatan Dana Bos Dengan Ketentuan, Standar, Rencana Atau Norma Yang Ditetapkan (%)	100	100	100 %
		Persentase Tingkat Kesesuaian Kegiatan Dana Desa Dengan Ketentuan, Standar, Rencana Atau Norma Yang Ditetapkan	100	100	100 %

#### 43. Sekretariat DPRD

Sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, Sekretariat DPRD melaksanakan program sebanyak 2 program dengan 2 indikator keberhasilan. Namun dari 2 indikator kinerja tersebut tidak dapat mencapai target yang ditetapkan disebabkan refocusing anggaran sehingga kegiatan

pendukung tidak seluruhnya dapat dilaksanakan. Indikator, target, capaian dan realisasi program Urusan Kesekretariatan DPRD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.109**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kalimantan Barat Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
1.	Program Peningkatan Pelayanan Kelembagaan DPRD	Persentase Penyelenggaraan Layanan Sekretariat DPRD	100	71,40	71,40 %
2.	Program Peningkatan Kapabilitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Rancangan PERDA (RAPERDA) yang ditetapkan oleh DPRD dan Kepala Daerah	16	6	37,50 %

## BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat

Kebijakan ekonomi daerah Kalimantan Barat merujuk pada Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat (Perda nomor 1 Tahun 2021) melalui program prioritas untuk membangun daerah. Tahun 2023 adalah Tahap Pemanjangan yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia, produktivitas masyarakat dan daya saing daerah. Tahap ini sebagai upaya mempertajam arah pembangunan khususnya arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam ketercapaian visi dan misi pembangunan Kalimantan Barat. Tahap pemanjangan ini tidak terlepas dari proses identifikasi dan inventarisasi berbagai masalah-masalah pembangunan yang dihadapi pada tahap-tahap sebelumnya sehingga mampu mendeteksi secara dini adanya persoalan disekitarnya serta dapat merespon dengan cepat dan efektif. Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat dan terutama meningkatnya kualitas hidup manusia, produktivitas masyarakat dan daya saing daerah dapat dipercepat. Tentunya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pun perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan.

Dampak pandemi Covid-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2023, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara preventif maupun kuratif termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan. Pandemi Covid-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan. Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2023, tidak terlepas dari hasil pencapaian pembangunan ekonomi tahun 2021 yang menjadi momentum pertumbuhan ekonomi, proyeksi tahun 2022 dan prospek serta tantangan perekonomian tahun 2023.

#### 3.1.1. Perkembangan Ekonomi Global

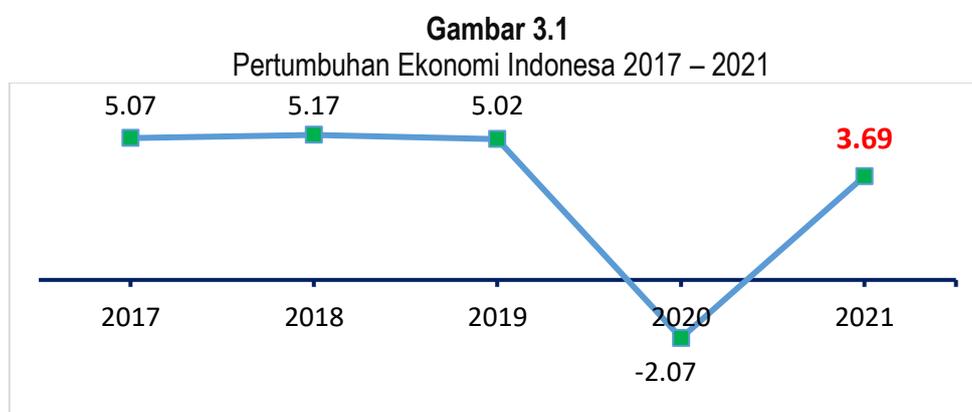
Ekonomi global pada tahun 2022 diperkirakan akan kembali pulih, namun akan lebih lambat dari yang diperkirakan. Dalam *Global Economic Prospects* yang dirilis Bank Dunia diperkirakan melambat menjadi 4,1 persen pada tahun 2022 dari level 5,5 persen pada 2021. Pada tahun 2023, Bank Dunia kembali memangkas prospek pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,2 persen karena dukungan fiskal dan moneter di seluruh dunia mulai dicabut. Pandemi kemungkinan akan memperparah perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa dekade ke depan yang sebelumnya telah diperkirakan, Pesatnya penyebaran Covid-19 varian Omicron menunjukkan bahwa pandemi kemungkinan akan terus mengganggu aktivitas ekonomi dalam waktu dekat. Selain itu, perlambatan yang signifikan terjadi di negara-negara ekonomi utama, termasuk Amerika Serikat dan China, akan membebani permintaan eksternal di negara-negara berkembang.

Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh Bank Dunia di 2022-2023 lebih mengarah pada dampak dari konvergensi pertumbuhan ekonomi menuju level pra pandemi. Bila dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya, sebagian besar pertumbuhan ekonomi negara maju direvisi melemah atau mengarah ke bawah oleh Bank Dunia. Revisi ke bawah oleh Bank Dunia didorong oleh inflasi yang naik cukup cepat di sebagian besar negara maju akibat harga komoditas yang diperkirakan berdampak pada laju pemulihan ekonomi mereka.

Secara umum dari berbagai sumber analisis, pelambatan pertumbuhan ekonomi global itu disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor pertama akibat base level produk domestik bruto (PDB) global sudah tinggi di 2021 sehingga pertumbuhan pada 2022 dan 2023 juga menjadi rendah. Faktor kedua, risiko kenaikan suku bunga global karena tapering off The Fed (bank sentral Amerika Serikat). Ketiga, adanya kemungkinan masih terjadi kenaikan harga komoditas dan inflasi dunia pada tahun 2022 dan risiko covid-19 khususnya muncul varian baru.

### 3.1.2. Perkembangan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2021 sudah kembali ke zona positif, setelah pada tahun 2020 mencatat pertumbuhan negatif 2,07% yoy. Tahun 2021 mulai terjadi pemulihan ekonomi dan hingga kuartal IV pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 sudah mencapai 3,69 persen (c to c).. Pada Triwulan-IV 2021, angka ekonomi mencetak nilai pertumbuhan yang cukup tinggi yakni sebesar 5,02% (y.o.y) dibandingkan dengan tren pelemahan pertumbuhan yang terjadi pada triwulan sebelumnya yakni sebesar 3,51% (y.o.y). Pertumbuhan pada Triwulan-IV 2021 kemudian menghasilkan pertumbuhan keseluruhan PDB Indonesia di tahun 2021 menjadi 3,69% (y.o.y) atau lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan negatif pada tahun lalu sebesar -2,07% (y.o.y). Dengan kata lain, angka pertumbuhan pada Triwulan-IV berada pada jangkauan target pertumbuhan pemerintah yakni di antara 3,50% (y.o.y) hingga 4,00% (y.o.y). Melihat ke sisi sektoral, hampir semua sektor mencatatkan pertumbuhan positif yang didukung oleh relaksasi pembatasan setelah selesainya gelombang kedua pandemi.



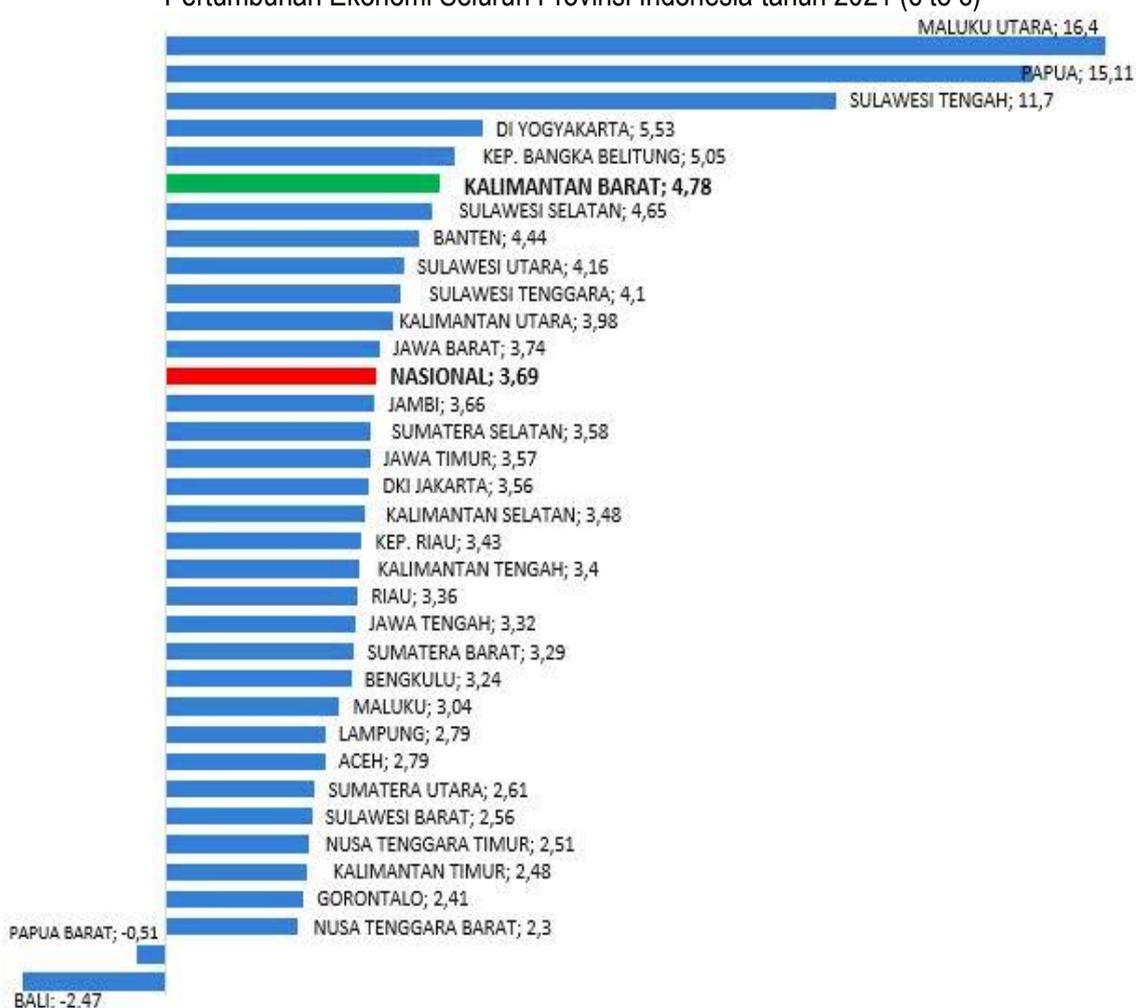
Sumber; BPS Pusat, 2021 (diolah).

Dari semua sektor, sektor transportasi dan perdagangan serta akomodasi serta aktivitas makanan dan minuman merupakan sektor yang mencatatkan perubahan pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini terkait dengan aktivitas bisnis dan produksi yang kembali berjalan seiring dengan pelonggaran PPKM yang kemudian terefleksi dari pertumbuhan PDB untuk masing-masing sektor tersebut. Melihat pada komponen konsumsi rumah tangga, pada Triwulan-IV 2021 tercatat adanya peningkatan menjadi 3,55% (y.o.y) tingkat pertumbuhan dibandingkan dengan 1,02% (y.o.y) pada kuartal sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi hampir seluruh Provinsi secara kumulatif (c to c) sudah kembali ke pertumbuhan normal, hanya dua provinsi yang masih mengalami kontraksi yaitu Bali (2,47%) dan Papua Barat (-0,51%).. Sementara itu Kalimantan Barat yang tumbuh 4,78% menduduki peringkat ke enam dari 33 provinsi dan diatas rata-rata nasional (3,69%).

**Gambar 3.2**

Pertumbuhan Ekonomi Seluruh Provinsi Indonesia tahun 2021 (c to c)



Sumber; BPS Pusat, 2021 (diolah).

### 3.1.3. Perkembangan Ekonomi Kalimantan Barat

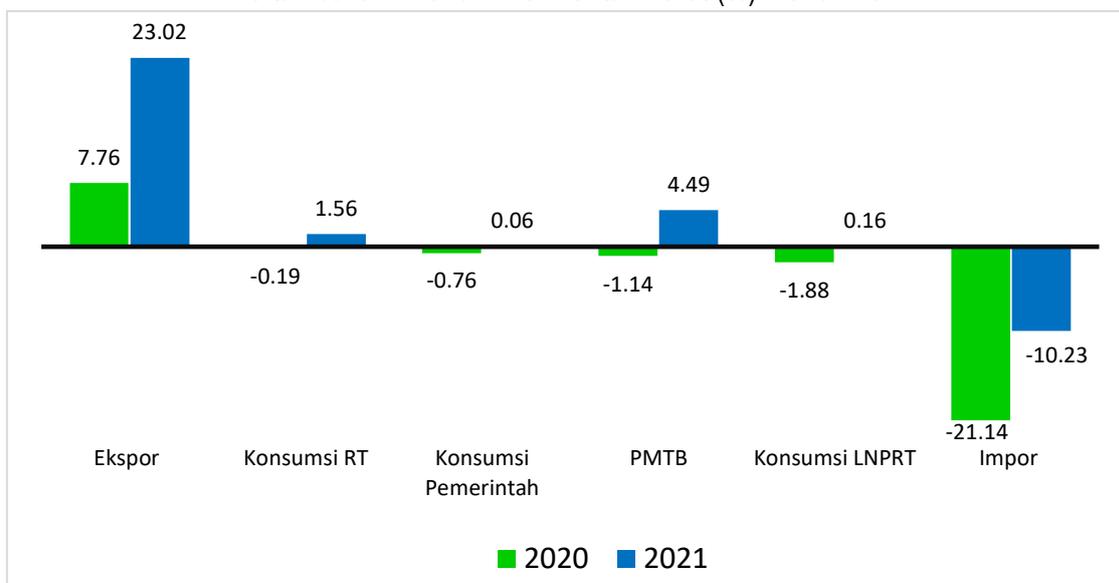
#### A. Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi Kalbar hingga pada kuartal IV tahun 2021 mencapai 4,78% (c to c) sedangkan secara nasional tumbuh 3,69% yang artinya capaian pertumbuhan ekonomi masih lebih baik secara rata-rata seluruh provinsi di Indonesia. Ini mencerminkan bahwa pemulihan kinerja ekonomi Kalimantan Barat sudah berjalan baik dan menunjukkan dampak yang cukup signifikan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dari triwulan I hingga triwulan IV-2021 mencapai Rp 231,3 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 141,2 triliun.

Pada sisi Pengeluaran PDRB, tahun 2020 hanya Ekspor saja yang tumbuh, pada tahun 2021 sudah terdapat 5 komponen yang tumbuh dan hanya Impor yang tetap mengalami kontraksi, Pertumbuhan tertinggi di tahun 2021 terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 23,02 persen; diikuti Komponen PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) sebesar 4,49 persen, Komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar 1,56 persen, Komponen LNPRT (Lembaga Non Profit Rumah Tangga) sebesar 3,72 persen, dan Komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 3,18

persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa terkontraksi cukup dalam sebesar 10,23 persen.

**Gambar 3.3**  
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat (%) Tahun 2021

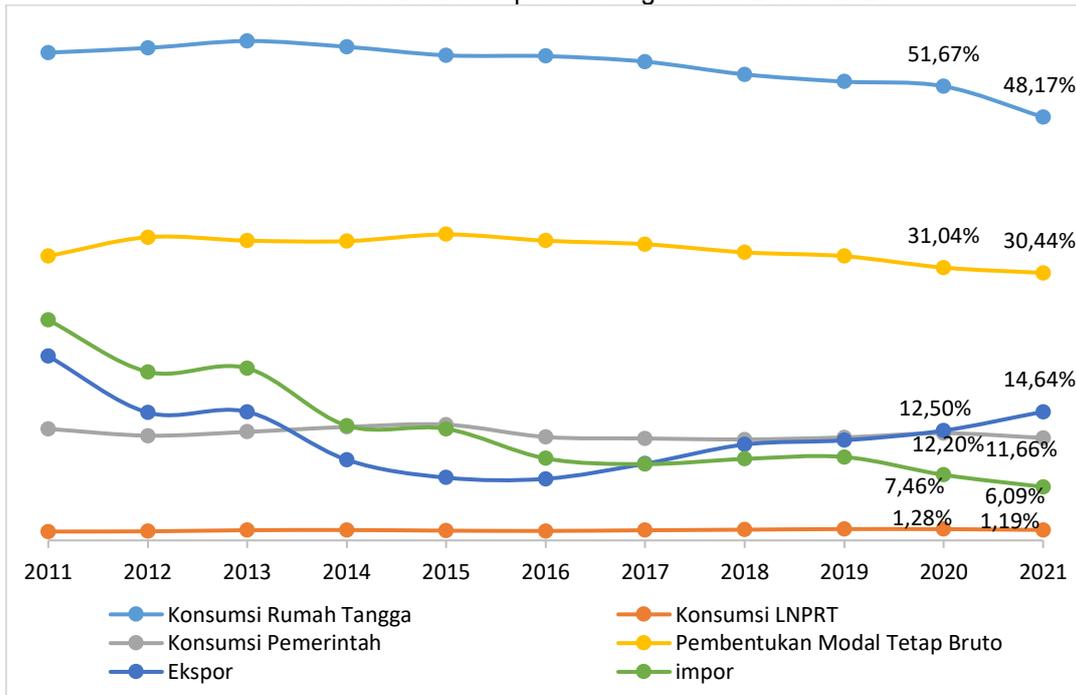


Sumber: BPS Kalbar

Pertumbuhan ekspor didorong secara signifikan dari ekspor Golongan Barang Lemak dan Minyak Hewan/Nabati (H515) yang dalam hal ini adalah Crued Palm Oil (CPO) dan Golongan Barang Biji, Kerak dan Abu Logam (HS26) yang didalamnya terdapat bauksit/alumina dengan negara tujuan China dan India melalui pelabuhan Kijing, sedangkan menurunnya impor lebih pada Bahan Bakar Mineral, Mesin/Peralatan Listrik, serta Mesin-mesin/Pesawat Mekanik yang dipasok dari negara Tiongkok, Malaysia, dan Singapura. Pada komponen LNPRT (Lembaga Non Profit yang menangani Rumah Tangga), kegiatan-kegiatan lembaga organisasi kemasyarakatan yang melibatkan banyak orang sudah mulai aktif kembali sehingga ikut menaikkan konsumsinya. PMTB yang tumbuh terkait peningkatan penjualan semen, realisasi belanja modal pemerintah dan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang meningkat dalam tahun 2021 ini dan juga pengerjaan konstruksi pelabuhan kijing menambah realisasi angka investasi di Kalbar. Upaya pemulihan ekonomi dari berbagai program pemerintah baik melalui APBN dan APBD secara umum lebih besar daripada tahun 2020 sehingga mampu menumbuhkan komponen Pengeluaran Pemerintah. Konsumsi Rumah Tangga telah tumbuh pula meskipun belum signifikan tetapi sudah lebih baik dari tahun lalu.

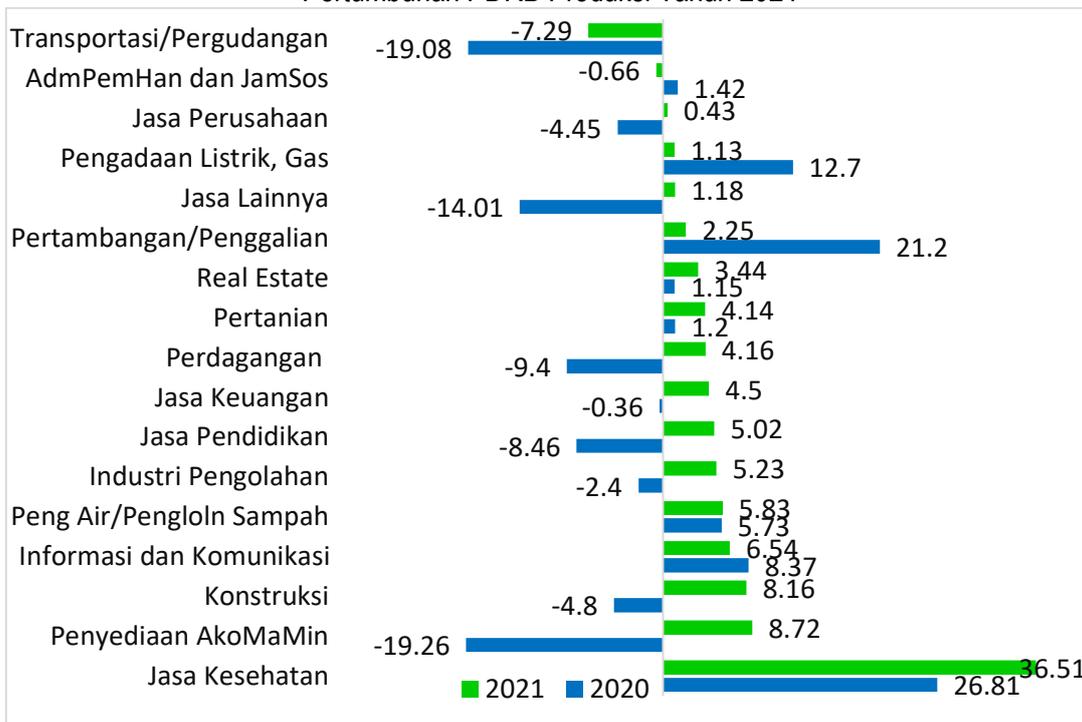
Struktur PDRB Kalimantan Barat menurut Pengeluaran atas dasar harga berlaku 2021 sedikit mengalami perubahan yaitu pada komponen ekspor yang tumbuh hingga dua digit mengakibatkan kontribusinya menjadi naik dari 12,50% pada tahun 2020 menjadi 14,46% di tahun 2021. Sementara itu, komponen konsumsi rumah tangga mengalami penurunan kontribusinya dari 51,67% pada tahun 2020 menjadi 48,17% di tahun 2021. Ini tentunya mengindikasikan menurunnya daya beli masyarakat akibat masih berlanjutnya efek domino dampak covid 19 terhadap perekonomian di Kalimantan Barat.

**Gambar 3.4**  
Series Struktur PDRB Komponen Pengeluaran 2011 - 2021



Pada pertumbuhan sisi Produksi, tahun 2020 terdapat 9 sektor yang mengalami kontraksi, pada tahun 2021 hampir semua sektor telah tumbuh kembali dan hanya sektor Transportasi dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial yang masih mengalami kontraksi.

**Gambar 3.5**  
Pertumbuhan PDRB Produksi Tahun 2021



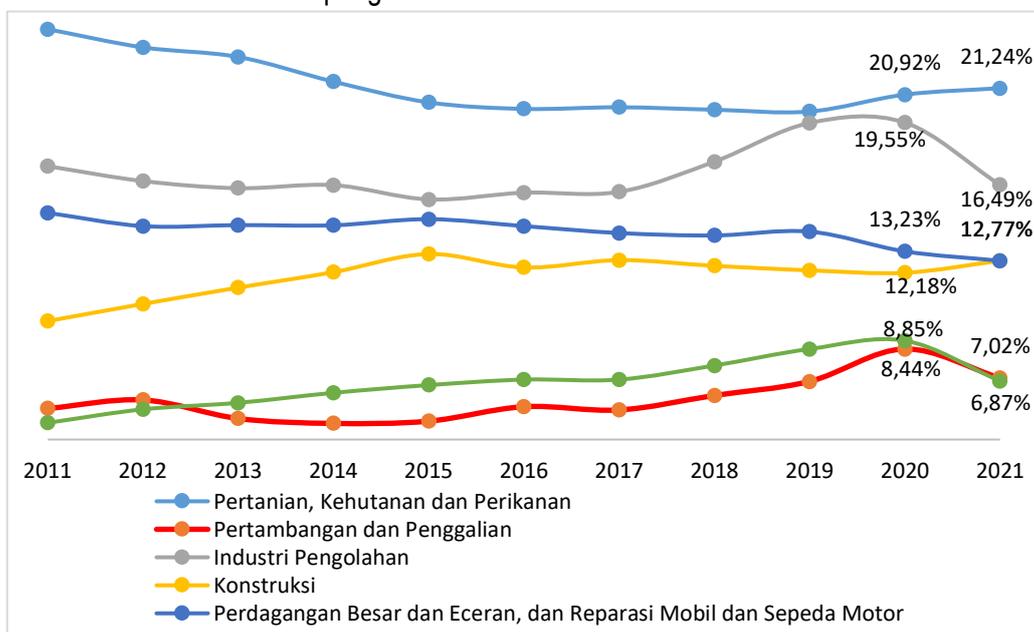
Sumber: BPS Kalbar 2021 (data diolah Tim KEMD Provinsi Kalbar)

Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh pesat berkenaan dengan besarnya keperluan masyarakat berobat baik di klinik maupun Rumah Sakit baik itu dikarenakan covid-19 maupun penyakit lain, disamping ditutupnya PLBN Entikong dan PLBN Aruk akibat lock down negara Malaysia sehingga pasien yang dahulunya rutin berobat ke RS Timberland, Normah, KPJ dan sebagainya di Khucing-Sarawak menjadi beralih berobat ke Rumah Sakit dalam daerah Pontianak saja. Untuk sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan cenderung mengalami perlambatan, pengaruh cuaca dan iklim pada tanaman pangan dan Hortikultura menyebabkan turunnya produksi, sedangkan meningkatnya harga komoditas hasil pengolahan Perkebunan disinyalir meningkatkan produksi yang menurut data publikasi Dirjen Perkebunan menunjukkan peningkatan data produksi kelapa sawit dan karet di Kal-Bar. Produksi Peternakan relatif stabil karena ,produksi kayu turun karena permintaan industri yang relatif turun, dan pemasukan ikan di Tempat Pendaratan Ikan meningkat  $\pm$  43%, dan perikanan budidaya masih mengalami stagnan dari data UPT Pelabuhan Perikanan Kal-Bar.

Pada sektor Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman yang pada tahun 2020 berkontraksi cukup dalam, di tahun 2021 sudah tumbuh kembali karena sudah longgarnya pembatasan jam beroperasi restoran, rumah makan dan warung kopi, dan juga meningkatnya hunian kamar hotel. Sedangkan untuk sektor Transportasi yang masih berkontraksi lebih diakibatkan berkurangnya jam terbang maskapai penerbangan dan menurunnya mobilitas transportasi lainnya.

Struktur perekonomian Kalimantan Barat menurut lapangan usaha dalam 10 tahun terakhir masih didominasi oleh tiga sektor utama yaitu sector Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 21,24 persen, sector Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 16,49 persen, sector Perdagangan masing-masing sama kontribusinya yakni 12,77 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, sector pertanian dan sector konstruksi mengalami peningkatan kontribusi dalam PDRB, sedangkan sector industry dan sector perdagangan mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB.

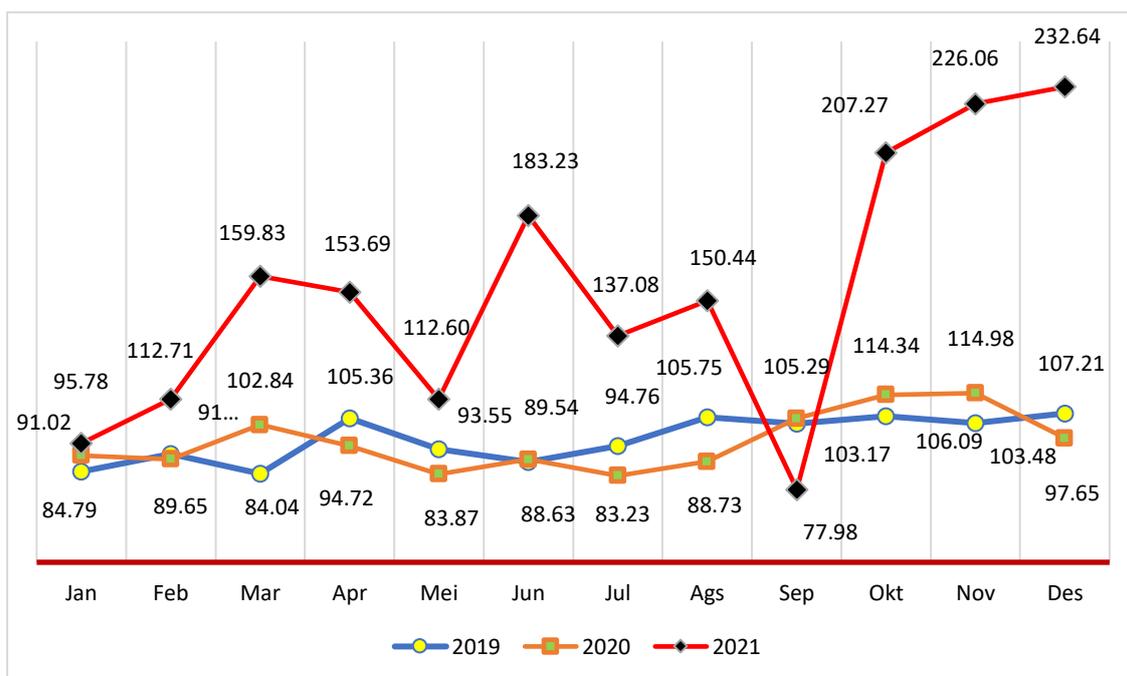
**Gambar 3.6**  
Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB tahun 2011 - 2021



## B. Kinerja Ekspor dan Impor

Nilai Ekspor Kalimantan Barat pada Tahun 2021 mencapai US\$ 1.851,53 Juta naik 60,19 Persen (Y-on-Y) dibanding Tahun 2020 dengan nilai US\$ 1.155,83 Juta. Ekspor Kalimantan Barat Tahun 2021 masih didominasi 3 (tiga) golongan barang yaitu Lemak & Minyak Hewan / Nabati (HS15) dengan nilai US\$ 457,01 Juta; Bijih, Kerak dan Abu Logam (HS26) dengan nilai US\$ 452,33 Juta; dan Bahan Kimia Anorganik (HS28) dengan nilai US\$ 243,36 Juta. Adapun 3 (tiga) negara tujuan Ekspor Kalimantan Barat pada Tahun 2021 adalah yang terbesar Tiongkok dengan nilai US\$ 678,05 Juta, kedua India dengan nilai US\$ 352,94 Juta dan ketiga Malaysia dengan nilai US\$ 294,39 Juta.

**Gambar 3.7**  
Ekspor Kalimantan Barat (juta US\$)



Sumber : BPS Prov Kalbar 2022

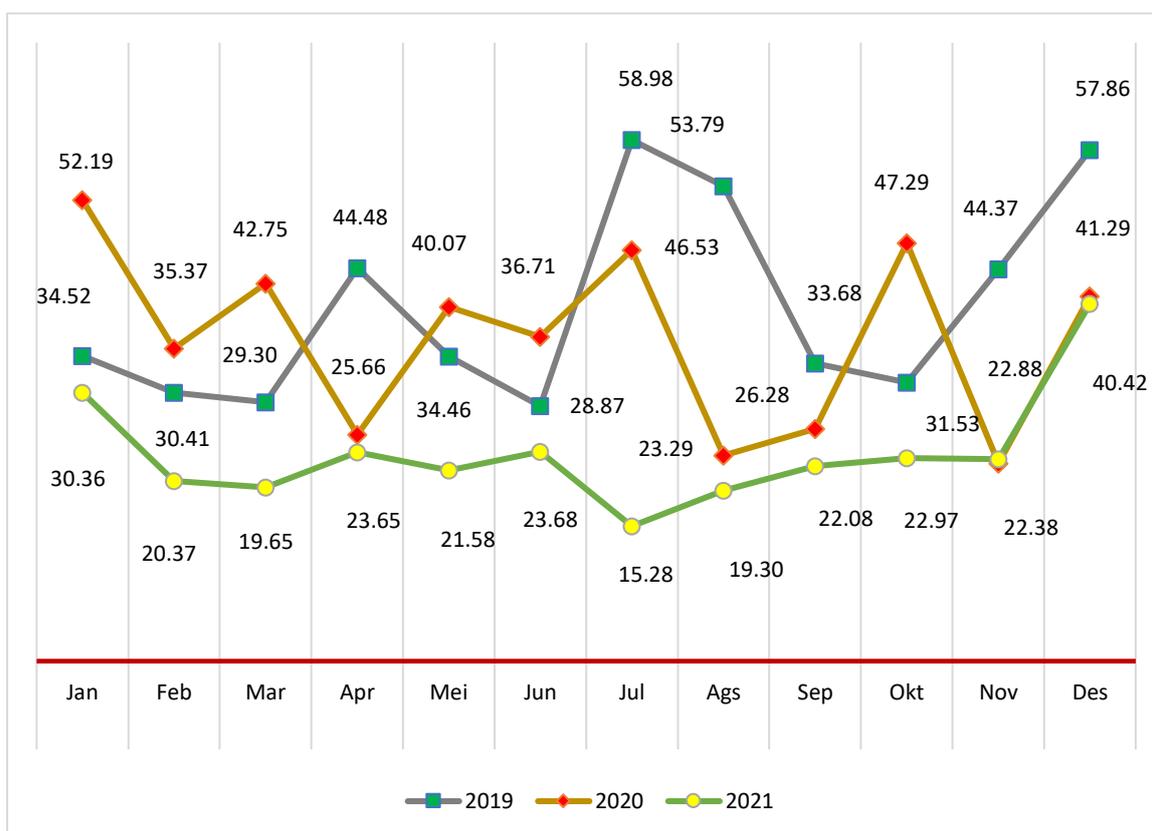
Struktur Ekspor Kalimantan Barat Tahun 2021 menurut Sektor Lapangan Usaha adalah Sektor Industri Pengolahan menyumbang 67,55 persen dari total Ekspor senilai US\$ 1.250,69 Juta, Sektor Pertambangan 24,43 persen senilai US\$ 452,33 Juta dan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 8,02 persen dengan nilai US\$ 148.51 Juta.

Kinerja Ekspor Kalimantan Barat Tahun 2021 merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan capaian 5 (lima) Tahun terakhir meskipun pada Tahun 2020 nilai Ekspor Kalimantan Barat berkontraksi sebesar -1,09 persen (Y-onY) yang disebabkan oleh pandemi Covid -19 yang memberikan dampak terhadap perdagangan internasional dimana komoditas unggulan Ekpor Kalimantan Barat seperti *Crude Palm Oil*, *Crumb Rubber* dan *Washed Bauxite* sangat bergantung dengan kinerja perdagangan internasional. Peningkatan kinerja Ekspor Kalimantan Barat Tahun 2021 juga dipengaruhi oleh harga komoditas unggulan Ekpor Kalimantan Barat terutama *Crude*

*Palm Oil* yang selama Tahun 2021 mengalami kenaikan. Hal tersebut juga dikarenakan tingginya harga minyak goreng yang menggunakan bahan baku dari bunga matahari dan kanola sehingga minyak goreng yang menggunakan bahan baku sawit menjadi alternatif utama.

Sedangkan Nilai Impor Kalimantan Barat Tahun 2021 senilai US\$ 282,22 Juta mengalami kontraksi -35,83 persen (Y-on-Y) dibandingkan Tahun 2020 dengan nilai US\$ 439,81 Juta. Impor Kalimantan Barat Tahun 2021 masih didominasi 3 (tiga) golongan barang yaitu Bahan Bakar Mineral (HS27) dengan nilai US\$ 142,04 Juta; Mesin-mesin / Pesawat Mekanik (HS84) dengan nilai US\$ 35,02 Juta; dan Mesin/Peralatan Listrik (HS85) dengan nilai US\$ 18,20 Juta. Adapun 3 (tiga) negara asal Impor Kalimantan Barat pada Tahun 2021 adalah yang terbesar Malaysia dengan nilai US\$ 122,08 Juta, kedua Tiongkok dengan nilai US\$ 54,84 Juta dan ketiga Singapura dengan nilai US\$ 47,58 Juta.

**Gambar 3.8**  
Impor Kalimantan Barat (US\$)



Sumber : BPS Prov Kalbar 2022

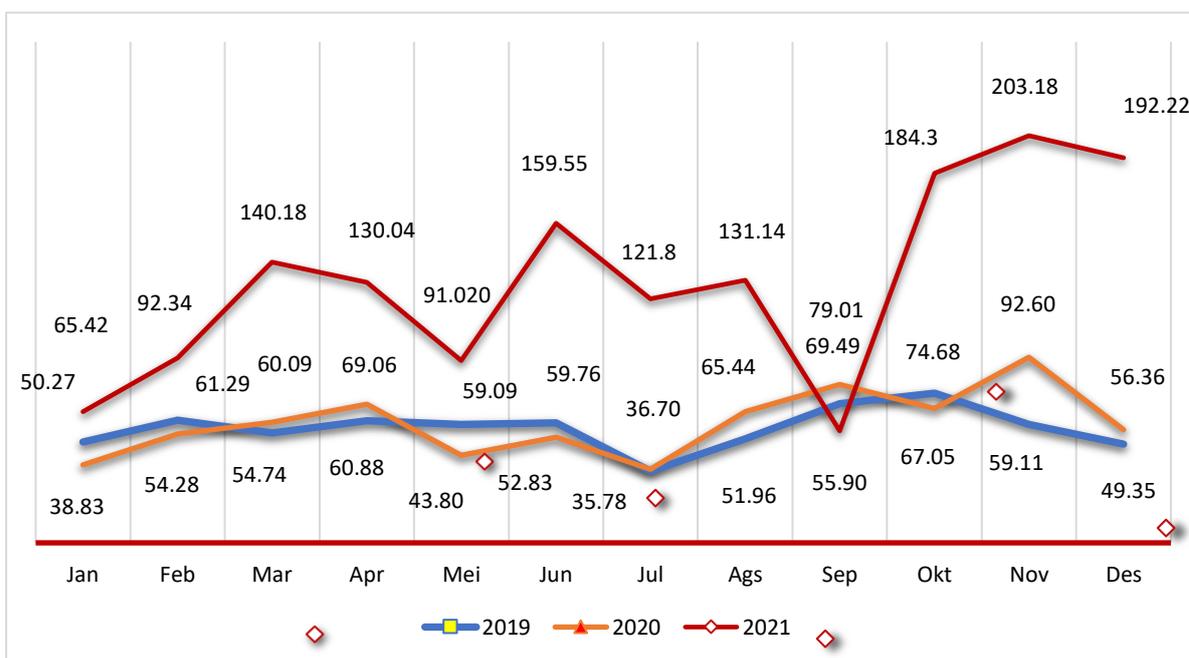
Kinerja Impor Kalimantan Barat Tahun 2021 merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan capaian 5 (lima) Tahun terakhir dan terkontraksi cukup signifikan jika dibandingkan Tahun 2020. Penurunan kinerja Impor Kalimantan Barat Tahun 2021 dipengaruhi/didominasi pembelian listrik oleh PT. PLN (Persero) dari Malaysia melalui *Sarawak Electricity Supply Corporation*

(SESCO) yang turun pada Tahun 2021 dengan nilai US\$ 77,55 Juta. Pembelian Listrik dari Malaysia sangat tergantung dengan peningkatan kapasitas penyediaan listrik oleh PT. PLN (Persero) untuk Kalimantan Barat.

Impor Listrik dari Malaysia akan tetap dominan di tahun depan dan harus dimanfaatkan secara optimal terutama untuk industri dan IKM yang ada di wilayah perbatasan. Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi investasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing menjadi melambat yang harusnya dimanfaatkan industri pengolahan di Kalimantan Barat sehingga mempengaruhi kinerja Impor Kalimantan Barat.

Neraca Perdagangan Kalimantan Barat Tahun 2021 mengalami Surplus sebesar US\$ 1.569,31 Juta. Hal ini memperkuat trend positif Kinerja Perdagangan Kalimantan Barat yang setiap tahunnya selalu Surplus.

**Gambar 3.9**  
Neraca Perdagangan Kalimantan Barat (Juta US\$)



Sumber : BPS Prov Kalbar 2022

### C. Investasi

Investasi merupakan salah satu indikator yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi akan berdampak positif pada proses produksi dalam bisnis yang semakin giat, kemudian juga akan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Investasi berperan dalam pemulihan ekonomi dan memiliki korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang meningkat akan mendukung upaya pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Masih berlanjutnya dampak pandemic covid menjadi factor penyebab tidak tercapainya target ditahun 2021, karena investasi dunia yang memang cenderung turun. Disamping itu, proyek-proyek dari PSN (Proyek Strategis Nasional) tahun 2021 juga tidak ada yang dilaksanakan di Kalimantan Barat, sedangkan sisa dari pekerjaan proyek PSN tahun 2020 yang masih berlanjut ditahun 2021 terhitung menyumbangkan nilai investasi hingga 5 triliun yaitu dari proyek strategi nasional sektor pertambangan industri logam.

Secara kumulatif realisasi investasi Periode Januari-Desember Tahun 2021 tercatat sebesar Rp. 17,54 triliun, mengalami penurunan tajam sebesar -13,13% apabila dibandingkan dengan Periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp. 20,19 Triliun.

**Tabel 3.1**  
Realisasi PMDN dan PMA di Kalimantan Barat Tahun 2021

Bidang Usaha/Sektor	Penanaman Modal Asing (PMA)			Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)		
	Nilai realisasi	Share (%)	Penyerapan Tenaga Kerja	Nilai realisasi	Share (%)	Penyerapan Tenaga Kerja
1	2	3	4	5	6	7
Tan.Pangan, Bun nak	243.148,40	52,5%	10.513	2.157.823,60	20,0%	4.863
Kehutanan	4.984,80	1,1%	40	9.540,00	0,1%	2
Perikanan	-	0,0%	-	2.309,50	0,0%	7
Pertambangan	968,80	0,2%	1	1.036.880,40	9,6%	644
Industri Karet Dan Plastik	659,30	0,1%	-	699,30	0,0%	26
Industri Kayu	13,40	0,0%	-	49.202,20	0,5%	19
Industri Kertas	-	0,0%	-	212,50	0,0%	-
Industri Kimia Dan Farmasi	302,40	0,1%	9	-	0,0%	28
Industri Mineral Non Logam	186,20	0,0%	-	20.409,00	0,2%	56
Industri Logam Dasar	74.567,60	16,1%	16	5.009.165,70	46,5%	45
Industri Makanan	75.697,40	16,3%	2.955	1.154.766,40	10,7%	2.488
Industri Tekstil	-	0,0%	-	1.500,00	0,0%	12
Industri Lainnya	-	0,0%	-	33.277,80	0,3%	96
Hotel Dan Restoran	345,00	0,1%	5	121.396,60	1,1%	146
Konstruksi	-	0,0%	-	14.229,50	0,1%	127
Listrik, Gas Dan Air	37.920,10	8,2%	17	73.549,90	0,7%	96
Perdagangan Dan Reparasi	385,60	0,1%	28	226.531,20	2,1%	899
Perumahan, Kawasan Industri Dan Perkantoran	1.305,10	0,3%	6	364.936,40	3,4%	53
Transportasi, Gudang Dan Telekomunikasi	22.779,90	4,9%	-	460.453,90	4,3%	125
Jasa Lainnya	149,70	0,0%	-	36.509,10	0,3%	82
	<b>463.413,70</b>		<b>13.590</b>	<b>10.773.393,00</b>		<b>9.814</b>

Sumber: DPMPSTSP tahun 2022 (diolah)

Jika dilihat berdasarkan sektor usaha maka realisasi investasi PMDN yang dicapai pada tahun 2021 menunjukkan subsektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya adalah yang paling dominan, karena menyumbang 51,45% dari total PMDN, dan disusul sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan sebesar 22,16%. Sementara itu, realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha yang paling dominan adalah sektor Tanaman

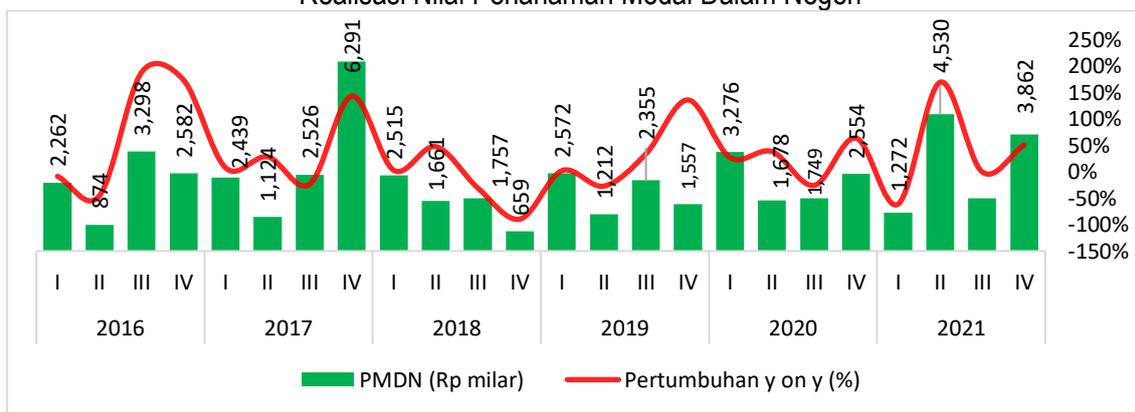
Pangan, Perkebunan, dan Peternakan sebesar 52,5%. Disusul sektor Industri makanan sebesar 16,3% dan sector Logam Dasar yaitu 16,1%.

Sumber dana investasi tahun 2021 yang bersumber dari investasi PMDN sebesar Rp 9.74 triliun yang bila dibanding dengan tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan sebesar 18,89%. Sedangkan penanaman modal asing sebesar USD.463 ribu mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya USD 759 ribu.

Realisasi PMA kedepannya diperkirakan dapat tumbuh kembali bila melihat kondisi ekonomi global yang cenderung membaik. Untuk Kalimantan Barat tentunya sektor perkebunan dan pertambangan masih menjadi primadona investasi asing. Keadaan realisasi PMDN diharapkan berlanjut dimasa mendatang, dan tidak terlepas adanya dukungan yang kuat Pemerintah yang akan melanjutkan reformasi di bidang ekonomi, pemanfaatan Online Single Submission (OSS) yang lebih baik, serta intensifikasi pengawalan investasi oleh berbagai instansi terkait baik di pusat dan daerah.

**Grafik 3.1**

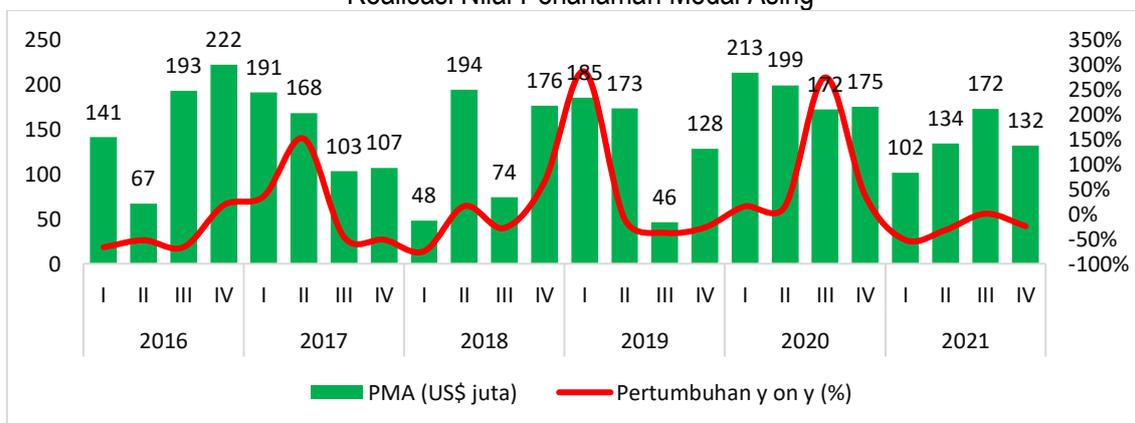
Realisasi Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri



Sumber: DPMPSTSP tahun 2022 (diolah)

**Grafik 3.2**

Realisasi Nilai Penanaman Modal Asing



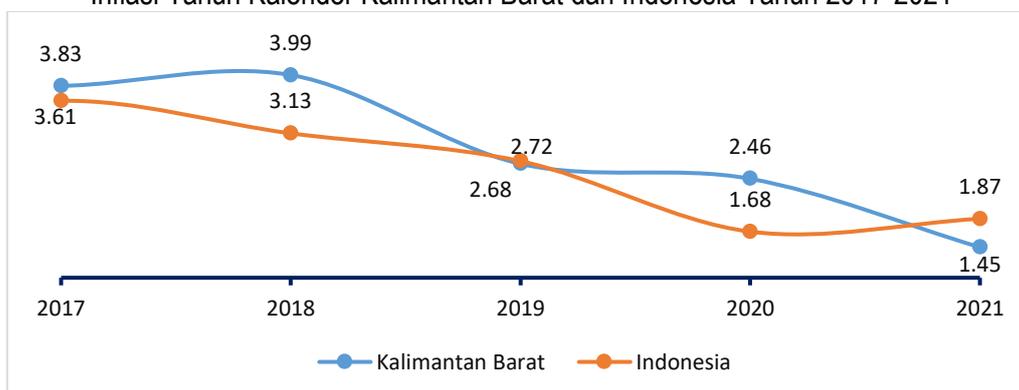
Sumber: DPMPSTSP tahun 2022 (diolah)

#### D. Inflasi

Tingkat inflasi kumulatif tahun 2021 sebesar 1,45 persen yang terjadi di tiga kota yang ada di Kalimantan Barat yaitu Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Kabupaten Sintang. Ini berarti masih dalam range asumsi makro ekonomi yang Kalimantan Barat ( $3\pm 1$  persen) dan dalam posisi

dibawah laju inflasi Nasional. Laju inflasi tahun 2021 ini lebih rendah dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yaitu 2,46 persen (tahun 2020) dan 2,68 persen (tahun 2019).

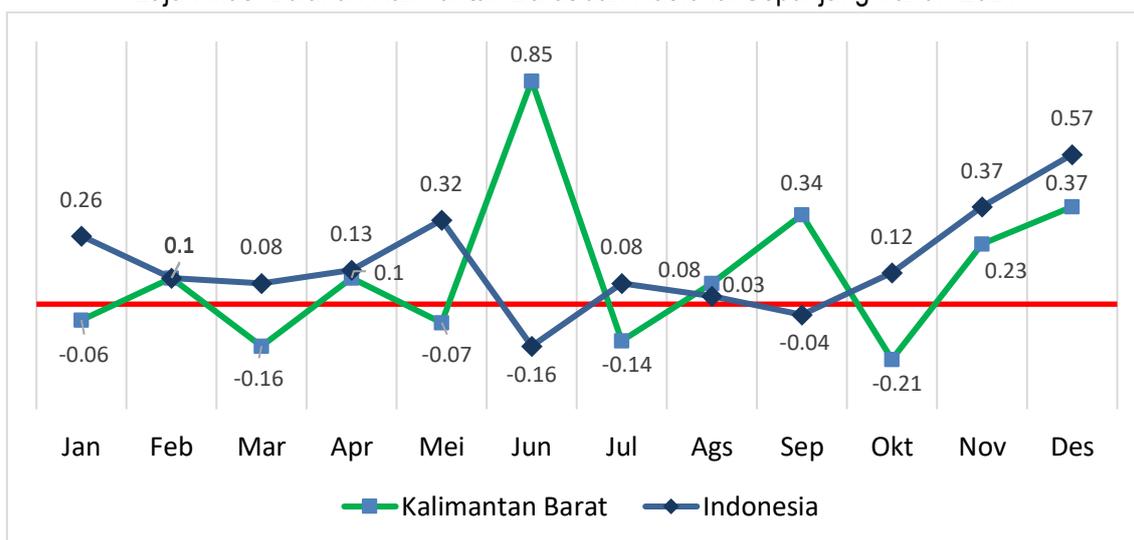
**Gambar 3.10**  
Inflasi Tahun Kalender Kalimantan Barat dan Indonesia Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kalbar 2021 (data diolah Tim KEMD Provinsi Kalbar)

Selama tahun 2021, tingkat Inflasi bulanan Kalimantan Barat terlihat fluktuatif begitu pula inflasi nasional menurun dibanding tahun sebelumnya. Pandemi Covid19 menekan inflasi hingga sampai mengakibatkan beberapa bulan terjadi deflasi yaitu pada bulan Maret deflasi 0,16 persen, bulan Juli deflasi 0,14 persen dan bulan Oktober deflasi sebesar 0,21 persen.

**Gambar 3.11**  
Laju Inflasi Bulanan Kalimantan Barat dan Nasional Sepanjang Tahun 2021



Sumber: BPS Kalbar 2022 (data diolah Tim KEMD Provinsi Kalbar)

Peningkatan tekanan inflasi di bulan Juni 2021 terutama disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok transportasi. Berdasarkan komoditasnya, kenaikan harga komoditas sawi hijau, daging ayam ras, bayam, dan kacang panjang, ditambah kenaikan harga mobil pada bulan September 2021 dan pada bulan Desember yang lebih dipicu oleh permintaan kelompok makanan disaat Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

Secara umum, inflasi di Kalimantan Barat sepanjang 2021 sangat terkendali. Inflasi yang terkendali tidak terlepas dari semua pihak terutama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sehingga hal tersebut sangat berdampak pada pemulihan ekonomi Kalimantan Barat.

### 3.1.4 Perkiraan Perekonomian Kalimantan Barat di tahun 2022 dan 2023

Asumsi ekonomi makro dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat ditentukan oleh asumsi makro Indonesia dan makro dunia. Ditambah juga asumsi lain yang dianggap berdampak langsung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dominan pada sektor lapangan usaha, dalam hal ini harga Crude Palm Oil (CPO) dan Tandan Buah Sawit (TBS) karena menyumbang rata-rata 40 persen dari total sektor Pertanian dalam PDRB Lapangan Usaha. Tingkat inflasi diasumsikan stabil pada rentang sasaran 3 plus minus 1 (3±1) persen.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi inflasi yang mencerminkan daya beli masyarakat sejalan dengan rendahnya konsumsi rumah tangga. Stabilitas makro ekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi covid-19.

Pergerakan nilai tukar rupiah mempengaruhi kinerja ekspor dan investasi serta inflasi daerah. Nilai tukar rupiah sampai dengan akhir tahun 2021, diperkirakan masih relatif stabil. Posisi nilai tukar sampai dengan akhir tahun 2021 berkisar Rp14.700,00 sampai dengan Rp14.900,00 per dolar AS. Jadi, stabilitas nilai tukar rupiah relatif terjaga yang ditunjukkan oleh volatilitasnya yang semakin menurun.

**Tabel 3.2**  
Asumsi Makro Ekonomi

<b>Asumsi</b>	Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)	5,0 - 5,5
	Inflasi (%)	3 ± 1
	Nilai Tukar (Rp/USD)	14.700-14.900
<b>Tambahan Lain</b>	Crude Palm Oil (CPO) (USD/Ton)	850-900
	Tandan Buah Sawit (TBS)(Rp/Kg)	2.500 - 3500

#### 3.1.4.1 Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi tahun 2022

Perkiraan kondisi ekonomi Kalimantan Barat tahun 2022 lebih baik dibanding 2021, dengan asumsi sudah dalam pemulihan dampak Covid 19 (tersedianya vaksin) dan menggeliatnya sektor produksi seiring mulai beroperasinya Pelabuhan Kijing. Konsumsi rumah tangga berkontribusi 53,05% pada total PDRB Kalbar dengan pertumbuhan sebesar 2,10-2,42% di tahun 2022. Artinya sebagai konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama dari sisi pengeluaran yang sangat besar pengaruhnya dalam perekonomian Kalbar dibanding komponen pengeluaran PDRB lainnya. Keadaan ini bisa sama atau diatas di tahun 2021 dengan pertimbangan inflasi tetap terkendali pada level rendah dan stabil yaitu 3 plus minus 1%, Inflasi juga diharapkan terjaga karena upaya koordinasi kebijakan yang kuat lewat TPID baik di tingkat pusat dan daerah.

Investasi menjadi prasyarat penting untuk mencapai percepatan pertumbuhan, mengingat kondisi pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 yang sudah mulai pulih (4,78%). Sehingga apabila ada tambahan investasi yang masuk ke Kalbar tahun 2022 secara langsung akan menambah nilai PDRB dan ekonomi bisa tumbuh kembali. Paling tidak ada 5 - 8 triliun investasi baru yang masuk ke Kalbar agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 5%. Dunia usaha mulai kembali

berproduksi pada skala normal; hal ini tentunya tidaklah mudah, namun secara lambat tapi pasti, sektor-sektor ekonomi yang terdampak covid-19 mulai bangkit lagi seiring terciptanya rasa aman dengan adanya vaksin dan juga sudah beradaptasi dengan kebiasaan baru.

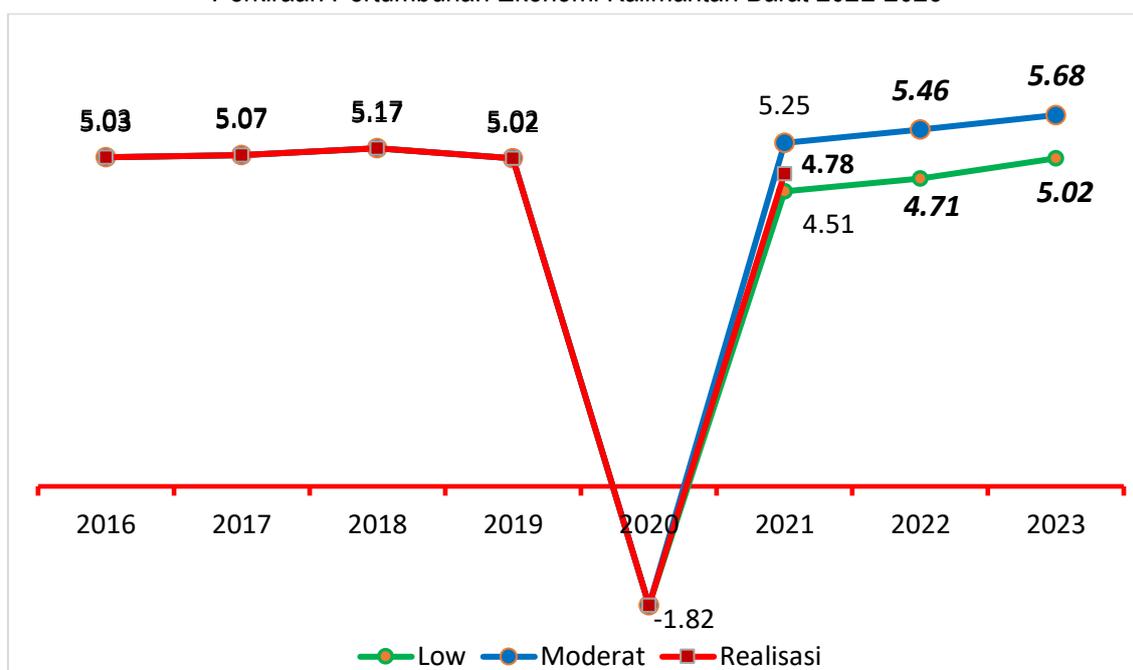
Dari sisi ekspor impor dengan memanfaatkan sebesar-besarnya pintu gerbang ekspor Kalbar yaitu beroperasinya Pelabuhan Kijing dan di 3 PLBN yang ada (Aruk, Entikong dan Badau), berpeluang memperbesar kapasitas berbagai produk ekspor ke pasar dunia seiring naiknya harga komoditas di pasar global.

### 3.1.4.2 Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi 2023

Hasil simulasi skenario pertumbuhan PDRB Kalbar akibat dampak Covid-19 dapat digambarkan pada grafik berikut ini.

**Gambar 3.12**

Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat 2022-2023



Sumber: BPS Kalbar 2021 dan RPJMD Perubahan Kalimantan Barat 2018-2023

Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat tahun 2022 dan 2023 telah diproyeksikan didalam Perubahan RPJMD 2018 – 2024 dengan target capaian 4,71 persen sampai dengan 5,68 persen, dengan inflasi terjaga dalam kisaran  $3 \pm 1$  persen. Dalam mencapai hal tersebut, tentu memerlukan integritas, inovasi, serta transformasi sektor - sektor ekonomi dan juga jaminan kenyamanan hingga kepastian bagi para investor.

**Tabel 3.3**

Realisasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat dari Sisi lapangan Usaha (Sektoral)

PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha	Realisasi (%)		Target RPJMD (%)	
	2019	2020	2022	2023
<b>Pertumbuhan PDRB</b>	<b>5,06</b>	<b>-1,82</b>	<b>4,74 - 5,46</b>	<b>5,02 - 5,68</b>
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,69	1,2	5,39 - 5,98	5,71 - 6,44
Pertambangan dan Penggalian	7,66	21,2	7,26 - 7,65	4,43 - 5,07

PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha	Realisasi (%)		Target RPJMD (%)	
	2019	2020	2022	2023
Industri Pengolahan/Manufacturing	2,59	-2,4	6,86 - 7,25	7,81 - 7,83
Pengadaan Listrik dan Gas	3,58	12,7	3,11 - 3,71	3,30 - 3,86
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,63	5,73	3,58 - 3,90	3,80 - 4,06
Konstruksi	1,94	-4,8	1,85 - 2,26	1,96 - 2,35
Perdagangan	4,59	-9,4	4,20 - 5,76	4,51 - 5,99
Transportasi dan Pergudangan	7,83	-19,08	2,60 - 3,56	2,75 - 3,71
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,09	-19,26	3,22 - 4,54	3,41 - 4,73
Informasi dan Komunikasi	6,48	8,37	7,80 - 8,37	8,26 - 8,71
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,15	-0,36	1,67 - 2,98	1,77 - 3,10
Real Estat	4,39	1,15	0,52 - 0,93	0,55 - 0,96
Jasa Perusahaan	4,06	-4,45	2,44 - 3,35	2,59 - 3,49
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,73	1,42	2,04 - 2,80	2,16 - 2,92
Jasa Pendidikan	3,41	-8,46	4,83 - 4,91	5,12 - 5,11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,73	26,81	8,39 - 8,92	8,88 - 9,28
Jasa lainnya	5,43	-14,01	4,98 - 5,16	5,27 - 5,37

Sumber: BPS Kalbar 2021 dan RPJMD Perubahan Kalimantan Barat 2018-2023

Struktur perekonomian Kalimantan Barat masih tergantung pada sektor primer, yang dalam hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan sektor pertambangan dan sektor pertanian di tahun 2020. Pada pertambangan seperti bouksit dan alumina, serta perkebunan sawit cukup mendominasi dalam devisa ekspor, membuat perekonomian Kalimantan Barat bergantung pada fluktuasi harga komoditas dan permintaan global.

Sedangkan pada sisi Pengeluaran, diperkirakan konsumsi rumah tangga akan turun seiring turunnya konsumsi LNPRT terkait kenaikan harga barang dan inflasi, demikian pula dengan ekspor dan impor barang dan jasa menurun pertumbuhannya. Sementara itu hanya dari konsumsi pemerintah yang diproyeksikan naik pertumbuhannya sehubungan dengan besarnya pembiayaan kesehatan dan kegiatan bantuan sosial dalam penanganan Covid 19 di Kalimantan Barat. Pembentukan Modal Tetap Bruto diperkirakan akan tumbuh positif 3,76 persen di tahun 2021 melalui peningkatan investasi pemerintah pusat dan daerah serta swasta melalui perbaikan iklim investasi yang berkelanjutan, adanya tingkat keyakinan yang tinggi pasca pemilu, pembangunan infrastruktur terus berlanjut dan multi dampak dengan adanya rencana pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan jalan lingkaran luar (ORR) dan kanal lingkaran luar (ORC), duplikasi jembatan Kapuas I, jembatan Sambas besar, pembangunan jalan tol ruas Supadio-Pontianak-Sungai Pinyuh-Mempawah-Singkawang dan pembangunan bandara Singkawang yang pada tahun 2019 progresnya sudah sampai tahap pembersihan lahan tahap kedua. Kinerja Ekspor diperkirakan akan tumbuh positif dengan telah beroperasinya Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah yang dibangun oleh PT. Pelindo II.

Pada sisi ekspor dan impor diprediksi mengalami perlambatan terutama ekspor CPO sawit ke negara-negara di Eropa yang saat ini pula melakukan lockdown atau mengurangi operasi pabrik industrinya, juga negara China yang banyak mengimpor bahan setengah jadi dari Kalimantan Barat.

**Tabel 3.6**

Realisasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat dari Sisi Pengeluaran

PDRB berdasarkan Pengeluaran	Realisasi (%)		Target RPJMD (%)	
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
<b>Pertumbuhan PDRB</b>	<b>-1,65</b>	<b>4,78</b>	<b>4,74 - 5,46</b>	<b>5,02 - 5,68</b>
Konsumsi Rumah Tangga	-0,19	1,56	2,10 - 2,42	2,22 - 2,51
Konsumsi LNPRT	-1,88	-0,16	-0,03 - 0,02	1,98 - 2,24
Konsumsi Pemerintah	-0,76	0,06	4,31 - 5,09	6,45 - 7,26
Pembentukan Modal Tetap bruto	-1,14	4,29	2,63 - 3,03	2,79 - 3,16
Ekspor Barang dan Jasa	7,76	23,02	5,39 - 6,47	5,71 - 9,58
Impor Barang dan Jasa	-21,14	-10,23	4,95 - 5,57	5,71 - 9,58

Sumber: BPS Kalbar 2021 dan RPJMD Perubahan Kalimantan Barat 2018-2023

Tercapai atau tidaknya target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tahun 2022 akan sangat ditentukan oleh beberapa hal, antara lain:

- Penanganan covid sudah ke arah lebih baik lagi, tingkat penyebaran covid relatif dapat dikendalikan dengan vaksinasi di semua Kabupaten/Kota serta tetap selalu menerapkan protokol kesehatan (3 M) dalam setiap aktivitas sehari-hari.
- Kondisi sosial, politik dan keamanan stabil, baik di level Nasional maupun di dalam provinsi Kalimantan Barat bisa terkendali karena juga merupakan kunci dari keberhasilan perekonomian.
- Stimulus pemulihan ekonomi berjalan sesuai yang direncanakan; dengan tetap mendukung dalam pengawasan, penyaluran dan sebagainya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan keberhasilan strategi berbagai program di sektor ekonomi dalam Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022.
- Dunia usaha mulai kembali memproduksi pada skala normal; hal ini tentunya tidaklah mudah, namun secara lambat tapi pasti, sektor-sektor ekonomi yang terdampak covid-19 mulai bangkit lagi seiring terciptanya rasa aman dengan adanya vaksin dan juga sudah beradaptasi dengan kebiasaan baru.

Sementara itu, dalam Rancangan RKP tahun 2023 (Target Pengembangan Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2022), Pemerintah Pusat menargetkan untuk pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat adalah 5,26–6,04, dengan pertimbangan potensi industrialisasi, pengembangan hilirisasi komoditas unggulan yang mendorong peningkatan nilai tambah bagi perekonomian, percepatan realisasi investasi, mendorong optimalisasi pengelolaan kawasan-kawasan strategis Kawasan Industri Ketapang, dan pengembangan Destinasi Pariwisata Sambas dan Singkawang, serta mengembangkan sentra produksi pangan (food estate) dengan didukung korporasi petani.

### 3.1.5 Sasaran Makro Ekonomi

Perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 diperkirakan terus memberikan dampak bagi pencapaian sasaran pembangunan. Harapan dari pertumbuhan ekonomi kedepannya membawa dampak baik pula terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, tingkat kesenjangan (Rasio Gini), dan Indeks Pembangunan Manusia (Tabel 3.7).

**Tabel 3.8**  
Target Indikator Makro Pembangunan

Indikator Makro Pembangunan	2022	2023
1	2	3
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,74 - 5,46	5,02 - 5,68
Indeks Pembangunan Manusia	70,29	71,25
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,53 - 4,29	5,42 - 3,98
Angka Kemiskinan (%)	7,31 - 7,23	7,08 - 7,00
Gini Rasio	0,323-0,321	0,321-0,318

Sumber: RPJMD Perubahan Kalimantan Barat 2018-2023

#### a. Indeks Pembangunan Manusia

Perlambatan pertumbuhan ekonomi berdampak pula pada IPM, terutama pada komponen pengeluaran per kapita yang merupakan indikator standar hidup layak. Penurunan pengeluaran per kapita di tahun 2021 disebabkan oleh merosotnya konsumsi rumah tangga akibat menurunnya pendapatan dan turunnya daya beli masyarakat. Pembatasan aktivitas penduduk selama pandemi menyebabkan banyaknya pekerja yang dirumahkan atau diberhentikan, serta terhentinya aktivitas ekonomi pekerja informal.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalbar termasuk kategori “sedang” terjadi peningkatan pertumbuhan 0,35 persen dari 67,66 poin tahun 2020 menjadi 67,90 pada tahun 2021, berada di bawah IPM Nasional 72,29. Meskipun terjadi kenaikan namun capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) namun hal itu diluar ekspektasi karena target tahun 2021 adalah 69,38 poin mengingat dampak melemahnya perekonomian daerah. Kebijakan di bidang kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas tahun 2022 dan 2023 dalam rangka pencapaian target nilai IPM yaitu 70,29 dan 71,25 yang didukung pula oleh kebijakan lainnya seperti pengendalian inflasi, mendorong daya beli masyarakat dan meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP).

#### b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengakibatkan tingginya pekerja yang menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Tingginya pekerja ter-PHK, masuknya angkatan kerja baru ke pasar kerja, dan keterbatasan ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja hingga menambah pengangguran sebanyak 151 561 jiwa. Hal tersebut terus berdampak ditahun 2021 karena pembukaan lapangan pekerjaan yang terbatas. Tingginya jumlah penganggur tersebut membuat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPf) pada tahun 2021 mencapai 5,82 persen dan naik 0,1 persen dari tahun 2020 sebesar 5,81 persen.

#### c. Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat pada Maret 2021 mencapai 367,89 ribu orang. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 2,82 ribu orang dibandingkan September 2020. Jika dibandingkan dengan angka Maret tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 1,12 ribu orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2020 - Maret 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 2.540 orang, sedangkan daerah perdesaan turun sebesar 1.420 orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 4,69 persen menjadi 4,68 persen. Sedangkan di perdesaan naik dari 8,50 persen menjadi 8,57 persen. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan. Porsi Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis

Kemiskinan pada Maret 2021 adalah sebesar 76,62 persen. Empat jenis komoditi makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras dan daging ayam ras. Sedangkan tiga jenis komoditi bukan makanan yang paling dominan adalah biaya perumahan, bensin dan listrik. Optimisme penurunan Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Barat dapat terlihat jelas dari proyeksi untuk tahun 2023 yaitu 7,08 - 7,00 persen dengan harapan membaiknya pertumbuhan ekonomi dan turunnya persentase Tingkat Pengangguran Terbuka.

#### **d. Rasio Gini**

Rasio gini yang mengalami penurunan secara bertahap sejak tahun 2015 hingga mencapai 0,325 pada September 2020 kembali naik pada periode yang sama tahun 2019 (0,318), artinya terjadi perubahan distribusi pengeluaran penduduk sebagai dampak penyebaran pandemi COVID-19 seperti pembatasan sosial, tutupnya usaha kecil menengah, restoran dan sebagainya terkait kelompok kelas pengeluaran penduduk. Pada Maret 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Barat (Gini Ratio) adalah sebesar 0,313. Angka ini turun sebesar 0,012 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,325. Sementara jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 (0,317), tercatat penurunan yang lebih kecil, sebesar 0,004 poin.

Untuk Rasio Gini tahun 2023 ditargetkan dalam kisaran angka 0,321-0,318, tidak berbeda jauh dari target tahun 2022 yaitu 0,323 – 0,321 karena berkaitan erat dengan angka kemiskinan yang memang cenderung menurun setiap tahunnya.

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah adalah dua sisi mata uang yang sama pentingnya. Kebijakan fiskal sebagai salah satu instrumen pembangunan hendak dilakukan sejalan dengan perencanaan pembangunan. Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis pembangunan. Keuangan daerah meliputi komponen penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran terhadap arah kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah akan dilaksanakan secara optimal apabila diikuti dengan pengalokasian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun yang cenderung terus meningkat.

Kedepan, ada dua aspek dalam manajemen keuangan daerah yang mendesak dan perlu dikembangkan secara profesional. Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Dukungan sistem ini mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah, mulai dari kegiatan apa saja yang dilaksanakan, berapa pendanaan serta apa hasil dan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Hal lain yang tak kalah pentingnya, melalui sistem ini terdapat integrasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pendanaan. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah.

Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal menyebabkan pengelolaan aset daerah secara profesional memiliki posisi tawar yang amat potensial guna menunjang penerimaan keuangan daerah.

Secara legal formal, yang dimaksud Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun bersangkutan. Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Pembahasan tentang arah kebijakan keuangan daerah, meliputi atas Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendaan, Arah Kebijakan Pendapatan Daerah, Arah Kebijakan Belanja Daerah, dan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

### 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah provinsi terdiri atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi : hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan pembiayaan diantaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bila dikaitkan dengan analisis makro perekonomian Kalimantan Barat tahun 2022, dengan melihat tantangan dan prospek perkembangan perekonomian tahun 2021 maka tren pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat diprediksi sedikit membaik serta berdampak pada peningkatan potensi sumber penerimaan daerah sehingga mampu memiliki kontribusi positif dalam pembiayaan pembangunan daerah secara optimal.

Pada tahun 2022 ini, proyeksi total Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.5.392.933.970.527,-. Rincian proyeksi Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	= Rp.2.672.831.356.527, -
b. Pendapatan Transfer	= Rp.2.660.721.446.000, -
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	= Rp. 59.381.168.000, -

Adapun untuk proyeksi total Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.3.952.223.543.665, - dengan komposisi empat jenis belanja berikut ini:

a. Belanja Operasi	= Rp.1.873.540.809.290,-
--------------------	--------------------------

- b. Belanja Modal = Rp. 869.649.751.630,-
- c. Belanja tidak terduga = Rp. 30.000.000.000,-
- d. Belanja Transfer = Rp.1.152.032.982.745,-

Dari sisi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 terdapat penerimaan pembiayaan yang berasal dari pos SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar Rp.341.483.529.424,- jika dibandingkan tahun sebelumnya terdapat penurunan, sedangkan pengeluaran pembiayaan diperkirakan sebesar Rp.50.000.000.000,- yang digunakan untuk penyertaan modal investasi pada BUMD milik Daerah.

Sejalan dengan arah kebijakan, berikut disampaikan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

### 3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan memiliki sumber pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Sumber utama penerimaan daerah di Provinsi Kalimantan Barat adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Kondisi ini menyebabkan perlu adanya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan daerah, yang sangat *limitative* sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dalam kerangka mewujudkan kemandirian fiskal daerah prioritas kebijakan pendapatan daerah yaitu menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerjasama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) maupun *Social Corporate Responsibility* (CSR), seperti:

- a. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kalimantan Barat;
- b. Kerjasama investasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan swasta atau dengan Pemerintah Daerah lainnya dengan perjanjian yang disepakati;
- c. Mendorong peningkatan investasi bagi masyarakat local;
- d. Optimalisasi pengelolaan BUMD.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi yang jelas, kemudahan dalam pemungutan pajak dan restribusi, aparatur yang profesional dan didukung teknologi informasi yang handal.

**Tabel 3.9**

PERTUMBUHAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 - 2023

Kode	Uraian	APBD 2022	RKPD 2023	Perubahan (%)	
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5.392.933.970.527</b>	<b>5.851.838.865.428</b>	<b>458.904.894.901</b>	<b>8,51</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2.672.831.356.527</b>	<b>3.029.176.056.332</b>	356.344.699.805	13,33
4.1.01	Pajak Daerah	2.343.271.581.063	2.583.486.493.965	240.214.912.902	10,25
4.1.02	Retribusi Daerah	13.447.743.000	11.941.470.000	- 1.506.273.000	- 11,20

Kode	Uraian	APBD 2022	RKPD 2023	Perubahan (%)	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	96.368.227.301	120.344.680.092	23.976.452.791	24,88
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	219.743.805.163	313.403.412.275	93.659.607.112	<b>42,62</b>
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.660.721.446.000</b>	<b>2.763.254.771.096</b>	<b>102.533.325.096</b>	<b>3,85</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.660.721.446.000	2.763.254.771.096	102.533.325.096	3,85
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>59.381.168.000</b>	<b>59.408.038.000</b>	<b>26.870.000</b>	<b>0,05</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	59.381.168.000	59.408.038.000	26.870.000	0,05
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>5.392.933.970.527</b>	<b>5.851.838.865.428</b>	458.904.894.901	8,51

Sumber: Bappeda, BPKAD dan Bappeda Prov Kalbar, Th.2022.

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan, Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan

### 3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah tahun 2020 diarahkan untuk mendukung capaian tujuan – tujuan pembangunan sebagaimana termuat dalam visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan status Desa Mandiri yang tercermin dalam Indeks Desa Membangun (IDM), Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Kemiskinan, Perluasan lapangan kerja dan sebagainya, serta pengendalian dari dampak covid-19.

Belanja Daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang dialokasikan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta manajemen efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Tabel berikut menggambarkan perkembangan belanja daerah dari tahun 2022-2023.

**Tabel 3.10**

#### PERTUMBUHAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 - 2023

Kode	Uraian	APBD 2022	RKPD 2023	Perubahan (%)	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>3.952.223.543.665</b>	<b>6.120.979.866.600</b>	<b>2.168.756.322.935</b>	<b>54,87</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.873.540.809.290</b>	<b>3.654.999.033.932</b>	1.781.458.224.642	<b>95,09</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.634.880.100.472	1.661.823.358.859	26.943.258.387	1,65
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.733.927.884	1.684.222.998.008	1.682.489.070.124	- 1,03
5.1.05	Belanja Hibah	229.333.078.852	308.294.750.126	78.961.671.274	34,43
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.593.702.082	657.926.939	- 6.935.775.143	- 91,34
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>896.649.751.630</b>	<b>1.147.872.112.568</b>	<b>251.222.360.938</b>	<b>28,02</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.771.900.904	34.189.000	- 2.737.711.904	- 98,77

Kode	Uraian	APBD 2022	RKPD 2023	Perubahan (%)	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.774.866.819	199.067.532.293	61.292.665.474	44,49
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	390.351.866.782	411.184.505.294	20.832.638.512	5,34
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi	315.419.087.554	490.699.472.231	175.280.384.677	55,57
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.814.078.471	44.766.105.000	-5.047.973.471	- 10,13
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	517.951.100	2.120.308.750	1.602.357.650	309,36
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>30.000.000.000</b>	-	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	30.000.000.000	-	-
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.152.032.982.745</b>	<b>1.288.108.720.100</b>	136.075.737.355	<b>11,81</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil Pajak	1.089.637.982.745	1.218.793.720.100	129.155.737.355	11,85
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	62.395.000.000	69.315.000.000	6.920.000.000	11,09
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.952.223.543.665</b>	<b>6.120.979.866.600</b>	2.168.756.322.935	54,87
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>1.440.710.426.862</b>	<b>-269.141.001.172</b>	<b>-1.709.851.428.034</b>	<b>-118,68</b>

Sumber: Bappeda, BPKAD dan Bappenda Prov Kalbar, Th.2022.

Kebijakan belanja daerah dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
2. Efisiensi, belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik. Untuk itu diperlukan penyusunan pedoman Harga Satuan Umum (HSU) Barang/Jasa dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dengan diikuti pelaksanaan Analisa Satuan Biaya (ASB).
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, pemerataan tenaga medis maupun peningkatan kapasitas.
5. Penurunan jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan tenaga kerja.
6. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
7. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, diarahkan pada kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, menjaga kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
8. Kebijakan untuk belanja operasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan kinerja, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - b. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk mengganggu pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penjabaran dari alokasi belanja sosial untuk masyarakat tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus dan teknis.
9. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanganan dampak covid-19, penganggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Penjabaran dari alokasi belanja tidak terduga tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus dan teknis.

### 3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan anggaran surplus atau defisit akan tercermin dalam pembiayaan daerah karena menggambarkan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Pada 2021, APBD Provinsi Kalimantan Barat diproyeksi mengalami defisit.

Defisit ini tentunya dibiayai dari SILPA pada tahun sebelumnya. SILPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, karena SILPA sebagai salah satu tolok ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Perkiraan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang diperkirakan.

Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun, proyeksi/target tahun berkenaan serta 3 (tiga) tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam table sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 - 2023

Kode	Uraian	APBD 2022	RKPD 2023	Perubahan (%)	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			-	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>341.483.529.424</b>	<b>319.141.001.172</b>	<b>- 22.342.528.252</b>	<b>- 6,54</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	341.483.529.424	319.141.001.172	- 22.342.528.252	- 6,54
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>341.483.529.424</b>	<b>319.141.001.172</b>	<b>- 22.342.528.252</b>	<b>- 6,54</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000	50.000.000.000	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	-	-

	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>291.483.529.424</b>	<b>269.141.001.172</b>	<b>- 22.342.528.252</b>	<b>- 7,67</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Daerah Tahun Berkenaan</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	

Sumber: Bappeda, BPKAD dan Bappeda Prov Kalbar, Th.2022.

Kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan pembiayaan daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk pengelolaan SiLPA dan diharapkan SiLPA akan menjadi bagian dari pendapatan pada periode anggaran berikutnya.
2. Pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.
3. Guna mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah, maka kemitraan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu terus dikembangkan. Program dan kegiatan yang searah mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai dengan berbagai skema dengan memperhatikan kapasitas fiskal. Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi alternatif dalam pembiayaan pembangunan daerah. Hal ini sangat dimungkinkan karena keterbatasan anggaran pembangunan daerah.

## II. Kerangka Pendanaan

Dalam kerangka RPJMN 2020-2024 sebagai penjabaran visi, misi dan program Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 yang sejalan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang Indonesia, pelaksanaannya dilakukan dengan kaidah pelaksanaan melalui kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan serta kerangka evaluasi dan pengendalian. Kerangka pendanaan sebagai salah satu kaidah dalam pelaksanaan RPJMN 2020-2024 berupaya mengoptimalkan dan mensinergikan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan pembangunan.

Sumber-sumber pendanaan pembangunan dimaksud berasal dari Pemerintah yang diperoleh dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah, Pinjaman Luar Negeri (PLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Surat Berharga Negara (SBN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) maupun sumber pendanaan yang berasal dari Non Pemerintah yang diperoleh melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pendanaan Badan Usaha, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility-CSR), Filantropi, dan Dana Keagamaan.

Kebutuhan pendanaan pembangunan terus meningkat sedangkan sumber dana publik terbatas. Di sisi lain berbagai sumber dan instrumen pendanaan baru terus berkembang. Untuk itu, diperlukan adanya pendekatan pengelolaan pendanaan untuk mendorong pertumbuhan dan kinerja investasi publik. Peningkatan efisiensi dan kinerja investasi publik mensyaratkan adanya perbaikan proses perencanaan investasi di semua sektor dan tingkat pemerintahan, termasuk dalam mengalokasikan investasi Pemerintah untuk sektor dan proyek yang tepat sehingga memberi daya ungkit (*leverage*), melaksanakan proyek tepat waktu dan tepat biaya serta peningkatan kapasitas dan efisiensi kelembagaan. Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan pemberian stimulus bagi pihak swasta dan masyarakat melalui regulasi dan kebijakan yang memberikan insentif dalam rangka mengoptimalkan peran pembiayaan non- Pemerintah dalam pembiayaan pembangunan nasional (investasi publik).

Penggunaan pendanaan pembangunan harus dapat secara optimal memanfaatkan kapasitas pendanaan yang ada dan dilakukan secara lebih efektif. Untuk maksud tersebut diperlukan adanya kaidah-kaidah yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penggunaan pendanaan pembangunan yaitu:

## 1. Fokus Meningkatkan Kualitas Alokasi pada Prioritas melalui Proyek Prioritas dan Integrasi Pendanaan

dilakukan dengan beberapa langkah yaitu:

- **Mengutamakan alokasi pada prioritas:** Mengalokasikan sumber dana yang terbatas dengan mendahulukan kegiatan atau proyek yang menjadi prioritas nasional khususnya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Pendanaan pembangunan harus diarahkan berdasarkan pada strategi pembangunan nasional dimana fokus alokasi anggaran adalah pendanaan prioritas pembangunan terutama pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah untuk masyarakat.
- **Memperkuat sinergi dan integrasi pendanaan pembangunan** dengan mensinergikan dan mengintegrasikan pemanfaatan belanja K/L dan Non K/L (antara lain Subsidi, Dana Transfer Khusus, dan Dana Desa) serta sumber pendanaan lainnya, baik pusat, daerah maupun swasta untuk mendukung pembiayaan prioritas nasional.

## 2. Mengidentifikasi proyek yang dapat dilakukan Pemerintah Pusat, Daerah, BUMN, swasta dan masyarakat.

Besarnya skala pembangunan nasional Indonesia membutuhkan koordinasi, kerjasama dan pembagian kerja di antara para pemangku kepentingan. Untuk itu, dalam pelaksanaan proyek pembangunan diperlukan identifikasi serta pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, swasta dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan efisiensi penggunaan sumber daya nasional dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

## 3. Menyesuaikan modalitas pendanaan dengan sasaran pembangunan serta memastikan kesiapan pelaksanaan proyek.

Agar dapat terjadi kesesuaian perencanaan pendanaan program/kegiatan/ proyek harus mempertimbangkan:

1. Kapasitas dan keberlanjutan pendanaan, termasuk kebutuhan pembiayaan yang melampaui satu tahun anggaran;
2. Kesesuaian antara karakteristik sumber pendanaan dengan karakter investasi pemerintah;
3. Mekanisme penyaluran (*delivery mechanism*) yang tepat dan efisien; dan
4. Tingkat kesiapan pelaksanaan (*implementation readiness*).

## 4. Optimalisasi dan perluasan pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.

Sumber pendanaan pembangunan yang telah ada dan dimanfaatkan saat ini seperti dari pinjaman luar negeri dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan pinjaman dari lembaga pembiayaan pembangunan dan pemanfaatan skema pendanaan kerjasama pembangunan, serta fasilitas pembiayaan luar negeri lainnya dengan persyaratan yang menguntungkan. Dalam pemanfaatan pinjaman luar negeri terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan di antaranya: tingkat bunga, penyediaan barang dengan syarat dan ikatan (*tied* dan *untied*), serta keunggulan komparatif mitra pembangunan.

Pemerintah akan terus meningkatkan pemanfaatan skema KPBU dengan melakukan perluasan pada beberapa aspek yaitu: regulasi; fungsi kantor bersama; peran empat pilar KPBU (regulator, penanggung jawab proyek kerjasama (*investee*), konsultan pendamping (*transaction advisor*), dan investor), perencanaan dan penyiapan proyek, serta internalisasi KPBU dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat maupun daerah.

Di samping itu, Pemerintah dapat memperbesar pemanfaatan skema-skema pembiayaan yang bersumber dari berbagai skema pembiayaan tematik (*thematic financing windows*) termasuk di dalamnya adalah skema pembiayaan hijau (*green financing*). Selain menjadi sumber, skema-skema pembiayaan ini juga membantu Pemerintah untuk memaksimalkan daya ungkit (*leverage*) sumber dana publik dan mendatangkan investasi swasta dalam pembangunan.

## 5. Mendorong inovasi pendanaan pembangunan.

Kebutuhan pembiayaan pembangunan akan terus meningkat namun kemampuan Pemerintah terbatas, sehingga diperlukan upaya untuk mengembangkan berbagai sumber, skema, dan instrumen pembiayaan, baik dari sisi jumlah maupun efisiensi dan efektivitas pemanfaatannya. Dalam rangka mendorong inovasi pendanaan pembangunan, maka perlu dilakukan:

### a. Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pemanfaatan bauran pembiayaan (*blended finance*)

Untuk mendanai program/proyek/kegiatan dengan sumber, skema, dan instrument pembiayaan yang berbeda disesuaikan dengan waktu, tahap, dan jenis kegiatan yang spesifik. Dalam pelaksanaan dan pengembangan bauran pembiayaan (*blended finance*) tersebut diperlukan beberapa langkah diantaranya:

- Menyediakan dan menyempurnakan kerangka hukum dan peraturan sebagai dasar inovasi pendanaan. Sebagai negara berpendapatan menengah atas, peluang Indonesia mendapatkan pendanaan berbiaya lunak dan konvensional diperkirakan makin terbatas. Untuk mengotimalkan pemanfaatan pendanaan tersebut perlu dukungan kerangka hukum yang memadai.
- Memposisikan pembiayaan Pemerintah sebagai pengungkit (*leveraging*) dan katalisator untuk mengembangkan sumber pendanaan non-Pemerintah;
- Mengutamakan penggunaan sumber-sumber pendanaan non-Pemerintah sesuai dengan kelayakan finansial, ekonomi, dan sosialnya;

### b. Mengembangkan Prinsip Transfer Berbasis Kinerja (*Output Based Transfer*).

Untuk memperkuat pengendalian program serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah akan melanjutkan pengembangan hibah ke daerah sebagai bentuk mekanisme transfer berbasis kinerja (*output based transfer*). Mekanisme ini khususnya ditujukan untuk mendukung pendanaan Pelayanan Dasar kepada Masyarakat ataupun mendukung pencapaian target-target pembangunan tertentu.

## III. Perencanaan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Sebagai salah satu sumber pendanaan Non Pemerintah, KPBU merupakan alternatif skema pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan pembagian risiko antara para pihak.

Dengan skema KPBU diharapkan Pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana layanan umum dengan tepat waktu (*on schedule*), tepat anggaran (*on budget*), dan tepat layanan (*on service*).

Perencanaan sebagai salah satu tahap proses pemilihan skema KPBU selain tahap persiapan dan tahap transaksi merupakan tahapan paling penting sebelum sebuah proyek infrastruktur ditetapkan skema pembiayaannya menggunakan skema yang tersedia.

Dalam proses perencanaan KPBU terdapat dua hal yang harus dilakukan yakni identifikasi proyek dan penyusunan kajian Studi Pendahuluan. Dari tahap perencanaan KPBU dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan penyediaan infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha berdasarkan RPJM, RKP, Renstra dan Renja Kementerian/Lembaga dan atau RPJMD dan RKPD yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung koordinasi perencanaan dan pengembangan rencana KPBU serta melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai rencana KPBU.

Identifikasi proyek yang memiliki potensi untuk dikerjasamakan dengan Badan Usaha dilakukan dengan menyusun Studi Pendahuluan yang memuat paling kurang rencana bentuk KPBU, rencana skema pembiayaan dan sumber dananya, dan rencana penawaran KPBU yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.

Studi pendahuluan yang disusun memuat 5 kajian yakni:

1. Analisis kebutuhan (need analysis) yang meliputi:
  - kebutuhan infrastruktur memiliki dasar pemikiran teknis dan ekonomi dengan permintaan yang berkelanjutan dan diukur dari ketidakcukupan pelayanan, baik secara kuantitas maupun kualitas, berdasarkan analisis data sekunder yang tersedia;
  - identifikasi pilihan dalam penyediaan layanan mencakup lingkup layanan, solusi, ketersediaan penyedia, target pengerjaan, dan skema pembiayaan berdasarkan kebutuhan infrastruktur; dan
  - kepastian KPBU mendapat dukungan dari pemangku kepentingan yang berkaitan, salah satunya melalui Konsultasi Publik.
2. Kriteria kepatuhan (compliance criteria) yang meliputi:
  - kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, termasuk penentuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN/Direksi BUMD bertindak selaku PJK;
  - kesesuaian KPBU dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/ Daerah dan/ atau Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana bisnis BUMN/BUMD;
  - kesesuaian lokasi KPBU dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai kebutuhan jenis infrastruktur yang akan dikerjasamakan; dan
  - keterkaitan antar sektor Infrastruktur dan antar wilayah sesuai kebutuhan jenis Infrastruktur yang akan dikerjasamakan.
3. Kriteria faktor penentu Nilai Manfaat Uang (Value for Money), antara lain:
  - sektor swasta memiliki keunggulan dalam pelaksanaan KPBU termasuk dalam pengelolaan risiko;
  - terjaminnya efektivitas, akuntabilitas, dan pemerataan pelayanan publik dalam jangka panjang;
  - alih pengetahuan dan teknologi; dan
  - terjaminnya persaingan sehat, transparansi, dan efisiensi dalam proses pengadaan.
4. Analisis potensi pendapatan dan skema pembiayaan proyek, yang meliputi:
  - kemampuan pengguna untuk membayar;
  - kemampuan fiskal Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dalam melaksanakan KPBU;
  - potensi pendapatan lainnya; dan
  - perkiraan bentuk Dukungan Pemerintah.
5. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut, meliputi:
  - indikasi bentuk KPBU;
  - rekomendasi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti; dan
  - rencana jadwal kegiatan penyiapan dan transaksi KPBU.

Dari kajian Studi Pendahuluan yang dihasilkan keputusan yang bisa direkomendasikan adalah proyek infrastruktur dimaksud dapat dilaksanakan dengan skema KPBU. Namun tidak menutup kemungkinan dari hasil kajian Studi Pendahuluan yang disusun menghasilkan rekomendasi skema pembiayaan lainnya untuk penyediaan infrastruktur.

Peran menteri/kepala lembaga/kepala daerah, atau direksi BUMN/D sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau disebut sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJK) sangat penting untuk memutuskan jenis infrastruktur yang akan dikerjasamakan berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan. Kesesuaian dengan RPJM, RKP, Renstra dan Renja Kementerian/Lembaga dan atau RPJMD dan RKPD perlu dipastikan agar sesuai dengan kerangka pendanaan sebagai salah satu kaidah dalam pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dalam upaya mengoptimalkan dan mensinergikan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan pembangunan.

Identifikasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyusunan kajian sangat diperlukan agar proyek infrastruktur yang akan dikerjasamakan dapat memastikan, memanfaatkan dan mengintegrasikan pendanaan atau rencana kerja pemerintah sehingga penyediaan infrastruktur dapat dilakukan secara tepat waktu dengan disertai penyediaan infrastruktur pendukung dari stakeholder yang terkait. dan sumber pendanaan lainnya, baik pusat, daerah maupun swasta.

#### **IV. Kesimpulan**

Sejalan dengan pengertian tentang perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen, karakteristik dan maksud dilakukan perencanaan, Pemerintah dalam merencanakan pembangunan nasional mewujudkannya melalui sistem perencanaan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam bentuk undang undang.

Pemerintah melalui SPPN untuk menjamin tercapainya tujuan negara melalui kegiatan pembangunan yang berjalan secara efektif, efisien dan ber sasaran berdasarkan perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Sebagaimana tujuan SPPN, dalam pencapaiannya Pemerintah membagi perencanaan menjadi beberapa tahapan yakni jangka panjang (RPJPN/D), jangka menengah (RPJMN/D) dan jangka pendek (RKP) yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sekiranya diputuskan skema KPBU digunakan dalam penyediaan infrastruktur, maka pada tahap perencanaan PJK sebagai pemilik kewenangan dalam sektor yang akan di KPBU kan sangat berperan dalam menentukan proyek yang akan di KPBU kan dengan melihat dari tujuan SPPN. Adapun tujuan SPPN untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Referensi:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2020 Tentang Fasilitas Untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur;
4. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
5. <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-perencanaan/>;
6. <https://kebijakankesehatanindonesia.net/36-sinkronisasi/2586-sistem-perencanaan-pembangunan-nasional>;
7. <http://perencanaan.ipdn.ac.id/kajian-perencanaan/kajianperencanaan/sistemperencanaanpembangunannasionalppn>;
8. Wismana Adi Suryabrata, Peran APIP dalam RPJMN 2020-2024, Bahan Presentasi dalam Rapat Bulanan DPN AAIP, 2020;
9. Jadhie J. Ardajat, Bahan Presentasi Dalam Diklat Dasar Dasar Perencanaan LPEM UI-Bappenas, Februari 2019.

## BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat periode Tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 merupakan penjabaran dari Visi Pembangunan Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yaitu **“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”** yang selanjutnya dijabarkan melalui 6 Misi Pembangunan yaitu:

- 1) Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur
- 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*
- 3) Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif
- 4) Mewujudkan masyarakat sejahtera
- 5) Mewujudkan masyarakat yang tertib
- 6) Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan diselesaikan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kewenangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan pilihan strategi pembangunan. Tujuan akan mempresentasikan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran akan menjabarkan tujuan dalam bentuk hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur dan rasional.

Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan Kalimantan Barat tahun 2018-2023 yang telah dirancang dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
Tujuan dan Sasaran

<b>VISI</b>	
<b>Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan</b>	
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Misi 1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur</b>	
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah serta Perbatasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Infrastruktur serta Pasokan Tenaga Listrik Wilayah Kalbar Meningkat</li> <li>2. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan Sesuai Standar</li> <li>3. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air</li> </ol>

<b>VISI</b>	
<b>Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan</b>	
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pemukiman Perdesaan Sesuai Dengan Indeks Desa Membangun dan Pemukiman Perkotaan</li> <li>5. Tersedianya Sarana dan Pelayanan Produksi Konstruksi</li> <li>6. Meningkatnya Pelayanan, Konektivitas dan Keselamatan Jaringan Transportasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat</li> </ol>
<b>Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas dengan Prinsip-Prinsip <i>Good Governanve</i></b>	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah</li> <li>2. Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan di Kalimantan Barat</li> <li>3. Terlaksananya Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta</li> <li>4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>5. Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi</li> <li>6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi</li> <li>7. Meningkatnya pengadaan barang jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)</li> </ol>
<b>Misi 3. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif dan Inovatif</b>	
Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kebudayaan dan Literasi</li> <li>2. Meningkatnya Kualitas dan Pelayanan Kesehatan</li> <li>3. Meningkatnya Kualitas Pemuda</li> <li>4. Meningkatnya Capaian Indeks Pembangunan Gender</li> <li>5. Meningkatnya Capaian Indeks Pemberdayaan Gender</li> <li>6. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah</li> </ol>
<b>Misi 4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera</b>	
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan</li> <li>2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Investasi</li> <li>3. Meningkatnya kualitas pembangunan desa</li> <li>4. Meningkatnya Perekonomian Sektor Koperasi dan UMKM</li> <li>5. Meningkatnya Kesejahteraan petani dan nelayan</li> <li>6. Meningkatnya pemberdayaan, perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial masyarakat</li> <li>7. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan tenaga kerja</li> <li>8. Ketersediaan lahan transmigrasi</li> <li>9. Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Perbatasan</li> </ol>
<b>Misi 5. Mewujudkan Masyarakat yang Tertib</b>	

<b>VISI</b>	
<b>Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan</b>	
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Skor Indeks Pemahaman terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>2. Meningkatkan Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>3. Meningkatnya Jumlah Orang atau Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi</li> <li>4. Menurunnya Resiko Bencana di Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>5. Meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat</li> </ol>
<b>Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan</b>	
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kualitas Air dan Udara</li> <li>2. Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan</li> <li>3. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkat</li> </ol>

Sumber: RPJMD Perubahan Prov. Kalbar Tahun 2018-2023

#### 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Prospek pembangunan Tahun 2023 lebih baik dibandingkan dengan Tahun 2020 dan 2021, hal ini terkait dengan pemulihan dampak covid-19 yang semakin membaik yang ditandai dengan mulai menggeliatnya sektor produksi. Mulai beroperasinya pelabuhan samudera Kijing di Kabupaten Mempawah juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas dari sektor-sektor produksi di Kalimantan Barat. Sebagai ilustrasi pada tahun 2020 hanya komponen ekspor saja yang mengalami pertumbuhan, tetapi di Tahun 2021 sudah terdapat penambahan 5 komponen pembentuk PDRB yang ikut mengalami pertumbuhan. Diharapkan momentum tersebut dapat terjaga di Tahun 2022 sehingga Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Barat dapat berfokus pada peningkatan kualitas hidup manusia dan pencapaian target-target kinerja pada tahun ke 5 (lima) yang merupakan tahun terakhir periode RPJMD Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD diperlukan arah kebijakan guna efektivitas dan efisiensi pencapaian pembangunan selama lima tahun. Oleh karena itu, rumusan tahapan-tahapan pembangunan sebagai pijakan rencana pembangunan tahunan menjadi pedoman dan arahan yang tegas dan jelas guna menentukan prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat. Untuk tema Pembangunan RKP 2023 adalah “peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”. Sedangkan tema RKPD Kalimantan Barat adalah “peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat”. Adapun tahapan untuk tahun kelima (2023) RPJMD Kalimantan Barat adalah “Tahap Pemantapan (Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia, Produktivitas Masyarakat, dan Daya Saing Daerah)”. Tahap pemantapan sebagai upaya mempertajam arah pembangunan khususnya arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam ketercapaian visi dan misi pembangunan Kalimantan Barat. Tahap pemantapan ini tidak terlepas dari proses identifikasi dan inventarisasi berbagai masalah-

masalah pembangunan yang dihadapi pada tahap-tahap sebelumnya sehingga mampu mendeteksi secara dini adanya persoalan disekitarnya serta dapat merespon dengan cepat dan efektif. Penangan yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk meminimalisir permasalahan yang lebih parah dengan segala dampak yang mengikutinya.

Maka, pada tahap terakhir ini upaya pencapaian visi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat menjadi prioritas pembangunan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup manusia, produktivitas masyarakat serta daya saing daerah. Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat dan terutama meningkatnya kualitas hidup manusia, produktivitas masyarakat dan daya saing daerah dapat dipercepat. Tentunya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pun perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi biasanya hanya mementingkan pertumbuhan PDRB tetapi kurang memperhatikan masalah pengurangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja termasuk pemerataan pendapatan. Banyak wilayah yang terjebak dalam ekonomi eksklusif yaitu keinginan untuk mengejar taraf perekonomian yang tinggi dengan mendorong kepada pertumbuhan sektor-sektor yang kurang menyerap tenaga kerja yang besar tetapi lebih kepada *sector* yang padat modal.

Pada tahap ini pembangunan ekonomi diarahkan tidak hanya tumbuh dari sisi kuantitas, namun juga dari sisi kualitas. Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif diharapkan menjadi pendorong inklusif yaitu pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan serta kesenjangan. Maka, menjadi strategis bila pembangunan tahap penguatan difokuskan pada pembangunan inklusif, mandiri dan berdaya saing yang merupakan pembangunan yang berkualitas yaitu pembangunan yang memperhitungkan pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan memperhatikan lingkungan.

Adapun prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

#### **4.2.1 Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur**

Dalam rangka mewujudkan target indeks infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 sebesar 71.24 poin. Maka perlu dilakukan Percepatan Pembangunan Infrastruktur sebagai berikut:

- a. Rasio Elektrifikasi, dalam rangka mendukung sasaran rasio elektrifikasi tahun 2023 sebesar 93.00% maka prioritas pembangunan diarahkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penyediaan tenaga listrik Non PLN, fasilitasi perizinan penyediaan listrik Non PLN, penyediaan listrik bagi Rumah Tangga Miskin yang belum berakses listrik, fasilitasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pemanfaatan *excess power* dari industri perkebunan dan pertambangan, serta mendorong peran serta para pihak tersebut diatas untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik.
- b. Kondisi Jalan Mantap sebesar 80% dalam rangka untuk mendukung pengembangan Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Kegiatan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Proyek Strategis Nasional, dengan melakukan penanganan skala prioritas seperti penanganan jalan dengan kondisi rusak (berat dan ringan) serta pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan dalam penanganan jalan dengan kondisi rusak disekitar wilayah usaha guna meningkatkan akses perekonomian, membuka

- pengembangan wilayah, membuka keterisolasian, meningkatkan akses mobilitas dan kelancaran lalu lintas.
- c. Jaringan irigasi Provinsi dalam kondisi baik sebesar 61,21%; guna mendukung indikator persentase Irigasi Provinsi, maka prioritas pembangunan yang akan dilakukan adalah: melakukan rehabilitasi jaringan irigasi dalam kondisi rusak (berat dan ringan) yang difokuskan pada lahan pertanian yang produktif dan potensial, dalam upaya untuk meningkatkan produksi hasil pertanian, meningkatkan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan petani.
  - d. Persentase penduduk yang berakses air minum sebesar 70.00%, guna mendukung indikator persentase penduduk yang berakses air minum maka prioritas pembangunan lintas Kab/Kota yang akan dilakukan adalah: pembangunan kapasitas air baku, peningkatan cakupan pelayanan akses air bersih, pengembangan jaringan air bersih, peningkatan kerjasama antar daerah, penguatan dokumen perencanaan yang berbasis spasial serta peningkatan kapasitas kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) air bersih.
  - e. Dalam rangka untuk mendukung indikator pelayanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) sebesar 52.00% prioritas pembangunan yang akan dilakukan adalah: Membangun pelayanan sanitasi lintas Kab/Kota serta peningkatan kapasitas kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) sanitasi.
  - f. Pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang akan dilakukan adalah: penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi, fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi serta peningkatan kapasitas kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
  - g. Dalam rangka meningkatkan pelayanan, konektivitas dan keselamatan jaringan transportasi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilakukan adalah: meningkatkan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan, meningkatkan pelayanan angkutan yang aman, nyaman dan terjangkau, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP), serta mendorong percepatan pelayanan perhubungan udara dan perkeretaapian.

#### **4.2.2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas dengan Prinsip-Prinsip *Good Governance***

Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *good governance* bertujuan untuk meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan pencapaian misi ini ditunjukkan dengan melalui 2 indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dengan target pada tahun 2023 meningkat menjadi nilai A, dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2023 ditargetkan meningkat menjadi nilai A.

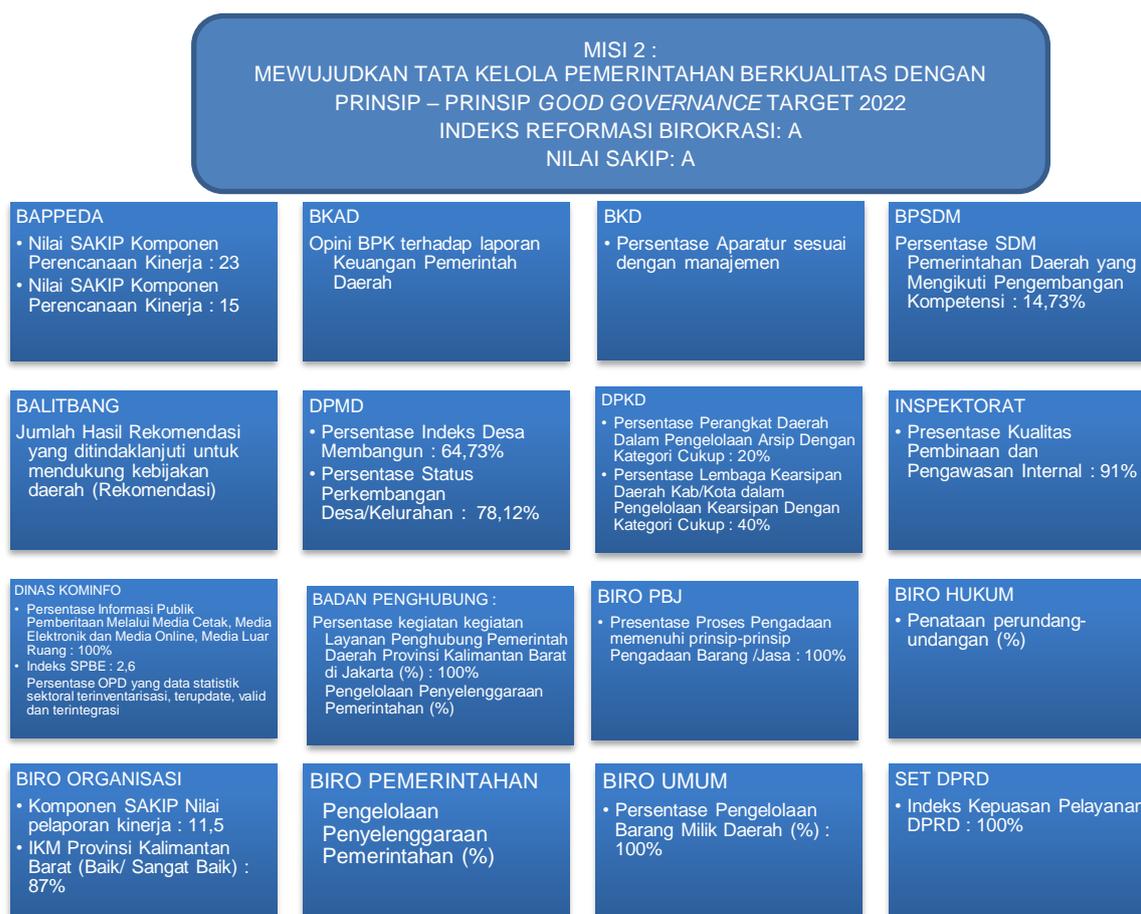
Untuk mencapai indikator tujuan tersebut akan dicapai dengan upaya pencapaian target kinerja indikator sasaran upaya pencapaian target kinerja indikator sasaran yaitu:

- 1) Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan desa dengan persentase Status Perkembangan Desa/Kelurahan sebesar 88.77%
- 2) Pengelolaan Pemerintahan desa dengan meningkatnya persentase indeks Desa Membangun sebesar 73.89%

- 3) Meningkatnya penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat dengan persentase kepemilikan dokumen kependudukan, akurasi data kependudukan, kerjasama dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Kalimantan Barat sebesar 82.14%.
- 4) Penataan administrasi kependudukan melalui persentase kepemilikan *E-KTP* sebesar 99.00%, persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 55.00%, persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk sebesar 95.00%, persentase kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun sebesar 97.00%, persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan sebesar 75%, persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan sebesar 100%, persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan sebesar 75.00%, persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid sebesar 95.00%, persentase capaian Penyusunan Profil Kependudukan sebesar 100%, persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 95.00%.
- 5) Persentase perangkat daerah dengan zona hijau sebanyak 100.00% dan persentase total bobot domain evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebesar 92.00%.

**Gambar 4.1**

Tujuan dan Sasaran Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dengan Prinsip-prinsip *Good Governance*



Sumber: RPJMD Perubahan Prov. Kalbar Tahun 2018 – 2023

Kemudian, dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas dengan Prinsip-Prinsip *Good Governance*, prioritas pembangunan diarahkan pada penyelesaian penegakan batas daerah, khususnya daerah yang memiliki potensi konflik lahan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik sosial berskala besar. Berkenaan dengan peningkatan status desa mandiri di Kalimantan Barat, pada tahun 2020 terdapat 214 (delapan puluh tujuh) desa mandiri sedangkan pada Tahun 2021 jumlah desa mandiri di Kalimantan Barat sebanyak 385 desa. Maka pembangunan dalam tahap sekarang lebih diarahkan pada upaya peningkatan status desa menuju desa mandiri. Apalagi bila dikaitkan dengan target RPJMD, yang menetapkan sasaran pada pencapaian desa mandiri tahun 2023 kurang lebih 425 desa mandiri.

#### **4.2.3 Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Inovatif**

Pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia yang ditargetkan meningkat menjadi 71.25 pada tahun 2023 akan dicapai dengan upaya pencapaian terget kinerja indikator sasaran antara lain:

- 1) Meningkatnya Kualitas, Kuantitas dan Mutu Pendidikan melalui peningkatan Rata-rata Lama Sekolah menjadi hingga 8.2 tahun, Harapan Lama Sekolah selama 13.2 tahun, dan Skor Mutu Pendidikan sebesar 6 poin.
- 2) Meningkatnya kualitas dan pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indikator Angka Harapan Hidup selama 70.99 tahun dan status akreditasi rumah sakit paripurna dengan Indeks kepuasan masyarakat dengan status sangat baik.
- 3) Meningkatnya pembangunan kebudayaan dengan nilai indikator pembangunan kebudayaan sebesar 45.28 poin.
- 4) Meningkatnya literasi masyarakat yang ditandai dengan indikator cakupan kunjungan perpustakaan pada tahun 2023 sebesar 141.570, jumlah koleksi daerah yang dilestarikan sebanyak 6.692 koleksi, Nilai Budaya Literasi sebesar 54 poin, Indeks Kepuasan layanan perpustakaan pada predikat A (sangat baik) sehingga Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dapat tercapai pada 13,76 poin.
- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 80,5
- 6) Meningkatnya keterwakilan perempuan melalui indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang meningkat sebesar 67.46.
- 7) Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk dengan persentase fasilitasi penyelenggaraan program KB, KS dan Pengendalian Penduduk sebesar 53.00%.

#### **4.2.4 Mewujudkan Masyarakat Sejahtera**

Sejalan dengan upaya mendorong peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dalam rangka menikmati pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5.02 - 5.68, penurunan angka kemiskinan menjadi 7.08-7.00 dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5.42 - 3.98, maka penanggulangan kemiskinan sebagai akar permasalahan sosial menjadi prioritas utama dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Masalah utama yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan adalah masih besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk menekan angka kemiskinan maka pengangguran memiliki kaitan erat karena berpengaruh pada pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Maka dari itu, pengangguran bukan lagi masalah pribadi, namun

menjadi masalah bersama yang harus diatasi baik pemerintah, perusahaan, organisasi, dan masyarakat sekitar. Menurunkan angka pengangguran menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama untuk meningkatkan kinerja ekonomi negara. Dalam rangka mewujudkan misi ini maka akan dicapai dengan upaya pencapaian target kinerja indikator sasaran yaitu:

1. Dalam rangka meningkatkan Jumlah Nilai Investasi diarahkan pada upaya untuk mengoptimalkan data dan informasi tentang potensi dan peluang investasi yang ditawarkan, penyediaan faktor-faktor penunjang dalam merangsang dan mempercepat masuknya investasi, dan mengurangi kesenjangan antara minat investasi dan realisasinya. Begitu pula untuk meningkatkan mutu pelayanan diarahkan agar dapat mengoptimalkan terintegrasinya sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dikelola oleh BKPM RI dengan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik yang dikelola oleh Kemenkominfo.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya yaitu peningkatan produksi, peningkatan kualitas produk, memproduksi produk turunan atau peningkatan nilai tambah dan lainnya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PDRB sektor seperti terlihat di bawah ini :
  - a) Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Peternakan dilakukan melalui peningkatan produksi dan populasi ternak yang sehat dan aman konsumsi merupakan sasaran yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penyediaan sumber pangan protein asal hewan merupakan langkah strategis membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan sumber pangan yang terjangkau baik jumlah maupun kualitasnya. Produk ternak yang sehat dan aman konsumsi juga merupakan pra-syarat daya saing pasar produk peternakan.
  - b) Meningkatnya Jumlah Produksi dan Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan dan Hortikultura dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian (alsin; pengairan; lahan; dan sarana produksi), Meningkatkan ketersediaan dan penggunaan benih bermutu, Optimalisasi penerapan dan pemanfaatan teknologi budi daya, dan meningkatkan pengawasan, produksi dan peredaran benih tanaman serta menurunkan luas serangan hama dan penyakit tanaman.
  - c) Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB Perkebunan dan produksi perkebunan dilakukan dengan mensinergikan sumber daya perkebunan untuk pengembangan komoditi unggulan perkebunan yang produktif melalui pemanfaatan teknologi budi daya dan pengolahan yang baik (GAP & GHP) didukung pengembangan kemitraan usaha serta penanganan Gangguan Usaha dan Dampak Perubahan Iklim serta Peningkatan mutu dan nilai tambah hasil perkebunan dan mendorong peningkatan kinerja perkebunan besar.
  - d) Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB Perikanan dilakukan dengan Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku, peningkatan konsumsi ikan, peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, teknologi, sanitasi dan higien.
  - e) Meningkatnya pertumbuhan PDRB Kehutanan dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung secara lestari, pemberian akses pengelolaan sumber daya hutan yang berkeadilan dan berkeadilan melalui pengembangan perhutanan sosial (hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman

- rakyat, hutan rakyat, hutan adat, kemitraan kehutanan), dan optimalisasi sistem informasi publik dibidang kehutanan dan penyelenggaraan pembangunan kehutanan.
- f) Dalam rangka meningkatkan Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan Tahun 2023 dengan upaya mengoptimalkan Pelabuhan Internasional Kijing (asumsi 2021 telah beroperasi) akan meningkatkan transaksi perdagangan ekspor impor terutama dari sisi ekspor. Menurunkan inflasi bahan makanan dengan mengawasi ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta melindungi hak hak konsumen dalam mengkonsumsi barang yang beredar sesuai dengan peraturan dan tertib niaga yang berlaku.
  - g) Dalam rangka meningkatkan Pertumbuhan PDRB sektor industri Tahun 2023 perlu upaya dalam percepatan hilirisasi industri dengan mendukung pembangunan berbasis kewilayahan seperti Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Industri Mikro. Meningkatkan kerjasama guna meningkatkan investasi industri (PMA dan PMDN) dan penyerapan tenaga kerja sektor industri. Melaksanakan promosi dan pemasaran dengan meningkatkan kualitas produk IKM Kalimantan Barat.
3. Peningkatan nilai NTP salah satunya dipengaruhi oleh faktor produksi, konsumsi petani, hasil produksi yang mereka hasilkan dan pemasaran produk. Beberapa upaya peningkatan NTP dapat dilihat di bawah.
- a) Meningkatnya NTP Peternakan dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan peternak, maka pemberdayaan peternak untuk mampu meningkatkan nilai tambah kegiatan peternakan, serta daya saing produk peternakan. Membangun kawasan berbasis korporasi adalah salah satu wujud pemberdayaan peternak, dimana pemerintah memfasilitasi peternak untuk mengelompok dalam satu kawasan, dan membangun keterpaduan pelayanan peternakan dari sektor hulu produksi hingga ke hilir, yaitu jaminan pasar dan kepastian harga yang diterima peternak.
  - b) Meningkatnya NTP Tanaman Pangan dan NTP Tanaman Hortikultura dilakukan dengan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Penyuluhan Pertanian melalui Pembinaan, pengembangan dan penilaian Kelembagaan, Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani, penguatan, fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan petani dan penyuluh pertanian.
  - c) Meningkatnya NTP Perkebunan dilakukan dengan memfasilitasi usaha perkebunan rakyat yang berwawasan agribisnis serta mensinergikan Sumber daya Perkebunan melalui pengembangan SDM & kelembagaan pekebun, diversifikasi, teknologi pasca panen (GMP) dan promosi produk.
  - d) Meningkatnya NTP Perikanan dengan meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem vital di laut dan pesisir serta meningkatkan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam rangka meningkatkan skor PPH di Kalimantan Barat perlu peningkatan pada tiga pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan merupakan ketersediaan pangan yang berasal dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan, termasuk didalamnya bantuan pangan, apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Keterjangkauan pangan

menunjukkan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan menjamin kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri, berkelanjutan dan berbasis sumber daya lokal. Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan mendukung misi pertama ini melalui penetapan target Pola Pangan Harapan (PPH). Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Pada tahun 2023, Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat menargetkan Indeks Ketahanan Pangan Provinsi sebesar 59,04. Untuk mendukung pencapaian kinerja Pembangunan ini, Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menentukan sasaran strategis dan program strategis seperti terlihat pada tabel di bawah.

**Tabel 4.2**  
Sasaran dan Program Pangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS PD / PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR	TARGET	OPD
			2021	
Terjaminnya kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri dan berbasis sumber daya lokal		Skor Pola Pangan Harapan	81,27	DPPKH
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Indeks Ketersediaan Pangan Provinsi	79	DPPKH
2.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi Energi Penduduk	1.938	DPPKH
		Konsumsi Protein Penduduk	56,70	DPPKH
		Konsumsi Beras Penduduk	93,02	DPPKH
		Coefisient Varian (Cv) Harga Beras Di Tingkat Konsumen	5,00	DPPKH
		Penguatan Cadangan Pangan Provinsi	40,00	DPPKH
		Ketersediaan Energi	3.178	DPPKH
		Ketersediaan Protein	80,06	DPPKH
3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Tingkat Kerawanan Pangan	13,00	DPPKH
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	88,00	DPPKH

Misi mewujudkan Masyarakat Sejahtera bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang merata di Provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan pencapaian misi ini ditunjukkan dengan melalui beberapa indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi yang ditargetkan tumbuh sebesar 5,02 – 5,68 %, Gini Rasio ditargetkan menjadi 0,321 – 0,318, Jumlah Desa Mandiri menjadi 425, Angka Kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 7,08 - 7,00 % pada tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 5,53 - 4,29 % pada tahun 2023.

Pencapaian target ini akan dicapai dengan upaya pencapaian terget kinerja indikator sasaran yaitu:

- 1) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan pada tahun 2023 yang terdiri atas:
  - 1.1 Subsektor Peternakan antara 6,19 - 7,26;
  - 1.2 Subsektor Tanaman Pangan antara 4,39 - 5,20;
  - 1.3 Subsektor Tanaman Hortikultura antara 7,17 - 9,43;
  - 1.4 Subsektor Tanaman Perkebunan antara 6,45 - 9,67;
  - 1.5 Subsektor Perikanan antara 4,09 - 4,64;
- 2) Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan pada tahun 2023 yang terdiri atas:
  - a. NTP Peternakan sebesar 100;
  - b. NTP Tanaman Pangan sebesar 95,17;
  - c. NTP Tanaman Hortikultura sebesar 102,4;
  - d. NTP Perkebunan Rakyat sebesar 100;
  - e. NTP Perikanan sebesar 104.
- 3) Meningkatnya Laju Pertumbuhan Investasi pada tahun 2023 sebesar 3,5% dan Indeks kepuasan masyarakat dengan nilai A.

Untuk mendukung pencapaian kinerja Pembangunan diatas, telah ditentukan beberapa sasaran strategis perangkat daerah dan program strategis seperti terlihat pada tabel di bawah.

**Tabel 4.3**  
Sasaran dan Program Pertanian Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Sektoral  
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS PD / PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR	TARGET	OPD
			2023	
Meningkatnya produksi pangan hewani asal ternak, nilai tambah dan daya saing peternakan		Produksi Daging Hewani Asal Ternak (Ton)	78.417	DPPKH
		Produksi Telur (Ton)	37.549	DPPKH
		Persentase Daerah terkendali PHM/Zoonosa dan penyakit hewan eksotik lainnya	70,00	DPPKH
		Presentase Unit Usaha Produk Hewan yang menerapkan persyaratan teknis	30,00	DPPKH
1	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Jenis Penyakit Ternak/ Hewan Yang Dikendalikan	7	DPPKH
		Tingkat Keamanan Pangan Produk Hewan Dan Olahannya	85,0	DPPKH
2		Populasi Sapi	165.723	DPPKH

SASARAN STRATEGIS PD / PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR	TARGET	OPD
			2023	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Populasi Kambing	168.918	DPPKH
		Populasi Babi	566.879	DPPKH
		Populasi Ayam Buras	6.399.015	DPPKH
		Populasi Ayam Ras Petelur	2.462.101	DPPKH
		Populasi Ayam Ras Pedaging	8.926.057	DPPKH
		Populasi Itik/ Itik Manila	604.663	DPPKH
		Persentase Pakan Yang Memenuhi Standar Mutu	80,0	DPPKH
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jenis Kawasan Peternakan yang ditumbuh kembangkan	2	DPPKH
4	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanggulangan Hewan Terdampak Bencana	60	DPPKH
<b>Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>		<b>Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura</b>	<b>1.650.880</b>	<b>DPTPH</b>
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peredaran Pestisida Yang Kadaluarsa, Palsu dan Ilegal	30,00	DPTPH
		Persentase Peningkatan Produksi Benih Sumber Tanaman Pangan	10,00	DPTPH
		Produktivitas Padi	31,03	DPTPH
		Persentase Luas Panen Tanaman Pangan	97,57	DPTPH
		Persentase Peningkatan Luas Panen Hortikultura	2	DPTPH
		Persentase Peningkatan Benih Tanaman Pangan Yang Diawasi	6,5	DPTPH
		Persentase Peningkatan Benih Hortikultura Yang Diawasi	6,5	DPTPH
		Persentase Peningkatan Produksi Benih Sumber Hortikultura Bermutu	3,5	DPTPH
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Luas Lahan Sawah Ditanami 2x	1,79	DPTPH
		Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Melalui Pengembangan Komoditas	2,00	DPTPH
		Angka Produktivitas Benih Sumber Tanaman Padi (Ku/Ha)	22,4	DPTPH
3	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim	3,12	DPTPH

SASARAN STRATEGIS PD / PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR	TARGET 2023	OPD
<b>Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan</b>		<b>Jumlah produksi perkebunan (Ton)</b>	<b>3.841.481</b>	DISBUN
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat	1.450.736	DISBUN
		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan Yang Disertifikasi	1.000.000	DISBUN
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tingkat Produktivitas Perkebunan Rakyat	1.690	DISBUN
3	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penurunan Luas Serangan Organisme Pengganggu Tanaman Komoditi Perkebunan	0,5	DISBUN
		Penurunan Luas Lahan Perkebunan yang mengalami Dampak Perubahan Iklim	1.500	DISBUN

**Tabel 4.4**

Sasaran dan Program Perikanan Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS PD / PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR	TARGET 2023	OPD
<b>Meningkatnya produksi perikanan</b>		<b>Jumlah produksi perikanan (Ton)</b>	<b>245.253</b>	<b>DKP</b>
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	166.464	DKP
		Produksi Perikanan Yang Didaratkan Di Pelabuhan Perikanan (Ton)	4.900	DKP
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	78.789	DKP
		Produksi Benih/ Benur Unggul Komoditas Ikan Air Payau dan Laut (ekor)	4.764.375	DKP

**Tabel 4.5**

Sasaran dan Program Kehutanan pendukung pertumbuhan ekonomi sektoral Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS PD / PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR	TARGET 2023	OPD
<b>Meningkatnya Produksi Hasil Hutan</b>		<b>Produksi Hasil Hutan (m3)</b>	<b>1.200.000</b>	<b>DLHK</b>
1	Program Pengelolaan Hutan	Rencana Tata Hutan KPH	26 unit	DLHK
		Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	1.960.000	DLHK
		Lahan kritis yang direhabilitasi	1000 ha	DLHK
		Perlindungan pada HP dan HL	5 kab	DLHK
		Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu	1	DLHK

SASARAN STRATEGIS PD / PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR	TARGET	OPD
			2023	
		Industri pengolahan hasil hutan kapasitas <6.000 m3 yang beroperasi	54	DLHK
		Penyediaan Perbenihan Tanaman Hutan	2 unit	DLHK
2	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Petugas pelaksana penyuluh kehutanan yang meningkatnya Kapasitas	26,00	DLHK

**Tabel 4.6**  
Sasaran dan Program Pertanian pendukung NTP Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS PD / PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR	TARGET	OPD
			2023	
<b>Meningkatnya pendapatan peternak</b>		<b>Indeks Harga yang diterima Peternak</b>	<b>101,30</b>	<b>DPPKH</b>
1	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan Berizin	60	DPPKH
2	Program Penyuluhan Pertanian	Jenis Teknologi Pengembangan Peternakan Yang Didiseminasi ke Kelompok Ternak	2	DPPKH
<b>Meningkatnya pendapatan petani padi dan palawija</b>		<b>Indeks Harga yang diterima Petani Padi dan Palawija</b>	<b>102,39</b>	<b>DPTPH</b>
1	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Peningkatan Pertimbangan Teknis untuk Usaha Pertanian yang Diterbitkan	10,0	DPTPH
2	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penggunaan Benih Bermutu	2,0	DPTPH
		Jumlah Kelembagaan Pertanian (Unit)	185	DPTPH
		Persentase Peningkatan Kelompok Tani Kelas Lanjut	10	DPTPH
		Persentase Peserta Diklat Pertanian Dengan Kategori Baik	70	DPTPH
<b>Meningkatnya pendapatan pekebun</b>		<b>Indeks harga yang diterima petani (Nilai)</b>	<b>123,21</b>	<b>DISBUN</b>
1	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Pertimbangan Teknis yang diberikan	25	DISBUN
2	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Usaha Komoditi Perkebunan yang terfasilitasi Kelembagaannya	84	DISBUN

**Tabel 4.7**

Sasaran dan Program Perikanan pendukung NTP Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS PD / PROGRAM PEMBANGUNAN		INDIKATOR	TARGET	OPD
			2023	
Meningkatnya Indeks Harga yang diterima oleh Nelayan dan/atau Pembudidaya ikan		Indeks Harga yang diterima oleh Nelayan dan/atau Pembudidaya ikan	124,00	DKP
1	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Kawasan Ruang Laut Dan Konservasi Yang Dikelola	40	DKP
		Persentase Desa Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil Yang Di Berdayakan	30	DKP
2	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan dan per undang-undangan yang berlaku	60,0	DKP
3	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi olahan hasil perikanan (ton)	16.358	DKP
		Jumlah layanan uji mutu hasil perikanan yang diberikan kepada unit pengolahan ikan dan masyarakat	355	DKP

#### 4.2.5 Mewujudkan Masyarakat yang Tertib

Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib pada prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023, maka upaya pencapaian target kinerja indikator sasaran dapat berupa:

- 1) Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana.  
 Dalam rangka mewujudkan meningkatkan Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana prioritas pembangunan diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas daerah rawan bencana melalui pembentukan POKMAS/ DESTANA di daerah rawan bencana serta peningkatan kapasitas personil yang dilatih/ diberi pengetahuan, kajian resiko bencana pada daerah rawan bencana, rencana penanggulangan bencana, fasilitasi pembentukan TRC pada kabupaten/ kota dengan indeks Resiko Bencana Tinggi, serta penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 2) Penanganan Kedaruratan dan Pendistribusian Logistik Pada Daerah Terkena Bencana.  
 Dalam rangka meningkatkan penanganan kedaruratan dan pendistribusian logistik pada daerah terkena bencana prioritas pembangunan diarahkan pada upaya penyediaan logistik dan penanganan bencana yang terjadi.
- 3) Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.  
 Dalam rangka meningkatkan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana prioritas pembangunan diarahkan pada upaya inventarisasi kerugian pasca bencana dan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

#### 4.2.6 Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Dalam rangka menurunkan luas Kerusakan Kawasan Hutan dan lahan prioritas pembangunan diarahkan pada upaya peningkatan ekonomi masyarakat dalam dan sekitar hutan melalui pemanfaatan potensi hutan dan lahan, peningkatan tutupan hutan dan lahan pada hutan dan lahan kritis, fasilitasi pembangunan areal konservasi pada kegiatan usaha berbasis lahan, penyelamatan hutan pada areal penggunaan lain dengan tingkat konservasi tinggi (gambut lidung dan kubah gambut), areal berhutan di APL pada sepanjang sempadan sungai/ lahan dengan kemiringan curam, habitat satwa khas Kalimantan Barat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pengelolaan hutan tembang, pembangunan hutan rakyat / hutan adat.

Misi mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib, dan berkelanjutan yang ditandai dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut telah ditetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah, dimana pada tahun 2023 ditargetkan 66,80. Pencapaian target ini akan dicapai dengan upaya pencapaian target kinerja indikator sasaran yaitu menurunnya luas Kerusakan Kawasan Hutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan indikator Indeks Tutupan Kualitas Lahan sebesar 64,483. Untuk mencapai target tersebut perlu dilakukan Percepatan Pembangunan Infrastruktur sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas air dan udara melalui pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) serta dalam kajian dampak lingkungan, peningkatan pelayanan penyelesaian kasus dan sengketa lingkungan, meningkatkan pembinaan kepada dunia usaha dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), pengendalian pencemaran air dan udara, meningkatkan peran masyarakat/kelompok masyarakat, sekolah dan swasta untuk menjaga kualitas lingkungan hidup serta meningkatkan kualitas air, udara dan menurunkan emisi gas rumah kaca.
2. Meningkatkan kualitas tutupan lahan melalui perlindungan hutan dan penegakan hukum di bidang kehutanan, perlindungan areal berhutan di Areal Penggunaan Lain (APL), pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), perlindungan ekosistem Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan mangrove, rehabilitasi lahan kritis baik yang berada didalam dan diluar Kawasan hutan, serta pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
3. Dalam rangka mendorong peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup tersebut pada tahun 2023 akan dilaksanakan penetapan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014-2034 serta melanjutkan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang didukung oleh Forum Penataan Ruang dan Sistem Informasi Penataan Ruang.

## BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota merupakan pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang menjadi panduan arah kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota di tahun 2023.

Sejalan dengan fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas manusia yang diukur melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, maka arah kebijakan pembangunan di tingkatan Kabupaten/Kota diarahkan pada fokus yang sama dengan didasari atas pencapaian target kinerja makro pembangunan yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi sebagai basis perhitungan diikuti dengan indikator IPM, Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Secara lebih jelas arah kebijakan kewilayahan tahun 2023 dirinci dalam aspek pencapaian indikator makro pembangunan sebagai berikut.

### 5.1. Arah Kebijakan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan hasil dari pembangunan yang telah dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian LPE kabupaten/kota tahun 2021 dibandingkan capaian tahun 2020, maka capaian LPE kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1**  
Kategori Capaian LPE Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
1	2	3
I		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE LEBIH RENDAH dan PERUBAHAN LPE (2020-2021) LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
II		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE dan PERUBAHAN LPE (2020-2021) LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
III		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE dan PERUBAHAN LPE (2020-2021) LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE LEBIH TINGGI dan PERUBAHAN LPE (2020-2021) LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi

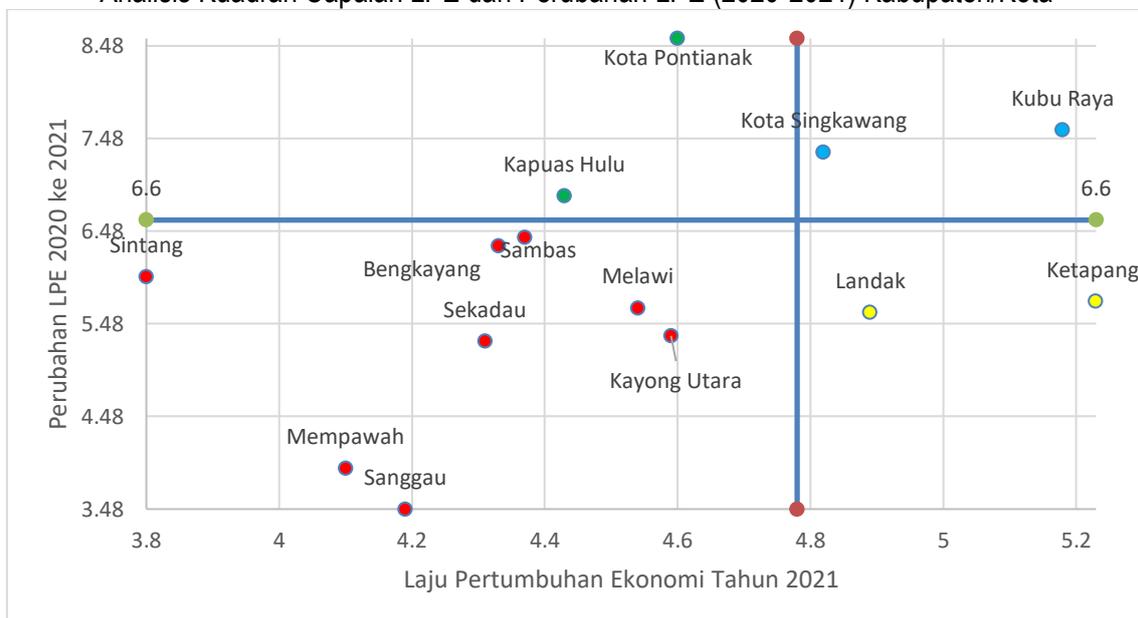
Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Barat. 2022

1. Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian LPE lebih rendah dan perubahan LPE (2020-2021) lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kapuas Hulu dan Kota Pontianak.

2. Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan perubahan LPE (2020-2021) lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang.
3. Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 8 (delapan) kabupaten dengan capaian LPE dan perubahan LPE (2020-2021) lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Sintang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Kayong Utara.
4. Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian LPE lebih tinggi dan perubahan LPE (2020-2021) lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Landak dan Kabupaten Ketapang.

**Gambar 5.1**

Analisis Kuadran Capaian LPE dan Perubahan LPE (2020-2021) Kabupaten/Kota



Sumber: BPS, diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, 2022

Berdasarkan capaian tahun 2021 tersebut maka pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat ditargetkan tumbuh sebesar 5,02% - 5,68%. Guna mencapai target tersebut maka arah kebijakan pembangunan di bidang perekonomian bagi kabupaten/kota diarahkan pada pengembangan potensi perekonomian berbasis sumber daya alam, industri dan perdagangan.

Peningkatan produktivitas sektor unggulan baik di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan sawit, kelapa dan karet serta pengolahan hasil pertambangan yang menjadi basis pertumbuhan bagi hampir sebagian besar Kabupaten di Kalimantan Barat diarahkan selain untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah juga untuk meningkatkan kinerja ekspor baik antar pulau maupun ekspor luar negeri. Beroperasinya Pelabuhan Internasional Kijing sebagai salah satu pintu ekspor di Kalimantan Barat diharapkan mampu mendukung peningkatan ekspor terhadap komoditi unggulan di Kalimantan Barat.

Selain peningkatan produktivitas dari komoditi unggulan, arah kebijakan di bidang perekonomian bagi kabupaten/kota juga diarahkan pada pengembangan potensi pariwisata khususnya pada daerah destinasi prioritas Sambas-Singkawang. Operasionalisasi Kawasan

perbatasan aruk diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisatawan untuk daerah destinasi prioritas Sambas-Singkawang yang juga menjadi salah satu lokasi prioritas dalam RKP Tahun 2023 di tingkatan pusat pada tahun 2023.

Disisi lain penataan kawasan perkotaan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 ke depan juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kunjungan ke Kalimantan Barat baik melalui pintu perbatasan antar negara, Bandar Udara dan Pelabuhan Laut.

## 5.2. Arah Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM kabupaten/kota tahun 2021 dibandingkan capaian tahun 2020, maka capaian IPM kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

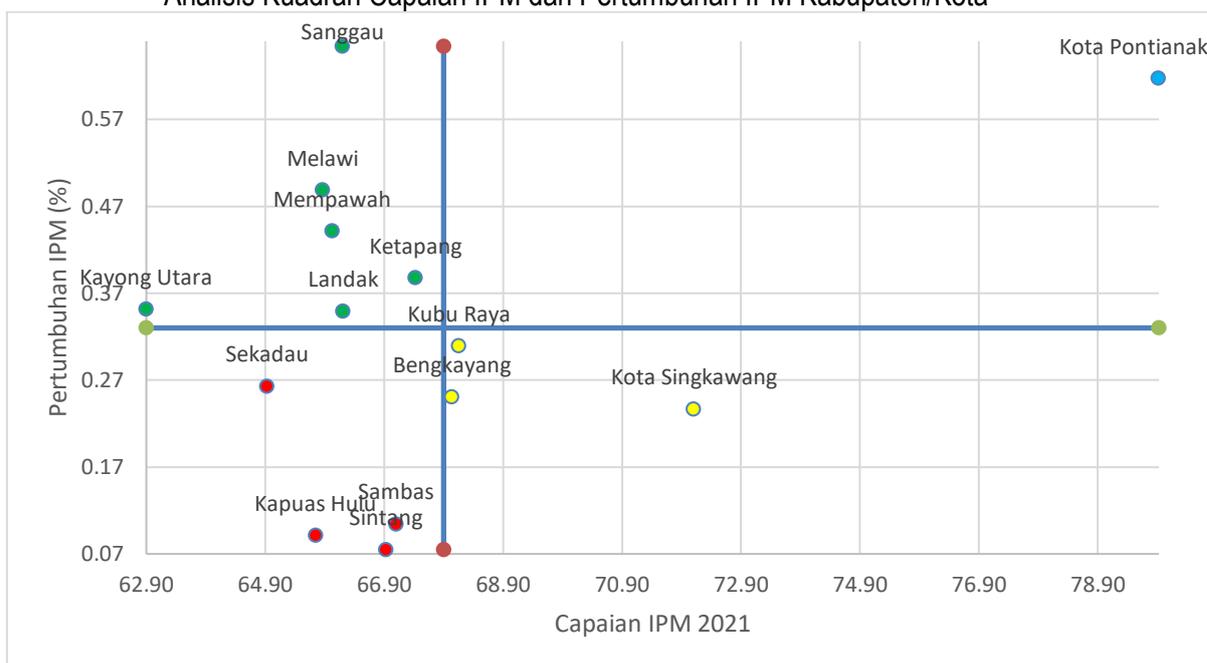
**Tabel 5.2**  
Kategori Capaian IPM Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
1	2	3
I		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM LEBIH RENDAH dan Laju Pertumbuhan IPM LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
II		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
III		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM LEBIH TINGGI dan Laju Pertumbuhan IPM LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Barat. 2022

1. Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten dengan capaian IPM lebih rendah dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Kayong Utara.
2. Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kota tersebut adalah Kota Pontianak.
3. Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian IPM lebih tinggi dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Bengkayang.

**Gambar 5.2**  
Analisis Kuadran Capaian IPM dan Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota



Sumber: BPS, diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, 2022

Pada tahun 2021, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. Capaian IPM kabupaten/kota berkisar antara 62,90 (Kabupaten Kayong Utara) hingga 79,93 (Kota Pontianak). Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan status capaian pembangunan manusia kabupaten/kota satu dan lainnya. Berdasarkan statusnya, terdapat 2 (dua) kota dengan status IPM “Sangat Tinggi”, dan 12 (dua belas) kabupaten dengan status IPM “Sedang”.

Dalam rangka menurunkan kesenjangan dan mewujudkan pemerataan pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, upaya akselerasi dan pembagian peran dalam pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota disusun yang meliputi antara lain sebagaimana dijelaskan pada tabel 5.3 berikut:

**Tabel 5.3**  
Pembagian Peran dalam Peningkatan IPM di Kalimantan Barat

No	Strategi	Arah Kebijakan	Stakeholder	Peran
1	2	3	4	5
1.	Menurunkan tingkat kematian Ibu dan Anak, serta Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting	Penguatan Fasilitas Kesehatan	Provinsi	Meningkatkan kualitas layanan rujukan tingkat provinsi
			Kabupaten/Kota	Meningkatkan keterjangkauan Faskes hingga tingkat desa
		Meningkatkan cakupan imunisasi dan pelayanan KB	Provinsi	Memastikan ketersediaan dan distribusi stock vaksin dan obat-obatan
			Kabupaten/Kota	Menyediakan data dan mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam

No	Strategi	Arah Kebijakan	Stakeholder	Peran	
1	2	3	4	5	
		Pemenuhan Kebutuhan Gizi	Provinsi	program imunisasi dan pelayanan KB	
			Kabupaten/Kota	Ketersediaan Stok Makanan Pendamping Bagi ibu Hamil	
		Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi	Provinsi	Mendorong ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan	
			Kabupaten/Kota	Penyediaan akses terhadap air bersih dan sanitasi skala provinsi	
	Meningkatkan Jangkauan Perlindungan Sosial	Perlindungan sosial bagi Lansia	Provinsi	Penyediaan akses terhadap air bersih dan sanitasi skala Kab Kota	
			Kabupaten/Kota	Penyediaan layanan di dalam Panti	
	2.	Meningkatkan rata-rata lama sekolah tingkat pendidikan tinggi (usia 19 - 24 tahun)	Pemberian Bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu di level perguruan tinggi	Provinsi	Penyediaan layanan di luar Panti
				Kabupaten/Kota	Pembayaran Biaya Pendidikan
Meningkatkan harapan lama sekolah melalui peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi lokal			Provinsi dan Kabupaten/Kota	Bantuan Biaya Hidup (Penyediaan Asrama Kab/Kota)	
			Penguatan PKBM sebagai fasilitator Pendidikan Non Formal	Provinsi	Kerjasama dengan perguruan tinggi di kab/kota atau wilayah terdekat jika belum tersedia.
Kabupaten/Kota				Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Paket Penyetaraan, fasilitasi kerjasama dengan lembaga nirlaba	
3.	Peningkatan produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Pengendalian Harga	Provinsi	mendorong partisipasi masyarakat (umur 25 th keatas) mengikuti paket penyetaraan	
			Kabupaten/Kota	menyediakan aksesibilitas dengan peningkatan kondisi jalan mantap provinsi	
				menyediakan informasi harga kebutuhan pokok real time per hari.	

No	Strategi	Arah Kebijakan	Stakeholder	Peran
1	2	3	4	5
		Menjaga ketersediaan bahan pangan	Provinsi	Memastikan Ketersediaan Cadangan Pangan
			Kabupaten/Kota	Koordinasi penyediaan bangunan penyimpan cadangan pangan di daerah
		Penyerapan Tenaga kerja Lokal melalui pola padat karya	Provinsi	mendorong pelaksanaan paket pekerjaan fisik APBD Prov melalui skema padat karya
			Kabupaten/Kota	mendorong pelaksanaan paket pekerjaan fisik APBD Kab/Kota melalui skema padat karya
		Nilai Tukar Petani	Provinsi	Menurunkan biaya produksi petani
			Kabupaten/Kota	Menetapkan kebijakan pemanfaatan hasil petani
		Peningkatan produktivitas sektor unggulan	Provinsi	Meningkatkan produksi sektor unggulan
			Kabupaten/Kota	memastikan ketersediaan lahan dan mencegah alih fungsi lahan produktif

### 5.3. Arah Kebijakan Penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota

Persentase penduduk miskin menunjukkan kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita perbulan berada dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2021 dibandingkan capaian tahun 2020, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4**  
Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota

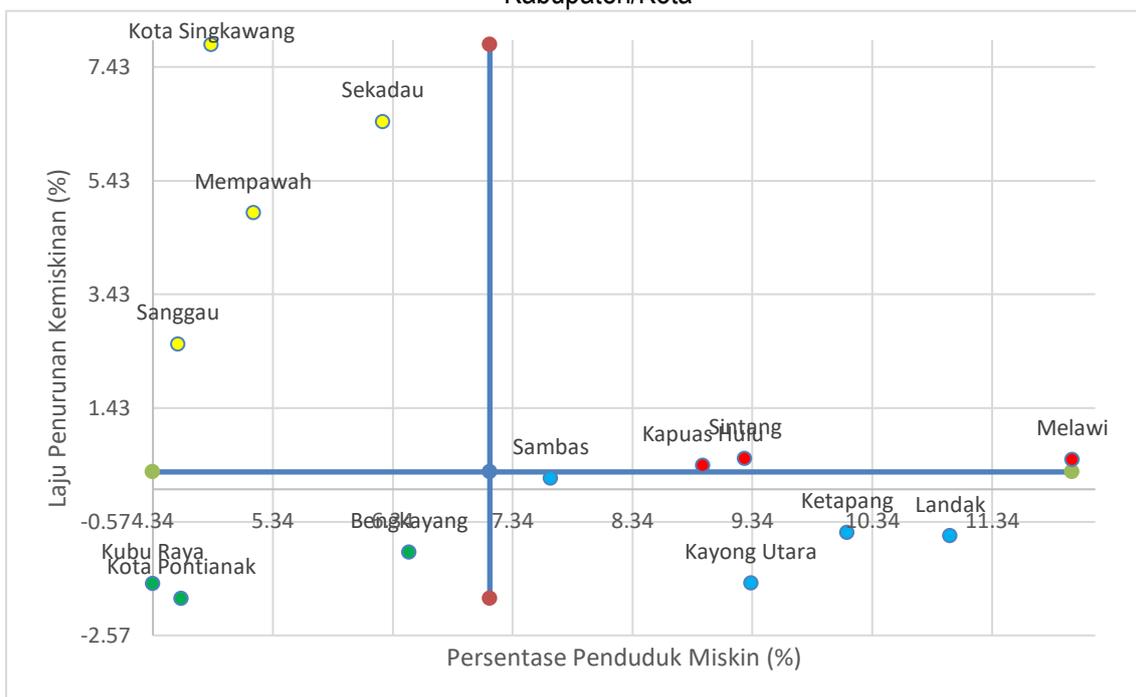
Kuadran	Simbol	Interpretasi
1	2	3
I		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin LEBIH RENDAH dan Laju Penurunan LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
II		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
III		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin LEBIH TINGGI dan Laju Penurunan LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Barat. 2022

1. Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih rendah dan Laju Penurunan Kemiskinan lebih tinggi (kemiskinan turun) dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Bengkayang.
2. Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan Kemiskinan lebih tinggi (kemiskinan turun) dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Sambas, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Landak.
3. Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan Kemiskinan lebih rendah (peningkatan persentase penduduk miskin) dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut Kota Singkawang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Sanggau.
4. Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih tinggi dan Laju Penurunan lebih rendah (peningkatan persentase penduduk miskin) dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.

**Gambar 5.3**

Analisis Kuadran Capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan Kemiskinan Kabupaten/Kota



Sumber: BPS, diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, 2022

Persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan perkembangan yang positif dengan tren konsisten menurun. Namun demikian permasalahan kemiskinan masih dialami oleh sejumlah kabupaten/kota dimana tingkat kemiskinan masih lebih tinggi dan laju penurunan kemiskinan yang lebih rendah dibanding provinsi. Permasalahan kemiskinan umumnya dialami oleh kabupaten dengan karakteristik wilayah didominasi perdesaan. Untuk itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat fokus mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program desa

mandiri dengan berkolaborasi dengan TNI/Polri. Selain itu meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan juga harus terus dilakukan. Disisi lain Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan terus berupaya mengoptimalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan dengan selalu melakukan pemutakhiran terhadap DTKS agar seluruh bantuan dalam kerangka program penanggulangan kemiskinan dapat dialokasikan tetap sasaran.

#### 5.4. Arah Kebijakan Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan jumlah pengangguran dalam angkatan kerja. Angka TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2021 dibandingkan capaian tahun 2020, maka capaian kinerja TPT kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 5.5**  
Kategori Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota

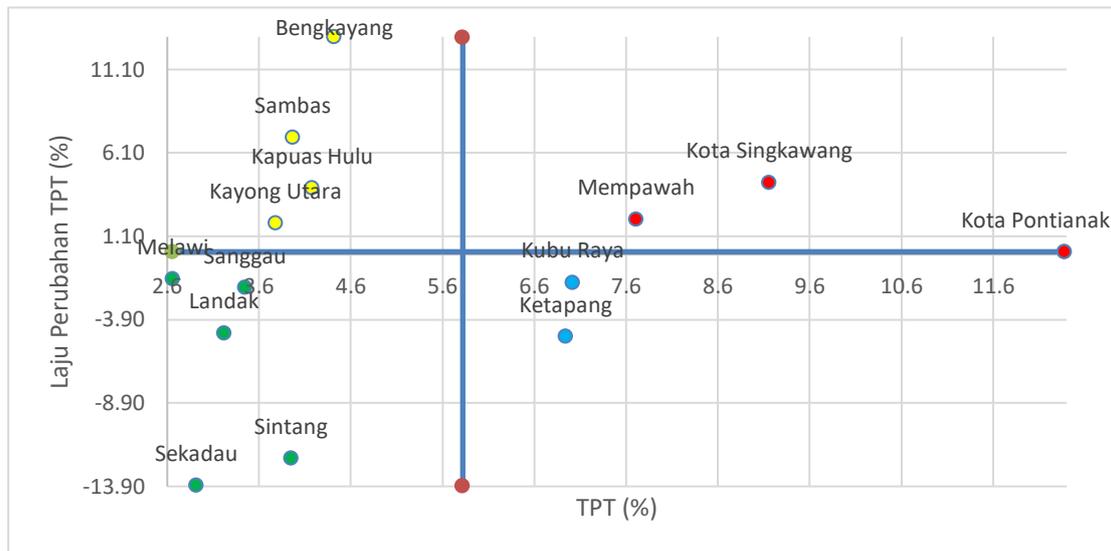
Kuadran	Simbol	Interpretasi
1	2	3
I		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT dan Laju Perubahan TPT LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
II		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT LEBIH TINGGI dan Laju Perubahan TPT LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
III		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT LEBIH RENDAH dan Laju Perubahan TPT LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT dan Laju Perubahan TPT LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Barat. 2022

1. Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten dengan capaian TPT dan Laju Perubahan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Melawi, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau.
2. Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Ketapang.
3. Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT di atas capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Kayong Utara.
4. Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT di atas capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Singkawang, Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah.

**Gambar 5.4**

Analisis Kuadran Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka dan Laju Perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota



Sumber: BPS, diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, 2022

Pada umumnya, permasalahan masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat disebabkan oleh tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang belum diringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Daya serap pasar tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang ada. Upaya penurunan tingkat pengangguran harus terus diupayakan setiap kabupaten/kota dengan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor juga dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing sehingga angkatan kerja dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja. Pemanfaatan pusat sertifikasi tenaga kerja yang baru selesai dibangun di Kota Pontianak dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kompetensi angkatan kerja sehingga dapat terwujud kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten yang akan menjadikan Kalimantan Barat sebagai provinsi yang berdaya saing tinggi.

## **BAB VI**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan daerah berdasarkan prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Fokus pembangunan di Tahun 2023 diarahkan guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat yang diukur dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Sejalan dengan itu program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun diarahkan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat serta meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar dan peningkatan produktivitas masyarakat. Adapun rencana kerja dan pendanaan daerah tertuang sebagaimana tabel 6.1 berikut:

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.623.007.250.888							308.004.254.498				
1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu	Persen	100	Persen	85 Persen	649.038.143.588						85 Persen	16.204.701.480			
1	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu	Persen	100	Persen	85 Persen	427.184.100					85 Persen	1.285.870.960			
1	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	70.357.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	2 Dokumen	81.559.170	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	28.018.300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	37.446.750	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22.971.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	31.538.760	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22.691.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	32.326.580	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.635.700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	34.109.900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	8 laporan	64.268.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	4 laporan	293.389.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108 Laporan	36 Laporan	36 laporan	42 laporan	193.241.300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	36 laporan	775.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Laporan	1 Laporan	Laporan	1 Laporan	640.365.940.061	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	1.039.965.520	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	639.497.109.661	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	6250 Orang/ Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	420 Dokumen	140 Dokumen	140 Dokumen	140 Dokumen	31.573.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	38.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	679.260.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	4 Dokumen	732.930.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	54.123.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	4 Dokumen	59.535.520	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Dokumen	1 laporan	1 laporan	1 laporan	8.873.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	1 laporan	38.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	16.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	80.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	18 laporan	88.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100 persen	Persen	85 Persen	758.339.900					85 Persen	1.235.850.000		
1	1	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150 Dokumen	267.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	385.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	197.485.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	1 laporan	92.400.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	293.354.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	2 laporan	66.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	1.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur	Persen	100	Persen	85 Persen	608.351.700					85 Persen	782.320.000		
1	1	1	1.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	62.263.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	3 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	1.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1300 orang	400 Orang	450 Dokumen	456 Dokumen	355.251.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	Aparatur di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	450 Dokumen	330.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	1.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	10 Orang	10 Orang	18 Orang	100.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	10 Orang	66.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	1.1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45 orang	15 Orang	15 Orang	100 Orang	90.836.300	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	15 Orang	66.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan barang	Persen	100 persen	Persen	85 Persen	2.529.828.300					85 Persen	3.992.945.000		
1	1	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	1 Paket	1 Paket	6 Paket	65.983.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket	93.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	1 Paket	1 Paket	12 Paket	207.748.100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket	330.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	1 Paket	1 Paket	8 Paket	69.734.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket	330.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	1 Paket	1 Paket	33 Paket	60.000.000	Semua Kecamatan,		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket	132.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1	1	1	1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	1 Paket	1 Paket	6 Paket	128,917,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket	75,075,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	1	6	Penyediaan Bahan Bacan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	12,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	27,720,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	1	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	1 laporan	34,650,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	1	9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	1,863,778,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	3 laporan	2,915,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	37,710,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	55,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	23,956,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	1	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas	Persen	100 persen	Persen	85 Persen	740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,					85 Persen	2,486,000,000	
1	1	1	1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	1 unit	1 unit	2 unit	740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	1 unit	220,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
													Dana Insentif Daerah						
1	1	1	1	1	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100 persen	Persen	85 Persen	3,344,311,416					85 Persen	4,288,900,000	
1	1	1	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan	1 laporan	1 laporan	460 berkas	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	1 laporan	92,400,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	714,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	775,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21 laporan	7 laporan	7 laporan	1 laporan	2,569,811,416	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	7 laporan	3,421,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	1	1	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen	100 persen	Persen	85 Persen	1,003,448,111					85 Persen	1,092,850,000	
1	1	1	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	6 unit	2 Unit	2 Unit	4 Unit	43,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	2 Unit	47,850,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit	305,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	1 unit	335,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	2 Paket	2 Paket	1 unit	444,948,111	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	2 Paket	440,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit	3 unit	3 unit	5 unit	210,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	3 unit	49,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
						Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ Paket C	Persen	85.21	Persen	81.98 Persen	973,751,561,300						81.98 Persen	290,507,053,018	
						Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ Paket C	Persen	51.77	Persen	60.58 Persen							60.58 Persen		
						Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/ Paket C	Persen	69.38	Persen	60.58 Persen							60.58 Persen		
						Angka Putus Sekolah SMA/SMK	Persen	0.07	Persen	0.4 Persen							0.4 Persen		
						Persentase sekolah SMA/SMK yang terakreditasi	Persen	73.84	Persen	97.22 Persen							97.22 Persen		
						Skor Mutu Pendidikan SMA	Persen	5.26	Persen	5.95 Persen							5.95 Persen		
						Skor Mutu Pendidikan SMK	Persen		Persen	5.72 Persen							5.72 Persen		
1	1	2	1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase ketersediaan sarana pendidikan Menengah Atas	Persen	84,2 persen	Persen	85 Persen	567,531,874,261						85 Persen	171,138,367,115	
1	1	2	1	1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	7 sekolah	3 sekolah	2 Unit	18 Unit	50,124,638,316	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	0 Unit	4,400,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	2	1	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	48 Ruang	38 Ruang	5 Ruang	40 Ruang	23,790,728,447	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	5 Ruang	1,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	1	2	1	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	46 ruang	8 Ruang	19 Ruang	19 Ruang	4,588,412,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	19 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	2	1	4	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	39 ruang	9 Ruang	15 Ruang	10 Ruang	3,517,036,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	15 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	2	1	5	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	58 ruang	12 Ruang	23 Ruang	18 Ruang	5,024,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	23 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	2	1	6	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	79 ruang	19 Ruang	30 Ruang	25 Ruang	3,989,808,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	30 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	2	1	7	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	21 ruang	5 Ruang	8 Ruang	3 Ruang	912,228,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	8 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	2	1	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	30 ruang	6 Ruang	12 Ruang	10 Ruang	3,446,246,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	12 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	2	1	11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 ruang	1 Ruang	2 Ruang	1 Ruang	382,954,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	2 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	2	1	13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	3 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2,714,168,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	1 Unit	638,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
													Dana Insentif Daerah						
1	1	2	1	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	43 Unit	83 Paket	2 Unit	31 Unit	15,911,949,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	2 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						

1	1	2	1	17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	13 unit	3 Unit	5 Unit	3 Unit	3.142,016,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	5 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	1	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	353 ruang	173 Ruang	90 Ruang	180 Ruang	16,975,091,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	90 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	1	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	32 ruang	12 Ruang	10 Ruang	8 Ruang	3.519,405,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	10 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	1	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 ruang	1 Ruang	3 Ruang	2 Ruang	970,081,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	3 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	1	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 ruang	1 Ruang	3 Ruang	1 Ruang	1,697,696,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	3 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	1	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 ruang	2 Ruang	3 Ruang	1 Ruang	470,764,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	3 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	1	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 ruang	1 Ruang	0 Ruang	7 Ruang	1,539,774,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	0 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3 Ruang							3 Ruang		
1	1	2	1	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	8 unit	2 Ruang	3 Unit	6 Unit	9,913,923,237	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	3 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	1	2	1	34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi	5 unit	1 Ruang	4 Unit	1 Unit	789,770,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	4 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	1	36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	14360 paket	9.360 set	2500 Paket	8000 Paket	14,700,027,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	2500 Paket	4,437,475,460	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1	1	2	1	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100%	13567 Paket	10506 Paket	13567 Paket	9,000,242,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	10506 Paket	9,823,110,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	1	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	98%	100,593 siswa	134595 Peserta Didik	134594 Peserta Didik	124,323,679,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	134595 Peserta Didik	133,248,307,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	1	46	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	606 paket	6 Paket	300 Paket	10 Paket	6,990,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	300 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
												Dana Insentif Daerah						
1	1	2	1	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1592 orang	532 orang	530 Orang	270 orang	11,511,458,361	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	530 Orang	13,443,799,205	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	1	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1250 orang	50 Orang	600 orang	55 orang	200,968,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	600 orang	2,626,061,020	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	1	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 persen	2 Aplikasi	20 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	5,134,802,200	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	20 Satuan Pendidikan	1,069,613,930	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	1	2	1	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	98%	Negeri : 268 Sekolah, Swasta 276 Sekolah	270 Satuan Pendidikan	442 Satuan Pendidikan	242,163,570,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	270 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	1	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	100 %	262 orang	210 Orang	296 orang	86,008,400	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	SMA di Kalimantan Barat	210 Orang	352,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase ketersediaan sarana pendidikan Menengah kejuruan	Persen	100 persen	85 Persen	85 Persen	382,869,803,840	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,				85 Persen	111,817,995,285	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	1	1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	9 unit	1 Unit	4 Unit	7 Unit	20,680,642,857	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas SDM	SMK di Kalimantan Barat	4 Unit	4,400,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1	1	2	1	2	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	41 unit	1 Unit	20 ruang	16 ruang	36,542,791,429	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas SDM	SMK di Kalimantan Barat	20 ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	1	2	1	4	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	68 ruang	18 Ruang	25 Ruang	25 Ruang	36,770,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatnya Kualitas SDM	SMK di Kalimantan Barat	25 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	1	5	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	87 ruang	29 Ruang	29 Ruang	29 Ruang	15,066,000,000	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatnya Kualitas SDM	SMK di Kalimantan Barat	29 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	1	6	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	25 ruang	13 ruang	6 Ruang	6 Ruang	1,080,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatnya Kualitas SDM	SMK di Kalimantan Barat	6 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	1	7	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	15 ruang	5 ruang	5 Ruang	5 Ruang	3,780,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatnya Kualitas SDM	SMK di Kalimantan Barat	5 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	1	9	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	7 unit	1 unit	3 Unit	3 Unit	508,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Insentif Daerah	Meningkatnya Kualitas SDM	SMK di Kalimantan Barat	3 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	1	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	28 unit	26 Paket	1 Unit	1 Unit	7,035,212,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas SDM	SMK di Kalimantan Barat	1 Unit	220,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	1	2	1	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	42 ruang	20 Ruang	11 Ruang	24 Ruang	2,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatnya Kualitas SDM	SMK di Kalimantan Barat	11 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



1	1	3	1	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Peserta Workshop Inovasi Akademik Model Pembelajaran : 85 orang, Jumlah Peserta Review Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal : 120 orang, Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum Menengah : 120	Jumlah Peserta Workshop Inovasi Akademik Model Pembelajaran : 85 orang, Jumlah Peserta Review Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal : 120 orang, Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum Menengah : 120	120 Orang	350 Orang	40,187,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	120 Orang	715,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	1	3	1		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan		refocusing			33,268,700					220,000,000				
1	1	3	1	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	48 Orang	-	46 Orang	48 Orang	33,268,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	46 Orang	220,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru bersertifikat pendidik	Rasio	72	1 : 6 Rasio	1 : 6 Rasio	94,090,000				1 : 6 Rasio	209,000,000			
						Rasio guru terhadap siswa SLB	Rasio	1 : 7	1 : 17 Rasio	1 : 17 Rasio					1 : 17 Rasio				
						Rasio guru terhadap siswa SMA/SMK	Rasio	1 : 17 Rasio	1 : 18	1 : 17 Rasio	1 : 17 Rasio				1 : 17 Rasio				
1	1	4	1		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Persentase ketersediaan guru Sekolah Menengah Atas	Persen	refocusing	85 Persen	85 Persen	94,090,000				85 Persen	209,000,000			
1	1	4	1	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	144 Dokumen	0 dokumen	49 Dokumen	48 Dokumen	94,090,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Kalimantan Barat	49 Dokumen	209,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	persentase pengajuan sekolah baru yang diproses	100 %	100 persen	100 %	100 %	50,000,000				100 %	148,500,000			
1	1	5	1		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Dieleenggarakan oleh Masyarakat	persentase pengajuan sekolah baru yang diproses	Persen	100 persen	85 Persen	85 Persen	50,000,000				85 Persen	148,500,000			
1	1	5	1	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Dieleenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Dieleenggarakan oleh Masyarakat	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	0	14 Dokumen	110,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						5,925,000,100					4,272,658,500			
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah warisan budaya benda dan tak benda yang di agrestasi	25 Bh	100 persen	5 Bh	5 Bh	5,625,000,100				5 Bh	3,589,300,000			
2	22	2	1		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelaksana Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang terlindungi	buah	refocusing	5 buah	5 buah	400,000,100				5 buah	1,677,500,000			
2	22	2	1	1	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	6 Objek	-	2 Objek	2 Objek	400,000,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	0	15 Objek	1,017,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	2	1		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang terbina	buah	100 persen	1 buah	1 buah	5,225,000,000				2 buah	811,800,000			
2	22	2	1	1	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	15 Objek	5 Objek	5 Objek	5 Objek	5,225,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	0	15 Objek	522,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentasi Objek Cagar Budaya yang di Petakan	Persen	100 persen	7.8 Persen	7.8 Persen	300,000,000				7.8 Persen	683,358,500			
2	22	5	1		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang di petakan	Objek	100 persen	131 Objek	131 Objek	300,000,000				131 Objek	683,358,500			
2	22	5	1	1	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Petakan	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 Lokasi	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya Kualitas SDM	Objek Cagar Budaya	131 Objek	440,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	5	1	4	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelesteri Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	135 Objek	45 Objek	45 Objek	45 Objek	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya Kualitas SDM	Objek Cagar Budaya	45 Objek	243,358,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						2,162,562,800					2,013,188,364			
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						2,162,562,800					2,013,188,364			
1	1	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15,321,900					36,447,950			
1	1	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	3,765,000				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	9,900,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	8,314,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	17,256,140	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	1 Laporan	3,242,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Laporan	9,291,810	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						115,403,600					641,095,200			
1	1	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	108,060,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			614,695,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	1	1	1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	7,343,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	26,400,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	1	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						24,600,000					6,006,000			
1	1	1	1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			12 Orang	12 Orang	24,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	12 Orang	6,006,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah						287,891,900					184,339,846			
1	1	1	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	71,525,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Paket	17,466,515	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	1	1	Penyediaan Perlatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	27,898,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Paket	33,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	1	3	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	51,504,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Paket	16,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	59,651,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Paket	64,034,138	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	20,145,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Paket	24,072,593	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	1 Dokumen	16,320,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	8,646,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	1	9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	1 Laporan	40,848,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Laporan	20,620,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

1	1	1	1.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,236,329,600							802,859,200		
1	1	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	284,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Laporan		306,209,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	952,329,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan		496,650,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	1.1		Pemeliharaan Borang Millik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			483,015,800								342,440,168		
1	1	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	35,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	5 Unit		22,976,250	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	122,515,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Unit		16,446,491	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	325,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2 Unit		303,017,427	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2			2.2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			4,562,225,584									2,000,000,000	
2			2.2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			2,241,336,584									2,000,000,000	
2			2.2	1	1.1	Pengadaan Barang Millik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			675,000,000								2,000,000,000	
2			2.2	1	1.1	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	650,000,000		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2 Unit		1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2			2.2	1	1.1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2			2.2	1	1.1		Pemeliharaan Borang Millik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,566,336,584							0	
2			2.2	1	1.1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 Unit	2 Unit	1,566,336,584		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2 Unit		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2			2.2	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			645,461,416								0	
2			2.2	2	1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelukisnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			645,461,416								0	
2			2.2	2	1	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemanung Kebudayaan	Jumlah Objek Pemanung Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	19 Objek	19 Objek	645,461,416		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	19 Objek			0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2			2.2	6		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			1,675,427,564								0	
2			2.2	6	1	Pengelolaan Museum Provinsi			1,675,427,564								0	
2			2.2	6	1	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	8 Unit	8 Unit	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	8 Unit		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2			2.2	6	1	2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	25 Orang	25 Orang	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Orang		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2			2.2	6	1	3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	11 Unit	11 Unit	75,427,564		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Unit		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1			1.2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			142,098,675,702									132,047,386,839	
1			1.2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			57,399,635,166									67,843,070,503	
1			1.2	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			167,496,200								163,996,200	
1			1.2	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	25,823,300		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	25,323,300	DINAS KESEHATAN	
1			1.2	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	12,321,200		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	11,821,200	DINAS KESEHATAN	
1			1.2	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	10,475,600		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	9,975,600	DINAS KESEHATAN	
1			1.2	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	13,171,900		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	12,671,900	DINAS KESEHATAN	
1			1.2	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	12,892,900		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	12,392,900	DINAS KESEHATAN	
1			1.2	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	69,517,100		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	68,517,100	DINAS KESEHATAN	
1			1.2	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	23,294,200		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	23,294,200	DINAS KESEHATAN	
1			1.2	1	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				53,569,608,311						63,653,609,451	
1			1.2	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				52,488,567,491						62,514,067,431	DINAS KESEHATAN
1			1.2	1	1	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	1,058,501,080		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1,049,641,620	DINAS KESEHATAN	
1			1.2	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		3500 Dokumen	22,539,800		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3500 Dokumen	22,539,800	DINAS KESEHATAN	
1			1.2	1	1	1	Administrasi Barang Millik Daerah pada Perangkat Daerah				5,696,000						23,066,500	
1			1.2	1	1	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Millik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Millik Daerah SKPD		1 Dokumen	5,696,000		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	5,696,000	DINAS KESEHATAN	
1			1.2	1	1.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				388,136,000						336,313,845	
1			1.2	1	1.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		2 Paket	192,496,000		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Paket	144,909,645	DINAS KESEHATAN	
1			1.2	1	1.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		4 Dokumen	32,036,900		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	32,036,900	DINAS KESEHATAN	
1			1.2	1	1.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		3 Dokumen	99,604,100		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	67,712,300	DINAS KESEHATAN	
1			1.2	1	1.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3 Orang	51,000,000		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Orang	51,000,000	DINAS KESEHATAN	

1	2	1	1.1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	12,999,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas SDM		50 Orang	12,999,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,129,404,455							1,339,726,695	
1	2	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			21,824,600			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	21,824,600	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			127,346,500		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Paket	127,346,500	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket			9,671,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Paket	13,212,800	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			101,475,000		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Paket	27,335,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			63,221,100		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	76,716,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen			20,083,000		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	20,083,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			18,819,960		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	1 Paket	25,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan			36,900,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	79,940,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			714,757,795			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	921,727,095	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen			15,305,500			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	16,541,700	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					240,335,400								284,275,052	
1	2	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit			15,885,400			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Unit	84,275,052	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit			224,450,000		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	1 Unit	200,000,000	DINAS KESEHATAN
																Meningkatnya Kualitas SDM			
1	2	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,532,462,800								1,532,462,800	
1	2	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			8,000,000		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			965,000,000		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	965,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan			559,462,800		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Laporan	559,462,800	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					366,496,000								519,619,960	
1	2	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit			100,800,000		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7 Unit	100,800,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit			145,696,000		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Unit	18,819,960	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit			120,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Unit	200,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					82,591,052,536								51,189,116,036	
1	2	2	1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					15,432,612,036								18,825,313,336	
1	2	2	1	6	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	1 Layanan			137,089,438		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	1 Layanan	137,089,438	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	60 Dokumen			220,936,000		Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	60 Dokumen	1,076,627,300	DINAS KESEHATAN
													DAK Non Fisik-BOKB-KB						
1	2	2	1	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	6 Paket			15,074,586,598		Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	6 Paket	17,611,598,598	DINAS KESEHATAN
													DAK Fisik-bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian						
													Dana Insentif Daerah						
1	2	2	1		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					66,875,804,000								31,183,838,700	
1	2	2	1	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	5470797000 Orang			464,400,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	5470797000 Orang	628,992,000	DINAS KESEHATAN
													DAK Non Fisik-BOKB-KB						
1	2	2	1	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	5470797000 Orang			1,279,487,500		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	5470797000 Orang	279,487,500	DINAS KESEHATAN
													Dana Insentif Daerah						
1	2	2	1	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3 Dokumen			1,386,773,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	3 Dokumen	3,134,256,000	DINAS KESEHATAN
													DAK Non Fisik-BOKB-KB						
1	2	2	1	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen			10,543,179,900		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	3 Dokumen	13,307,039,900	DINAS KESEHATAN
													DAK Fisik-bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting						
													DAK Non Fisik-BOKB-KB						

1	2	2	1	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	66,795,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM		2 Dokumen	70,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				8 Dokumen	462,829,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM		8 Dokumen	1,302,829,400	DINAS KESEHATAN
												DAK Non Fisik-BOKB-KB					
1	2	2	1	9	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	187,706,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM		0 Dokumen	306,000,000	DINAS KESEHATAN
										2 Dokumen					2 Dokumen		
1	2	2	1	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	201,808,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	1 Dokumen	201,808,400	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				16 Dokumen	3,016,373,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM		16 Dokumen	4,123,544,400	DINAS KESEHATAN
												Dana Insentif Daerah					
1	2	2	1	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	149,906,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	1 Dokumen	149,906,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				1 Dokumen	18,186,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	1 Dokumen	204,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				4 Dokumen	1,424,158,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	4 Dokumen	929,158,000	DINAS KESEHATAN
												Dana Insentif Daerah					
1	2	2	1	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	45,058,340,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	58,322,600	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	441,693,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	1 Dokumen	850,000,000	DINAS KESEHATAN
												DAK Non Fisik-BOKB-KB					
1	2	2	1	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	266,765,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM		1 Dokumen	306,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				28 Dokumen	190,743,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM		28 Dokumen	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				14 Dokumen	64,121,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM		14 Dokumen	255,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal oleh Kabupaten/Kota				4 Dokumen	68,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM		4 Dokumen	1,374,494,500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				3 Unit	106,025,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM		3 Unit	200,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1	24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	53,634,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM		1 Dokumen	30,000,000	DINAS KESEHATAN
												Meningkatnya Kualitas SDM					
1	2	2	1	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				3 Paket	148,572,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM		3 Paket	200,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				14 Dokumen	37,947,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM		14 Dokumen	300,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				12 Dokumen	656,783,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM		12 Dokumen	350,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1	30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 Keluarga	581,432,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM		1 Keluarga	550,000,000	DINAS KESEHATAN
												DAK Non Fisik-BOKB-BOK					
1	2	2	1		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						132,769,400					414,964,000	
1	2	2	1	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				15 Dokumen	66,119,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM		15 Dokumen	176,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	22,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM		1 Dokumen	200,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia				6 Unit	44,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6 Unit	38,964,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						149,867,100					765,000,000	
1	2	2	1	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				1 Unit	149,867,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM		1 Unit	255,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						807,561,700					11,355,200,000	
1	2	3	1		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UEM dan UKP Provinsi						325,945,700					10,905,200,000	
1	2	3	1	2	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi				400 Orang	325,945,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM		400 Orang	459,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	3	1		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						481,616,000					450,000,000	
1	2	3	1	1	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan				450 Orang	144,414,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM		450 Orang	250,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	3	1	2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	337,201,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM		1 Dokumen	200,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						121,869,300					408,000,000	
1	2	4	1		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)						73,384,900					204,000,000	
1	2	4	1	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut penerbitan Perizinan				34 Sarana	73,384,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM		34 Sarana	204,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	4	1		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)						48,484,400					204,000,000	
1	2	4	1	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				8 Sarana	48,484,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM		8 Sarana	204,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1,178,557,000					1,252,000,000	
1	2	5	1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						68,037,500					100,000,000	

1	2	5	1	1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemirisan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemirisan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	68,037,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	1 Dokumen	100,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	5	1		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi			943,400,000					952,000,000	
1	2	5	1	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	902,000,000	SEHUS KAB/KOTA, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	2 Dokumen	902,000,000	DINAS KESEHATAN
										DAK Non Fisik-BOKB-KB				
1	2	5	1	2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	41,400,000			Meningkatnya Kualitas SDM	1 Dokumen	50,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	5	1		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi			167,119,500					200,000,000	
1	2	5	1	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	167,119,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	1 Dokumen	200,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,779,865,860					1,840,771,935	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			1,306,787,560					1,257,198,235	
1	2	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30,525,200					30,525,200	
1	2	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6,751,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	1 Dokumen	6,751,800	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7,294,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	1 Dokumen	7,294,200	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,295,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	1 Dokumen	5,295,900	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,611,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	1 Dokumen	5,611,200	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5,572,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	1 Laporan	5,572,100	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			125,762,000					117,602,000	
1	2	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	124,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	1 Dokumen	116,520,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1,082,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	1 Laporan	1,082,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah			146,563,500					130,078,300	
1	2	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	24,537,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	0 Paket	24,537,000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket					1 Paket		
1	2	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41,217,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	1 Paket	24,732,200	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	35,695,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	0 Paket	35,695,000	DINAS KESEHATAN
						Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket					1 paket		
1	2	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,964,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	1 Paket	7,964,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 paket	12,150,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	1 paket	12,150,100	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket					0 Paket		
1	2	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	0 Laporan	25,000,000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 orang					8 orang		
1	2	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			832,805,200					840,965,200	
1	2	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	4,587,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	0 Laporan	4,587,800	DINAS KESEHATAN
						Jumlah surat menyurat	1 paket					1 paket		
1	2	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 paket	319,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	1 paket	327,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	508,877,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	0 Laporan	508,877,400	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Paket					1 Paket		
1	2	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			171,131,660					138,027,535	
1	2	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perincinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perincinannya	4 Unit	39,262,293		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	4 Unit	29,278,400	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	89,705,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	0 Unit	77,800,000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 paket					1 paket		
1	2	1	1.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	39,163,667		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	0 Unit	27,949,135	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket					1 paket		
1	2	1	1.1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0 Unit	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	0 Unit	3,000,000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 paket					1 paket		
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			473,078,300					583,573,700	
1	2	3	1		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			473,078,300					583,573,700	
1	2	3	1	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	270 Orang	339,504,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	270 Orang	450,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	3	1	2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	133,573,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	2 Dokumen	133,573,700	DINAS KESEHATAN

1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,774,527,226						3,773,645,500	
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/ tepat waktu	%	%	100 %		1,537,163,426					100 %	2,103,645,500	
1	2	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan renja, RKA, DPA dan LAKIP	Dokumen	Dokumen	4 Dokumen		30,159,200					4 Dokumen	63,000,000	
1	2	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen		7,988,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar dan Instansi Terkait	1 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			1 Dokumen		7,390,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar dan Instansi Terkait	1 Dokumen	14,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1 Dokumen		7,390,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar dan Instansi Terkait	1 Dokumen	14,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Dokumen		7,390,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar dan Instansi Terkait	1 Dokumen	15,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan keuangan dan Baris	%	%	85 %		126,240,000				85 %	154,184,000	
1	2	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Buku Cek			3 Buku		126,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	UPT Labkes Provinsi Kalbar, Pengelola Keuangan dan Barang, dan Instansi Terkait	3 Buku	140,184,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Jumlah Pengelola Keuangan dan Baris		Orang		10 Orang						10 Orang		
1	2	1	1.1	2	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakalan Korpi Yang Tersedia		Orang	45 Orang	14,982,000					45 Orang	37,400,000	
1	2	1	1.1	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhiya kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standar	Kegiatan	Kegiatan	7 Kegiatan	322,479,500					7 Kegiatan	468,530,000	
1	2	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor			10 Item	8,943,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar	10 Item	16,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor			57 Item	39,293,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar	57 Item	71,500,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga			13 Item	14,181,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar	13 Item	25,520,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman			3 Item	175,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar	3 Item	219,670,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang dan Penggandaan			19 Item	38,595,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar	19 Item	53,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan			2 Item	2,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar	2 Item	2,840,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			1 Kali	43,086,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar	1 Kali	80,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kegiatan jasa penunjang layanan kantor	Kegiatan	Kegiatan	3 Kegiatan	969,702,726					3 Kegiatan	975,500,000	
1	2	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat			1 Tahun	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar	1 Tahun	5,500,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Materai			150 Buah						150 Buah		
1	2	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan komunikasi,sumber daya air dan listrik			6 rekening	469,737,286	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar	6 rekening	600,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor			3 Item	497,465,440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar	3 Item	370,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Diauditan			0 Laporan						0 Laporan		
1	2	1	1.1	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	Kegiatan	Kegiatan	2 Kegiatan	68,600,000					2 Kegiatan	95,000,000	
1	2	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak			3 Unit	29,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar	3 Unit	42,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara			4 Item	39,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar	4 Item	53,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan sesuai standar	%	%	100 %		1,242,363,800				100 %	1,670,000,000	
1	2	2	1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya kegiatan peningkatan fasilitas pelayanan sarana dan prasana kesehatan	Kegiatan	Kegiatan	2 Kegiatan	1,034,346,800					2 Kegiatan	1,410,000,000	
1	2	2	1	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat laboratorium yang terpelihara dan terkalibrasi			35 Alat	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	Masyarakat pengguna layanan laboratorium kesehatan	35 Alat	210,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	1	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan			0 Paket	834,346,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	Masyarakat pengguna layanan laboratorium kesehatan	0 Paket	1,200,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	1		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah pengadaan bahan kimia dan bahan habis perlengkapan medis			157 Item						157 Item		
1	2	2	1	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen		13,217,000				1 Dokumen	58,000,000	
1	2	2	1	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			1 Dokumen		13,217,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar dan Instansi Terkait	1 Dokumen	58,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1	1	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Akreditasi Laboratorium Kesehatan	Sertifikasi	Sertifikasi	1 Sertifikasi		194,800,000				1 Sertifikasi	202,000,000	
1	2	2	1	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan pemantauan mutu pelayanan kesehatan masyarakat			1 Kegiatan		194,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar dan Instansi Terkait	1 Kegiatan	202,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2,397,075,081						3,163,251,809	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					972,989,605						1,206,092,789	
1	2	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					47,408,700						52,388,350	
1	2	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen		13,873,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	15,340,710	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen		9,290,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	10,219,110	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen		9,230,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	10,153,110	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen		4,709,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5,260,310	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan		10,305,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	11,415,110	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					318,318,280					350,308,986		
1	2	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			160 Dokumen		292,898,880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		160 Dokumen	322,188,786	DINAS KESEHATAN	

1	2	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	25,419,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	28,120,200	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			16,381,950					17,998,145	
1	2	1	1.1	2	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	10,861,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	11,948,145	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	5,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Orang	6,050,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah			195,764,750					318,149,000	
1	2	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,617,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	9,100,900	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	22,107,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	47,057,400	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	15,959,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	20,336,200	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	10,890,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	2 Paket	24,210,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	30,826,200	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,551,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1,705,400	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	8	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	2,280,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	2,508,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	114,039,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16 Laporan	195,723,900	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			154,713,000					170,966,800	
1	2	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	154,713,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19 Unit	170,966,800	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			240,422,825					296,281,508	
1	2	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizin Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinnya	3 Unit	49,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	80,106,400	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	10,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		23 Unit	17,710,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	180,422,825		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	198,465,108	DINAS KESEHATAN
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERENCANAAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,424,085,476					1,957,159,120	
1	2	2	1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1,179,153,576					1,675,854,000	
1	2	2	1	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit	472,121,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Unit	519,333,100	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	10,293,300	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	5 Paket	697,032,576		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	1,140,727,600	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			236,657,300					272,203,060	
1	2	2	1	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	158,120,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	185,812,800	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	78,536,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	86,390,260	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			8,274,600					9,102,060	
1	2	2	1	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	8,274,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	9,102,060	DINAS KESEHATAN
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			8,639,085,314					9,643,775,001	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			3,461,970,947					3,660,042,686	
1	2	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			67,024,400					111,702,140	
1	2	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7,549,200	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	20,789,120	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6,878,500	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	13,891,350	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6,946,600	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	14,145,560	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6,688,600	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	13,682,460	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	31,954,900	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	35,326,390	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	7,006,600	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	13,867,260	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			169,670,000					221,323,740	
1	2	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	169,670,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	188,419,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			70,000,000					77,000,000	
1	2	1	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	70,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	77,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			59,928,000					0	
1	2	1	1.1	2	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	59,928,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah			237,050,400					176,236,960	
1	2	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,909,400	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	15,226,970	DINAS KESEHATAN

1	2	1	1	1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	56,020,200	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	75,922,110	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1	1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	68,660,800	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	79,035,880	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1	1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	5,824,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	2,904,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1	1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	89,756,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1	1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Paket	2,880,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	3,168,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1	1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							11,150,000								166,737,456	
1	2	1	1	1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Paket	11,150,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	55,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1	1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,732,764,647								2,620,314,532	
1	2	1	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	7,015,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	7,716,500	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	713,054,447	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	622,116,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1	1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	2,012,695,200	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	1,990,482,032	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1	1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							114,383,500								286,707,858	
1	2	1	1	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan					1 Paket	57,644,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	63,408,400	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	1	1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					1 Paket	56,739,500	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	85,799,458	DINAS KESEHATAN	
1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							5,177,114,367								5,983,732,315	
1	2	2	1			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							964,734,167								1,559,492,011	
1	2	2	1	16		Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan					1 Paket	964,734,167	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	1,471,492,011	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	1			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							13,649,800								8,839,600	
1	2	2	1	22		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit					1 Dokumen	13,649,800	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	8,839,600	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	1			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							4,198,730,400								4,393,400,704	
1	2	2	1	3		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan					1 Unit	4,198,730,400	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	4,393,400,704	DINAS KESEHATAN	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							432,410,848,931								0	
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	332,125,581,477								100 Persen	0	
1	02	01	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	96,339,500								100 Persen	0	
1	02	01	1	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	19,750,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SDM Rumah Sakit	2 Dokumen	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO	
1	02	01	1	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	19,894,500	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SDM Rumah Sakit	1 Dokumen	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO	
1	02	01	1	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	16,102,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SDM Rumah Sakit	1 Dokumen	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO	
1	02	01	1	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 Laporan	15,093,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SDM Rumah Sakit	2 Laporan	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO	
1	02	01	1	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	25,500,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SDM Rumah Sakit	4 Laporan	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO	
1	02	01	1			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti % serapan anggaran	Persen	Persen	Persen	100 Persen	139,534,291,685								100 Persen	0	
1	02	01	1	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					995 Orang/ Bulan	139,054,791,685	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas SDM		SDM Rumah Sakit	995 Orang/ Bulan	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO	
1	02	01	1	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen	439,920,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO	

1 02 01 1 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	13,230,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Rumah Sakit	2 Dokumen	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO
1 02 01 1 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	26,350,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SDM Rumah Sakit	4 Laporan	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO
1 02 01 1 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	Persen	100 Persen	13,230,000						100 Persen	0	
1 02 01 1 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	13,230,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Rumah Sakit	2 Dokumen	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO
1 02 01 1.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur Persentase pengembangan Kompetensi Pegawai sesuai dengan perencanaan	Persen	Persen	100 Persen	160,925,000						100 Persen	0	
1 02 01 1.1 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	57,925,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Rumah Sakit	3 Dokumen	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO
1 02 01 1.1 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	103,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Rumah Sakit	10 Orang	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO
1 02 01 1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	Persen	100 Persen	166,412,000						100 Persen	0	
1 02 01 1.1 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	166,412,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	SDM Rumah Sakit	20 Laporan	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO
1 02 01 1.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang	Persen	Persen	100 Persen	2,818,777,700						100 Persen	0	
1 02 01 1.1 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Paket	1,652,125,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sarana dan Prasarana Gedung RS	100 Paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO
1 02 01 1.1 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				106 Unit	967,600,700	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sarana dan Prasarana Gedung RS	106 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO
1 02 01 1.1 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	199,052,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Sarana dan Prasarana Gedung RS	2 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO
1 02 01 1.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persen	Persen	100 Persen	14,335,605,592						100 Persen	0	
1 02 01 1.1 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6,198,584,792	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Jasa Administrasi	12 Laporan	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO
1 02 01 1.1 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	8,137,020,800	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Jasa Administrasi	2 Laporan	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO
1 02 01 1.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD	Persen	Persen	100 Persen	175,000,000,000						100 Persen	0	
1 02 01 1.1 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	175,000,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Pendapatan dari BLUD		SDM Rumah Sakit dan Masyarakat	1 Unit Kerja	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP dan UKM	Persen	Persen	85 Persen	94,780,960,754						85 Persen	0	
1 02 02 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan	Persen	Persen	85 Persen	93,611,611,254						85 Persen	0	
1 02 02 1 03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	36,015,036,554	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat	1 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO
1 02 02 1 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				46 Unit	57,394,889,700	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat	46 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO
1 02 02 1 14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan				35 Paket	201,685,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat	35 Paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO
1 02 02 1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan	Persen	Persen	85 Persen	342,104,500						85 Persen	0	
1 02 02 1 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				1 Dokumen	16,314,900	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO

1	02	02	1	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1 Dokumen	130,100,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	1 Dokumen		0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO		
1	02	02	1	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					3 Dokumen	57,024,400	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	3 Dokumen		0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO		
1	02	02	1	28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan					14 Dokumen	138,665,200	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	14 Dokumen		0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO		
1	02	02	1		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	Persen		Persen	100 Persen	33,360,000								100 Persen		0		
1	02	02	1	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan					3 Dokumen	33,360,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	3 Dokumen		0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO		
1	02	02	1		Penerbitan 12m Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penilaian Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Nasional Persentase Penilaian Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Nasional	Persen		Persen	95 Persen	793,885,000								95 Persen		0		
1	02	02	1	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar					1 Unit	516,425,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Unit		0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO		
1	02	02	1	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan					1 Unit	277,460,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas SDM	Masyarakat	1 Unit		0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM	Persen		Persen	85 Persen	6,504,306,700								85 Persen		0		
1	02	03	1		Penentuan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase SDM sesuai Standar Pelayanan Rumah Sakit	Persen		Persen	85 Persen	5,075,885,700								85 Persen		0		
1	02	03	1	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					141 Orang	5,075,885,700	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sumber Daya Manusia Kesehatan	141 Orang		0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO		
1	02	03	1		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Mutu dan Kompetensi Teknis SDM	Persen		Persen	85 Persen	1,428,421,000								85 Persen		0		
1	02	03	1	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat					295 Orang	1,428,421,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Sumber Daya Manusia Kesehatan	295 Orang		0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO			
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						85,921,702,251									9,330,731,937			
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						79,993,901,294									6,818,271,372			
1	2	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						62,065,000							mengkarkan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.		62,790,000			
1	2	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Renstra dan Renja	2 dokumen		100%	2 dokumen	16,875,000	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2 dokumen	16,875,000		0	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
1	2	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA	1 dokumen		1 Dokumen	1 dokumen	11,350,000	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1 dokumen	11,350,000		0	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
1	2	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 dokumen		1 Dokumen	1 dokumen	11,275,000	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1 dokumen	11,275,000		0	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
1	2	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan kinerja	1 dokumen		1 Dokumen	1 dokumen	11,275,000	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1 dokumen	12,000,000		0	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
1	2	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen		1 Dokumen	2 dokumen	11,290,000	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2 dokumen	11,290,000		0	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
1	2	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						37,852,794,314							meningkatnya penatausahaan keuangan PD		213,540,000			
1	2	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan yang disediakan	12 bulan		61.66%	12 Bulan	12 bulan	37,663,024,314	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			12 bulan		0	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
1	2	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen yang diverifikasi	12 dokumen		27.37%	12 Bulan	12 dokumen	167,280,000	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			12 dokumen	191,050,000		0	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI

1	2	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	-	12 Bulan	12 Laporan	22,490,000	Kota Singkawang, Singkawang Timur, Bagak Sahwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		12 Laporan	22,490,000	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
1	2	1	1.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						541,820,000				meningkatnya pengembangan kompetensi ASN		485,690,000		
1	2	1	1.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	323 pegawai	-	323 Pegawai	323 pegawai	406,130,000	Kota Singkawang, Singkawang Timur, Bagak Sahwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas SDM		323 pegawai	300,000,000	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
1	2	1	1.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	-	0 Dokumen	0 Dokumen	5,690,000	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas SDM		0 Dokumen	5,690,000	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
					jumlah dokumen penetapan kinerja	1 dokumen			1 Dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
1	2	1	1.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	-	49.67%	0 Orang	0 Orang	50,000,000	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas SDM		0 Orang	100,000,000	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI
					jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan	40 pegawai			40 Pegawai	40 pegawai						40 pegawai			
1	2	1	1.1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	94.04%	0 Orang	0 Orang	30,000,000	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas SDM		0 Orang	30,000,000	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI
					jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan sosialisasi	30 pegawai			30 Pegawai	30 pegawai						30 pegawai			
1	2	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	65.10%	0 Orang	0 Orang	50,000,000	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas SDM		0 Orang	50,000,000	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI
					jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan bintek	40 pegawai			40 Pegawai	40 pegawai						40 pegawai			
1	2	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,654,359,780				meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah		562,000,000		
1	2	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	-	3 Paket	3 Paket	328,620,000	Kota Singkawang, Singkawang Timur, Bagak Sahwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		3 Paket	120,000,000	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
1	2	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	-	2 Paket	2 Paket	88,926,280	Kota Singkawang, Singkawang Timur, Bagak Sahwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		2 Paket	0	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
1	2	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Jenis	-	44.69%	1 Jenis	1 Jenis	976,998,500			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Jenis	192,000,000	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI
1	2	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1085 Paket	-	79.84%	1085 Paket	1085 Paket	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas SDM		1085 Paket	80,000,000	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI
1	2	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dalam dan luar daerah	2 LS	-	54.95%	2 LS	2 LS	184,815,000	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		2 LS	170,000,000	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI
					jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan			0 Laporan	0 Laporan						0 Laporan			
1	2	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						47,595,000				meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas		52,200,000		
1	2	1	1.1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	-	3 Paket	3 Paket	47,595,000	Kota Singkawang, Singkawang Timur, Bagak Sahwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		3 Paket	52,200,000	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
1	2	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,881,997,080				meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		3,697,555,576		
1	2	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	-	47.23%	0 Laporan	0 Laporan	1,017,839,800	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		0 Laporan	1,246,799,976	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI
					jumlah pengiriman surat	500 paket			500 Paket	500 paket						500 paket			
1	2	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-	47.46%	1 Laporan	1 Laporan	1,864,157,280	Kota Singkawang, Singkawang Timur, Bagak Sahwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas SDM		1 Laporan	2,400,755,600	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI
1	2	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						953,270,120				meningkatnya pengelolaan BMD		1,744,495,796		
1	2	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	-	6 Unit	6 Unit	199,100,000	Kota Singkawang, Singkawang Timur, Bagak Sahwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		6 Unit	15,000,000	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
1	2	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	6.94%	0 Unit	0 Unit	754,170,120	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		0 Unit	1,729,495,796	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI
					jumlah gedung yang dirchab dan dipelihara	1 bangunan			1 Bangunan	1 bangunan						1 bangunan		0	
1	2	1	1.1		Peningkatan Pelayanan BLUD						36,000,000,000								

1	2	1	1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	65.98%	0 Kerja	0 Unit Kerja	36,000,000,000	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 Unit Kerja	0	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
						persentase kegiatan yang diawasi oleh blud	50 persen		50 Persen	50 persen						50 persen		
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						5,849,600,957						2,412,460,565	
1	2	2	1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						5,582,314,957			meningkatnya penyediaan fasilitas pelayanan, sarana dan alat kesehatan			1,894,640,565	
1	2	2	1	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	0 Unit	25.33%	0 Unit	0 Unit	4,151,005,557	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 Unit	20,000,000	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
						jumlah gedung yang dirchab dan dipelihara	4 bangunan		4 Bangunan	4 bangunan			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			4 bangunan		
1	2	2	1	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	92 Unit	86.04%	92 Unit	92 Unit	770,929,400	Kota Singkawang, Singkawang Timur, Bagak Sahwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	92 Unit	100,000,000	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					
1	2	2	1	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	jumlah gedung yang dibangun	2 bangunan	2.69%	2 Bangunan	2 bangunan	226,030,000	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2 bangunan	329,839,407	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
						Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit						0 Unit		
1	2	2	1	12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	jumlah bangunan yang dibangun	1 bangunan	97.78%	1 Bangunan	1 bangunan	108,310,000	Kota Singkawang, Singkawang Timur, Bagak Sahwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 bangunan	698,871,158	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
1	2	2	1	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	jumlah paket alat kesehatan yang dikalibrasi	83 paket	-	83 Paket	83 paket	71,040,000	Kota Singkawang, Singkawang Timur, Bagak Sahwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Ketenteraman dan Keterbacaan Masyarakat	83 paket	70,930,000	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
1	2	2	1	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	0 Paket		0 Paket	0 Paket	187,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Ketenteraman dan Keterbacaan Masyarakat	0 Paket	75,000,000	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
						jumlah jenis bahan pakai habis lainnya yang disediakan	5 item		5 Item	5 item						5 item		
1	2	2	1	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	jumlah alat/mesin yang dipelihara	5 paket		5 Paket	5 paket	50,000,000	Kota Singkawang, Singkawang Timur, Bagak Sahwa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Ketenteraman dan Keterbacaan Masyarakat	5 paket	50,000,000	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
1	2	2	1	20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1 Unit		1 Unit	1 Unit	17,500,000	Kota Singkawang, Singkawang Timur, Bagak Sahwa		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Unit	50,000,000	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						74,116,000			tersedianya layanan kesehatan		220,000,000		
1	2	2	1	9	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	16,116,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	20,000,000	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
1	2	2	1	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	jumlah kegiatan napza	3 kegiatan		3 Kegiatan	3 kegiatan	58,000,000	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Ketenteraman dan Keterbacaan Masyarakat	3 kegiatan	200,000,000	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	20 Orang		20 Orang	20 Orang						20 Orang		
1	2	2	1		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						148,280,000			terselenggaranya sisten informasi kesehatan yang terintegrasi		240,000,000		
1	2	2	1	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	0 Dokumen	-	0 Dokumen	0 Dokumen	21,600,000	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 Dokumen	20,000,000	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
						jumlah jasa rubrikasi/ iklan	5 item		5 Item	5 item						5 item		
1	2	2	1	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	jumlah jaringan	1 paket	-	1 Paket	1 paket	15,000,000	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	20,000,000	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
1	2	2	1	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	0 Unit	45.75%	0 Unit	0 Unit	111,680,000	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 Unit	200,000,000	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	
						jumlah jaringan/ software	1 aplikasi		1 Aplikasi	1 aplikasi						1 aplikasi		
1	2	2	1		Penerbitan Izin Rumah Sakti Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						44,890,000			meningkatnya tata kelola dan mutu pelayanan		57,820,000		
1	2	2	1	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	44,890,000	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Unit	57,820,000	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	



1	3	1	1.1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saine		ASN di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat	50 Orang	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saine	Meningkatnya Kualitas SDM	ASN di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat	12 Orang	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah PNSD dan Tenaga Kontrak Dinas PUPR Prov. Kalbar	Orang		Orang	215 Orang	647,813,200						215 Orang	0		
1	3	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	27,911,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	ASN di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	47,495,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	ASN di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	109,834,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	ASN di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				240 Paket	47,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	ASN di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat	240 Paket	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	34,980,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	ASN di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	9,360,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	ASN di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	1.1	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				50 Laporan	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat	50 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	174,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	ASN di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat	14 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	1.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	59,646,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	ASN di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat	12 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	1.1	11	Dukungan Pelembagaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelembagaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	106,786,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	ASN di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sarana dan prasarana kantor Dinas PUPR Prov. Kalbar	Unit		Unit	19 Unit	487,944,400						19 Unit	0		
1	3	1	1.1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	81,962,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		0	1 Paket	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Paket	405,981,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		0	5 Paket	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PNSD dan Tenaga Kontrak Dinas PUPR Prov. Kalbar	Orang		Orang	215 Orang	4,195,688,490						215 Orang	0		
1	3	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat serta Masyarakat Luas	1 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	499,898,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Masyarakat Luas	ASN di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat serta Masyarakat Luas	12 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	3,690,790,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	ASN di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat serta Masyarakat Luas	2 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berfungsinya Prasarana Sarana Mebel, Gedung Kantor, Pralatan dan Mesin Lainnya	Tahun		Tahun	1 Tahun	943,801,000						1 Tahun	0		
1	3	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				121 Unit	282,577,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		0	121 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	1.1	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				8 Unit	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		0	8 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Paket	160,108,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		0	7 Paket	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	1.1	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		0	1 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Paket	441,115,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		0	3 Paket	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						152,495,179,400							35,630,382,500	0	
1	3	2	1		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						87,980,860,400								0	
1	3	2	1	3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai				4 Dokumen	490,390,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan		4 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	2	1	4	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun				4 Dokumen	1,112,201,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan		4 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	2	1	8	Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun				1.5 KM	753,898,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan		1.5 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	2	1	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0.1 KM	22,783,988,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan		0.1 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	2	1	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0.1 KM	62,567,035,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan		0.1 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	2	1	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Perkuatan Kelembagaan Komisi Irigasi Provinsi Kalimantan Barat dan Dokumen Pembentukan TKPSDA Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat				2 Laporan	306,346,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan		2 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	2	1	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan		1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

1	3	2	1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					64,514,319,000										35,630,382,500		
1	3	2	1	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	8 Dokumen		2,318,379,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	8 Dokumen					0		DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	1	10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	13.93 KM		4,957,796,300				Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	13.93 KM					23,459,905,000		DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	1	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.71 KM		2,036,899,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	0.71 KM					2,580,000,000		DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	1	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	37.14 KM		52,360,390,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	37.14 KM					6,245,477,500		DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	1	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	12 KM		714,574,600		DAK Fisik-Bidang Irigasi-Pengusapan		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	12 KM					780,000,000		DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	1	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	32 KM		2,126,279,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	32 KM					2,565,000,000		DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang berakses air minum	%		70 %	1,404,378,600									70 %		1,540,000,000
1	3	3	1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Yang Berakses Air Minum	Jiwa		2106 Jiwa	1,404,378,600									2106 Jiwa		1,540,000,000
1	3	3	1	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	2 Dokumen		1,404,378,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	2 Dokumen					1,540,000,000		DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penduduk yang terlayani Persampahan sesuai standar	Persen		Persen	20 Persen									20 Persen		1,017,500,000
1	3	4	1		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah jiwa penduduk yang terlayani Persampahan sesuai standar dengan tersedianya sistem fasilitas penanganan sampah dan tersedianya sistem penanganan sampah lintas/kabupaten/kota	Jiwa		Jiwa	6073 Jiwa	928,688,900								6073 Jiwa		1,017,500,000
1	3	4	1	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPT/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPT/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen		928,688,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	1 Dokumen					1,017,500,000		DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai (sesuai standar)	%		%	4 %	928,334,800								4 %		1,017,500,000
1	3	5	1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah jiwa penduduk yang terlayani sistem air limbah domestik regional dengan tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	Jiwa		Jiwa	4640 Jiwa	928,334,800								4640 Jiwa		1,017,500,000
1	3	5	1	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	1 Dokumen		928,334,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	1 Dokumen					1,017,500,000		DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Jumlah Penduduk yang terlayani sistem drainase skala kota	%		%	12 %	1,354,496,500								12 %		1,485,000,000
1	3	6	1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah jiwa penduduk yang terlayani pengolahan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota dan kawasan strategis provinsi dengan tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	Jiwa		Jiwa	6142 Jiwa	1,354,496,500								6142 Jiwa		1,485,000,000
1	3	6	1	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	2 Dokumen		1,354,496,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	2 Dokumen					1,485,000,000		DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				45,543,567,800										59,973,242,481		
1	3	8	1		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				45,543,567,800										59,973,242,481		
1	3	8	1	1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	3 Dokumen		9,100,433,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Dokumen					24,674,705,409		DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	8	1	2	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	0 Unit		36,443,134,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	0 Unit					35,298,537,072		DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	8 Unit							8 Unit							
1	3	9	1		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				21,943,328,200										28,708,792,420		
1	3	9	1	2	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis	2 Kawasan		668,436,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	2 Kawasan					1,076,490		DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1	3	9	1	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			2 Kawasan	21,274,892,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	2 Kawasan	28,707,715,930	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	%	4,21 %	547.311.200,242						4,21 %	0	
1	3	10	1		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	%	4,21 %	547.311.200,242						4,21 %	0	
1	3	10	1	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan			6 Dokumen	8.087.194,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Masyarakat Pengguna Jalan	6 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	10	1	7	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Dengan Menambah Lajur			2,15 KM	17.722.746,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Masyarakat Pengguna Jalan	2,15 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	10	1	8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan			30,41 KM	397.992.827,078	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Masyarakat Pengguna Jalan	30,41 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	10	1	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala			20 KM	47.616.346,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Masyarakat Pengguna Jalan	20 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	10	1	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin			26.616 KM	70.286.934,364	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Masyarakat Pengguna Jalan	26.616 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	10	1	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin			100 M	5.087.116,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Masyarakat Pengguna Jalan	100 M	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	10	1	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			1 Dokumen	518,036,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Masyarakat Pengguna Jalan	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat	73,37 %	67,92 %	73,37 %	1.240.159,500						73,37 %	0	
1	3	11	1		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang terlatih		Orang	220 Orang	557.945,600						220 Orang	0	
1	3	11	1	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan			80 Orang	275,825,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Badan Usaha Konstruksi Kalimantan Barat	80 Orang	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	11	1	6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi			40 Orang	102.120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Badan Usaha Konstruksi Kalimantan Barat	40 Orang	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	11	1	7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			100 Orang	179,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Badan Usaha Konstruksi Kalimantan Barat	100 Orang	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	11	1		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPIAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi yang terlaksana	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	483.729,900						1 Kegiatan	0	
1	3	11	1	1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi			1 Laporan	83.698,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Admin SIPIAKI Kab/Kota	1 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	11	1	3	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPIAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPIAKI			30 Orang	65.254,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Admin SIPIAKI Kab/Kota	30 Orang	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	11	1	5	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan provinsi			2 Dokumen	334.777,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Admin SIPIAKI Kab/Kota	2 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	11	1		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah kebijakan khusus terhadap Penyelenggaraan jasa Konstruksi yang disusun	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	198.484,000						1 Dokumen	0	
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Laporan	Laporan	25 Laporan							25 Laporan	0	
1	3	11	1	2	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi			25 Laporan	198.484,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Badan Usaha Konstruksi Kalimantan Barat	25 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tersedianya Anggaran	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	1.507.298.500						1 Kegiatan	0	
1	3	12	1		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Terlaksananya Proses Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	300,000,000						1 Kegiatan	0	
1	3	12	1	1	Pelaksanaan Persewaan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Terlaksananya Proses Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan			1 Kegiatan	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjajin Pemerataan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	12	1		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya Persandingan Data RTRW Provinsi dengan RTRW dan RRTIR Kabupaten/Kota	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	289.329,000						1 Kegiatan	0	
1	3	12	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Terlaksananya Persandingan Data RTRW Provinsi dengan RTRW dan RRTIR Kabupaten/Kota			1 Kegiatan	180.293,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	12	1	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTIR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTIR Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi			1 Kegiatan	109.036,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	12	1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang Prov. Kalbar	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	380.698.500						1 Kegiatan	0	
1	3	12	1	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang Prov. Kalbar			1 Kegiatan	380.698.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	12	1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Audit Tata Ruang Wilayah Prov. Kalbar	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	537.271,000						1 Kegiatan	0	
1	3	12	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Audit Tata Ruang Wilayah Prov. Kalbar			1 Kegiatan	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjajin Pemerataan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	12	1	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			1 Kegiatan	237.271,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjajin Pemerataan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					315.042.277,909							321.412.817,169	
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100% %	n/a %	85 %	12.909.197,456						85 %	13.324.817,169	
1	4	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	7 Dokumen	520.833,687						7 Dokumen	595,000,000	
1	4	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	283.792,500	Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	DPRKP Provinsi Kalimantan Barat	4 Dokumen	250,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	25,000,000	Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	DPRKP Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0 Dokumen	25,000,000	Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	DPRKP Provinsi Kalimantan Barat	0 Dokumen	50,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

																	1 Dokumen								1 Dokumen										
1	4	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD							0 Dokumen	25,000,000	Pontianak	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	DPRKP Provinsi Kalimantan Barat	0 Dokumen	50,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
						Tersedianya DPA SKPD							1 Dokumen											1 Dokumen											
1	4	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							0 Dokumen	25,000,000	Pontianak	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	DPRKP Provinsi Kalimantan Barat	0 Dokumen	50,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
						Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD							1 Dokumen											1 Dokumen											
1	4	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							0 Laporan	50,000,000	Pontianak	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	DPRKP Provinsi Kalimantan Barat	0 Laporan	55,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
						Tersedianya dokumen LAKIP							1 Dokumen											1 Dokumen											
1	4	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							3 Laporan	87,041,187	Pontianak	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	DPRKP Provinsi Kalimantan Barat	3 Laporan	90,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
1	4	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen			Dokumen			7 Dokumen	9,413,232,971	Pontianak								7 Dokumen	9,467,986,371	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	4	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							0 Orang/ Bulan	8,767,986,371	Pontianak	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)							0 Orang/ Bulan	8,767,986,371	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN							74 Orang/ Bulan										74 Orang/ Bulan												
1	4	1	1	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							1 Dokumen	376,347,500	Pontianak	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)							1 Dokumen	450,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	4	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							1 Dokumen	79,713,500	Pontianak	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)							1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	4	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							1 Laporan	43,595,800	Pontianak	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)							1 Laporan	45,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	4	1	1	6	Pengelolaan dan Penyianan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan							1 Dokumen	35,699,900	Pontianak	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)							1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	4	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD							4 Laporan	74,923,800	Pontianak	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)							4 Laporan	55,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	4	1	1	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							1 Dokumen	34,966,100	Pontianak	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)							1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	4	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedia dan Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen			Dokumen			1 Dokumen	23,000,000	Pontianak								1 Dokumen	25,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	4	1	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah							1 Tahun	23,000,000	Pontianak	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan					1 Tahun	25,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	4	1	1	1	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah								337,000,000	Pontianak										403,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	4	1	1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Terlaksananya Administrasi Kepegawalan							1 Tahun	72,000,000	Pontianak	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)							1 Tahun	80,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	4	1	1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							30 Orang	265,000,000	Pontianak	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)							30 Orang	265,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	4	1	1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah								558,817,838	Pontianak										564,817,838	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	4	1	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							1 Tahun	25,817,838	Pontianak	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)							1 Tahun	25,817,838	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	4	1	1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK/Peralatan dan Perlengkapan Kantor							49 Item	60,000,000	Pontianak	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)							49 Item	60,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	4	1	1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan							19 Item	25,000,000	Pontianak	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)							19 Item	25,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	4	1	1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							0 Paket	45,000,000	Pontianak	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)							0 Paket	47,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
						Tersedianya Makan dan Minum Rapat							1 Tahun										1 Tahun												
1	4	1	1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan							0 Paket	45,000,000	Pontianak	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)							0 Paket	47,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
						Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan							1 Tahun										1 Tahun												
1	4	1	1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							0 Dokumen	35,000,000	Pontianak	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)							0 Dokumen	35,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	4	1	1	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu							0 Laporan	30,000,000	Pontianak	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)							0 Laporan	30,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	4	1	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							0 Laporan	75,000,000	Pontianak	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)							0 Laporan	77,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
						Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah							1 Tahun										1 Tahun												
1	4	1	1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penataan Arsip SKPD							1 Tahun	33,000,000	Pontianak	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)							1 Tahun	35,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	4	1	1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							0 Dokumen	185,000,000	Pontianak	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)							0 Dokumen	183,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
						terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya							1 Tahun										1 Tahun												
1	4	1	1	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								287,906,000	Pontianak										502,906,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	4	1	1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel tersedia							2 Item	137,226,000	Pontianak	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)							2 Item	137,226,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan							0 Paket										0 Paket												
1	4	1	1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							0 Unit	150,680,000	Pontianak	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)							0 Unit	150,680,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										



1	4	3	1	7	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Direspon di Daerah	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Direspon di Daerah			25 Ha	3,497,161,200	Kab/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Masyarakat Provinsi Kalbar	25 Ha	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Keterseediaan PSU di pusat kegiatan lokal (PKL) sesuai RT/RW Provinsi Kalimantan Barat	pkL	pkL	14 pkL	289,642,382,800	Kab/Kota						14 pkL	300,000,000,000	
1	4	5	1		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dalam kondisi baik	%	%	100 %	289,642,382,800	Kab/Kota						100 %	300,000,000,000	
						Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dalam kondisi baik	persen	persen	100 persen								100 persen		
1	4	5	1	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman			10 Lokasi	289,573,258,000	Kab/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat	10 Lokasi	300,000,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	4	5	1	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman			1 Laporan	69,124,800	Kab/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					3,364,537,000								1,550,000,000	
2	10	3			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pembangunan untuk Kepentingan Umum	%	%	100 %	417,419,000							100 %	500,000,000	
2	10	3	1		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase fasilitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitas sengketa tanah garapan	%	%	100 %	417,419,000	Kab/Kota						100 %	500,000,000	
2	10	3	1	1	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum			4 Dokumen	417,419,000	Semua kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Instansi yang memerlukan tanah di Provinsi Kalimantan Barat	4 Dokumen	500,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	%	%	100 %	947,098,000							100 %	1,050,000,000	
2	10	4	1		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase fasilitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitas sengketa tanah garapan	%	%	100 %	947,098,000	Kab/Kota						100 %	1,050,000,000	
2	10	4	1	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			6 Dokumen	500,868,000	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat	6 Dokumen	550,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2	10	4	1	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			6 Berita Acara	446,230,000	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat	6 Berita Acara	500,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					21,342,857,956								7,711,636,300	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100% %	n/a %	85 %	18,579,633,206							85 %	4,199,300,000	
1	5	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu	%	%	100 %	199,285,900							100 %	195,800,000	
1	5	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja dan Renstra OPD			2 Dokumen	50,104,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentraman dan Keteriban Masyarakat	ASN Pol PP	2 Dokumen	55,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	17,138,100			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentraman dan Keteriban Masyarakat	ASN Pol PP	1 Dokumen	18,300,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	16,138,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentraman dan Keteriban Masyarakat	ASN Pol PP	1 Dokumen	16,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	16,975,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentraman dan Keteriban Masyarakat	ASN Pol PP	1 Dokumen	18,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	16,197,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentraman dan Keteriban Masyarakat	ASN Pol PP	1 Dokumen	17,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	22,146,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentraman dan Keteriban Masyarakat	ASN Pol PP	4 Laporan	25,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12 Laporan	60,585,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentraman dan Keteriban Masyarakat	ASN Pol PP	12 Laporan	45,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan SKPD	%	%	100 %	14,906,354,486							100 %	261,000,000	
1	5	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			110 Orang/Bulan	14,653,512,186		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentraman dan Keteriban Masyarakat	ASN Pol PP	110 Orang/Bulan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	213,668,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentraman dan Keteriban Masyarakat	ASN Pol PP	1 Dokumen	220,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			4 Laporan	26,083,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentraman dan Keteriban Masyarakat	ASN Pol PP	4 Laporan	27,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	1	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	13,090,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentraman dan Keteriban Masyarakat	ASN Pol PP	1 Dokumen	14,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	1	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase pelaporan BMD tepat waktu	%	%	100 %	42,919,600							100 %	44,500,000	
1	5	1	1	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	13,089,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentraman dan Keteriban Masyarakat	ASN Pol PP	1 Dokumen	13,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	1	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	13,239,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentraman dan Keteriban Masyarakat	ASN Pol PP	1 Laporan	14,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			2 Laporan	16,589,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentraman dan Keteriban Masyarakat	ASN Pol PP	2 Laporan	17,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	1.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan ASN yang disiplin dan berkualitas	%	%	100 %	977,525,808							100 %	1,026,000,000	
1	5	1	1.1	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			1 Unit	14,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentraman dan Keteriban Masyarakat	ASN Pol PP	1 Unit	15,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	1.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya			4 Paket	691,834,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentraman dan Keteriban Masyarakat	ASN Pol PP	4 Paket	650,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	1.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1 Dokumen	24,975,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentraman dan Keteriban Masyarakat	ASN Pol PP	1 Dokumen	26,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	1	1.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			2 Dokumen	40,640,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentraman dan Keteriban Masyarakat	ASN Pol PP	2 Dokumen	60,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	



1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11,345,784,535													4,682,000,000	
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				7,877,125,285														3,432,000,000
1	5	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			329,586,000														560,000,000
1	5	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	150,000,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	Dokumen	200,000,000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	16,999,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			20,000,000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	16,999,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			20,000,000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	16,999,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			20,000,000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	16,999,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			20,000,000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	50,431,200	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	Laporan	170,000,000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	61,158,800	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	Laporan	110,000,000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,897,983,923												393,000,000
1	5	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Pegawai	5,592,305,223	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	ASN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			0				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dokumen	217,640,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4	Dokumen	260,000,000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	16,247,600	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			19,000,000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tidak Lanjut Pemeriksaan	2	Dokumen	13,324,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	Dokumen	27,000,000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	29,102,800	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4	Laporan	47,000,000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	29,364,300	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	Dokumen	40,000,000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				106,172,100												170,000,000
1	5	1	1	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	14,765,800	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			20,000,000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	Laporan	30,000,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			40,000,000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	19,717,300	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			30,000,000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	21,724,400	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	Laporan	50,000,000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	19,964,600	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			30,000,000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				130,659,650												283,000,000
1	5	1	1	1	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66	Stel	83,663,150	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	ASN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			90,000,000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	16,996,700	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	ASN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			18,000,000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	29,999,800	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	ASN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	Dokumen	95,000,000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1		Administrasi Umum Perangkat Daerah				373,897,852												520,000,000
1	5	1	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	14,993,300	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			20,000,000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	29,999,800	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	Paket	70,000,000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	16,999,900	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			20,000,000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	29,999,800	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10	Paket	50,000,000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	16,320,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	Dokumen	0				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	217,586,452	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4	Laporan	300,000,000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	17,999,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			20,000,000				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1	5	1	1.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	29,999,600	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0 Dokumen	40,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							755,025,760							941,000,000		
1	5	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	700,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0 Laporan	1,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	199,388,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0 Laporan	350,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	554,937,760	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	590,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							283,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					565,000,000		
1	5	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Labangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan					15 Unit Mobil; 8 unit motor	149,200,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0 Unit	310,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						39,600,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	45,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	40,000,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0 Unit	90,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	1	1.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	30,000,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0 Unit	90,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	1	1.1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						25,000,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	30,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							3,138,659,250							1,250,000,000		
1	5	3	1		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							1,132,259,550							0		
1	5	3	1	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi					1 Dokumen	249,999,900	Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	3	1	5	Pengelolaan Risiko Bencana	Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Barat					1 Dokumen	189,999,800	Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	3	1	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana					5 Kawasan	373,780,000	Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Kabupaten/ Kota se-Kalbar	5 Kawasan	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	3	1	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi					1 Dokumen	230,000,000	Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	3	1	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi					1 Laporan	88,479,850	Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 Laporan	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	3	1		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban							1,406,399,700							1,250,000,000		
1	5	3	1	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana					4 Laporan	300,000,000	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Benermar Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Kabupaten/ Kota se-Kalbar	4 Laporan	550,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	3	1	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					- Orang	249,999,900	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Kabupaten/ Kota se-Kalbar	- Orang	700,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
						DOKUMEN LAPORAN MOBILISASI PERALATAN DARI BNPB					1 DOKUMEN								1 DOKUMEN		
						JUMLAH LOGISTIK YANG TERSEDIA UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA					7 JENIS								7 JENIS		
						LAPORAN PENYATAAN DAN PEMELIHARAAN GUDANG LOGISTIK DAN PERALATAN					4 DOKUMEN								4 DOKUMEN		
1	5	3	1	5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana					1 Laporan	856,399,800	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 Laporan	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	3	1		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							600,000,000							0		
1	5	3	1	7	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun					1 Dokumen	600,000,000	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Kabupaten/ Kota se-Kalbar	0 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							330,000,000							0		
1	5	4	1		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana							330,000,000							0		
1	5	4	1	2	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal					1 Dokumen	330,000,000	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	5	4	1	2	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal					1 Dokumen	330,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat		1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							27,497,014,286								9,650,500,000	
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%		20,279,930,961							100%	5,105,500,000	
1	6	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%		244,252,000							100%	166,000,000	
						Tersusunnya dokumen perencanaan kinerja dan evaluasi yang tepat waktu (Renstra, Renja, RKA, DPA, LPPD, LKIP, LAKIP, Laporan Monev)	8 dokumen	7 Dokumen	10 dokumen	8 dokumen									8 dokumen		
1	6	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		90,536,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	2 Dokumen	95,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		9,737,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	1 Dokumen	16,000,000	DINAS SOSIAL	

1	6	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	9,115,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	1 Dokumen	13,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	10,380,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	1 Dokumen	11,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	12,090,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	1 Dokumen	12,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	18,620,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	2 Laporan	19,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	93,773,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	2 Laporan	0	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	15,783,135,911							100 %	383,500,000	
1	6	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Org	113 org	104 Org	115 Orang/ Bulan	15,449,981,611		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Provinsi dan UPT	115 Orang/ Bulan	0	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	269,540,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Provinsi dan UPT	1 Dokumen	290,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	8,206,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Provinsi dan UPT	2 Dokumen	8,500,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6,981,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Provinsi dan UPT	1 Laporan	9,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9,975,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Provinsi dan UPT	1 Dokumen	11,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	18 Laporan	28,979,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Provinsi dan UPT	18 Laporan	51,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	9,471,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Provinsi dan UPT	2 Dokumen	14,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	100%	100%	100%	100 %	53,040,000							100 %	59,000,000	
1	6	1	1	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8,204,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Prov	1 Dokumen	10,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	21,620,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Prov	1 Dokumen	20,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	0 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	6,940,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Prov	1 Laporan	9,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	6,963,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Prov	1 Laporan	9,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	9,312,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Prov	1 Laporan	11,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.1	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan layanan adm kepegawaian	100%	100%	100%	100 %	131,449,800							100 %	206,000,000	
1	6	1	1.1	2	Pengadaan Pakelan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	56,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Prov dan UPT	2 Paket	95,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,199,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Prov dan UPT	1 Dokumen	12,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Prov dan UPT	20 Orang	90,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan layanan adm umum SKPD	100%	100%	100%	100 %	361,751,400							100 %	612,000,000	
1	6	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12,887,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinsos Prov	1 Paket	6,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	127,708,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinsos Prov	2 Paket	2 Paket	200,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	39,232,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinsos Prov	1 Paket	70,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	20,678,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinsos Prov	2 Paket	22,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinsos Prov	12 Dokumen	14,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.1	9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	127,721,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinsos Prov	1 Laporan	275,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	21,525,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinsos Prov	1 Dokumen	25,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.1	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan BMD penunjang SKPD	100%	100%	100%	100 %	96,533,200							100 %	180,000,000	
1	6	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	0 Unit	0 Unit	18 Unit	96,533,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial Prov	18 Unit	95,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.1	1	Pengadaan gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit										
1	6	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100 %	2,942,073,581							100 %	2,780,000,000	
1	6	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	274,724,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Provinsi Kalbar	1 Laporan	300,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	2,667,349,581		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Provinsi Kalbar	5 Laporan	2,480,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.1	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan BMD penunjang SKPD	100%	100%	100%	100 %	667,695,069							100 %	719,000,000	
1	6	1	1.1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peringatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Peringatannya	15 Unit	4 Unit	15 Unit	15 Unit	170,079,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Prov	5 Unit	130,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.1	9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	0 Unit	0 Unit	3 Unit	34,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Prov	3 Unit	16,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	3 Unit	253,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Prov	3 Unit	300,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	2	1	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	3 Unit	210,115,469		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Sosial Prov	3 Unit	265,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	2	1	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang diberdayakan	30%	19%	25%	30%	787,113,100							100 %	925,000,000	
1	6	2	1	1	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase Penyelenggara UGB dan PUB yang terkoordinir	83%	85%	80%	83%	34,413,700							75 %	50,000,000	
1	6	2	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan pengumpulan Uang atau Barang	20 Dokumen	17 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	34,413,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Prov Kalbar	20 Dokumen	50,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	2	1	1	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	14.61%	24%	12.93%	14.61%	752,699,400							6.46 %	875,000,000	

1	6	2	1	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	52 Orang	52 Org	260 Org	52 Orang	107,999,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	52 Orang	150,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	2	1	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	45 Keluarga	48 Keluarga	50 Keluarga	45 Keluarga	110,174,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	45 Keluarga	175,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	3			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	160 Lembaga	210 Lembaga	150 Lembaga	160 Lembaga	534,525,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	120 Lembaga	550,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	3	1		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	% Cakupan Layanan Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan orang terlarant	%	100%	%	100%	380,928,400						100%	460,000,000	
1	6	3	1	1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarokasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan orang terlarant	%	50%	%	42.5%	380,928,400						42.5%	460,000,000	
1	6	4			Facilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarokasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarokasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	1226 Org	900 Org	650 Orang	380,928,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlarant	650 Orang	460,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	4	1		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PPKS (Disabilitas, Lansia, anak terlarant, gipeng dan lainnya di luar napza) yg mendapatkan Resos	%	7.20%	%	3.20%	862,093,300						3.20%	1,050,000,000	
1	6	4	1	6	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar di dalam Pant	Persentase Penyandang Disabilitas Terlarant yang Terpenuhi Kebutuhannya di dalam pant	%	11.50%	%	100%	250,981,100						100%	350,000,000	
1	6	4	1		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	802 org	250 org	150 Orang	250,981,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	150 Orang	350,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	4	1	6	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerAntar di dalam Pant	Persentase Anak Terlarant yang Terpenuhi Kebutuhannya di Dalam Pant	%	3.75%	%	3.75%	204,867,200						3.75%	210,000,000	
1	6	4	1		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	358 Org	350 Org	100 Orang	204,867,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		0 100 Orang	210,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	4	1	6	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlarant di dalam Pant	Persentase Lanjut Usia Terlarant di Dalam Pant yang mendapatkan Resos	%	6.06%	%	6.06%	329,789,000						6.06%	400,000,000	
1	6	4	1		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	250 Org	400 Org	170 Orang	329,789,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	170 Orang	400,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	4	1	5	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan resos	%	52%	%	75%	38,001,000						75%	40,000,000	
1	6	4	1.1		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	0	50 Org	20 Orang	38,001,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	PPKS	20 Orang	40,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	4	1.1	5	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	Persentase PPKS Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi mendapatkan Resos	%	0.29%	%	72.5%	38,455,000						72.5%	50,000,000	
1	6	5			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Org	145 Org	50 Orang	38,455,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	PPKS	50 Orang	50,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	5	1		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase peningkatan perlindungan dan jaminan sosial	%		%	0.257%	4,285,310,900						0.257%	900,000,000	
1	6	5	1	1	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Persentase Rekomendasi yang dikeluarkan dalam rangka Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	%		%	100%	28,632,000						100%	50,000,000	
1	6	5	1		Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	20 Anak	15 Anak	15 Orang	28,632,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Kelompok Masyarakat Miskin	15 Orang	50,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	5	1	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Data keluarga Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	%	50.03%		0.5915%	4,256,678,900						0.5915%	850,000,000	
1	6	6			Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	1604 Keluarga	250 Keluarga	250 Keluarga	4,256,678,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Kelompok Masyarakat Miskin	250 Keluarga	850,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	6	1		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yg mendapatkan penanganan	%	95.43%	%	100%	753,150,250						100%	1,010,000,000	
1	6	6	1	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase Bantuan Perlindungan Sosial yang dialokasikan kepada Korban Bencana Alam dan Bencana	%	100%	%	100%	753,150,250						100%	1,010,000,000	
1	6	6	1	2	Penyediaan Permaknaan	Jumlah Penguksi yang Mendapatkan Permaknaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	65.000 org	65000 org	60.500 org	65.000 org	458,159,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Korban bencana alam dan Sosial	5000 Orang	600,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	6	1	4	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pangsigam) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	5000 org	5.000 org	5.000 orang	3.500 Orang	195,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Korban bencana alam dan Sosial	3500 Orang	250,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	6	1	5	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	50 Orang	0	50 Orang	50 Orang	39,991,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Korban bencana alam dan Sosial	50 Orang	80,000,000	DINAS SOSIAL	
1	6	7			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	50 orang	0	50 orang	50 Orang	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Korban bencana alam dan Sosial	50 Orang	80,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	7	1		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM	Cakupan byanan pengelolaan TMP dan MPN	100%	97.45%	100%	100%	148,487,375						100%	200,000,000	
1	6	7	1	2	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	100%	97.45%	100%	100%	148,487,375						100%	200,000,000	
1					Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	3 TMP dan MPN	3 TMP dan MPN	3 TMP dan MPN	3 Makam	148,487,375		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Makam	200,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	6	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						3,438,842,000							3,782,726,199	
1	6	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu	%		%	100%	1,669,042,365						100%	1,835,946,601	
1	6	1	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Keuangan dan Laporan Kinerja PD	%		%	100%	30,445,000						100%	33,489,500	



1	6	1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		n/a %	85%	909,476,212						85%	1,560,024,320	
1	6	1	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rincian Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	laporan		laporan	2 laporan		12,505,200						2 laporan	14,700,000	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen		4,505,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 1 Dokumen	4,700,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	1	2										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen		4,500,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 2 Dokumen	5,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	1	7										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan		3,500,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 2 Laporan	5,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	1	3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya administrasi keuangan	laporan		laporan	2 laporan		103,560,000						2 laporan	100,000,000	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen		103,560,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	UPT.PSA			12 Dokumen	100,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	1	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	ASN		ASN	18 ASN		6,741,900						18 ASN	4,000,000	
					Pengadaan Pakelan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakelan Dinas dan Kelengkapannya				36 stel		6,741,900	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 36 stel	4,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	tahun		tahun	1 tahun		394,394,074						1 tahun	1,003,324,320	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket/gedung		13,823,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	UPT. PSA			3 Paket/gedung	16,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	1	2										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket		221,806,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	UPT. PSA			45 Paket	720,324,320	DINAS SOSIAL
1	6	1	1	3										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				45 Paket		116,667,400	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	UPT. PSA			45 Paket	200,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	1	4										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket		12,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	UPT. PSA			2 Paket	25,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	1	5										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket		24,656,774		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	UPT. PSA			5 Paket	22,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	1	6										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen		4,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	UPT. PSA			4 Dokumen	6,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	1	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya saran perkantoran	tahun		tahun	1 tahun		121,478,060						1 tahun	113,000,000	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 layanan		121,478,060	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	UPT PSA			4 layanan	113,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	1	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							270,796,978								325,000,000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya				9 Unit		129,587,250	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9 Unit	150,000,000	DINAS SOSIAL
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit		35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit	55,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	1	9										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit/wc		6,209,728	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11 Unit/wc	0	DINAS SOSIAL
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit/gedung		100,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit/gedung	120,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	4	1		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PPKS (Disabilitas, Lansia, anak terlantar, gepeng dan lainnya di luar napza) yg mendapatkan benefit	3,3 %		n/a %	3,3 %		1,494,502,239						3,3 %	1,254,000,000	
1	6	4	1	2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	tersedianya program rehabilitasi sosial anak terlantar dalam panti	anak		anak	40 anak		1,058,650,939						40 anak	854,000,000	
					Penyediaan Makanan	Jumlah anak panti yang mendapatkan permakanan				40 anak		657,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Terlantar Dalam Panti			40 anak	700,000,000	DINAS SOSIAL
					Penyediaan Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				0 Orang				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang		
					Penyediaan Sandang	Jumlah anak panti yang mendapatkan sandang				40 anak		124,724,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Terlantar Dalam Panti			40 anak	154,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	4	1	6										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
					Jumlah Orang yang Menerima Pakelan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakelan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				0 Orang				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang		
1	6	4	1	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				40 Orang		35,500,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Terlantar Dalam Panti			40 Orang	0	DINAS SOSIAL
					Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah anak panti yang mendapatkan bimbingan aktivitas hidup sehari hari				40 anak		33,500,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Terlantar Dalam Panti			40 anak	0	DINAS SOSIAL
					Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				0 Orang				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang		
1	6	4	1	9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				40 Orang		177,926,939	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anak Terlantar Dalam Panti			40 Orang	0	DINAS SOSIAL
1	6	4	1	10										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah anak panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga			40 anak	30,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Anak Terlantar Dalam Panti	40 anak		0	DINAS SOSIAL		
1	6	4	1		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi			0 Orang						0 Orang					
1	6	4	1	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	tersedianya program rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis dalam panti	orang	orang	15 orang	283,600,000				15 orang			0		
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi			15 Orang	171,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		gelandangan dan pengemis dalam panti	15 Orang			0	DINAS SOSIAL	
1	6	4	1	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakai dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi			15 Orang	25,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		gelandangan dan pengemis dalam panti	15 Orang			0	DINAS SOSIAL
1	6	4	1	4															
1	6	4	1	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi			15 Orang	15,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong			gelandangan dan pengemis dalam panti	15 Orang			0	DINAS SOSIAL
1	6	4	1	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi			15 Orang	20,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong			gelandangan dan pengemis dalam panti	15 Orang			0	DINAS SOSIAL
1	6	4	1	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi			15 Orang	25,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong			gelandangan dan pengemis dalam panti	15 Orang			0	DINAS SOSIAL
1	6	4	1	8	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi			15 Orang	20,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong			gelandangan dan pengemis dalam panti	15 Orang			0	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.1		Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemenuhan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau identitas gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis			15 Orang	7,600,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong			gelandangan dan pengemis dalam panti	15 Orang			0	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.1	11	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	tersedianya program rehabilitasi sosial ABH dalam panti	anak	anak	20 anak	152,251,300					20 anak		400,000,000		
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan Pembinaan			20 ABH	152,251,300	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Panti	20 ABH		400,000,000		DINAS SOSIAL
2						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA			0 Dokumen						0 Dokumen				
2	7				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>					36,773,535,304							7,730,983,109		
2	7	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>					29,772,233,004							4,420,983,109		
2	7	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					186,860,700							472,283,810		
2	7	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	60,195,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	5 Dokumen		226,687,680		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	12,878,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	1 Dokumen		16,688,430		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0 Dokumen						0 Dokumen				
2	7	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	14,961,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	1 Dokumen		16,457,540		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0 Dokumen						0 Dokumen				
2	7	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	19,029,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	1 Dokumen		21,847,320		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			0 Dokumen						0 Dokumen				
2	7	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	9,583,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	1 Dokumen		15,602,840		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			0 Dokumen						0 Dokumen				
2	7	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0 Laporan	17,444,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	0 Laporan		25,000,000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Laporan Kinerja			3 Dokumen						3 Dokumen				
2	7	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Profil/Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian			1 Dokumen	52,767,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	1 Dokumen		150,000,000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Evaluasi Rencana Aksi, Manajemen Resiko, Sakip dan Kinerja Perangkat Daerah			4 Dokumen						4 Dokumen				
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0 Laporan						0 Laporan				
						Jumlah Laporan Tahunan			1 Dokumen						1 Dokumen				
2	7	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					26,197,476,183							307,701,000		
2	7	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan			1 Tahun	25,928,676,383	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	1 Tahun		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi/ jumlah pengajuan SPM			1 Dokumen	250,310,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	1 Dokumen		257,901,000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0 Dokumen						0 Dokumen				

2	7	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	8,999,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	0 Laporan	9,800,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu	1 Dokumen					1 Dokumen			
2	7	1	1	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	7,999,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	0 Dokumen	8,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
						Jumlah laporan bahan tanggapan	1 Tahun					1 Tahun			
2	7	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	1,490,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	0 Laporan	32,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
						Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	12 Kegiatan					12 Kegiatan			
2	7	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			93,198,300					84,000,000		
2	7	1	1	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBM SKPD	1 Dokumen	8,999,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	1 Dokumen	10,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen					0 Dokumen			
2	7	1	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BMD yang diamankan	12 Bulan	71,720,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	12 Bulan	65,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen					0 Dokumen			
2	7	1	1	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan barang milik daerah	1 Dokumen	8,456,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	1 Dokumen	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan					0 Laporan			
2	7	1	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	4,022,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	0 Laporan	9,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
						Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen			
2	7	1	1	1.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			238,364,300					205,093,300		
2	7	1	1	1.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	64,955,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	1 Paket	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	166 orang					166 orang			
2	7	1	1	1.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	53,110,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	0 Dokumen	80,683,700	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Dokumen Pengelola Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen					1 Dokumen			
						Jumlah Dokumen Penyusunan SOP	1 Dokumen					1 Dokumen			
						Jumlah ketersediaan Informasi Publik	1 Dokumen					1 Dokumen			
2	7	1	1	1.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Individu	1 Dokumen	101,968,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	1 Dokumen	105,999,600	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen					0 Dokumen			
2	7	1	1	1.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat minimal 20 JP Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/sosialisasi Jumlah Peserta Bimtek	20 Orang	9,880,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	20 Orang	9,960,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1	1.1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis	50 Orang	6,500,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	50 Orang	6,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	15 Orang	1,950,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	15 Orang	1,950,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah			419,547,300				411,499,999		
2	7	1	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	22,993,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	1 Paket	23,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket					0 Paket			
2	7	1	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	69,194,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	1 Paket	91,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket					0 Paket			
2	7	1	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Paket	26,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	1 Paket	28,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket					0 Paket			
2	7	1	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	20,644,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	0 Paket	29,999,999	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket					1 Paket			
2	7	1	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	5,500,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	0 Dokumen	5,500,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



2	7	3	1	1	Realisasi Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas				45 Perusahaan	118,355,650	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	45 Perusahaan	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
												Kab. Landak, Semua Kecamatan,					
												Kab. Sambas, Semua Kecamatan,					
												Kab. Singgau, Semua Kecamatan,					
												Kab. Sintang, Semua Kecamatan,					
												Kab. Trianduk, Semua Kecamatan,					
												Kab. Sekeloa, Semua Kecamatan,					
												Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan,					
												Kab. Mempawah, Semua Kecamatan,					
2	7	3	1	1	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi						145,941,450					0	
2	7	3	1	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saling Tenaga Kerja di Tingkat daerah				14 Dokumen	145,941,450		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	14 Dokumen	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Tenaga Kerja yang terukur produktivitasnya				20000 orang					20000 orang		
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						228.569.200					310.000.000	
2	7	4	1		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota						196.426.800					310.000.000	
2	7	4	1	2	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Pelayanan Antar Kerja Kab/kota				1 Tahun	76,367,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	1 Tahun	120,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD				484 Orang					484 Orang		
2	7	4	1	4	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL				60 Orang	85,075,900	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	60 Orang	110,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
												Kab. Sintang, Semua Kecamatan,					
2	7	4	1	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				250 Orang	34,983,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	250 Orang	80,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
												Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
2	7	4	1		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						32,142,400					0	
2	7	4	1	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karirhub)				4000 Orang	32,142,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	4000 Orang	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						3.589.969.800					810.000.000	
2	7	5	1		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota						185,539,800					205,000,000	
2	7	5	1	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online				50 Perusahaan	74,475,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	50 Perusahaan	80,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	1	2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar di WLKP Online				50 Perusahaan	71,274,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	50 Perusahaan	75,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	1	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamstok				1 Laporan	39,790,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	1 Laporan	50,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	1		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi						358,354,400					445,000,000	
2	7	5	1	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				7 Perkara	194,154,100	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	7 Perkara	250,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
												Semua Kecamatan,					
												Kota Pontianak, Semua Kecamatan,					
												Kab. Singgawang, Semua Kecamatan,					
												Kab. Sekeloa, Semua Kecamatan,					





3	32	3	1	7	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	331 Kepala Keluarga	30,000,000	Kab. Bengkayang, Rajoi Babang, Semuning Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	331 Kepala Keluarga	30,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
									Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Nanga Kalis										
									Kab. Sambas, Paloh, Sebusub										
									Kab. Sanggau, Sekayam, Sangai Tekam										
									Kab. Sintang, Ketungau Hulu, Nanga Bayan										
									Kab. Kayong Utara, Pulau Maya,										
3	32	3	1	8	Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran Hasil Penjajakan yang telah di Verifikasi	3 Lokasi	203,470,900	Kab. Ketapang, Matan Hilir Selatan, Sungai Nanjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	3 Lokasi	220,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
									Kab. Sambas, Paloh, Sebusub										
									Kab. Sintang, Ketungau Hulu, Nanga Bayan										
3	32	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN			300,000,000						0					
3	32	4	1		Pengembangan Satu-satun Permukiman pada Tahap Penempatan			300,000,000						0					
3	32	4	1	2	Pengutan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Pengutan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	7 Satuan Permukiman	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	7 Satuan Permukiman		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									0					
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			1,693,550,438						0					
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			1,429,398,938						0					
2	7	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			49,979,000						0					
2	7	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	14,819,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Dokumen		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
2	7	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7,716,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Dokumen		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
2	7	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7,868,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Dokumen		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
2	7	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7,716,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Dokumen		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
2	7	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7,778,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Dokumen		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
2	7	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4,080,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Laporan		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
2	7	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			124,791,800						0					
2	7	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	96,780,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Dokumen		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
2	7	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	28,011,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	4 Laporan		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
2	7	1	1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			32,600,000						0					
2	7	1	1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	32,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	20 Orang		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
2	7	1	1		Administrasi Umum Perangkat Daerah			214,669,200						0					
2	7	1	1	1	1	1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	59,225,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3 Paket		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2	7	1	1	1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	12,130,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2 Paket		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2	7	1	1	1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	23,740,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Bulan		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2	7	1	1	1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	15,612,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3 Paket		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2	7	1	1	1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	3,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	36 Dokumen		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2	7	1	1	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	20 Laporan		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2	7	1	1	1	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			151,415,700						0				
2	7	1	1	1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	51,415,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	5 Unit		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2	7	1	1	1	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Aplikasi	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Aplikasi		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2	7	1	1	1	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	704,374,238		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	48 Laporan		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2	7	1	1	1	1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Kegiatan	592,264,880		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2	7	1	1	1	1	1	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0			
2	7	1	1	1	1	1	1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	34,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	6 Unit		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	1	1	1	6	1	1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	100,069,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 Unit		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	1	1	1	9	1	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Paket			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3 Paket		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	17,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Unit		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	6			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			264,151,500						0					



2	8	1	1.1	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Paket	50,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	1 Paket	66,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	8	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Paket	213,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	1 Paket	220,330,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						166,625,200							206,361,140			
2	8	2	1		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi						84,736,500							115,039,210			
2	8	2	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi				0 Dokumen	84,736,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM		0 Dokumen	115,039,210	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	8	2	1		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi						50,274,100							54,782,090			
2	8	2	1	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi				0 Dokumen	50,274,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM		0 Dokumen	54,782,090	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	8	2	1		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase hasil penguatan dan pengembangan penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	%		%	100 %	31,614,600							100 %	36,539,840		
2	8	2	1	3	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	31,614,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	Ibu Rumah Tangga, PPK, Organisasi Perempuan	1 Dokumen	36,539,840	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN																
						Persentase keaktifan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi	%		%	100 %	365,459,400							100 %	89,021,744		
						Persentase perangkat daerah yang dilibatkan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	%		%	100 %									100 %		
2	8	3	1		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	94,984,500							4 Dokumen	88,665,621		
						Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		
2	8	3	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				35 Lembaga	60,714,500	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	SKPD dan Organisasi/Lembaga Masyarakat	35 Lembaga	88,621,621	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	8	3	1	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				35 Perangkat Daerah	34,270,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	SKPD dan Organisasi/Lembaga Masyarakat	35 Perangkat Daerah	44,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	8	3	1		Penyediaan layanan rujukan lapangan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	Meningkatnya jumlah layanan lanjutan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan	%		%	100 %	102,439,600							100 %	143,017		
2	8	3	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				13 Layanan	102,439,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	Satgas PPA, Petugas Shelter dan Dinas PPA Kab/Kota	13 Layanan	143,017	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	8	3	1		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase koordinasi dan kerjasama antar SKPD dan Organisasi/Lembaga Masyarakat dalam pelayanan bagi perempuan korban kekerasan	%		%	100 %	168,035,300							100 %	213,105		
2	8	3	1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	15,776,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	SKPD terkait PPA dan Organisasi/Lembaga Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	23,954	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	8	3	1	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				85 Orang	63,400,100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	SKPD terkait PPA dan Organisasi/Lembaga Masyarakat Tingkat Provinsi	85 Orang	72,342	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	8	3	1	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik				400 Orang	88,859,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	SKPD terkait PPA dan Organisasi/Lembaga Masyarakat Tingkat Provinsi	400 Orang	116,810	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA																
						Persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak kewenangan provinsi	100 %		45 %	100 %	429,506,700							100 %	494,636,164		
2	8	4	1		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan provinsi dan lintas kab/kota	%		%	100 %	319,487,400							100 %	365,324,201		
2	8	4	1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	47,345,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	Perangkat Daerah Provinsi Terkait, DPP-PA Kab/Kota, Organisasi Perempuan, PKK dan Lembaga terkait	1 Dokumen	63,597,171	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	8	4	1	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	119,153,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	Perangkat Daerah Provinsi Terkait, DPP-PA Kab/Kota, Organisasi Perempuan, PKK dan Lembaga terkait	1 Dokumen	132,449,240	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	8	4	1	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	152,988,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	Perangkat Daerah Provinsi Terkait, DPP-PA Kab/Kota, Organisasi Perempuan, PKK dan Lembaga terkait	1 Dokumen	169,277,790	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	8	4	1		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah	Dokument		Dokument	3 Dokument	44,830,700							3 Dokument	49,753,792		
2	8	4	1	3	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	44,830,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM		0 1 Dokumen	49,753,792	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	8	4	1		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya lintas daerah Kabupaten/Kota	%		%	53 %	65,188,600							53 %	79,558,171		
2	8	4	1	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kab/Kota				53 %	65,188,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	Lembaga/Organisasi Masyarakat dan Unsur Masyarakat lainnya	53 %	79,558,171	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK																
						Persentase Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	%		%	42 %	225,956,500							42 %	1,221,549,692		
2	8	5	1		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Terselenggaranya Pengelolaan Data Gender dan Anak	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	225,956,500							2 Dokumen	1,221,549,692		

2	8	5	1	1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Terselenggaranya Pengelolaan Data Gender dan Anak				2 Dokumen	143,273,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	Semua OPD Terkait (Dinas Pendidikan, Dinas, Disdikcapil, Disnakertrans, Dinas Sosial, BPS, Dinas PPPA Kab/Kota dan Sektor Publik)	2 Dokumen	182,089,182	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	5	1	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi				2 Dokumen	82,683,100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	Semua OPD Terkait (Dinas Pendidikan, Dinas, Disdikcapil, Disnakertrans, Dinas Sosial, BPS, Dinas PPPA Kab/Kota dan Sektor Publik)	2 Dokumen	1,039,460,510	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pelebangan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	%	%	80 %		441,724,700							80 %	542,714,106	
2	8	6	1		Pelebangan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi yang mendapatkan penguatan dan peningkatan	%	%	80 %		152,780,800							80 %	196,797,865	
2	8	6	1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta dari Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				67 Orang	77,117,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Lembaga pemerintah, non pemerintah, media, dunia usaha dan anak usia sekolah	67 Orang	113,292,905	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	6	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebangan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Anak				150 Orang	75,663,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Lembaga pemerintah, non pemerintah, media, dunia usaha dan anak usia sekolah	150 Orang	83,504,960	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	6	1		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi yang mendapatkan penguatan dan peningkatan	%	%	85 %		288,943,900							85 %	345,916,241	
2	8	6	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Forum Anak Daerah (FAD)				52 Orang	167,906,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	Forum Anak Daerah (FAD) Kalimantan Barat	52 Orang	184,697,326	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	6	1	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Forum Anak Daerah (FAD)				4 Orang	21,706,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	Forum Anak Daerah (FAD) Kalimantan Barat	4 Orang	48,690,290	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	6	1	4	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Forum Anak Daerah (FAD)				52 Orang	99,331,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	Forum Anak Daerah (FAD) Kalimantan Barat	52 Orang	112,528,625	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	%	80 %		140,562,600							80 %	302,689,901	
2	8	7	1		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	Lembaga	Lembaga	8 Lembaga		140,562,600							8 Lembaga	189,397,161	
2	8	7	1	1	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Anak Usia Sekolah				80 Orang	84,279,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Stakeholder yang memberikan layanan perlindungan khusus dan anak yang memerlukan perlindungan khusus	80 Orang	124,295,168	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	7	1	4	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lemabag Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				60 Orang	56,283,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Stakeholder yang memberikan layanan perlindungan khusus dan anak yang memerlukan perlindungan khusus	60 Orang	65,101,933	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						678,753,160								830,930,408	
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
2	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100% %	n/a %	85% %		232,555,340							85% %	340,146,378	
2	8	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	4 Dokumen		70,920,000							4 Dokumen	87,692,000	
2	8	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	70,920,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	UPT PPA Prov. Kalbar	4 Dokumen	87,692,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	1 Paket		63,785,900							1 Paket	117,221,434	
2	8	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	24,517,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	UPT PPA Prov. Kalbar	1 Paket	26,969,404	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5,047,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	UPT PPA Prov. Kalbar	1 Paket	5,552,030	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12,100,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	UPT PPA Prov. Kalbar	1 Paket	13,310,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	22,121,000							1 Laporan	71,390,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	1 Laporan		97,849,440							1 Laporan	135,232,944	
2	8	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	97,849,440	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	UPT PPA	1 Laporan	135,232,944	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						271,714,820								298,221,330	
2	8	3	1		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						76,370,000								82,951,000	
2	8	3	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	76,370,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Kualitas SDM		1 Dokumen	82,951,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	3	1		Penyediaan Layanan Kujakin Langgung bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	orang	orang	145 orang		143,992,100							145 orang	158,804,030	

2	8	3	1	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	45 Orang	80,771,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kualitas SDM	45 Orang	89,261,700	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	8	3	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	100 Layanan	63,220,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kualitas SDM	100 Layanan	69,542,330	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	8	3	1		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan			51,352,720							56,466,300				
2	8	3	1	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	95 Orang	51,352,720	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Meningkatnya Kualitas SDM	95 Orang	56,466,300	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			174,483,000							192,562,700				
2	8	7	1		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi			174,483,000							192,562,700				
2	8	7	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	101 Layanan	174,483,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Meningkatnya Kualitas SDM	101 Layanan	192,562,700	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			26,851,574,258							29,956,487,466				
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			11,080,795,898							11,931,838,761				
2	9	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			155,416,100							280,000,000				
2	9	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	46,936,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Tim Perencanaan dan Pelaporan OPD	3 Dokumen	120,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14,572,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Tim Perencanaan dan Pelaporan OPD	1 Dokumen	20,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12,246,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Tim Perencanaan dan Pelaporan OPD	1 Dokumen	15,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13,192,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Tim Perencanaan dan Pelaporan OPD	1 Dokumen	20,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11,355,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Tim Perencanaan dan Pelaporan OPD	1 Dokumen	15,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	24,680,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Tim Perencanaan dan Pelaporan OPD	3 Laporan	30,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	32,433,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Tim Perencanaan dan Pelaporan OPD	4 Laporan	60,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7,299,372,463								7,342,838,761			
2	9	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ Bulan	56 Orang/ Bulan	56 Orang/ Bulan	56 Orang/ Bulan	7,072,838,761	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Tercapainya Serapan Anggaran OPD	56 Orang/ Bulan	7,072,838,761	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	196,960,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Tercapainya Serapan Anggaran OPD	12 Dokumen	200,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	14,716,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Tercapainya Serapan Anggaran OPD	2 Laporan	20,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	14,857,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Tercapainya Serapan Anggaran OPD	13 Laporan	20,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			33,929,200								112,000,000			
2	9	1	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	13,929,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Barang Milik Daerah yang dikelola OPD	12 Laporan	18,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Barang Milik Daerah yang dikelola OPD	1 Dokumen	44,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			78,034,900								146,000,000			
2	9	1	1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	1 Dokumen	5,490,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Dokumen	20,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Laporan	1 Dokumen	18,994,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Dokumen	23,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	4,750,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 Orang	53,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	12,200,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	30 Orang	10,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang	36,600,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	24 Orang	40,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1		Administrasi Umum Perangkat Daerah			395,325,800								509,000,000			
2	9	1	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6,540,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Nilai Kepuasan Layanan Internal	1 Paket	8,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	1 Paket	8,411,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Nilai Kepuasan Layanan Internal	1 Paket	15,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20,912,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Nilai Kepuasan Layanan Internal	1 Paket	13,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	4 Paket	4 Paket	7 Paket	96,803,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Nilai Kepuasan Layanan Internal	7 Paket	126,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

2	9	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	2 Paket	2 Paket	3 Paket	10,919,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Nilai Kepuasan Layanan Internal	3 Paket	16,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Nilai Kepuasan Layanan Internal	2 Dokumen	22,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	210,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Nilai Kepuasan Layanan Internal	40 Laporan	220,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	7,609,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Nilai Kepuasan Layanan Internal	1 Laporan	10,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	28,128,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Nilai Kepuasan Layanan Internal	1 Dokumen	50,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1,556,311,878								631,000,000	
2	9	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	4 Unit	8 Unit	19 Unit	9,450,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Barang Milik Daerah yang dikelola OPD	19 Unit	431,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.1	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	1,546,861,878	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Barang Milik Daerah yang dikelola OPD	1 Unit	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,252,834,980								2,156,000,000	
2	9	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	1 Laporan	100 Jasa	3 Laporan	3,405,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Nilai Kepuasan Layanan Internal	1 Laporan	6,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4 jenis	12 Laporan	275,800,020	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Nilai Kepuasan Layanan Internal	12 Laporan	350,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	12 Bulan Layanan	5 Laporan	973,629,960	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Nilai Kepuasan Layanan Internal	5 Laporan	1,800,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					309,570,579								755,000,000	
2	9	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	6 Unit	1 Unit	49,232,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 Unit	50,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	106,169,579	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2 Unit	300,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.1	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	3 Jenis	5 Unit	10,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	5 Unit	20,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	9	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			20 Unit	44,905,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	20 Unit	15,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	99,264,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 Unit	200,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					1,108,655,200								7,553,053,900	
2	9	2	1		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi					1,108,655,200								7,553,053,900	
2	9	2	1	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	10 Unit	2 Unit	2 Unit	4 Unit	600,000,000	Kab. Landak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Infrastruktur Pangan dan Institusi Terkait	4 Unit	2,000,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	2	1	2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	12 Unit	4 Unit	7 Unit	4 Unit	300,000,000	Kab. Landak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Infrastruktur Pangan dan Institusi Terkait	4 Unit	5,000,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	2	1	4	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	104,351,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Infrastruktur Pangan dan Institusi Terkait	1 Laporan	353,053,900	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	2	1	5	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Dokumen Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	104,304,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Infrastruktur Pangan dan Institusi Terkait	1 Dokumen	200,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					9,565,646,300								7,638,273,505	
2	9	3	1		Penyediaan barang pangan pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga					3,067,107,800								4,267,938,905	
2	9	3	1	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				0 Laporan	52,046,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Masyarakat Umum dan Kelembagaan Distribusi Pangan	0 Laporan	52,046,200	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	1	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan yang tersedia	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	4 Laporan		Kab. Landak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Masyarakat Umum dan Kelembagaan Distribusi Pangan	4 Laporan		
2	9	3	1	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1 Laporan	3 jenis	5 Laporan	46,966,600	Kab. Landak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Masyarakat Umum dan Kelembagaan Distribusi Pangan	5 Laporan	180,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	1	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	450 ton	8 Laporan	562,087,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Masyarakat Umum dan Kelembagaan Distribusi Pangan	8 Laporan	800,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN



2	9	3	1	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.604,209,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Aparatur Provinsi dan Kabupaten/kota dan Masyarakat Umum	1 Laporan	60,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	9	4			<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>					2.326,879,700							770,346,800		
2	9	4	1		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi					2.121,493,900							259,399,000		
2	9	4	1	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.121,493,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Tim FSVA Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait	1 Dokumen	259,399,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	9	4	1		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi					205,385,800							510,947,800		
2	9	4	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	205,385,800	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kota Samudra, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Tim Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait	1 Laporan	310,947,800	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	9	5			<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>					2.769,597,160							2,062,974,500		
2	9	5	1		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					2,769,597,160							2,062,974,500		
2	9	5	1	1	Pengutan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	1 Unit	1 Unit	1 Unit	245,467,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Sampel PSAT , Kelembagaan OKKPD, Unit Usaha dan Produk PSAT	1 Unit	122,974,500	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	9	5	1	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	14 Sertifikat	2 Sertifikat	6 Sertifikat	74,117,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Sampel PSAT , Kelembagaan OKKPD, Unit Usaha dan Produk PSAT	6 Sertifikat	90,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	9	5	1	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300 Dokumen	985,033,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Sampel PSAT , Kelembagaan OKKPD, Unit Usaha dan Produk PSAT	300 Dokumen	1,000,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	5	1	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	166 Dokumen	1,417,579,460		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				166 Dokumen	500,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	5	1	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	47,400,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan SDM dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Sampel PSAT , Kelembagaan OKKPD, Unit Usaha dan Produk PSAT	1 Dokumen	350,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									Meningkatnya Kualitas SDM					
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN					54,844,848,672							5,098,500,000		
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PROVINSI)	Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu	persen	persen	100 persen	51,020,538,395						100 persen	5,098,500,000		
2	11	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu (persen)	Persen	Persen	100 Persen	690,748,071						100 Persen	752,000,000		
2	11	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	256,037,948	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	2 Dokumen	265,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
2	11	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	29,821,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	1 Dokumen	32,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
2	11	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	20,065,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	1 Dokumen	23,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
2	11	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	34,716,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	1 Dokumen	35,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
2	11	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	20,065,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	1 Dokumen	22,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
2	11	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD			3 Laporan	107,055,948	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Kota Khatulistiwa, Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	3 Laporan	125,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
2	11	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3 Laporan	222,985,075	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Kota Khatulistiwa, Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	3 Laporan	250,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
2	11	1	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penatausahaan keuangan (bulan)	Bulan	Bulan	12 Bulan	46,769,696,136						12 Bulan	560,000,000		
2	11	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			468 Orang	46,240,511,386	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	468 Orang	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
2	11	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			5 Dokumen	326,560,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	5 Dokumen	340,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
2	11	1	1	6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			2 Dokumen	73,427,950	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	2 Dokumen	85,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
2	11	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			16 Laporan	129,196,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Kota Khatulistiwa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	16 Laporan	135,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
2	11	1	1	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (persen)	Persen	Persen	100 Persen	114,636,400						100 Persen	179,000,000		
2	11	1	1	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	114,636,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	1 Laporan	135,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
2	11	1	1.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelanggaran disiplin ASN	kasus	kasus	3 kasus	174,959,280						3 kasus	254,000,000		
2	11	1	1.1	2	Pengadaan Pakalan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Berserta Atribut Kelengkapan			200 Paket	90,790,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Pegawai DLHK Kalbar	200 Paket	135,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
2	11	1	1.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			2 Dokumen	64,356,380	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Pegawai DLHK Kalbar	2 Dokumen	94,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	

2	11	1	1.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	19,812,900	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Pegawai DLHK Kalbar	1 Dokumen	25,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan	layanan		layanan	8 layanan	483,877,033						8 layanan	624,500,000	
2	11	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	17,889,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LHK Prov. Kalbar	12 Paket	20,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	60,533,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LHK Prov. Kalbar	8 Paket	115,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	22,710,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LHK Prov. Kalbar	9 Paket	11,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	60,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LHK Prov. Kalbar	12 Paket	55,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	48,012,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LHK Prov. Kalbar	2 Paket	50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6 Dokumen	8,200,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LHK Prov. Kalbar	6 Dokumen	8,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				68 Dokumen	142,531,823	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LHK Prov. Kalbar	68 Dokumen	230,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	1	1.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	124,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LHK Prov. Kalbar	2 Dokumen	135,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa	jenis		jenis	2 jenis	310,896,900						2 jenis	238,000,000	
2	11	1	1.1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	65,869,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LHK Prov. Kalbar	5 Paket	68,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	umlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Paket	245,027,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LHK Prov. Kalbar	8 Paket	170,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Layanan	Layanan		Layanan	8 Layanan	2,122,627,920						8 Layanan	1,911,000,000	
2	11	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	15,500,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LHK Prov. Kalbar	250 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	561,430,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LHK Prov. Kalbar	12 Laporan	311,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,545,697,920	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LHK Prov. Kalbar	12 Laporan	1,600,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD	Jenis		Jenis	4 Jenis	353,096,665						4 Jenis	580,000,000	
2	11	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya				2 Unit	145,500,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LHK Prov. Kalbar	2 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	54,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LHK Prov. Kalbar	25 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	41,160,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LHK Prov. Kalbar	36 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	1	1.1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	112,436,665	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Kantor Dinas LHK Prov. Kalbar	6 Unit	230,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis yang wajib disusun	persen		persen	90 persen	577,918,392						90 persen	0	
2	11	2	1		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah Dokumen RPPLH yang disusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	327,918,392						1 Dokumen	0	
2	11	2	1	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi				3 Dokumen	327,918,392	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	3 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	2	1		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Persentase dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang wajib disusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	250,000,000						1 Dokumen	0	
2	11	2	1	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RP/DP/RP/MD yang disusun	Jumlah Dokumen KLHS RP/DP/RP/MD yang disusun				1 Dokumen	250,000,000	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Status Kualitas Udara	point		point	87 point	955,238,285						87 point	0	
						Status Mutu Air	point		point	52 point							52 point	0	
2	11	3	1		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kasus Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dapat dicegah	kasus		kasus	11 kasus	925,300,209						11 kasus	0	
2	11	3	1	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut				1 Dokumen	565,821,700	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Provinsi Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	3	1	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan				1 Dokumen	359,478,509	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Provinsi Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	3	1		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dapat dipulihkan	Lokasi		Lokasi	10 Lokasi	29,938,076						10 Lokasi	0	
2	11	3	1	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi				1 Dokumen	29,938,076	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Provinsi Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah b3 yang terkela dari hasil limbah b3 yang bekerja sama dengan pengumpul limbah b3 skala provinsi	persen		persen	100 persen	623,569,500						100 persen	0	
2	11	5	1		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengumpulan Limbah B3 Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi yang dilaksanakan	ton		ton	819.8322 ton	623,569,500						819.8322 ton	0	

2	11	5	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengembangan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dalam rangka pengembangan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan kewenangan provinsi serta pelaksanaan pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang sesuai kewenangannya.			1 Dokumen	623,569,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Provinsi	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	6			TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	Persentase investasi kewenangan provinsi yang memiliki dokumen lingkungan	persen	persen	95 persen	710,705,000						95 persen	0	
2	11	6	1		Pembiayaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah keataatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Provinsi	izin	izin	682 izin	710,705,000						682 izin	0	
2	11	6	1	1	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Lingkungan yang Diberikan			5 Dokumen	326,288,000	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	5 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	6	1	2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan Peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi fungsional PPLHD			2 Orang	33,835,000	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2 Orang	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	6	1	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan pelanggaran usaha dan/atau kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah			68 Laporan	250,582,000	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	68 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	6	1	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			3 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	3 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi	persen	persen	70 persen	334,621,600						70 persen	0	
2	11	9	1		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan	entitas	entitas	11 entitas	334,621,600						11 entitas	0	
2	11	9	1	1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai terwujudnya dalam rangka PPLH			11 Entitas	334,621,600	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Pemerhati lingkungan	11 Entitas	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup kewenangan provinsi yang ditangani	Dokumen	Dokumen	88 Dokumen	315,540,000						88 Dokumen	0	
2	11	10	1		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	persen	persen	88 persen	315,540,000						88 persen	0	
2	11	10	1	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap Pengelolaan PPLH Provinsi yang Ditangani/Ditindaklanjuti			3 Dokumen	165,540,000	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Provinsi	3 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	10	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan			3 Dokumen	150,000,000	Semua kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Provinsi	3 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah pada kondisi khusus	persen	persen	100 persen	306,717,500						100 persen	0	
2	11	11	1		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase penanganan Sampah pada kondisi khusus	persen	persen	100 persen	306,717,500						100 persen	0	
2	11	11	1	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penanganan sampah pada kondisi khusus			1 Dokumen	306,717,500	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Sampah Regional Provinsi	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					10,745,020,970								2,509,429,760
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rencana tata Hutan KPH	unit	unit	34 unit	9,907,508,970						34 unit		2,378,429,760
3	28	3	1		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Akumulasi RPHPH KPH yang dinilai dan disahkan	unit	unit	34 unit	6,000,000,000						34 unit		0
3	28	3	1	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun			34 Unit	6,000,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Hutan Provinsi Kalbar	34 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
											Kab. Kutaiating, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)						
											Kab. Sambas, Semua Kecamatan,							
											Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,							
											Kab. Sintang, Semua Kecamatan,							
											Kab. Sintang, Semua Kecamatan,							
											Kab. Sintang, Semua Kecamatan,							
											Kab. Sintang, Semua Kecamatan,							
											Kab. Sintang, Semua Kecamatan,							
3	28	3	1		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecil di Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Data dan informasi wilayah usaha di kawasan HP dan HL	data	data	30 data	475,000,000						30 data	0	
3	28	3	1	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun			34 Dokumen	475,000,000	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Kalbar	34 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
											Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)						
											Kab. Kutaiating, Semua Kecamatan,							
											Kab. Sambas, Semua Kecamatan,							
											Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,							
											Kab. Sintang, Semua Kecamatan,							





3	28	3	1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Terwujudnya Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan	tahun	tahun	1 tahun	36,120,000						1 tahun	36,000,000		
3	28	3	1	1	Penyusunan Rancangan Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancangan Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun			1 Dokumen	36,120,000	Kab. Sambas, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	UPT KPH Wilayah Sambas	1 Dokumen	36,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	3	1		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Keseluruhan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHKPH yang sudah di sah kan	dokumen	dokumen	1 dokumen	12,430,000						1 dokumen	12,000,000	
3	28	3	1	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun			1 dokumen	12,430,000	Kab. Sambas, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	UPT KPH Wilayah Sambas	1 dokumen	12,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	3	1		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Benih/Bibit yang diproduksi	batang	batang	1600 batang	51,450,000						1600 batang	50,000,000	
3	28	3	1	6	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah benih/bibit yang diproduksi			1600 batang	51,450,000	Kab. Sambas, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			UPT KPH Wilayah Sambas	1600 batang	50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	3	1.1		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	tahun	tahun	1 tahun	430,000,000						1 tahun	460,000,000	
3	28	3	1.1	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			1 dokumen	160,000,000	Kab. Sambas, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	UPT KPH Wilayah Sambas	1 dokumen	160,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	3	1.1	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun			1 laporan	270,000,000	Kab. Sambas, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	UPT KPH Wilayah Sambas	1 laporan	300,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	%	%	100 %	120,000,000						100 %	120,000,000	
3	28	5	1		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terwujudnya Kelompok masyarakat yang mandiri di bidang kehutanan			9 KUPS	120,000,000						9 KUPS	120,000,000	
3	28	5	1	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan			9 kelompok	120,000,000	Kab. Sambas, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatnya Kualitas SDM	UPT KPH Wilayah Sambas	9 kelompok	120,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					1,325,880,000							1,325,880,000	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Sesuai Dengan Prosedur/Tepat Waktu	Persen	Persen	100 Persen	725,880,000						100 Persen	725,880,000	
3	28	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Persen	Persen	100 Persen	122,906,800						100 Persen	122,906,800	
3	28	1	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	26,891,000	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan dan dan penganggaran	1 Dokumen	26,891,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	32,081,000	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan dan dan penganggaran	1 Dokumen	32,081,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	31,967,400	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan dan dan penganggaran	1 Dokumen	31,967,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	31,967,400	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan dan dan penganggaran	1 Dokumen	31,967,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan	Persen	Persen	100 Persen	159,422,000						100 Persen	159,422,000	
3	28	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	110,660,000	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	110,660,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	14,564,600	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	14,564,600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12 Laporan	34,197,400	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	34,197,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	27,007,400						1 Dokumen	27,007,400	
3	28	1	1	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	27,007,400	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	27,007,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	1	1.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sesuai Prosedur (Persen)	Persen	Persen	100 Persen	35,458,800						100 Persen	35,458,800	
3	28	1	1.1	2	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			1 Paket	16,150,000	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian	1 Paket	16,150,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	1	1.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10 Orang	19,308,800	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian	10 Orang	19,308,800	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Barang (Persen)	Persen	Persen	100 Persen	166,590,100						100 Persen	166,590,100	
3	28	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	3,111,000	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Paket	3,111,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	24,895,400	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Paket	24,895,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	2,037,900	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Paket	2,037,900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	15,000,000	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Paket	15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	2,833,800	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Paket	2,833,800	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	118,712,000	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	118,712,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas (Persen)	Persen	Persen	100 Persen	70,874,900						100 Persen	70,874,900	
3	28	1	1.1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Paket	10,053,900	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Paket	10,053,900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
														Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup				

3	28	1	1.1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			5 Unit	25,821,000	Kau. Bengkulu, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Unit	25,821,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 Unit	35,000,000	Kau. Bengkulu, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Unit	35,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	Persen	Persen	100 Persen	67,500,000						100 Persen	67,500,000		
3	28	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	900,000	Kau. Bengkulu, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	900,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Laporan	66,600,000	Kau. Bengkulu, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	66,600,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (Persen)	Persen	Persen	100 Persen	76,120,000						100 Persen	76,120,000		
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Labangannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan			16 Unit	68,900,000	Kau. Bengkulu, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	16 Unit	68,900,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			15 Unit	7,220,000	Kau. Bengkulu, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	15 Unit	7,220,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	Persen	Persen	100 Persen	582,184,800						100 Persen	582,184,800		
3	28	3	1		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase Sarana prasarana operasional yang terpenuhi	Persen	Persen	100 Persen	56,125,000						100 Persen	56,125,000		
3	28	3	1	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH dan Kantor Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan yang terbangun			1 Unit	56,125,000	Kau. Bengkulu, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Perancangan Tata Hutan dengan terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Operasional KPH	1 Unit	56,125,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3	1		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan keculai pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Facilitasi UPT KPH dalam penyusunan rancangan pengelolaan (Dokumen RPH/HP)	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	10,473,500						1 Dokumen	10,473,500		
3	28	3	1	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun			1 Dokumen	10,473,500	Kau. Bengkulu, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH	1 Dokumen	10,473,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3	1		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase pemanfaatan hutan di kawasan HP dan HL yang dikelola secara aktif	Persen	Persen	100 Persen	11,515,200						100 Persen	11,515,200		
3	28	3	1	9	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan			1 Dokumen	11,515,200	Kau. Bengkulu, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1 Dokumen	11,515,200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3	1		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Luas Rehabilitasi Lahan Kritis di luar kawasan hutan negara	Persen	Persen	100 Persen	82,892,700						100 Persen	82,892,700		
3	28	3	1	6	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Bibit Tanaman Hutan/MPTS/Buah-Buahan yang diadakan			2000 Batang	74,377,500	Kau. Bengkulu, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan Negara	2000 Batang	74,377,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3	1	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan			1 Laporan	8,515,200	Kau. Bengkulu, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan Negara	1 Laporan	8,515,200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3	1.1		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Laporan	Laporan	1 Laporan	421,178,400						1 Laporan	421,178,400		
3	28	3	1.1	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			1 Laporan	16,015,200	Kau. Bengkulu, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 Laporan	16,015,200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3	1.1	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun			1 Laporan	405,163,200	Kau. Bengkulu, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 Laporan	405,163,200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Penyuluhan yang Berhasil Meningkatkan Kualitas Kelompok di Bidang Kehutanan (Persen)	Persen	Persen	100 Persen	17,815,200						100 Persen	17,815,200		
3	28	5	1		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah KTH yang difasilitasi Penguatan kelembagaannya (Kelompok)	Kelompok	Kelompok	2 Kelompok	17,815,200						2 Kelompok	17,815,200		
3	28	5	1	2	Pengutan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Pengutan dan Pendampingan kelembagaan			2 Kelompok	17,815,200	Kau. Bengkulu, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Peran Penyuluhan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2 Kelompok	17,815,200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					1,326,780,000							1,326,780,000		
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100% %	n/a %	85% %	726,780,000							85% %	894,308,885	
3	28	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	8,508,629						1 Dokumen	9,628,293		
3	28	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	8,508,629		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	9,628,293	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	105,727,770						1 Dokumen	106,337,936		
3	28	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	100,680,000	Kau. Mempawah, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	100,533,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12 Laporan	5,047,770	Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	UPT KPH Wilayah Mempawah	12 Laporan	5,804,936	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	34,189,000						3 Dokumen	46,000,000		
3	28	1	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	34,189,000	Kau. Mempawah, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	UPT KPH Wilayah Mempawah	1 Dokumen	46,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakalan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Paket	23 Paket	71,982,800						23 Paket	81,737,860		
3	28	1	1.1	2	Pengadaan Pakalan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya			3 Paket	64,982,800	Kau. Mempawah, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Pegawai Instansi UPT KPH Wilayah Mempawah	3 Paket	73,687,860	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			5 Orang	7,000,000	Kau. Mempawah, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Pegawai Instansi UPT KPH Wilayah Mempawah	5 Orang	8,050,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Perlatan Kantor	Paket	Paket	30 Paket	153,656,621	Kau. Mempawah, Semua Kecamatan,					30 Paket	228,564,364		



3	28	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	11,378,500	Kab. Langkat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 paket	36,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 paket	1,500,000	Kab. Langkat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		2 paket	51,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				120 Paket	7,200,000	Kab. Langkat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		120 Paket	7,200,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 paket	12,900,000	Kab. Langkat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		3 paket	20,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 laporan	158,859,968	Kab. Langkat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		18 laporan	210,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						229,976,000							231,057,265		
3	28	1	1.1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	35,000,000	Kab. Langkat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		1 Unit	35,057,265	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 unit	194,976,000	Kab. Langkat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 unit	196,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						77,140,800							79,000,000		
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 laporan	17,140,800	Kab. Langkat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 laporan	18,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan	60,000,000	Kab. Langkat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 laporan	61,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59,247,700							61,000,000		
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				19 unit	50,000,000	Kab. Langkat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		19 unit	51,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	9,247,700	Kab. Langkat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		5 Unit	10,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						645,175,632							327,212,420		
3	28	3	1		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						26,870,400							77,212,420		
3	28	3	1	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPH di kawasan Hutan Produksi				1 dokumen	26,870,400	Kab. Langkat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 dokumen	51,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3	1		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan						230,119,232							250,000,000		
3	28	3	1	6	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan					0	230,119,232	Kab. Langkat, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		0	250,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3	1.1		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						388,186,000							0		
3	28	3	1.1	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang dilaksanakan dalam satu tahun				1 laporan	388,186,000	Kab. Langkat, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		1 laporan	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				0 Laporan								0		
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						31,695,400							0		
3	28	5	1		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						31,695,400							0		
3	28	5	1	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				4 KTH	31,695,400	Kab. Langkat, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		4 KTH	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1,487,200,000							2,217,056,500		
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						787,200,000							880,405,900		
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100% %		n/a %	85% %								85% %	880,405,900	
3	28	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu	Persen		Persen	85 Persen	31,700,000							85 Persen	34,870,000	
3	28	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	16,700,000	Kab. Kubu Raya, Sungai Raya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Kubu Raya	1 Dokumen	18,370,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Kubu Raya, Sungai Raya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Kubu Raya	1 Dokumen	16,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat	Persen		Persen	85 Persen	127,000,000							85 Persen	139,700,000	
3	28	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	100,000,000	Kab. Kubu Raya, Sungai Raya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Kubu Raya	12 Dokumen	110,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	27,000,000	Kab. Kubu Raya, Sungai Raya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Kubu Raya	14 Laporan	29,700,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan barang	Persen		Persen	85 Persen	76,200,000							85 Persen	97,900,000	
3	28	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000	Kab. Kubu Raya, Sungai Raya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Kubu Raya	1 Paket	5,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	20,000,000	Kab. Kubu Raya, Sungai Raya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Kubu Raya	4 Paket	22,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	9,000,000	Kab. Kubu Raya, Sungai Raya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Kubu Raya	3 Paket	9,900,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	9,000,000	Kab. Kubu Raya, Sungai Raya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Kubu Raya	1 Paket	9,900,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6,000,000	Kab. Kubu Raya, Sungai Raya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Kubu Raya	1 Paket	6,600,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	

3	28	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	27,200,000	Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Kubu Raya	10 Laporan	44,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas (kumulatif tahun berjalan)	Persen		Persen	85 Persen	234,904,000						85 Persen	258,394,400		
3	28	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	24,931,300	Kab. Kubu Raya, Sungai Raya, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Kubu Raya	3 Unit	27,424,430	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	90,000,000	Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Kubu Raya	1 Unit	99,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	119,972,700	Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	UPT KPH Wilayah Kubu Raya	3 Unit	131,969,970	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	85 Persen	30,120,000						85 Persen	33,132,000		
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	24,600,000	Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Kubu Raya	4 Laporan	27,060,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,520,000	Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Kubu Raya	1 Laporan	6,072,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		Persen	85 Persen	287,276,000						85 Persen	316,409,500		
3	28	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	34,106,000	Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Kubu Raya	1 Unit	37,186,600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perbaikannya				17 Unit	141,225,000	Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Kubu Raya	17 Unit	155,347,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	11,945,000	Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Kubu Raya	9 Unit	13,139,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				0.06 Ha	100,000,000	Kab. Kubu Raya, Sungai Raya, Parit Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Kubu Raya	0.06 Ha	110,735,900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH (HL/HP)	Ha		Ha	5 Ha	641,499,000						5 Ha	1,272,299,500		
3	28	3	1		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Pemanfaatan Hutan di KPH (HP/HL)	Ha		Ha	5 Ha	57,083,000						5 Ha	62,791,300		
3	28	3	1		Pemanfaatan Hutan di KPH (HP/HL)	Lokasi			Lokasi	1 Lokasi							1 Lokasi			
3	28	3	1	8	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Pemanfaatan Hutan KPH (HP/HL)				1 Lokasi	57,083,000	Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pemerintah dan Masyarakat	1 Lokasi	62,791,300	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3	1		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Bibit Tanaman untuk Rehabilitasi Lahan	Batang		Batang	10000 Batang	134,416,000						10000 Batang	147,857,600		
3	28	3	1	6	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan				10000 Batang	134,416,000	Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	KPH dan Masyarakat	10000 Batang	147,857,600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3	1.1		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Laporan Gish/hutba/Penyelenggaraan pencegahan/Penganggulangan Karhutla	bulan		bulan	12 bulan	450,000,000						12 bulan	1,061,650,600		
3	28	3	1.1	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah kegiatan Petrol/ Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				4 Kegiatan	450,000,000	Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Wilayah rawan karhutla dan rawan gangguan keamanan hutan dan kawasan hutan	4 Kegiatan	1,061,650,600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Terbentuk/terfasilitasinya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	KUPS		KUPS	5 KUPS	58,501,000						5 KUPS	64,351,100		
3	28	5	1		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang terbentuk	KUPS		KUPS	5 KUPS	58,501,000						5 KUPS	64,351,100		
3	28	5	1	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah KUPS terbentuk/terfasilitasi				5 KUPS	58,501,000	Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pelaku Perhutanan Sosial/Usaha/Lembaga Perhutanan Sosial	5 KUPS	64,351,100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1,348,087,000							1,081,000,000		
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100% %		n/a %	85% %	698,087,000							85% %	16,000,000	
3	28	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	%		%	100 %	48,848,700							100 %	0	
3	28	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	24,280,500	Kab. Melawi, Nanga Pinoh, Paal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	KPH Melawi	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	24,568,200	Kab. Melawi, Nanga Pinoh, Paal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	KPH Melawi	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	meningkatnya penatausahaan keuangan PD	%		%	85 %	145,000,000							85 %	0	
3	28	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	120,000,000	Kab. Melawi, Nanga Pinoh, Paal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	KPH Wilayah Melawi	12 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	25,000,000	Kab. Melawi, Nanga Pinoh, Paal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	KPH Wilayah Melawi	17 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	20,000,000							100 %	0	
3	28	1	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Melawi, Nanga Pinoh, Paal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Melawi	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	49,542,600							100 %	0	
3	28	1	1.1	2	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas Beserta Atribut kelengkapan				1 Paket	19,542,600	Kab. Melawi, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Melawi	1 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	30,000,000	Kab. Melawi, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Melawi	12 Orang	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan BMD	%		%	98 %	176,046,600							98 %	0	
3	28	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000	Kab. Melawi, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Melawi	1 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	62,790,700	Kab. Melawi, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Melawi	1 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	

3	28	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2,508,400	Kab. Melawi, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Melawi	1 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kab. Melawi, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Melawi	1 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,500,000	Kab. Melawi, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Melawi	1 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	85,247,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Melawi	1 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengelolaan BMD	%	%	95 %		80,637,100							95 %	0	
3	28	1	1.1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	29,448,600	Kab. Melawi, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Melawi	1 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	51,188,500	Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	UPT KPH Wilayah Melawi	15 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan BMD	%	%	90 %		44,012,000							90 %	0	
3	28	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,000,000	Kab. Melawi, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Melawi	1 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	41,012,000	Kab. Melawi, Nanga Pinoh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Melawi	1 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan BMD	%	%	90 %		134,000,000							90 %	16,000,000	
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya				33 Unit	119,000,000	Kab. Melawi, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Melawi	33 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	15,000,000	Kab. Melawi, Nanga Pinoh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Melawi	21 Unit	16,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3			<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	2060000 Ha	1559700 Ha	2060000 Ha		650,000,000							2060000 Ha	1,065,000,000	
3	28	3	1		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Dokumen RPHJD	Dokumen	Dokumen	4 Dokumen		44,800,000							4 Dokumen	0	
3	28	3	1	1	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				4 Dokumen	44,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	UPT KPH Melawi	4 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3	1		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Tertelaksananya Pengawasan Pemegang Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Wilayah Kerja UPT KPH Wilayah Melawi	Laporan	Laporan	1 Laporan		30,000,000							1 Laporan	65,000,000	
3	28	3	1	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	30,000,000	Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pemegang Ijin	1 Dokumen	65,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3	1		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan	Jumlah bibit yang di hasilkan	Bibit	Bibit	10000 Bibit		42,700,000							10000 Bibit	0	
3	28	3	1	6	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit yang diproduksi				10000 Batang	42,700,000	Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat	10000 Batang	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3	1.1		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Tertelaksananya operasional brigade dan sosialisasi karhutla	Bulan	Bulan	12 Bulan		532,500,000							12 Bulan	1,000,000,000	
3	28	3	1.1	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	532,500,000	Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Kawasan Hutan	1 Laporan	1,000,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28				<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						1,125,060,058								1,229,950,180	
3	28				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						525,033,058							1 Tahun	629,923,180	
3	28	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	%	%	100 %		52,380,000							100 %	73,205,440	
3	28	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	12,762,000	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	UPT KPH Wilayah Kayong	1 Dokumen	19,855,440	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	12,612,000	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	UPT KPH Wilayah Kayong	1 Dokumen	14,850,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	12,894,400	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	UPT KPH Wilayah Kayong	1 Dokumen	23,650,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	14,112,000	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	UPT KPH Wilayah Kayong	1 Dokumen	14,850,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Laporan Keuangan	Tahun	Tahun	1 Tahun		127,277,668							1 Tahun	133,610,310	
3	28	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Penatausahaan Keuangan PD	Tahun	Tahun	1 Tahun									1 Tahun		
3	28	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	17,547,600	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	UPT KPH Wilayah Kayong	12 Laporan	16,341,710	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah	Tahun	Tahun	1 Tahun		17,282,000							1 Tahun	91,662,730	
3	28	1	1	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBM dan RPKMBD SKPD				2 Dokumen	12,000,000	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	UPT KPH Wilayah Kayong	2 Dokumen	14,850,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	5,282,000	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	UPT KPH Wilayah Kayong	4 Laporan	16,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Orang/Ahli	Orang/Ahli	3 Orang/Ahli		6,988,400							3 Orang/Ahli	51,360,000	

3	28	1	1.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat				3 Orang	6,988,400	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	UPT KPH Wilayah Kayong	3 Orang	51,360,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	193,083,740	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	UPT KPH Wilayah Kayong	1 Tahun	170,500,000		
3	28	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,354,300	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	UPT KPH Wilayah Kayong	1 Paket	5,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	67,708,200	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	UPT KPH Wilayah Kayong	6 Paket	44,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	8,543,800	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	UPT KPH Wilayah Kayong	2 Paket	4,400,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	15,600,000	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	UPT KPH Wilayah Kayong	0 Paket	6,600,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1			Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12 Bulan							12 Bulan			
3	28	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	98,877,440	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	UPT KPH Wilayah Kayong	12 Laporan	110,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas	Tahun		Tahun	1 Tahun	17,115,000	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,					1 Tahun	22,000,000		
3	28	1	1.1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	17,115,000	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	UPT KPH Wilayah Kayong	1 Paket	11,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	44,006,250						1 Tahun	26,584,500		
3	28	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24 Laporan	1,078,250	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	UPT KPH Wilayah Kayong	24 Laporan	1,078,250	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	42,928,000	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	UPT KPH Wilayah Kayong	12 Laporan	25,506,250	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	66,900,000						1 Tahun	61,000,000		
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	66,900,000	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	UPT KPH Wilayah Kayong	10 Unit	55,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						570,027,000							570,027,000		
3	28	3	1		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						20,719,700							30,000,000		
3	28	3	1	1	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun				1 Dokumen	7,731,700	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		1 Dokumen	15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3	1	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun				3 Unit	12,988,000	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		3 Unit	15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
															Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup					
3	28	3	1		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						15,904,000							20,000,000		
3	28	3	1	9	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan					0	15,904,000	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		0	20,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
						Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa				4 Jenis							4 Jenis			
3	28	3	1		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan						43,376,300							30,000,000		
3	28	3	1	6	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Bibit yang dibuat				3000 Bibit	43,376,300	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		3000 Bibit	30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
						Jumlah data dan informasi terkait Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan				1 Laporan							1 Laporan			
3	28	3	1.1		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						490,027,000							490,027,000		
3	28	3	1.1	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	35,000,000	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		1 Dokumen	35,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3	1.1	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	455,027,000	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		1 Laporan	455,027,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						30,000,000							30,000,000		
3	28	5	1		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						30,000,000							30,000,000		
3	28	5	1	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	30,000,000	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		10 Kelompok	30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1,378,978,920							1,580,000,000		
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100% %	n/a %	85% %		729,108,410							85% %	830,000,000	
3	28	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	dokumen			1 dokumen	50,000,000						1 dokumen	55,000,000		
3	28	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD				23 dokumen	50,000,000	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		0 23 dokumen	55,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen			12 dokumen	194,035,000						12 dokumen	205,000,000		
						Tertaskannya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen			12 dokumen							12 dokumen			
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan			19 Laporan							19 Laporan			
3	28	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	129,035,000	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		0 12 Dokumen	125,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	



3	28	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	31,553,800	Kab. Ketapang, Delta Pawan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah	4 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	4,383,400	Kab. Ketapang, Delta Pawan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah	3 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	16,444,000	Kab. Ketapang, Delta Pawan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah	3 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3,901,200	Kab. Ketapang, Delta Pawan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah	2 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	110,526,000	Kab. Ketapang, Delta Pawan, Tengah, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah	1 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas (kumulatif tahun berjalan)	%		%	100 %	72,335,700						100 %	0		
3	28	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	72,335,700	Kab. Ketapang, Delta Pawan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah	10 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan barang	%		%	100 %	79,077,600						100 %	0		
3	28	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000	Kab. Ketapang, Delta Pawan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah	1 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	72,592,000	Kab. Ketapang, Delta Pawan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah	1 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,485,600	Kab. Ketapang, Delta Pawan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah	1 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	162,109,700						100 %	0		
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	107,426,600	Kab. Ketapang, Delta Pawan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah	17 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	14,625,600	Kab. Ketapang, Delta Pawan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah	0 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
						Jumlah Peralatan dan Mesin yang Lainnya yang Dipelihara				11 Unit								11 Unit		
3	28	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40,057,500	Kab. Ketapang, Delta Pawan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemerintah	1 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luas Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang memanfaatkan (Ha)	Ha		Ha	2.060.000 Ha	650,000,000							2.060.000 Ha	0	
3	28	3	1		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Meningkatnya perencanaan tata hutan KPH	unit		unit	34 unit	96,376,200							34 unit	0	
3	28	3	1	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun				1 Unit	96,376,200	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				0	1 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	3	1		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar		Hektar	1000 Hektar	116,018,200							1000 Hektar	0	
3	28	3	1	6	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Bibit Tanaman yang Dikembangkan				20000 Batang	116,018,200	Kab. Ketapang, Delta Pawan, Tengah	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				0	20000 Batang	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	3	1.1		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan karhutla yang dilakukan	Laporan		Laporan	1 Laporan	437,605,600							1 Laporan	0	
3	28	3	1.1	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				12 Laporan	437,605,600	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				0	12 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1,274,642,000								1,374,642,000	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROVINSI	Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	674,642,000							100 Persen	674,642,000	
3	28	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	34,661,145							4 Dokumen	34,661,145	
3	28	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RENJA-RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RENJA-RKA SKPD				2 Dokumen	17,127,900	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	17,127,900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	13,117,500	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	13,117,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4,415,745	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	4,415,745	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Penatausahaan/Keuangan dan Barang	Orang		Orang	7 Orang	125,511,830							7 Orang	125,511,830	
3	28	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	106,636,630	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				12 Dokumen	106,636,630	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				19 Laporan	18,875,200	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				19 Laporan	18,875,200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	23,128,000							2 Dokumen	23,128,000	
3	28	1	1	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	13,500,000	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				4 Laporan	13,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	1	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	9,628,000	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				1 Laporan	9,628,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	1	1.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat minimal 20 JP	Orang		Orang	4 Orang	37,370,144							4 Orang	37,370,144	
3	28	1	1.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	17,370,144	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				4 Orang	17,370,144	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	20,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				4 Orang	20,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Orang		Orang	20 Orang	147,806,317							20 Orang	147,806,317	

3	28	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,500,000	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		UPT KPH Wilayah Sekadau	1 Paket	4,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	49,620,745	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		UPT KPH Wilayah Sekadau	1 Paket	49,620,745	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3,023,050	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		UPT KPH Wilayah Sekadau	1 Paket	3,023,050	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,912,000	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		UPT KPH Wilayah Sekadau	1 Paket	6,912,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6,427,775	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		UPT KPH Wilayah Sekadau	1 Paket	6,427,775	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	77,322,747	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		UPT KPH Wilayah Sekadau	12 Laporan	77,322,747	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Paket			Paket	2 Paket	93,195,464					2 Paket	93,195,464		
3	28	1	1.1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	40,145,464	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		UPT KPH Wilayah Sekadau	1 Unit	40,145,464	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	53,050,000	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		UPT KPH Wilayah Sekadau	1 Unit	53,050,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa	Jenis			Jenis	4 Jenis	66,283,600					4 Jenis	66,283,600		
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	22,100,000	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT KPH Wilayah Sekadau	12 Laporan	22,100,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	44,183,600	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT KPH Wilayah Sekadau	12 Laporan	44,183,600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jenis			Jenis	3 Jenis	146,685,500					3 Jenis	146,685,500		
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	38,578,100	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT KPH Wilayah Sekadau	10 Unit	38,578,100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	108,107,400	Kab. Sekadau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT KPH Wilayah Sekadau	10 Unit	108,107,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	2060000 Ha			1559700 Ha	2060000 Ha	600,000,000						2060000 Ha	700,000,000	
3	28	3	1		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan	Terlaksananya RHL diluar kawasan hutan negara	tahun			1 tahun		150,000,000						1 tahun	250,000,000	
3	28	3	1	6	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedia kebutuhan bibit masyarakat				1 Tahun		150,000,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat di sekitar kawasan hutan	0	250,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
						Tersedianya persemalan pembibitan permanen				1 Unit		Kab. Sekadau, Sekadau Hillir, Semua Kelurahan						1 Unit		
												Kab. Sekadau, Sekadau Hulu, Semua Kelurahan								
												Kab. Sekadau, Nanga Taman, Semua Kelurahan								
												Kab. Sekadau, Nanga Mahap, Semua Kelurahan								
3	28	3	1.1		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	luas Kawasan Hutan HP dan HL	Ha			Ha	132.425 Ha							132.425 Ha	450,000,000	
3	28	3	1.1	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				12 Laporan	450,000,000	Kab. Sanggau, Kapuas, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			UPT KPH Wilayah Sekadau	12 Laporan	450,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
												Kab. Sekadau, Sekadau Hulu, Semua Kelurahan								
												Kab. Sekadau, Nanga Taman, Semua Kelurahan								
												Kab. Sekadau, Nanga Mahap, Semua Kelurahan								
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1,404,327,680								408,650,000	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100% %	n/a %	85% %		754,327,680							85% %	408,650,000	
3	28	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			Paket	1 Paket	87,499,500						1 Paket	96,250,000	
						Tersedianya Dokumen Rencana Kerja KPH	Dokumen			Dokumen	1 Dokumen								1 Dokumen	
3	28	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	22,502,500	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dokumen	24,750,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	23,500,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dokumen	25,850,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	19,997,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dokumen	22,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	21,500,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dokumen	23,650,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	



3	28	3	1	6	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Dicakikan				4 Dokumen	26,370,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		4 Dokumen		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
3	28	3	1.1		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						562,626,000									0			
3	28	3	1.1	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di KPH				12 Laporan	562,626,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		12 Laporan		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						27,380,000									0			
3	28	5	1		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						27,380,000									0			
3	28	5	1	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial				423 Ha	27,380,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		423 Ha		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																0		
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1,342,325,880										0		
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tersusunnya RKA DPA DPPA	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen		742,325,880								1 Dokumen		0	
3	28	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya RKA DPA DPPA	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen		12,846,000								1 Dokumen		0	
3	28	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen		2,141,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	1 Dokumen		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen		2,141,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	1 Dokumen		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen		2,141,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	1 Dokumen		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen		2,141,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	1 Dokumen		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan		2,141,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	1 Laporan		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan		2,141,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	1 Laporan		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan	Dokumen		Dokumen	19 Dokumen		109,890,800								19 Dokumen		0	
3	28	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				18 Dokumen		104,760,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	18 Dokumen		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen		2,141,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	1 Dokumen		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan		2,989,800	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	18 Laporan		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terkelolanya Pengamanan Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun		41,523,000								1 Tahun		0	
3	28	1	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen		35,100,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	1 Dokumen		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan		2,141,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	1 Laporan		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan		2,141,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	1 Laporan		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan		2,141,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	1 Laporan		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas SDM	Tahun		Tahun	1 Tahun		74,040,000								1 Tahun		0	
3	28	1	1.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0 Paket		23,240,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	0 Paket		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Paket										1 Paket		0	
3	28	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang		20,000,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM		UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	2 Orang		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang		30,800,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM		UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	2 Orang		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun		173,419,800								1 Tahun		0	
3	28	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket		15,000,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	1 Paket		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		48,640,100	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	1 Paket		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket		12,258,500	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	1 Paket		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket		6,000,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	1 Paket		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	

3	28	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8,531,200	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	1 Paket		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	82,990,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	1 Laporan		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	%		%	100 %	107,971,000						100 %		0		
3	28	1	1.1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	4,029,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	1 Paket		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit dan 1 Website	103,942,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	5 Unit dan 1 Website		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Umum Kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun	52,235,880	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,						1 Tahun		0	
3	28	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	1 Laporan		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	42,215,880	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	1 Laporan		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	8,020,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	1 Laporan		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	170,399,400							1 Tahun		0	
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	155,399,400	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	17 Unit		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	15,000,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	5 Unit		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Dokumen RPH/DP yang Disahkan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	600,000,000							1 Dokumen		0	
3	28	3	1		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecil/ pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPKH)	Dokumen RPH/DP yang Disahkan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	27,340,500							1 Dokumen		0	
3	28	3	1	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				2 Dokumen	27,340,500	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	2 Dokumen		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3	1		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Persemaian yang Dipelihara	Persemaian		Persemaian	1 Persemaian	32,000,000							1 Persemaian		0	
3	28	3	1	6	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan				2 Unit KPHP	32,000,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	2 Unit KPHP		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3	1.1		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Perlindungan Hutan	Unit KPHP		Unit KPHP	2 Unit KPHP	540,659,500							2 Unit KPHP		0	
3	28	3	1.1	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/ Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				11 Laporan	540,659,500	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Wilayah Kerja UPT KPH Wilayah Sanggau Timur	11 Laporan		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1,294,556,231										1,425,749,160
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100% %		n/a %	85% %	644,556,231							85% %			817,280,310
3	28	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	23,779,600							1 Dokumen			18,303,560
3	28	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	23,779,600	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				UPT KPH Wilayah Sintang Timur	1 Dokumen			18,303,560
3	28	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanaan Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan		Bulan	12 Bulan	132,452,000							12 Bulan			157,264,800
3	28	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Dokumen		Dokumen	19 Dokumen								19 Dokumen			
3	28	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30 Dokumen	100,380,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				UPT KPH Wilayah Sintang Timur	30 Dokumen			130,240,000
3	28	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				18 Laporan	32,072,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				UPT KPH Wilayah Sintang Timur	18 Laporan			27,024,800
3	28	1	1.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat/Bimbelik	Orang		Orang	10 Orang	20,243,700							10 Orang			65,601,800
3	28	1	1.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Helai		Helai	14 Helai								14 Helai			
3	28	1	1.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas				14 Helai	5,243,700	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				UPT KPH Wilayah Sintang Timur	14 Helai			4,675,000
3	28	1	1.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10,000,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				UPT KPH Wilayah Sintang Timur	10 Orang			28,745,200
3	28	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	5,000,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				UPT KPH Wilayah Sintang Timur	10 Orang			32,181,600
3	28	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	CCTV	Paket		Paket	1 Paket	232,084,840							1 Paket			202,126,540
						Instalasi Listrik	Unit		Unit	1 Unit								1 Unit			
						Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Paket		Paket	1 Paket								1 Paket			
						Peralatan Kantor	Jenis		Jenis	5 Jenis								5 Jenis			
						Peralatan Listrik	Paket		Paket	1 Paket								1 Paket			
3	28	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,185,300	Kab. Sintang, Kayan Hulu, Tanjung Bunga dan Sintang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				UPT KPH Wilayah Sintang Timur	1 Paket			7,700,000
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Bahan Cetak, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5 Paket	98,898,800	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				UPT KPH Wilayah Sintang Timur	5 Paket			44,648,230
3	28	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1,889,300	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				UPT KPH Wilayah Sintang Timur	1 Paket			19,226,460

3	28	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	7,200,000	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				UPT KPH Wilayah Sintang Timur	2 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6,846,500	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				UPT KPH Wilayah Sintang Timur	1 Paket	6,841,450	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	109,064,940	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				UPT KPH Wilayah Sintang Timur	12 Laporan	123,710,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Halaman Parkir	Paket			Paket	1 Paket	88,014,231						1 Paket	206,994,260		
						Jumlah Pengadaan Mebel	Paket			Paket	2 Paket							2 Paket			
3	28	1	1.1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	32,514,000	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				UPT KPH Wilayah Sintang Timur	2 Paket	37,754,860	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Paket	55,500,291	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				UPT KPH Wilayah Sintang Timur	1 Paket	169,239,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengiriman Surat	Bulan			Bulan	12 Bulan	48,000,860						12 Bulan	57,010,250		
						Tersedianya Jasa Air, Jasa Listrik dan Jasa Komunikasi/Internet/TV Berlangganan Kantor	Bulan			Bulan	12 Bulan							12 Bulan			
3	28	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				UPT KPH Wilayah Sintang Timur	1 Laporan	5,618,250	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	43,000,860	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				UPT KPH Wilayah Sintang Timur	12 Laporan	43,472,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit			Unit	22 Unit	99,981,000						22 Unit	109,979,100		
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	99,981,000	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				UPT KPH Wilayah Sintang Timur	22 Unit	109,979,100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Tertatanya Petak Kerja Sesuai Fungsi Kawasan di areal KPH Unit XIV UPT KPH Wilayah Sintang Timur	Unit			Unit	1 Unit	650,000,000						1 Unit	608,468,850		
3	28	3	1		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Tersedianya Patok batas HP blok pemberdayaan masyarakat KPH Unit XIV UPT KPH Wilayah Sintang Timur	Unit			Unit	1 Unit	71,156,900						1 Unit	0		
3	28	3	1	2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPH/P) yang Telah Dilakukan Tata Batas				1 Unit	71,156,900	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				UPT KPH Wilayah Sintang Timur	1 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3	1.1		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pencegahan Karhutla dan Pambuh	Tahun			Tahun	1 Tahun	578,843,100						1 Tahun	608,468,850		
						Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Tahun			Tahun	1 Tahun							1 Tahun			
3	28	3	1.1	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	578,843,100	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				UPT KPH Wilayah Sintang Timur	1 Laporan	608,468,850	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1,370,719,104								1,523,561,704		
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100% %	n/a %	85% %		720,719,104								85% %	805,996,399	
3	28	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen			Dokumen	1 Dokumen	30,827,900						1 Dokumen	33,910,600		
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen			Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen			
3	28	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	21,827,900	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dokumen	24,010,600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	9,000,000	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Dokumen	9,900,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			Dokumen	12 Dokumen	135,608,000							12 Dokumen	149,168,800	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan			Laporan	2 Laporan								2 Laporan		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD SKPD	Laporan			Laporan	18 Laporan								18 Laporan		
3	28	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	106,840,000	Kab. Sintang, Sintang, Baling Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				meningkatnya penatausahaan keuangan PD	12 Dokumen	117,524,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	8,184,000	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				meningkatnya penatausahaan keuangan PD	2 Laporan	9,002,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	20,584,000	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				meningkatnya penatausahaan keuangan PD	18 Laporan	22,642,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			Laporan	2 Laporan	9,380,000							2 Laporan	10,318,000	
3	28	1	1	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	9,380,000	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Meningkatnya Pengelolaan BMD	2 Laporan	10,318,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Administrasi Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang			orang	6 orang	26,673,100							6 orang	29,340,410	
						Jumlah Paket Pakiaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Paket			Paket	2 Paket								2 Paket		
3	28	1	1.1	2	Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya				2 Paket	12,373,100	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				meningkatnya disiplin ASN UPT	2 Paket	13,610,410	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	14,300,000	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				meningkatnya disiplin ASN UPT	6 Orang	15,730,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan			Laporan	20 Laporan	128,918,688							20 Laporan	155,015,942	

					Jumlah paket bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket		Paket	1 Paket														1 Paket				
					Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket		Paket	2 Paket															2 Paket			
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket		Paket	1 Paket															1 Paket			
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket		Paket	2 Paket															2 Paket			
					Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket		Paket	1 Paket															1 Paket			
3	28	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			1 Paket	17,552,200	Kab. Sintang, Sintang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	1 Paket	19,307,420	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN											
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	23,910,400	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	3 Paket	26,301,440	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN											
3	28	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	7,532,600	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	1 Paket	8,285,860	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN											
3	28	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	13,200,000	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	2 Paket	14,520,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN											
3	28	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	11,584,000	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	2 Paket	13,732,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN											
3	28	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20 Laporan	55,139,488	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	20 Laporan	72,868,822	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN											
3	28	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	Unit	1 Unit	110,260,300					1 Unit	121,286,330											
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	Unit	6 Unit						6 Unit												
					Jumlah unit sarana dan prasarana gedung pendukung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	Unit	Unit	1 Unit						1 Unit												
3	28	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			6 Unit	33,260,300	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas	6 Unit	36,586,330	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN											
3	28	1	1.1	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	65,000,000	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas	1 Unit	71,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN											
3	28	1	1.1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	12,000,000	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas	1 Unit	13,200,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN											
3	28	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik disediakan	Laporan	Laporan	12 Laporan	60,251,116					12 Laporan	66,276,227											
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Laporan	12 Laporan							12 Laporan												
3	28	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	4,850,000	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	5,335,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN											
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	55,401,116	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	60,941,227	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN											
3	28	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	Unit	1 Unit	218,800,000					1 Unit	240,680,000											
					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	Unit	Unit	15 Unit						15 Unit												
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	Unit	Unit	10 Unit						10 Unit												
					Luas Tanah yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	Ha	Ha	0.2 Ha						0.2 Ha												
3	28	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			15 Unit	65,000,000	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	15 Unit	71,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN											
3	28	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10 Unit	10,000,000	Kab. Sintang, Sintang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	10 Unit	11,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN											
3	28	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	31,000,000	Kab. Sintang, Ketungau Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	1 Unit	34,100,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN											
3	28	1	1.1	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi			0.2 Ha	112,800,000	Kab. Sintang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	0.2 Ha	124,080,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN											
3	28	3			<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	2060000 Ha	1559700 Ha	2060000 Ha	549,977,500					2060000 Ha	611,005,555											
3	28	3	1		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPKH)	Fasilitas UPT KPH dalam penyusunan rancangan pengelolaan Wiltu (unit)	Unit	Unit	3 Unit	54,381,100					3 Unit	59,819,210											
3	28	3	1	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek			3 Dokumen	54,381,100	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Meningkatnya pengelolaan hutan	3 Dokumen	59,819,210	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN											
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jangka Pendek				3 Dokumen						3 Dokumen												
3	28	3	1		<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan</b>					70,677,400						77,745,140											
3	28	3	1	6	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Penyediaan bibit untuk kegiatan RHL			5000 batang	70,677,400	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan Negara	5000 batang	77,745,140	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN											
					Tersedianya bibit untuk kegiatan RHL				5000						5000												
3	28	3	1.1		<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	Laporan	10 Laporan	424,919,000					10 Laporan	473,441,205											
					Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	Dokumen	Dokumen	20 Dokumen						20 Dokumen												
3	28	3	1.1	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			20 Dokumen	50,050,000	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Meningkatnya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	20 Dokumen	55,990,105	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN											
3	28	3	1.1	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun			10 Laporan	374,869,000	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Meningkatnya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	10 Laporan	417,451,100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN											
3	28	5			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Petugas pelaksana penyuluh kehutanan yang meningkatnya kapasitas	26 Org	26 Org	26 Org	100,022,500					26 Org	106,559,750											
3	28	5	1		<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	Ha	1000 Ha	100,022,500					1000 Ha	106,559,750											
3	28	5	1	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial			1000 Ha	100,022,500	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1000 Ha	106,559,750	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN											

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
3	28	1		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100% %	n/a %	85% %	1,331,642,000					140,500,000			
3	28	1	1	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan DPA SKPD	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	474,127,500					140,500,000			
3	28	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13,575,600					25,000,000			
3	28	1	1	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen	13,575,600	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penyusunan dokumen anggaran dan perubahannya	2 Dokumen	25,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen pengelolaan keuangan pada upt kph wilayah kapuas hulu utara	dokumen	dokumen	12 dokumen	95,371,500				12 dokumen	115,500,000		
					Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12 Dokumen					12 Dokumen			
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	laporan	laporan	12 laporan					12 laporan			
3	28	1	1	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	76,046,100	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pejabat pengelola keuangan	12 Dokumen	95,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		12 Laporan	19,325,400	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pejabat pengelola keuangan	12 Laporan	20,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	1.1 Administrasi Kewilayahan Perangkat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut dan perlengkapannya	laporan	laporan	12 laporan	11,245,500				12 laporan	0		
3	28	1	1.1	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		2 Paket	11,245,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas SDM	ASN pada upt kph wilayah kapuas hulu utara	2 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	1.1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	paket	paket	12 paket	106,531,100				12 paket	0		
					Tersedianya peralatan rumah tangga	paket	paket	12 paket					12 paket			
3	28	1	1.1	2 Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	22,986,100	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Pala Pulau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket	13,134,500	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	3 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	9,988,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	9,420,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	51,002,500	Bemah Kayabuta, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	1.1.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	unit	5 unit	110,933,400				5 unit	0		
3	28	1	1.1	1.1.1.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5 Unit	110,933,400	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	1.1.1.1.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	laporan	12 laporan	69,880,000				12 laporan	0		
					Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	laporan	12 laporan					12 laporan			
3	28	1	1.1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	5,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa tenaga kebersihan kantor	12 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 tahun	52,880,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa tenaga kebersihan kantor	1 tahun	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyediaan Jasa tenaga kebersihan kantor	12 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1.1	4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	unit	21 unit	66,590,400				21 unit	0		
3	28	1	1.1	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		21 Unit	66,590,400	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Sepeda Motor dan Mobil Patroli	21 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	2060000 Ha	1559700 Ha	2060000 Ha	818,368,000				2060000 Ha	0		
3	28	3	1	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	108,368,000				2 Dokumen	0		
					Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen					2 Dokumen			
3	28	3	1	1 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		2 Dokumen	108,368,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penyusunan Rencana Pengelolaan hutan Jangka Pendek (RPHJpd)	2 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3	1	1 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan	Luas lahan yang dihijaukan diluar kawasan hutan	ha	3 ha	70,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	fasum, faoso, lingkungan sekolah dan lingkungan kantor	3 ha	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	3	1	4 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		3 Ha	70,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	fasum, faoso, lingkungan sekolah dan lingkungan kantor	3 Ha	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	3	1.1	1.1 Pelaksanaan Perindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	640,000,000				12 Dokumen	0		
3	28	3	1.1	4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan		12 Dokumen	40,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	luasan hutan produksi dan hutan lindung	12 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	3	1.1	5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		12 Laporan	600,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	kawasan hutan produksi dan hutan lindung	12 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Penyediaan pengetahuan Kelompok Tani Hutan dalam pengelolaan hutan dan hasil hutan	kelompok	kelompok	1 kelompok	39,146,500				1 kelompok	0		
3	28	5	1	1 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok tani hutan yang mandiri mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan	kelompok	kelompok	1 kelompok	39,146,500				1 kelompok	0		
3	28	5	1	2 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		1 Kelompok	39,146,500	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Ariung Mendalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Kelompok tani hutan	1 Kelompok	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	



3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENWULAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			82,522,600													0				
3	28	5	1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			82,522,600														0			
3	28	5	1	2	Pengutan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Pengutan dan Pendampingan kelembagaan	1 Kelompok	82,522,600	Kota Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		1 Kelompok						0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
												DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)												
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																				
3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			1,297,312,000															1,312,560,000		
3	28	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			697,312,000															800,000,000		
3	28	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22,268,200															44,536,400		
3	28	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	22,268,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen							22,268,200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			112,635,400															144,608,000		
3	28	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	84,860,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen							84,860,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	27,775,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan							40,254,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	1	Administrasi Keggawalan Perangkat Daerah			18,600,000														48,600,000		
3	28	1	1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24 Stel	18,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					24 Stel							18,600,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah			270,572,400														296,253,600		
3	28	1	1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22,766,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Paket							30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	11,414,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Paket							11,414,200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11,472,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Paket							11,439,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	224,920,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18 Laporan							243,400,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			142,896,000														135,662,000		
3	28	1	1	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	79,662,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Unit							79,662,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	5	Pengadaan Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	33,234,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Paket							36,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit							20,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			78,580,000														78,580,000		
3	28	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	2,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Tahun							2,800,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	75,780,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan							75,780,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	1	1	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			51,760,000														51,760,000		
3	28	1	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	51,760,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20 Unit							51,760,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			600,000,000															512,560,000		
3	28	3	1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			24,966,000															0		
3	28	3	1	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	24,966,000		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					2 Unit							0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3	1	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			62,474,000															0		
3	28	3	1	8	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Data dan Dokumen Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan	1 Dokumen	62,474,000		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					1 Dokumen							0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
3	28	3	1	1	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			512,560,000														512,560,000		
3	28	3	1	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	512,560,000		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					12 Laporan							512,560,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL			10,738,224,089															3,746,560,242		
2	12	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			9,215,679,769															1,888,775,132		
2	12	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			118,531,600															149,866,310		
2	12	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	23,084,900	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Dokumen							37,743,970	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	
2	12	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	24,074,700	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Dokumen							27,527,830	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	
2	12	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	23,670,800	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Dokumen							28,722,320	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	
2	12	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	24,283,100	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Dokumen							28,722,320	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	
															0 Dokumen									
2	12	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	23,418,100	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		3 Laporan							27,149,870	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	
2	12	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7,912,313,800															312,020,550		
2	12	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	7,609,100,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		14 Bulan								0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL





2	13	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RENIA				1 Dokumen	45,105,877	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPMD Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	60,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						RENSTRA				1 Dokumen							1 Dokumen		
2	13	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA-SKPD				1 Dokumen	26,657,300	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPMD Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RKA Perubahan				1 Dokumen	23,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPMD Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	23,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPMD Provinsi Kalimantan Barat	0 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Terlaksananya Penyusunan DPA-SKPD				1 Dokumen							1 Dokumen		
2	13	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	23,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPMD Provinsi Kalimantan Barat	0 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Terlaksananya Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen							1 Dokumen		
2	13	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	63,341,625	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPMD Provinsi Kalimantan Barat	0 Laporan	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Terlaksananya Penyusunan E-SAKIP				1 Dokumen							1 Dokumen		
						Terlaksananya Penyusunan LAKIP				1 Dokumen							1 Dokumen		
						Terlaksananya Penyusunan LKP				1 Dokumen							1 Dokumen		
						Terlaksananya Penyusunan LPPD				1 Dokumen							1 Dokumen		
2	13	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	33,893,618	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPMD Provinsi Kalimantan Barat	0 Laporan	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Terlaksananya PERJANKIN				1 Dokumen							1 Dokumen		
2	13	1	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Akuntansi	Dokumen			Dokumen	6,478,150,173						1 Dokumen		0
						Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen			Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen		
						GAJI/TPP	Dokumen			Dokumen	2 Dokumen						2 Dokumen		
						Laporan Keuangan Akhir tahun	Dokumen			Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen		
						Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Dokumen			Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen		
						Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Dokumen			Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen		
						Prognosis	Dokumen			Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen		
2	13	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				14 Dokumen	6,203,449,468	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPMD Prov Kalbar	14 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	204,060,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPMD Prov Kalbar	0 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				11 Dokumen							11 Dokumen		
2	13	1	1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	7,877,826	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPMD Prov Kalbar	0 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Terlaksananya Pelaporan Akuntansi SKPD				1 Dokumen							1 Dokumen		
2	13	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	22,098,090	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPMD Prov Kalbar	0 Laporan	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen							1 Dokumen		
2	13	1	1	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tidak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	21,361,616	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPMD Prov Kalbar	0 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Terlaksananya Laporan Tanggapan Pemeriksaan				1 Dokumen							1 Dokumen		
2	13	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				0 Laporan	5,903,173	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPMD Prov Kalbar	0 Laporan	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				1 Dokumen							1 Dokumen		
2	13	1	1	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	13,400,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPMD Prov Kalbar	0 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Terlaksananya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen							1 Dokumen		
2	13	1	1	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen			Dokumen	27,765,151						1 Dokumen		0
						Pengamanan Barang Milik Daerah	Dokumen			Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen		
						Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah	Dokumen			Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen		
2	13	1	1	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	5,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPMD Prov Kalbar	0 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen							1 Dokumen		
2	13	1	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	15,261,616	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPMD Prov Kalbar	0 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah				3 Dokumen							3 Dokumen		
2	13	1	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	7,503,535	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPMD Prov Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah						215,577,549							480,000,000	
2	13	1	1.1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 jenis	4,440,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 jenis	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.1.2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 jenis	8,699,775	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 jenis	25,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.1.3	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11 Paket	4,793,629	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11 Paket	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.1.4	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	23,160,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Paket	60,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2	13	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Jenis	7,942,925	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Jenis	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 kegiatan	146,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 kegiatan	300,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	1.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Laporan	20,541,220	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	35,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						588,276,693						800,000,000		
2	13	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Rekening	156,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Rekening	200,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	432,276,693	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Laporan	600,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persen			100 Persen	194,910,000					100 Persen	0		
						Pemeliharaan Mebel	Persen			100 Persen						100 Persen			
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Persen			100 Persen						100 Persen			
2	13	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	130,110,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPMD Prov Kalbar	0 Unit	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				7 Dokumen						7 Dokumen			
2	13	1	1.1	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	2,500,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPMD Prov Kalbar	0 Unit	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel				1 Tahun						1 Tahun			
2	13	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	27,300,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPMD Prov Kalbar	0 Unit	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Tahun						1 Tahun			
2	13	1	1.1	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	35,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPMD Prov Kalbar	0 Unit	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				1 Tahun						1 Tahun			
2	13	2			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase meningkatnya Penataan Desa	Persen			100 Persen	7,001,790,537						100 Persen	850,000,000	
2	13	2	1		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa jabatan kepala Desa dan Desa Adat	Dokumen			1 Dokumen	7,001,790,537						1 Dokumen	850,000,000	
2	13	2	1	1	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitas Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitas Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan				4 Dokumen	132,386,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kepala Desa	4 Dokumen	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	2	1	2	Fasilitas Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Fasilitas Kelembagaan Desa dan Desa Adat				10 Lembaga Adat	118,143,771	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kepala Desa	10 Lembaga Adat	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	2	1	3	Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa				12 Kabupaten	332,948,866	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kepala Desa	12 Kabupaten	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	2	1	4	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa				1 Sarpras Desa	6,418,311,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kepala Desa	1 Sarpras Desa	400,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendasi			6 Rekomendasi	646,790,448						6 Rekomendasi	450,000,000	
2	13	3	1		Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Fasilitas Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendasi			6 Rekomendasi	646,790,448						6 Rekomendasi	450,000,000	
2	13	3	1	1	Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten				1 Rekomendasi	114,478,206		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Kepala Desa dan Kelompok Masyarakat	1 Rekomendasi	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi				6 Rekomendasi						6 Rekomendasi			
2	13	3	1	2	Fasilitas Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Fasilitas Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga				2 Rekomendasi	117,667,361	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Kepala Desa dan Kelompok Masyarakat	2 Rekomendasi	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi				6 Rekomendasi						6 Rekomendasi			
2	13	3	1	3	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan				2 Rekomendasi	414,644,881	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Kepala Desa dan Kelompok Masyarakat	2 Rekomendasi	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi				6 Rekomendasi						6 Rekomendasi			
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten			12 Kabupaten	940,047,155						12 Kabupaten	0	
2	13	4	1		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah monitoring dan evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten			12 Kabupaten	940,047,155						12 Kabupaten	0	
2	13	4	1	5	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	121,109,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Kabupaten	1 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah monitoring dan evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa				12 Kabupaten						12 Kabupaten			
2	13	4	1	6	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti bimtek penerapan aplikasi SIPADES				240 orang	118,903,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Kabupaten	240 orang	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen						1 Dokumen			
2	13	4	1	7	Fasilitas Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Fasilitas Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				390 akabupaten	52,628,800		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Kabupaten	390 akabupaten	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				20 Orang						20 Orang			

2	13	4	1	8	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang melakukan evaluasi dan mengikuti lomdeskel				6 desa/kelurahan	300,060,155		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Kabupaten	6 desa/kelurahan	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan					1 Dokumen							1 Dokumen			
2	13	4	1	9	Facilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	78,522,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Kabupaten	1 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
					Persentase Jumlah Desa/Kelurahan yang menginput data Prodeskel					100 %							100 %			
2	13	4	1	10	Pembiinan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina				55 Orang	149,275,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Kabupaten	55 Orang	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
					Jumlah Pembiinan Aparatur Pemerintah Desa					12 kabupaten							12 kabupaten			
2	13	4	1	11	Pembiinan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembiinan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				48 Orang	79,546,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Kabupaten	48 Orang	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
					Jumlah Pembiinan Peningkatan Kapasitas Anggota					12 kabupaten							12 kabupaten			
2	13	4	1	18	Facilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota				1 Dokumen	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Kabupaten	1 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
					Jumlah Facilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota					12 kabupaten							12 kabupaten			
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Kabupaten/Kota yang lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga ekonomi Desa/Kelurahannya diberdayakan	Kabupaten	Kabupaten		14 Kabupaten	3,626,386,518						14 Kabupaten	2,630,000,000		
2	13	5	1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	3,626,386,518							1 Dokumen	2,630,000,000		
2	13	5	1	2	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			1 Dokumen	70,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Lembaga Ekonomi		1 Dokumen	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	5	1	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas			3 Lembaga	161,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Lembaga Ekonomi		3 Lembaga	200,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	5	1	4	Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			9 Unit	246,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan Lembaga Ekonomi		9 Unit	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	5	1	5	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			1 Dokumen	404,115,718		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Lembaga Ekonomi		1 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	5	1	6	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			1 Laporan	457,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Lembaga Ekonomi		1 Laporan	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	5	1	7	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			1 Laporan	120,000,000	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Lembaga Ekonomi		1 Laporan	280,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	5	1	8	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenraman, Ketersiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyelenggaraan Ketenraman, Ketersiban dan Perlindungan Masyarakat Desa			1 Dokumen	140,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Lembaga Ekonomi		1 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	5	1	9	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			1 Laporan	2,026,170,800	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Lembaga Ekonomi		1 Laporan	2,000,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						22,721,102,472							7,328,809,302		
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	%	100 %	15,609,049,146								100 %	5,261,456,000	
2	15	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	dokumen	12 dokumen	779,576,254	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,						12 dokumen	764,526,000		
2	15	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	330,943,800	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	4 Dokumen	290,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	24,114,600	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	1 Dokumen	26,526,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	23,524,300	Kab. Kubu Raya, Sungai Raya, Suntingraya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	1 Dokumen	24,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	23,543,100	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	1 Dokumen	25,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	23,047,100	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	1 Dokumen	24,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5 Laporan	146,681,200	Semua kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	5 Laporan	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	207,722,154	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	4 Laporan	225,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	%	%	100 %	10,735,507,186							100 %	472,000,000		
2	15	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			71 Orang/ Bulan	10,210,803,386		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	71 Orang/ Bulan	0	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	1	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	48,749,500	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,			Meningkatnya Kualitas SDM	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		

2	15	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	310,780,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	255,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	3,923,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	4,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	21,328,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	2 Laporan	22,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	26,468,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	27,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	75,617,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	76,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	37,835,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	38,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%			100 %	95,324,100							100 %	68,000,000	
2	15	1	1	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	24,123,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	25,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	39,681,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	3,850,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	4,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	24,140,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	25,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3,528,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	4,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%			100 %	38,894,000							100 %	35,000,000	
2	15	1	1	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	18,653,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1	6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketentuan Retribusi Daerah				1 Dokumen	20,240,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%			100 %	443,754,500							100 %	363,000,000	
					terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	%				100 %								100 %		
2	15	1	1.1	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	89,888,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pegawai Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	2 Unit	80,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1.1	2	Pengadaan Pakalan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Berserta Atribut kelengkapannya				2 Paket	105,630,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pegawai Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	2 Paket	90,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	60,638,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pegawai Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	1 Dokumen	58,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	176,598,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pegawai Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	4 Orang	130,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	11,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pegawai Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	10 Orang	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	%			100 %	821,263,450							100 %	909,000,000	
2	15	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	29,472,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket	30,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	279,526,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	2 Paket	90,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
													Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat							
2	15	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	26,579,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket	35,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	53,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket	55,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	65,144,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	10 Paket	80,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	15,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	10 Dokumen	16,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 tahun	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun	450,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	74,287,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	75,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemeliharaan website dan sosmed dishub prov kalbar				1 tahun	27,253,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun	78,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia jasa penunjang kantor	bulan		bulan	12 bulan	2,037,641,349							12 bulan	2,000,600,000	
2	15	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	525,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	600,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun	502,352,669	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	



2	15	2	1.1	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan			5 Unit	39,326,240	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Perusahaan Angkutan taksi	5 Unit	90,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.2		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampau 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya penetapan tarif ekonomi untuk angkutan umum	dokumen		1 dokumen	82,703,000						1 dokumen	75,000,000	
2	15	2	1.2	1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1 Dokumen	55,898,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	perusahaan angkutan umum	1 Dokumen	74,900,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.2	2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1 Dokumen	18,147,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	perusahaan angkutan umum	1 Dokumen	50,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.2	3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1 Laporan	8,657,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	perusahaan angkutan umum	1 Laporan	50,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatkan Pelayanan serta Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau Penyeberangan	%	%	100 %	444,791,144						100 %	540,258,853	
2	15	3	1		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pelayanan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi di Kalimantan Barat	dokumen	dokumen	1 dokumen	25,000,000						1 dokumen	25,000,000	
2	15	3	1	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan			1 Unit	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Pelaku Usaha Angkutan Laut	1 Unit	10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi			1 Laporan	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Pelaku Usaha Angkutan Laut	1 Laporan	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional di Kalimantan Barat	Terlaksananya Pelayanan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional di Kalimantan Barat	dokumen	dokumen	2 dokumen	26,000,000						2 dokumen	26,000,000	
2	15	3	1	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan			1 Unit	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Pelaku Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	1 Unit	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi			1 Laporan	11,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Pelaku Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	1 Laporan	11,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Terlaksananya Pelayanan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah di Kalimantan Barat	dokumen	dokumen	4 dokumen	45,000,000						4 dokumen	45,000,000	
2	15	3	1	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi Syarat Perizinan			1 Unit	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Operator Kapal Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	1 Unit	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi			1 Laporan	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Operator Kapal Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	1 Laporan	30,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Terlaksananya Pelayanan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi di Kalimantan Barat	dokumen	dokumen	2 dokumen	8,000,000						2 dokumen	8,000,000	
2	15	3	1	1	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Ditetuainya Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi			1 Dokumen	8,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Operator Kapal Penyeberangan	1 Dokumen	8,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1.1		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya penetapan lintsan penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal	dokumen	dokumen	2 dokumen	23,950,000						2 dokumen	24,000,000	
2	15	3	1.1	2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Ditetuainya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			1 Laporan	23,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Operator Kapal	1 Laporan	23,950,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1.1		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas di Kalimantan Barat	Terlaksananya Pelayanan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas di Kalimantan Barat	dokumen	dokumen	1 dokumen	42,500,000						1 dokumen	42,500,000	
2	15	3	1.1	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			1 Dokumen	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Pelaku Usaha Jasa Angkutan Laut	1 Dokumen	25,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1.1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			1 Laporan	17,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Pelaku Usaha Jasa Angkutan Laut	1 Laporan	17,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1.1		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Danau di Kalimantan Barat	dokumen	dokumen	2 dokumen	274,341,144						2 dokumen	344,758,853	

2	15	3	1.1	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan				1 Unit	116,491,144	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Pengguna Jasa Pelabuhan Sungai dan Danau di Kalimantan Barat	1 Unit	186,758,853	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1.1	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah				1 Laporan	157,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Pengguna Jasa Pelabuhan Sungai dan Danau di Kalimantan Barat	1 Laporan	157,850,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						28,141,065,235								0
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PROVINSI)	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang disusun tepat waktu	persen		persen	100 persen	11,601,501,945							100 persen	0
						Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	persen		persen	100 persen								100 persen	
						Persentase pelayanan administrasi kepegawai sesuai prosedur	persen		persen	100 persen								100 persen	
						Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar	persen		persen	100 persen								100 persen	
2	16	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	400,324,200							100 persen	0
2	16	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	150,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	8 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				1 Dokumen	19,111,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				1 Dokumen	20,412,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD				1 Dokumen	19,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD				1 Dokumen	20,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	44,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	3 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	127,800,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	5 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	8,068,286,905							100 persen	0
2	16	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 orang/bulan	7,641,731,405	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	55 orang/bulan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	5,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	281,760,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	71,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	22,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	22,795,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan triwulan, laporan semester dan tahunan yang disusun				6 Laporan	24,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	6 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	59,154,700							100 persen	0
2	16	1	1	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun				1 Dokumen	31,654,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	27,500,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat	persen		persen	100 persen	278,874,625							100 persen	0
2	16	1	1.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	72,404,625	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Paket	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	103,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	17,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	23,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				54 Orang	39,490,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	54 Orang	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				54 Orang	23,980,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	54 Orang	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	383,060,750							100 persen	0
						Persentase pelayanan administrasi kepegawai sesuai prosedur	persen		persen	100 persen								100 persen	
2	16	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	28,998,750	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Paket	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2	16	1	1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	44,224,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Paket	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	1	1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10,753,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Paket	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	1	1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	63,960,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Paket	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	1	1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	19,999,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Paket	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	1	1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan digital				1 Dokumen	6,400,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	1	1	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	19,824,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	1	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	173,900,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	1	1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	15,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	1	1	11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	persen		100 persen	375,070,400						100 persen	0	
2	16	1	1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	69,302,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Paket	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	1	1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	288,768,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	1	1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	17,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	1	1	11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	persen		100 persen	1,765,406,065						100 persen	0	
2	16	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,105,605	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	223,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	1	1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	9,900,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	1	1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,531,400,460	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	1	1	11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	persen		100 persen	271,324,300						100 persen	0	
2	16	1	1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya				1 Unit	41,750,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	1	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya				4 Unit	83,040,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	4 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	1	1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				170 Unit	146,534,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	170 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase media komunikasi publik yang dikelola oleh OPD	persen	persen		100 persen	4,382,297,000						100 persen	0	
						Persentase OPD dengan zona hijau / nilai 85 - 100	persen	persen		100 persen							100 persen	0	
2	16	2	1		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemerintah Kabupaten/ Kota dan OPD di Lingkungan Pemprov Kalbar yang membentuk PPID dan menyelenggarakan pelayanan informasi publik	persen	persen		100 persen	4,382,297,000						100 persen	0	
2	16	2	1	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				1 Dokumen	186,499,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	45 PPID OPD dan 14 PPID Kab/Kota, Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	1	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1,250,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	45 PPID OPD dan 14 PPID Kab/Kota, Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	1	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	200,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	45 PPID OPD dan 14 PPID Kab/Kota, Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	1	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	1,361,798,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	45 PPID OPD dan 14 PPID Kab/Kota, Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	1	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				3 Layanan	174,082,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	45 PPID OPD dan 14 PPID Kab/Kota, Masyarakat	3 Layanan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	1	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				250 Orang	119,918,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	45 PPID OPD dan 14 PPID Kab/Kota, Masyarakat	250 Orang	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	1	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				1 Dokumen	1,000,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	45 PPID OPD dan 14 PPID Kab/Kota, Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	1	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				1 Dokumen	90,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	45 PPID OPD dan 14 PPID Kab/Kota, Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase total bobot domain evaluasi SPIE	persen	persen		70 persen	12,157,266,290						70 persen	0	
2	16	3	1		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persen	persen		100 persen	8,008,200,000						100 persen	0	
2	16	3	1	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				1 Dokumen	110,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemprov Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	1	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah				1 Unit	7,898,200,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemprov Kalbar	1 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2	16	3	1	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persen		persen	100 persen	4,149,066,290							100 persen	0	
2	16	3	1	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi			1 Dokumen	70,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Kabupaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemprov Kalbar		1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	1	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			1 Dokumen	45,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemprov Kalbar		1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	1	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola			2 Unit	1,929,001,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemprov Kalbar		2 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	1	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			1 Dokumen	118,265,290	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemprov Kalbar		1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	1	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Data Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika pada wilayah 3T dan Kab/Kota selalimantan Barat yang diinventarisir			14 Data Kabupaten	57,800,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemprov Kalbar		14 Data Kabupaten	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	1	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			10 Unit	950,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemprov Kalbar		10 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	1	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah			1 Layanan	40,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemprov Kalbar		1 Layanan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	1	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City			1 Dokumen	780,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemprov Kalbar		1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	1	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			1 Dokumen	75,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemprov Kalbar		1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	1	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)			1 Dokumen	84,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemprov Kalbar		1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					404,360,200								0	
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					404,360,200								0	
2	20	2	1		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi					404,360,200								0	
2	20	2	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			1 Dokumen	225,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemprov Kalbar		1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	2	1	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun			1 Dokumen	93,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemprov Kalbar		1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	2	1	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS			104 Orang	86,360,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar		104 Orang	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					296,962,900								0	
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Status Kesiapan Keamanan Informasi : - Baik - Cukup Baik - Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar - Tidak Layak	status	status	Baik status	296,962,900								Baik status	0
2	21	2	1		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	persen	persen	100 persen	200,038,700								100 persen	0
2	21	2	1	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan			1 Dokumen	26,770,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar		1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	2	1	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			1 Laporan	64,561,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar		1 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	2	1	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			1 Laporan	7,275,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar		1 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	2	1	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			38 Perangkat Daerah	101,431,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar		38 Perangkat Daerah	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	2	1		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian	persen	persen	100 persen	96,924,200								100 persen	0
2	21	2	1	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			38 Perangkat Daerah	96,924,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar		38 Perangkat Daerah	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					17,973,094,783								17,973,094,783	
2	17	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu	Persan	100 persen	Persan	100 Persen	12,528,661,267							100 Persen	12,528,661,267
2	17	1	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu	Persan	100 persen	Persan	100 Persen	106,759,300							100 Persen	106,759,300
2	17	1	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	28,820,000	Prov. Kalbar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Koperasi,UKM		3 Dokumen	28,820,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	11,592,500	Prov. Kalbar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Koperasi,UKM		1 Dokumen	11,592,500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1	4	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	10,655,300	Prov. Kalbar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Koperasi,UKM		1 Dokumen	10,655,300	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1	5	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	10,757,500	Prov. Kalbar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Koperasi,UKM		1 Dokumen	10,757,500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



2	17	1	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	355,980,917	Prov. Kalbar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Koperasi,UKM Prov.Kalbar	3 Laporan	355,980,917	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	926,021,632	Prov. Kalbar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Koperasi,UKM Prov.Kalbar	7 Laporan	926,021,632	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen	100 Persen	Persen	100 Persen					100 Persen	182,430,000	
2	17	1	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	46,900,000	Prov. Kalbar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Koperasi,UKM Prov.Kalbar	2 Unit	46,900,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	126 Unit		126 Unit	89,530,000	Prov. Kalbar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Koperasi,UKM Prov.Kalbar	126 Unit	89,530,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung		1 Gedung	20,000,000	Prov. Kalbar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Koperasi,UKM Prov.Kalbar	1 Gedung	20,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1	1.1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung		1 Gedung	26,000,000	Prov. Kalbar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Koperasi,UKM Prov.Kalbar	1 Gedung	26,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	2				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase meningkatnya jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	Persen	62,26 persen	Persen	91,25 Persen					91,25 Persen	175,153,600	
2	17	2	1			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha simpan pinjam yang difasilitasi	Izin	65 izin	Izin	5 Izin					5 Izin	75,154,000	
2	17	2	1	1		Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	5 Unit Usaha		5 Unit Usaha	75,154,000	Prov. Kalbar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Koperasi Badan Hukum Provinsi	5 Unit Usaha	75,154,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	2	1			Penerbitan Izin Pemukiman Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Izin Pemukiman Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi	Izin		Izin	5 Izin					5 Izin	99,999,600	
2	17	2	1	1		Penerbitan Izin Pemukiman Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5 Unit Usaha		5 Unit Usaha	49,999,800	Prov. Kalbar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Koperasi Badan Hukum Provinsi	5 Unit Usaha	49,999,800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	2	1	2		Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah koperasi yang dapat mengakses Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 unit usaha		5 unit usaha	49,999,800	Prov. Kalbar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Koperasi Badan Hukum Provinsi	5 unit usaha	49,999,800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	3				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN	Persentase Tingkat Kepatuhan Koperasi	Persen	1,27 persen	Persen	8 Persen					8 Persen	181,508,900	
2	17	3	1			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	Persen	37 Persen	Persen	37 Persen					37 Persen	181,508,900	
2	17	3	1	2		Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Terselainya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	100 Unit Usaha		100 Unit Usaha	181,508,900	Prov. Kalbar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Koperasi Badan Hukum Provinsi	100 Unit Usaha	181,508,900	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	4				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP	Persen	1,27 persen	Persen	25 Persen					25 Persen	175,048,400	
2	17	4	1			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya	Persen		Persen	94 Persen					94 Persen	175,048,400	
2	17	4	1	1		Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jati Diri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jati Diri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	50 Unit Usaha		50 Unit Usaha	175,048,400	Prov. Kalbar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Koperasi Badan Hukum Provinsi	50 Unit Usaha	175,048,400	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	5				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peserta Pelatihan Koperasi yang Meningkatkan Pemahamannya	Persen	84,85 persen	Persen	95,24 Persen					95,24 Persen	1,267,203,700	
2	17	5	1			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Peserta yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	Persen		Persen	100 Persen					100 Persen	1,267,203,700	
2	17	5	1	1		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	450 Orang		450 Orang	1,267,203,700	Prov. Kalbar	Dana Alokasi Khusus	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Koperasi	450 Orang	1,267,203,700	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	6				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat jumlah Omzet	Persen	12,20 persen	Persen	5 Persen					5 Persen	1,150,910,200	
2	17	6	1			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi yang diberdayakan	Persen		Persen	97,84 Persen					97,84 Persen	1,150,910,200	
2	17	6	1	1		Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	130 Unit Usaha		130 Unit Usaha	841,690,200	Prov. Kalbar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Koperasi Badan Hukum Provinsi	130 Unit Usaha	841,690,200	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	6	1	2		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	200 Unit Usaha		200 Unit Usaha	309,220,000	Prov. Kalbar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Koperasi Badan Hukum Provinsi	200 Unit Usaha	309,220,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	7				PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Volume Usaha kecil yang meningkat	Persen	0,01 persen	Persen	1,47 Persen					1,47 Persen	538,966,016	
2	17	7	1			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Kecil yang diberdayakan	Persen	0,59 persen	Persen	2,36 Persen					2,36 Persen	538,966,016	
2	17	7	1	1		Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	12 Unit Usaha		12 Unit Usaha	310,583,816	Prov. Kalbar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pelaku Usaha	12 Unit Usaha	310,583,816	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	7	1	2		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	90 Orang		90 Orang	228,382,200	Prov. Kalbar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pelaku Usaha	90 Orang	228,382,200	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Urutan	No. Urutan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)						
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMMK	Presentase Usaha Kecil yang berkembang	Persen	0,04 persen	Persen	0,05 Persen	1.955.642,700								0,05 Persen	1.955.642,700		
2	17	8	1		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase Peserta Pelatihan UMMK yang Meningkatkan Pemahamannya	Persen	88,10 persen	Persen	90,28 Persen									90,28 Persen			
2	17	8	1		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil yang meningkat menjadi usaha menengah	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	1.955.642,700								20 Pelaku Usaha	1.955.642,700		
2	17	8	1	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Persentase Peserta yang Mengikuti Pelatihan UMMK	Persen		Persen	100 Persen									100 Persen			
2	17	8	1	2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMMK	Jumlah Unit Usaha UMMK yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				597 Unit Usaha	1.735.731,000	Prov. Kalbar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Khusus	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pelaku Usaha				597 Unit Usaha	1.735.731,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	8	1	2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMMK	Jumlah Pelaku UMMK yang Memahami Literasi Hukum				180 Orang	219,911,700	Prov. Kalbar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Khusus	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pelaku Usaha				180 Orang	219,911,700	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						13.533.519,667	Kalbar									0	
2	18	1	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Menunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		100%	100 %	10.387,064,721	Kalbar								100 %	0
2	18	1	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu		100%		100%	100 %	196,402,700	Pontianak								100 %	0
2	18	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	24,222,700	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 2 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	99,93%	1 Dokumen	1 Dokumen	12,243,200	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		99,88%	1 Dokumen	1 Dokumen	12,018,700	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		99,92%	1 Dokumen	1 Dokumen	12,201,800	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		99,88%	1 Dokumen	1 Dokumen	12,061,300	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	93,63%	1 Laporan	3 Laporan	48,258,700	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 3 Laporan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	98,58%	4 Laporan	2 Laporan	75,396,300	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 2 Laporan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan, dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang tepat waktu		100%	91,86%	100%	100 %	8.192.788,883	Pontianak								100 %	0
2	18	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		91,44%		53 Orang/Bulan	7.783,030,983	Pontianak								0 53 Orang/ Bulan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	3	Pelaksanaan Petausaahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Petausaahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	95,16%	1 Dokumen	1 Dokumen	273,600,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	96,70%	1 Laporan	1 Laporan	76,618,900	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 1 Laporan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemerksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	27,802,200	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	98,35%	1 Dokumen	1 Dokumen	31,736,800	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah		100%	100%	100%	100 %	21.459,900	Pontianak								100 %	0
2	18	1	1	6	Petausaahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Petausaahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	21,459,900	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 1 Laporan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya disiplin aparatur		80%		80%	80 %	314,694,800	Pontianak							0 80 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	2	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	84,000,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 2 Paket	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	3	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen			1 Dokumen	30,230,100	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	12,000,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	5 Dokumen	79,464,700	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 5 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	100%		20 Orang	80,000,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 20 Orang	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	100%	15 Orang	20 Orang	29,000,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 20 Orang	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan barang dan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dikelola dengan baik		100 %	99,87%	100 %	100 %	377,727,038	Pontianak								100 %	0
2	18	1	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	19,914,800	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 1 Paket	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	99,86%	1 Paket	1 Paket	41,463,900	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 1 Paket	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	99,80%	1 Paket	1 Paket	32,654,900	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 1 Paket	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	17,700,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 1 Paket	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	99,47%	1 Paket	1 Paket	68,366,800	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 1 Paket	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	99,47%	5 Dokumen	5 Dokumen	24,000,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 5 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	24,000,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 1 Laporan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	74,762,938	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 1 Laporan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	10	Petausaahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Petausaahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	99,48%	3 Dokumen	1 Dokumen	29,551,800	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	45,311,900	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas (komulatif tahun berjalan)		80 %	99,45%	80%	80 %	124,961,000	Pontianak							80 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	27,930,500	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 2 Paket	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		99,45%		30 Unit	97,030,500	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							0 30 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1	11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	95,79%	100 %	100 %	842.359,200	Pontianak							100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2	18	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	95.46%	1 Laporan	1 Laporan	216,000,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	623,359,200	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.1	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	80%	99.49%	80%	80%	316,671,200	Pontianak				80%		0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		99.49%	4 Unit	1 Unit	88,827,200	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	73,194,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		99.96%		80 Unit	74,650,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	80 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi		100%	1 Unit	3 Unit	70,000,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang				10 Unit	10,000,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pemetaan Potensi Investasi Berdasarkan komoditas di Kalbar	80%	99.94%	80%	80%	628,025,000	Pontianak				80%		0	
2	18	2			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kebijakan yang mendukung investasi	Kebijakan	99.93%	Kebijakan	1 Kebijakan	437,147,300	Pontianak				1 Kebijakan		0	
2	18	2			Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	99.93%	1 Dokumen	1 Dokumen	384,883,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	2			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah		99.97%		3 Kegiatan Usaha	52,264,300	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Kegiatan Usaha	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	2			Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah data potensi investasi	Dokumen	99.96%	Dokumen	1 Dokumen	190,877,700	Pontianak				1 Dokumen		0	
2	18	2			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				1 Dokumen	94,092,000	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	2			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	99.96%	1 Dokumen	1 Dokumen	96,785,700	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Sektor Unggulan Kalimantan Barat yang Digromosikan	100%	99.96%	100%	100%	696,993,600	Pontianak				100%		0	
2	18	3			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah fasilitas kerjasama	8 Kali	99.96%	1 Kali	1 Kali	696,993,600	Pontianak				1 Kali		0	
					Promosi investasi yang dilaksanakan		Kali		4 Kali	4 Kali		Pontianak				4 Kali		0	
2	18	3			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	4 Dokumen	99.96%	4 Dokumen	4 Dokumen	696,993,600	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
												Pontianak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	kuualitas pelayanan perizinan dan non perizinan Wilayah I dan Wilayah II	A Indeks	99.27%	A Indeks	A Indeks	796,972,748	Pontianak				A Indeks		0	
												Pontianak				100%		0	
												Pontianak				100%		0	
2	18	4			Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan	6.400 Izin dan non izin	99.88%	1350 Izin dan non izin	1350 Izin dan non izin	796,972,748	Pontianak				1350 Izin dan non izin		0	
2	18	4			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	98.48%	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	263,300,828	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	100 Pelaku Usaha	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	4			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	14 Dokumen	99.39%	4 Dokumen	180 Kegiatan Usaha	220,898,800	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	180 Kegiatan Usaha	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	4			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	30 Orang	99.94%	30 Orang	30 Orang	111,825,020	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 Orang	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	4			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi		99.88%	10 Kegiatan usaha	10 Kegiatan usaha	200,948,100	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Kegiatan usaha	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi	100%	69.68%	100%	100%	913,019,298	Pontianak				100%		0	
2	18	5			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi	100%	69.68%	100%	100%	913,019,298	Pontianak				100%		0	
2	18	5			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	17 Perusahaan	71.58%	17 Perusahaan	10 Kegiatan Usaha	85,627,898	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Kegiatan Usaha	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	5			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		93.47%	120 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	499,783,800	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	120 Pelaku Usaha	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
												Pontianak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2	18	5			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	30 Perusahaan	37.86%	10 Perusahaan	20 Pelaku Usaha	327,607,600	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	20 Pelaku Usaha	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
												Pontianak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Laporan Data Perizinan Berusaha dan Realisasi Investasi	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	111,444,300	Pontianak				4 Dokumen		0	
2	18	6			Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Terwujudnya pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik	100%	100%	100%	100%	111,444,300	Pontianak				100%		0	
2	18	6			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	111,444,300	Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						33,490,181,133							17,309,365,728	
2	19	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	% Penyusunan Perencanaan Kinerja Dan Keuangan Tepat Waktu	100%	89.08	90%	100%	18,649,271,217					100%		6,319,881,694	
2	19	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan Perencanaan Kinerja Dan Keuangan Tepat Waktu	100%	88.15	89%	100%	166,716,300					100%		425,000,000	

2	19	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	100	100	100	1 Dokumen	24,919,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,			Meningkatnya Kualitas SDM	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	30,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
2	19	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	100	100	100	1 Dokumen	17,625,100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	23,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	100	100	100	4 Dokumen	17,351,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	20,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	100	100	100	1 Dokumen	13,817,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	20,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1	n/a	100	100	1 Dokumen	24,757,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	30,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	100	100	100	3 Laporan	33,801,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	Dokumen Perencanaan	3 Laporan	32,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	100	100	100	2 Laporan	34,444,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	Dokumen Perencanaan	2 Laporan	270,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8	88.55	89			12,465,998,815								579,115,000		
2	19	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110	100	100	100	0 Orang/ Bulan	12,018,238,815			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kualitas SDM	0 Orang/ Bulan	0		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	100	100	100	600 Dokumen	392,560,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	Dokumen Perencanaan	600 Dokumen	485,430,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	2	100	100	100	5 Dokumen	25,200,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	37,750,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	1	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	100	100	100	0 Dokumen									0 Dokumen		
2	19	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	100	100	100	5 Laporan	16,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	16,560,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	1	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	100	100	100	2 Dokumen	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	Dokumen Perencanaan	5 Laporan	39,375,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	1	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	100	100	100	2 Dokumen	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	32,790,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	100	100	100	1 Dokumen	338,042,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	469,890,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	100	100	100	2 Laporan	16,325,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	Dokumen Perencanaan	2 Laporan	32,750,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	1	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	n/a	n/a			1 Dokumen	13,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	32,425,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	1	1	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100	99.87	100			55,887,000								165,755,000		
2	19	1	1	4	Pendaftar dan Pendaftar Objek Retribusi Daerah	Jumlah data wajib retribusi yang terdata dan terdaftar	1	100	100	100	24 Dokumen	13,925,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	Dokumen Perencanaan	24 Dokumen	45,870,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	1	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan data retribusi	1	100	100	100	3 Laporan	13,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	Dokumen Perencanaan	3 Laporan	19,125,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	1	6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1	100	100	100	24 Dokumen	14,362,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	Dokumen Perencanaan	24 Dokumen	55,200,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	1	7	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	100	100	100	12 Laporan	13,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	Dokumen Perencanaan	12 Laporan	45,560,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	1.1	1	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	% ASN YANG MENYUSUN DAN MELAPORKAN KINERJA TEPAT WAKTU	100%		100%	100 %		184,340,800							100 %	430,600,000		
						% PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI SESUAI DENGAN PERENCANAAN	100%		100%	100 %									100 %			
2	19	1	1.1	2	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	-	-	-	2 Paket	104,589,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	Dokumen Perencanaan	2 Paket	97,900,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	1.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	100	100%	100%	1 Dokumen	16,751,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	ASN	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	255,200,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	1.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	16			0 Orang	23,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,				ASN	Dokumen Perencanaan	0 Orang	25,500,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	1.1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	100	100%	100%	30 Orang	20,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	Dokumen Perencanaan	30 Orang	30,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40	100	100%	100%	30 Orang	20,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	ASN	Dokumen Perencanaan	30 Orang	22,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	1.1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK YANG DIKELOLA DENGAN BAIK	100%	95.33	100%	100 %		671,463,846							100 %	896,000,000		
2	19	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	100	100%	100%	10 Paket	24,600,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,				Meningkatnya Kualitas SDM	ASN	Dokumen Perencanaan	10 Paket	25,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	100	100%	100%	100 Paket	80,477,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	ASN	Dokumen Perencanaan	100 Paket	110,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30	100	100%	100%	30 Paket	52,230,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	ASN	Dokumen Perencanaan	30 Paket	80,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	58			0 Paket	92,148,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,				ASN	Dokumen Perencanaan	0 Paket	101,500,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	100	100%	100%	6 Paket	22,990,046		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas SDM	ASN	Dokumen Perencanaan	6 Paket	25,300,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		5	100	100%	100%		12,000,000						ASN	Dokumen Perencanaan		13,200,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	n/a			0 Laporan	122,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	Dokumen Perencanaan	0 Laporan	198,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	19	1	1.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	n/a			2 Dokumen	36,664,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	46,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	



3	26	2		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Jumlah Destinasi Wisata Unggulan	17.09 %	92.44	10.22 %	17.09 %	3,203,996,667						17.09 %	1,635,000,000			
3	26	2	1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi		98.24	lokasi	70 lokasi	1,142,139,700						70 lokasi	100,000,000			
3	26	2	1	1	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi yang ditetapkan sebagai Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	70	-		70 Lokasi	44,632,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Destinasi Wisata Unggulan Provinsi	70 Lokasi	55,000,000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	2	1	2	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1	99	100%	1 Dokumen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Destinasi Wisata Unggulan Provinsi	1 Dokumen		0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	2	1	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1	n/a		1 Lokasi	925,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Destinasi Wisata Unggulan Provinsi	1 Lokasi		0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
					Jumlah Sarana Prasarana Pariwisata					1 Kegiatan						1 Kegiatan				
3	26	2	1	4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan daya tarik wisata unggulan	14	100	100%	4 Dokumen	22,507,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Destinasi Wisata Unggulan Provinsi	4 Dokumen	45,000,000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	2	1		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		3	100	100%		845,763,467						550,000,000			
3	26	2	1	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1	n/a		1 lokasi	109,976,558	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		1 lokasi	120,000,000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	2	1	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1	-		1 Dokumen	39,514,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		1 Dokumen	50,000,000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	2	1	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1	n/a		1 Laporan	576,590,909	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		1 Laporan	80,000,000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	2	1	7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2	-		2 Lokasi	119,682,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		2 Lokasi	135,000,000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	2	1		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		3	91.1	100%		1,060,411,500						730,000,000			
3	26	2	1	2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1	n/a		1 Dokumen	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		1 Dokumen	100,000,000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	2	1	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2	100	100%	20 Lokasi	129,693,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		20 Lokasi	150,000,000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	2	1	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	10	n/a		2 lokasi	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		2 lokasi	100,000,000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	2	1	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1	n/a		1 Dokumen	23,688,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		1 Dokumen	35,000,000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	2	1	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1	n/a		1 Laporan	147,030,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		1 Laporan	160,000,000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	2	1	7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3	n/a		1 lokasi	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		1 Lokasi	125,000,000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	2	1		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah		3	97.03	100%		155,682,000						255,000,000			
3	26	2	1	1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	100	100%	30 Dokumen	69,282,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		30 Dokumen	35,000,000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	2	1	3	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Tersedianya laporan pengelolaan investasi pariwisata	1	-		1 Dokumen	86,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		1 Dokumen	150,000,000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Wisatawan Nusantra dan Mancanegara	6.075.000 Org	94.03	n/a Org	2.530.000 Org	4.545.000.000					2.530.000 Org	1.590.000.000			
3	26	3	1		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata di Provinsi Kalimantan Barat	Persen	94.03	100%	25 Persen	4.545.000.000						25 Persen	1.590.000.000		
3	26	3	1	1	Pengutan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2	100	100%	4 Dokumen	720,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritokaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat Ekonomi Pariwisata	4 Dokumen	440,000,000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	3	1	2	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2	100	100%	2 Laporan	2,615,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat Ekonomi Pariwisata	2 Laporan	710,000,000		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								

3	26	3	1	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	1	n/a		1 Dokumen	1,060,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritokaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat Ekonomi Pariwisata	1 Dokumen	66,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	3	1	4	Peningkatan Kerja Sama dan Mitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Mitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3	n/a		3 Dokumen	150,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Paritokaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat Ekonomi Pariwisata	3 Dokumen	374,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	4			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina	474 orang		Orang	170 Orang	1,380,886,000						170 Orang	616,000,000		
3	26	4	1		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan akses layanan sarana dan prasarana	460 orang	98.71	100%	150 Orang	1,345,886,000							150 Orang	577,500,000	
3	26	4	1	1	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	10	n/a		1 Unit	850,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pelaku Ekonomi Kreatif di Kalimantan Barat	1 Unit	0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	4	1	2	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	1	n/a		1 Laporan	150,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pelaku Ekonomi Kreatif di Kalimantan Barat	1 Laporan	165,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	4	1	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	1	n/a		1 Laporan	270,886,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pelaku Ekonomi Kreatif di Kalimantan Barat	1 Laporan	330,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	4	1	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	1	n/a		1 Laporan	75,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pelaku Ekonomi Kreatif di Kalimantan Barat	1 Laporan	82,500,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	4	1		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan pengembangan ekosistem	360 orang		Orang	20 Orang	35,000,000							20 Orang	38,500,000	
3	26	4	1	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1			1 Dokumen	35,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pelaku Ekonomi Kreatif di Kalimantan Barat	1 Dokumen	38,500,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina	560 orang		Orang	170 Orang	1,138,443,354							170 Orang	1,639,999,340	
3	26	5	1		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan peningkatan informasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi	360 orang	96.80	100%	30 Orang	599,943,954							30 Orang	1,046,000,000	
3	26	5	1	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	30			30 Orang	44,569,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30 Orang	70,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	5	1	3	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	30	61		30 Orang	56,288,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30 Orang	100,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	5	1	4	Facilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50	n/a		20 Orang	99,086,454		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	20 Orang	106,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	5	1	8	Facilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1	n/a		1 Laporan	200,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	220,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	5	1	9	Facilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30	31		100 Orang	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100 Orang	550,000,000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	5	1		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas	200 orang	n/a	100%	140 Orang	538,499,400							140 Orang	593,999,340	
3	26	5	1	1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100	n/a		90 Orang	328,499,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pelaku Ekonomi Kreatif di Kalimantan Barat	90 Orang	362,999,450	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	5	1	3	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	50	n/a		60 Orang	209,999,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pelaku Ekonomi Kreatif di Kalimantan Barat	60 Orang	230,999,890	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						5,649,428,900									
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan sesuai Standar	100%	46,32%	80%	100%	5,529,019,600							100%	1,260,211,900	
2	23	2	1		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		100%	55,14%	100%		5,313,257,100								924,040,100	
2	23	2	1	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	1 Perpustakaan	n/a	n/a	1 Perpustakaan	29,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Masyarakat	1 Perpustakaan	29,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	2	1	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	1 Perpustakaan	n/a	n/a	1 Perpustakaan	321,074,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Masyarakat	1 Perpustakaan	321,074,900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	2	1	4	Pembiinan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan standar Nasional Perpustakaan	200 Perpustakaan	n/a	n/a	62 Perpustakaan	82,641,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Masyarakat	62 Perpustakaan	82,641,100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	2	1	5	Pembiinan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	n/a	n/a	n/a	50 Perpustakaan	4,569,217,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Masyarakat	50 Perpustakaan	180,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	2	1	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang mendapatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah	300 Orang	n/a	n/a	25 Orang	65,441,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Masyarakat	25 Orang	65,441,100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	2	1	8	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	n/a	n/a	1 Perpustakaan	41,383,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Masyarakat	1 Perpustakaan	41,383,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	2	1	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	10000 eksemplar	n/a	18000eksamplar	3500 Eksemplar	204,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas SDM	Masyarakat	3500 Eksemplar	204,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	2	1		Budidayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kegiatan Pengembangan Minat Baca, Persentase Kegiatan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	100 Persen	37,50%	76,75 Persen	100 Persen	215,762,500							100 Persen	215,762,500	
2	23	2	1	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Budidayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Lokus	n/a	n/a	1 Lokus	15,334,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas SDM		1 Lokus	15,334,600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	2	1	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	28 Orang	n/a	n/a	28 Orang	125,870,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas SDM		28 Orang	125,870,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

2	23	2	1	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusif Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	13 Kabupaten/Kota	n/a	n/a	13 Kabupaten/Kota	74,557,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas SDM	13 Kabupaten/Kota	74,557,400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Daerah yang Dilestarikan	28,99 %	3,24%	23,11 %	28,99 %	120,409,300						28,99 %	120,409,300	
2	23	3	1		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi		5,89%	0,00%	5,23%		36,069,000							36,069,000	
2	23	3	1	1	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCCR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Keperawatan Serah Simpan KCCR	450 Eksemplar	n/a	n/a	450 Eksemplar	36,069,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	450 Eksemplar	36,069,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	3	1	1	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi	Jumlah Katalog yang diterbitkan	Kataloge	10%	Kataloge	1 Kataloge	25,750,000						1 Kataloge	25,750,000	
2	23	3	1	1	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	1250 entry	0 entry	600 entry	650 Entry	9,750,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 650 Entry	9,750,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	3	1	2	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	5 Naskah	1 Naskah	1 Naskah	1 Naskah	16,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 1 Naskah	16,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	3	1		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Lembaga yang menyimpan Naskah Kuno	1 Orang	n/a	n/a	1 Orang	17,502,400						1 Orang	17,502,400	
2	23	3	1	1	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	1 Orang	n/a	n/a	1 Orang	3,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 1 Orang	3,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	3	1	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	20 Eksemplar	n/a	n/a	20 Eksemplar	14,502,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas SDM	0 20 Eksemplar	14,502,400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	3	1		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diemuka oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Judul Koleksi Budaya Etnis Nusantara	200 Judul	-	Judul	200 Judul	41,087,900						200 Judul	41,087,900	
2	23	3	1	1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diakses dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	200 Eksemplar	n/a	n/a	200 Eksemplar	31,087,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 200 Eksemplar	31,087,900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	3	1	2	Pengolahan dan Penyajian Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyajian oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	200 Eksemplar	n/a	n/a	200 Eksemplar	10,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas SDM	0 200 Eksemplar	10,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						15,399,412,742						15,399,412,742		
2	24	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan Perencanaan Pelaporan Kinerja dan Keuangan sesuai dengan Prosedur/tepat	Persen	84,27%	Persen	100 Persen	15,770,379,822						100 Persen	15,770,379,822	
2	24	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan Kinerja dan keuangan tepat Waktu	Persen	100%	Persen	100 Persen	178,299,900						100 Persen	178,299,900	
2	24	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	44,173,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 1 Laporan	44,173,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen							2 Dokumen		
2	24	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25,122,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 1 Dokumen	25,122,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	n/a	n/a	n/a	0 Dokumen	15,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 0 Dokumen	15,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
						Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen							1 Dokumen		
2	24	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	16,747,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 1 Dokumen	16,747,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	17,310,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 1 Dokumen	17,310,800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	21,145,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Kota Keluarahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 1 Dokumen	21,145,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	38,800,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 3 Laporan	38,800,600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	13,134,066,165						100 Persen	13,134,066,165	
2	24	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12,853,745,765	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 12 Bulan	12,853,745,765	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	238,840,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 12 Dokumen	238,840,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30,299,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 12 Laporan	30,299,800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	1	1	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	11,180,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 0 Dokumen	11,180,600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
2	24	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik daerah	Persen	50%	Persen	100 Persen	23,020,900						100 Persen	23,020,900	
2	24	1	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	23,020,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 1 Laporan	23,020,900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	1	1	1	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	Persen	75%	Persen	100 Persen	101,636,397						100 Persen	101,636,397	
2	24	1	1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Analis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	44,638,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 1 Dokumen	44,638,900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen							0 Dokumen		
						Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
2	24	1	1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5,095,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 2 Dokumen	5,095,900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	1	1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	35,449,197	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 1 Tahun	35,449,197	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang							0 Orang		

2	24	1	1	1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	2,122,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	1 Tahun	2,122,400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	1	1	1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	14,330,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	1 Tahun	14,330,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	1	1	1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Barang	Persen	90,83%	Persen	100 Persen	394,796,900					100 Persen	394,796,900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	1	1	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	17,676,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	1 Tahun	17,676,100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket						0 Paket		
2	24	1	1	1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	78,697,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	1 Tahun	78,697,200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun						1 Tahun		
2	24	1	1	1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	41,979,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	1 Tahun	41,979,300	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket						0 Paket		
2	24	1	1	1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	37,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	1 Tahun	37,999,900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket						0 Paket		
2	24	1	1	1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	20,999,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	0 Paket	20,999,800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
							Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Bahan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun						1 Tahun		
2	24	1	1	1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	34,289,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	0 Dokumen	34,289,800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
							Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun						1 Tahun		
2	24	1	1	1	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	20,945,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	1 Tahun	20,945,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan						0 Laporan		
2	24	1	1	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100,657,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	1 Tahun	100,657,400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan						0 Laporan		
2	24	1	1	1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	10,130,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	0 Dokumen	10,130,800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
							Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun						1 Tahun		
2	24	1	1	1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	31,421,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	0 Dokumen	31,421,100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
							Jumlah Penerbitan Bulletin	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun						1 Tahun		
							Jumlah Pengelolaan Web	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun						1 Tahun		
							Jumlah Pengelolaan Website DPK	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun						1 Tahun		
2	24	1	1	1	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Tugas	Persen	75%	Persen	100 Persen	14,448,600					100 Persen	14,448,600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	1	1	1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	14,448,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	0 Paket	14,448,600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	1	1	1	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen	58,33%	Persen	100 Persen	1,762,799,360					100 Persen	1,762,799,360	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	1	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	1 Laporan	12,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	1	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	466,760,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	12 Bulan	466,760,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan						0 Laporan		
2	24	1	1	1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,284,039,360	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	12 Bulan	1,284,039,360	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan						0 Laporan		
							Jumlah Tenaga Kontrak	31 Orane	31 Orane	31 Orane	31 Orane						31 Orane		
							Pembinaan Jasmani dan Rohani	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun						1 Tahun		
							Penyediaan Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun						1 Tahun		
2	24	1	1	1	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Persen	95%	Persen	95 Persen	161,311,600					95 Persen	161,311,600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	1	1	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	16 Unit	16 Unit	16 Unit	16 Unit	92,071,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	16 Unit	92,071,600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	1	1	1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	39,240,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	0 Unit	39,240,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	85 Unit	85 Unit	85 Unit						85 Unit		
2	24	1	1	1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	30,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	2 Unit	30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Peningkatan Arsip yang Dikelola, Dirawat dan Dilestarikan	3,55 %	2,07%	n/a %	3,55 %	564,031,220					3,55 %	564,031,220	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	1			Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Arsip Dinamis yang dikelola dan dirawat	Persen	89,12%	Persen	100 Persen	186,864,220					100 Persen	186,864,220	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	1	1		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	188 Berkas	n/a	n/a	188 Berkas	47,255,220	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	188 Berkas	47,255,220	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	1	2		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	15100 Berkas	n/a	n/a	15100 Berkas	27,123,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	15100 Berkas	27,123,900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	1	3		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	32 Laporan	n/a	n/a	32 Laporan	112,485,100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	32 Laporan	112,485,100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
							Jumlah Peningkatan Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai Warisan Budaya	Arsip	583 Arsip	Arsip	300 Arsip	155,973,200					300 Arsip	155,973,200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2	24	2	1	1	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	40 Arsip	n/a	n/a	40 Arsip	25,000,100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	40 Arsip	25,000,100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	1	2	Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	31400 Arsip	n/a	n/a	31400 Arsip	130,973,100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	31400 Arsip	130,973,100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	1		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah data Arsip Simpul Jaringan dalam SIKN tingkat Provinsi	500 Arsip		Arsip	500 Arsip	221,193,800					500 Arsip	221,193,800	
2	24	2	1	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	61 Pengguna	n/a	n/a	61 Pengguna	117,759,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	61 Pengguna	117,759,800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	1	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	12 Laporan	n/a	n/a	12 Laporan	103,434,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	12 Laporan	103,434,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah	100 %	n/a%	n/a %	100 %	65,001,700					100 %	65,001,700	
2	24	3	1		Pemusnahan Arsip dilindungi Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip Retensi di bawah 10 Tahun untuk dimusnahkan	200 Arsip	n/a	n/a	200 Arsip	50,001,600					200 Arsip	50,001,600	
2	24	3	1	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2267 Arsip	n/a	n/a	2267 Arsip	25,004,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	2267 Arsip	25,004,400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	3	1	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun yang Dimusnahkan	1500 Berkas	n/a	n/a	1500 Berkas	24,997,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0	1500 Berkas	24,997,200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	3	1		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dinilai dan ditetapkan sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	1500 Arsip	n/a	n/a	1500 Arsip	15,000,100					1500 Arsip	15,000,100	
2	24	3	1	2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1500 Arsip	n/a	n/a	1500 Arsip	15,000,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas SDM	0	1500 Arsip	15,000,100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						33,211,110,075						14,661,911,235	
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Sesuai Dengan Prosedur/Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	20,941,106,995		Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		100 Persen	4,669,159,612	
3	25	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan Kinerja Dan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	197,444,200					100 Persen	244,068,984	
3	25	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	90,657,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dokumen Perencanaan	2	Dokumen	136,432,542	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	9,327,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dokumen Perencanaan	2	Dokumen	9,607,428	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7,004,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dokumen Perencanaan	2	Dokumen	7,214,326	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6,566,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dokumen Perencanaan	2	Dokumen	6,492,914	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 dokumen	3 Laporan	3 Laporan	11,528,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dokumen Perencanaan	3	Laporan	11,573,080	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 dokumen	4 Laporan	4 Laporan	72,359,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dokumen Perencanaan	4	Laporan	72,748,694	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	17,802,319,985					2 Dokumen	807,892,750	
3	25	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	134 Orang/ Bulan	134 Orang/ Bulan	17,471,868,685	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi Keuangan		134 Orang/ Bulan	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
3	25	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 dokumen	220 Dokumen	220 Dokumen	272,094,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi Keuangan		220 Dokumen	285,355,938	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1	6	Pengelolaan dan Penyisipan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,302,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi Keuangan		1 Dokumen	7,279,937	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 dokumen	12 Laporan	12 Laporan	8,054,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi Keuangan		12 Laporan	8,295,929	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	270,503,400					100 Persen	228,432,988	
3	25	1	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		3 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	222,050,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang Milik Daerah (BMD)		3 Dokumen	166,478,900	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	43,625,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang Milik Daerah (BMD)		1 Laporan	56,980,218	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	4,828,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang Milik Daerah (BMD)		1 Laporan	4,973,870	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1		Administrasi Kepagawalan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	202,288,848					100 Persen	324,452,060	
3	25	1	1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		-	1 Paket	1 Paket	31,087,650	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Lingkup DKP		1 Paket	159,427,530	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6,638,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Lingkup DKP		1 Dokumen	6,837,140	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang	12 Orang	12 Orang	140,063,198	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Lingkup DKP		12 Orang	103,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-	200 Orang	200 Orang	24,500,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN Lingkup DKP		200 Orang	25,235,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Barang	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	682,790,500					100 Persen	941,569,412	

3	25	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		7 Paket	1 Paket	1 Paket	13,516,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Umum Kantor	1 Paket	13,922,098	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Paket	4 Paket	4 Paket		43,531,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Umum Kantor	4 Paket	44,944,874	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	4 Paket	4 Paket		73,733,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Umum Kantor	4 Paket	79,076,087	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		16	1 Paket	1 Paket	43,167,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Umum Kantor	1 Paket	44,661,521	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		9,180,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Umum Kantor	12 Dokumen	9,455,400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 tahun	12 Laporan	12 Laporan		57,600,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Umum Kantor	12 Laporan	59,328,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	12 Laporan	12 Laporan		314,803,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Umum Kantor	12 Laporan	402,286,070	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen		23,752,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Umum Kantor	500 Dokumen	24,464,766	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 tahun	1 Dokumen	1 Dokumen		103,495,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi Umum Kantor	1 Dokumen	263,430,506	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Tugas	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	24,720,000						100 Persen	612,600,000	
3	25	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		21 unit	12 Unit	12 Unit	24,720,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Tugas Kantor	12 Unit	206,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1,398,008,542						100 Persen	1,472,301,881	
3	25	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 tahun	12 Laporan	12 Laporan		448,388,382	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jasa Penunjang Kantor	12 Laporan	595,740,033	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 layanan	12 Laporan	12 Laporan		949,620,160	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jasa Penunjang Kantor	12 Laporan	876,561,848	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	363,041,520						100 Persen	537,841,538	
3	25	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 tahun	7 Unit	7 Unit		110,380,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Daerah (BMD)	7 Unit	71,471,185	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	2 Unit	2 Unit		10,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Daerah (BMD)	2 Unit	10,300,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 tahun	5 Unit	5 Unit		92,061,520	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Daerah (BMD)	5 Unit	94,870,983	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 tahun	1 Unit	1 Unit		150,600,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Daerah (BMD)	1 Unit	361,199,370	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Kawasan Ruang Laut Dan Konservasi Yang Dikelola	Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	1,489,041,800			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan		50 Persen	1,655,351,938	
3	25	2	1		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kawasan Ruang Laut Dan Konservasi Yang Di Kelola	Kawasan	3 kKawasan	5 Kawasan	5 Kawasan	780,391,700						5 Kawasan	869,753,929	
						Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Ruang Laut Yang Di Fasilitas Layanan Perizinannya			7 Persen	7 Persen							7 Persen		
3	25	2	1	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	2 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		76,804,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Ruang Laut dan Kawasan Konservasi	1 Dokumen	84,980,145	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	1	2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	5 kawasan	637.514 Ha	637.514 Ha		244,485,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Ruang Laut dan Kawasan Konservasi	637.514 Ha	268,487,671	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
												Kab. Ketapang, Semua Kecamatan							
												Kab. Sambas, Semua Kecamatan							
												Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan							
3	25	2	1	3	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	2 kawasan	3 Ha	3 Ha		387,488,000	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Ruang Laut dan Kawasan Konservasi	3 Ha	425,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
												Kab. Ketapang, Semua Kecamatan							
												Kab. Sambas, Semua Kecamatan							
3	25	2	1	4	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Kawasan	70 Orang	70 Orang		71,613,200	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Ruang Laut dan Kawasan Konservasi	70 Orang	91,286,113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
												Kab. Sambas, Semua Kecamatan							
3	25	2	1		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Berdayakan Dan Dibina	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Berdayakan Dan Dibina	50 Kelompok	25 Kelompok	27 Kelompok	27 Kelompok	708,650,100						27 Kelompok	785,598,009	
3	25	2	1		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	60 Orang	60 Orang		399,999,900	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Desa pesisir dan Pulau Pulau kecil	60 Orang	412,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
												Kab. Sambas, Semua Kecamatan							

3	25	2	1	2	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	50 Orang	2 Kelompok	2 Kelompok	74,790,200	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Desa pesisir dan Pulau Pulau Kecil	2 Kelompok	76,734,009	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	2	1	3	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	50 Orang	80 Orang	80 Orang	145,060,000	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Kab. Mempawah, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Desa pesisir dan Pulau Pulau Kecil	80 Orang	206,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	2	1	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	2 Kelompok	2 Kelompok	88,800,000	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Mempawah, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Desa pesisir dan Pulau Pulau Kecil	2 Kelompok	90,864,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	150.625,01 Ton	165254,96 Ton	165254,96 Ton	6,199,361,600		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	165254,96 Ton	3,670,896,266		
3	25	3	1		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Yang Menerima Bantuan Sarana Dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kelompok	23 Kelompok	24 Kelompok	24 Kelompok	5,291,352,700				24 Kelompok	2,466,685,462		
3	25	3	1	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	229,791,300	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan, Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Kab. Mempawah, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	1 Dokumen	236,685,462	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	3	1	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	8 Unit	6 Unit	6 Unit	3,561,561,400	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan, Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Kab. Mempawah, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	6 Unit	1,030,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	3	1	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	15 unit	6 Unit	6 Unit	1,500,000,000	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan, Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Kab. Mempawah, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	6 Unit	1,200,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	3	1		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawak, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sumber daya ikan perairan umum yang di susun	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	139,948,000				1 Dokumen	350,146,570		
3	25	3	1	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	139,948,000	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Kab. Landak, Semua Kecamatan, Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	1 Dokumen	144,146,570	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN







																							Kab. Ketapang, Semua Kecamatan
																							Kab. Sambas, Semua Kecamatan
																							Kota Singkawang, Semua Kecamatan
																							Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan
																							Kab. Mempawah, Semua Kecamatan
3	25	5	1	3	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	5 dokumen	-	8 Dokumen	8 Dokumen	54,830,500	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)										Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan
																							Kab. Sambas, Semua Kecamatan
																							Kab. Mempawah, Semua Kecamatan
3	25	5	1	4	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	38 Kelompok	-	38 Kelompok	38 Kelompok	114,777,600	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)										Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan
																							Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan
																							Kab. Ketapang, Semua Kecamatan
																							Kab. Sambas, Semua Kecamatan
																							Kab. Sintang, Semua Kecamatan
																							Kota Pontianak, Semua Kecamatan
																							Kota Singkawang, Semua Kecamatan
																							Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan
																							Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan
																							Kab. Mempawah, Semua Kecamatan
3	25	5	1	1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Frekuensi Gelar Operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Di Wilayah Perairan Umum Lintas Kab/Kota	Persen	7 kali	12 Persen	12 Persen	167,656,400												
3	25	5	1	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	5 dokumen	5 unit	10 Dokumen	10 Dokumen	50,728,700	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)										Kab. Bengkayang, Semua Kelurahan
																							Kab. Ketapang, Semua Kecamatan
																							Kab. Sambas, Semua Kecamatan
																							Kota Pontianak, Semua Kecamatan
																							Kota Singkawang, Semua Kecamatan
																							Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan
																							Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan
																							Kab. Mempawah, Semua Kecamatan
3	25	5	1	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	-	-	8 Dokumen	8 Dokumen	50,728,700	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)										Kab. Bengkayang, Semua Kelurahan
																							Kab. Ketapang, Semua Kecamatan
																							Kab. Sambas, Semua Kecamatan
																							Kota Pontianak, Semua Kecamatan





3	25	1	1.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2,336,400	Kab. Mempawah, Anjongan, Pak Bulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	2,750,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah							138,050,430						143,501,510	
3	25	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8 Jenis	8 Paket	8 Paket		34,982,700	Kab. Mempawah, Anjongan, Pak Bulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8 Paket	35,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		39 Jenis	3 Paket	3 Paket		32,732,300	Kab. Mempawah, Anjongan, Pak Bulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Paket	35,200,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket		2,100,000	Kab. Mempawah, Anjongan, Pak Bulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	2,100,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		8,800 Lembar	9 Paket	9 Paket		16,015,430	Kab. Mempawah, Anjongan, Pak Bulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9 Paket	16,015,510	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Tahun	120 Laporan	120 Laporan		52,220,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120 Laporan	52,402,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							698,223,359						677,946,500	
3	25	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		9 unit	4 Unit	4 Unit		68,723,600	Kab. Sambas, Pemangkat, Sebatuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Unit	69,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	2 Unit	2 Unit		322,869,600	Kota Singkawang, Singkawang Selatan, Sedau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Unit	310,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		9 unit 1 paket	2 Unit	2 Unit		146,303,559	Kab. Mempawah, Mempawah Hilir, Terusan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Unit	150,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	6 Unit	6 Unit		160,326,600	Kab. Sambas, Pemangkat, Sebatuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 Unit	148,946,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							910,403,631						914,562,760	
3	25	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		255,316,920	Kab. Sambas, Pemangkat, Sebatuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	253,913,320	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 laporan	2 Laporan	2 Laporan		655,086,711	Kab. Sambas, Pemangkat, Sebatuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Laporan	660,649,440	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							95,757,150						258,497,900	
3	25	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7 Unit	3 Unit	3 Unit		46,730,400	Kab. Mempawah, Anjongan, Pak Bulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Unit	47,096,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6 Jenis	28 Unit	28 Unit		49,026,750	Kab. Sambas, Pemangkat, Sebatuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			28 Unit	49,399,400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Benih/ Benur Unggul Komoditas Ikan Air Payau dan Laut (ekor)	5,002,594	4,537,500	4,764,375	4,764,375		782,386,650			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan		820,000,000	
3	25	4	1.1		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat							782,386,650						820,000,000	
3	25	4	1.1	1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1 Paket	1 Unit	1 Unit		138,362,900	Kab. Sambas, Pemangkat, Sebatuan				1 Unit	140,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	1.1	2	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1 Paket	72 Unit	72 Unit		644,023,750	Kab. Sambas, Pemangkat, Sebatuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			72 Unit	680,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
													Kota Singkawang, Singkawang Selatan, Sedau						



3	25	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1,000,000	Kab. Kubu Raya, Sungai Kakap, Sungai Rengas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai UPT Pelabuhan Perikanan dan pengguna fasilitas pelabuhan	12 Laporan	1,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	563,686,980	Kab. Ketapang, Delta Pawan, Suka Bangun Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai UPT Pelabuhan Perikanan dan pengguna fasilitas pelabuhan	12 Laporan	1,035,464,678	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
												Kab. Sambas, Selakau, Sungai Nyirih								
												Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungai Jawi Dalam								
3	25	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1,131,221,400	Kab. Ketapang, Delta Pawan, Suka Bangun Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai UPT Pelabuhan Perikanan dan pengguna fasilitas pelabuhan	3 Laporan	1,131,221,400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
												Kab. Sambas, Selakau, Sungai Nyirih								
												Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungai Jawi Dalam								
												Kab. Kubu Raya, Sungai Kakap, Sungai Rengas								
3	25	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	84,055,400							100 Persen	411,008,000	
3	25	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	25,628,000	Kab. Kubu Raya, Sungai Kakap, Sungai Rengas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana UPT Pelabuhan Perikanan	6 Unit	75,008,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 unit	42 Unit	42 Unit	42 Unit	24,000,000	Kab. Ketapang, Delta Pawan, Suka Bangun Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana UPT Pelabuhan Perikanan	42 Unit	200,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
												Kab. Sambas, Selakau, Sungai Nyirih								
												Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungai Jawi Dalam								
												Kab. Kubu Raya, Sungai Kakap, Sungai Rengas								
3	25	1	1.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	34,427,400	Kab. Ketapang, Delta Pawan, Suka Bangun Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana UPT Pelabuhan Perikanan	2 Unit	136,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
												Kab. Sambas, Selakau, Sungai Nyirih								
												Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungai Jawi Dalam								
												Kab. Kubu Raya, Sungai Kakap, Sungai Rengas								
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan yang didaratkan di pelabuhan perikanan									Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	159.538 Ton	410,030,400		
3	25	3	1.1		Pemetaan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Produksi Perikanan yang didaratkan di pelabuhan perikanan	5000 Ton	4.850 Ton	5000 Ton	5000 Ton	355,104,400							5000 Ton	410,030,400	
3	25	3	1.1	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	5 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	160,000,000	Kab. Kubu Raya, Sungai Kakap, Sungai Rengas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Nelayan Kapal Perikanan dan UPT Pelabuhan Perikanan	2 Unit	160,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	3	1.1	3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan perikanan yang Terlaksana	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	195,104,400	Kab. Kubu Raya, Sungai Kakap, Sungai Rengas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Nelayan Kapal Perikanan dan UPT Pelabuhan Perikanan	4 Layanan	250,030,400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100% %	n/a %	85% %	85% %	45,197,095,663							85% %	45,730,771,941	
3	27	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	%	100 %	100 %	181,218,400							100 %	282,590,182	
3	27	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5		100	6 Dokumen	82,347,200	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	6 Dokumen	180,752,846	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1		100	1 Dokumen	13,341,100	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	1 Dokumen	13,741,333	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1		100	1 Dokumen	5,100,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	1 Dokumen	5,253,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1		100	1 Dokumen	9,226,500	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	1 Dokumen	9,503,295	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1		100	1 Dokumen	5,485,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	1 Dokumen	5,649,550	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12		100	12 Laporan	46,272,900	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	12 Laporan	47,661,087	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		100	4 Laporan	19,445,700	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	4 Laporan	20,029,071	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terbit administrasi keuangan yang dikelola	%	%	100 %	100 %	39,596,108,786							100 %	39,617,551,793	
3	27	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	270		100	274 Orang	39,296,741,886	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	274 Orang	39,303,332,886	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
														Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

3	27	1	1	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14		100	1 Dokumen	254,160,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	1 Dokumen	267,655,800	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1200		100	500 Dokumen	9,381,200	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	500 Dokumen	9,662,636	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12		100	12 Dokumen	15,910,800	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	12 Dokumen	16,388,124	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4		100	4 Dokumen	6,070,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	4 Dokumen	6,252,100	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18		100	18 Laporan	13,844,900	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	18 Laporan	14,260,247	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dikelola dengan baik	%		%	100 %	55,938,000							100 %	76,964,690	
3	27	1	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3		100	6 Dokumen	45,250,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	6 Dokumen	46,607,500	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5		100	4 Laporan	10,688,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	4 Laporan	30,357,190	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1.1	1	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kepengawasan yang akurat	%		%	100 %	242,099,050							100 %	284,727,329	
3	27	1	1.1	2	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100			360 Paket	124,402,250	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	360 Paket	152,169,625	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7			14 Dokumen	17,392,600	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	14 Dokumen	17,914,378	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100			2 Dokumen	25,304,200	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	2 Dokumen	26,063,326	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20			50 Orang	15,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	50 Orang	30,900,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20			10 Orang	60,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas SDM	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	10 Orang	57,680,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1.1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum mendukung kinerja sekretariat	%		%	100 %	809,592,180							100 %	936,136,770	
3	27	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10			3 Paket	97,712,800	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	3 Paket	100,598,658	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	20			3 Paket	330,823,100	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	3 Paket	379,875,948	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1600			2 Paket	108,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	2 Paket	111,240,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	318			1 Paket	42,984,400	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	1 Paket	44,274,396	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3			4 Dokumen	12,180,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	4 Dokumen	6,180,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50			50 Laporan	200,711,280		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	50 Laporan	206,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3			6 Dokumen	17,180,600	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	6 Dokumen	87,967,768	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1.1	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis		Jenis	6 Jenis	161,662,900							6 Jenis	183,313,735	
3	27	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3			23 Unit	161,662,900	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	23 Unit	183,313,735	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Layanan		Layanan	3 Layanan	3,659,876,977							3 Layanan	3,989,340,586	
3	27	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100			50 Laporan	500,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	50 Laporan	1,978,033	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4			3 Laporan	1,206,682,137	Kab. Sambas, Tabas, Sengaja	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	3 Laporan	1,470,297,808	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	5			5 Laporan	2,452,694,840	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	5 Laporan	2,517,064,745	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1.1	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berfungsi baik	%		%	100 %	490,599,370							100 %	360,146,856	
3	27	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2			12 Unit	40,160,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	12 Unit	42,394,800	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1.1	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1			4 Unit	10,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	4 Unit	20,600,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1			75 Unit	112,432,450	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	75 Unit	89,302,056	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1.1	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	9			3 Unit	20,006,920	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	3 Unit	20,600,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1.1	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1			0 Unit	148,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	0 Unit	15,450,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2			1 Unit	100,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	1 Unit	110,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	

3	27	1	1.1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dijelajahi/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dijelajahi/Direhabilitasi	1		1 Unit	60,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sintangbangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	1 Unit	61,800,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Luas Panen Tanaman Pangan	%	%	97.8 %	11,233,694,600						97.8 %	3,372,902,890	
						Persentase Peningkatan Luas Panen Hortikultura	%	%	2 %							2 %		
						Produktivitas Padi	ku/ha	ku/ha	31.63 ku/ha							31.63 ku/ha		
3	27	2	1		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah kabupaten/kota dengan sebaran sarana pertanian sesuai alokasi dan ketentuan yang berlaku	Kab/Kota	Kab/Kota	13 Kab/Kota	603,987,600						13 Kab/Kota	667,255,424	
3	27	2	1	1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	13		13 Laporan	229,097,600	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Landak, Semua Kecamatan, Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Kab. Kutai Linggau, Semua Kecamatan, Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Kab. Singkawang, Semua Kecamatan, Kab. Sekeloa, Semua Kecamatan, Kab. Trenggala, Semua Kecamatan, Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan, Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Kab. Mempawah, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Kelompok Tani	13 Laporan	260,541,384	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	2	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	13		13 Dokumen	374,890,000	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Landak, Semua Kecamatan, Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Kab. Kutai Linggau, Semua Kecamatan, Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Kab. Singkawang, Semua Kecamatan, Kab. Sekeloa, Semua Kecamatan, Kab. Trenggala, Semua Kecamatan, Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan, Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Kab. Mempawah, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Kelompok Tani	13 Dokumen	406,714,040	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	2	1		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas areal tanam difasilitasi benih bermutu	Ha	Ha	2600 Ha	10,629,707,000						2600 Ha	2,705,647,466	
3	27	2	1	2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	14		4 Laporan	7,287,220,000	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Landak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Kelompok Tani	4 Laporan	428,377,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

3	27	2	1	3	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	7		4 Dokumen	3.342.487,000	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Kelompok Tani	4 Dokumen	2.277.270,466	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
											Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
											Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
											Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
											Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
											Kab. Sekeloa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
											Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
											Kab. Widyadarmas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Luas Lahan Sawah Ditanami 2x	7,35 %	1,00 %	1,79 %	12.787.829,123						1,79 %	2.589.794,869	
						Persentase peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas	%	%	1,79 %							1,79 %		
3	27	3	1		Penataan Prasarana Pertanian	Luas cakupan sawah teririgasi	ha	ha	3500 ha	12.787.829,123						3500 ha	2.589.794,869	
						Luas Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dikembangkan	ha	ha	2200 ha							2200 ha		
3	27	3	1	1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	41		6 Dokumen	7.854.548,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Kelompok Tani	6 Dokumen	456.520,027	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	3	1	2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, kawasan dan Komoditas Pertanian	2		2 Dokumen	3.756.634,623	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Kelompok Tani	2 Dokumen	792.750,751	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
											Kab. Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
											Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	27	3	1	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	14		1 Dokumen	53.328,500	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Kelompok Tani	1 Dokumen	103.357,616	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
											Kab. Landak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
											Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
											Kab. Mempang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
											Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
											Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
											Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
											Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
											Kab. Sekeloa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
											Kab. Widyadarmas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
											Kab. Kayong Lingsar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
											Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
											Kab. Widyadarmas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	27	3	1	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	14		1 Dokumen	61.524,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Kelompok Tani	1 Dokumen	94.799,655	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	3	1	9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	5		12 Laporan	1.061.792,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Kelompok Tani	12 Laporan	1.142.366,820	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Pertanian	unit	unit	195 unit	2.293.027,500						195 unit	1.052.498,187	

					Persentase Peningkatan Kelompok Tani Kelas Lanjut	%			10 %									10 %				
					Persentase Peserta Didik Pertanian dengan kategori baik	%			80 %									80 %				
3	27	7			Pengembangan Ketegaan Penyuluhan Pertanian													120 orang		1,052,498,187		
																		5 poktan				
3	27	7			Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah penyuluh pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan (Orang)		80			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Penyuluh dan Kelompok Tani Kalimantan Barat						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	7			KERJA Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah penyuluh pertanian swadaya dan swasta yang telah mengikuti pengembangan kompetensi (orang)		60			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Penyuluh dan Kelompok Tani Kalimantan Barat						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	7	1		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah petani (non aparat) yang mengikuti diklat	orang		120 orang	2,293,027,500								120 orang		1,052,498,187		
						Jumlah Poktan yang menerapkan inovasi teknologi	poktan		5 poktan									5 poktan				
3	27	7	1	1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		11		3 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Penyuluh dan Kelompok Tani Kalimantan Barat			3 Dokumen		799,839,805	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	7	1	2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan		40		40 Kelompok	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Penyuluh dan Kelompok Tani Kalimantan Barat			40 Kelompok		252,658,382	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	7			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah petani (non aparat) yang mengikuti diklat	orang		120 orang	2,293,027,500								120 orang		1,052,498,187		
						Jumlah Poktan yang menerapkan inovasi teknologi	poktan		5 poktan									5 poktan				
3	27	7			Pembentukan dan Penguatan Kooperasi Petani	Jumlah kooperasi petani yang dibentuk dan beroperasi (unit)		20			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Penyuluh dan Kelompok Tani Kalimantan Barat						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	7			Pendampingan Manajemen Kooperasi Petani	Jumlah pendampingan manajemen kooperasi petani (Laporan)		1			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Penyuluh dan Kelompok Tani Kalimantan Barat						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	7			Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Kooperasi Petani	Jumlah kooperasi petani yang dinilai kelayakan dan standarisasi Manajemennya (Unit)		14			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Penyuluh dan Kelompok Tani Kalimantan Barat						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27	7			Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi (unit)	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi (unit)		10			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Penyuluh dan Kelompok Tani Kalimantan Barat						DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
												Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat										
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					6,322,317,000											0	
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan kinerja dan Keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu	%		100 %	3,264,065,424								100 %			0	
3	27	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%		100 %	27,460,500								100 %			0	
3	27	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1		1 Dokumen	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Program dan kegiatan UPT PSB			1 Dokumen			0	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1		1 Dokumen	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Program dan kegiatan UPT PSB			1 Dokumen			0	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		12		1 Dokumen	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Program dan kegiatan UPT PSB			1 Dokumen			0	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1		1 Dokumen	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Program dan kegiatan UPT PSB			1 Dokumen			0	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1		1 Dokumen	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Program dan kegiatan UPT PSB			1 Dokumen			0	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1		1 Laporan	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Program dan kegiatan UPT PSB			1 Laporan			0	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1		1 Laporan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Program dan kegiatan UPT PSB			1 Laporan			0	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terb administrasi keuangan yang dikelola	%		100 %	197,711,500								100 %			0	
3	27	1	1	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		2		1 Dokumen	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT PSB			1 Dokumen			0	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12		1 Dokumen	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT PSB			1 Dokumen			0	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1		1 Dokumen	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungailiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT PSB			1 Dokumen			0	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase BMD terkelola dengan baik	%		100 %	40,230,000								100 %			0	
3	27	1	1		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		4		7 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah UPT PSB			7 Dokumen			0	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1.1		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Presentase pengelolaan data administrasi kepegawalan yang akurat	%		100 %	196,669,500								100 %			0	
3	27	1	1.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		2		2 Paket	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pegawai UPT PSB			2 Paket			0	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		3		0 Dokumen	Semua Kecamatan, Kaur. Lanjut, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas SDM	Pegawai UPT PSB			0 Dokumen			0	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)				1 Dokumen	Semua Kecamatan							1 Dokumen				







3	27	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12			12 Laporan	2,999,805	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT Perlindungan TPH Prov. Kalbar	12 Laporan	3,200,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3	27	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12			12 Laporan	149,248,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT Perlindungan TPH Prov. Kalbar	12 Laporan	164,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3	27	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2			2 Laporan	526,001,280	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT Perlindungan TPH Prov. Kalbar	2 Laporan	578,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3	27	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	73,863,000						100 Persen	81,000,000			
3	27	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pertinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pertinannya	1			1 Unit	21,900,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT Perlindungan TPH Prov. Kalbar	1 Unit	24,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3	27	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62			49 Unit	21,963,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT Perlindungan TPH Prov. Kalbar	49 Unit	24,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3	27	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1			3 Unit	30,000,000	Kab. Sambas, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT Perlindungan TPH Prov. Kalbar	3 Unit	33,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan,	DANA Yang Dibebaskan Perencanaan Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar				0 Unit				
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan OPT dan dampak perubahan iklim	Persen		Persen	3,07 Persen	646,700,800						3,07 Persen	711,000,000			
3	27	5	1		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provisi	Luas Pengendalian dan penanggulangan gangguan OPT/ DPI pada lahan pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ha		Ha	400 Ha	646,700,800						400 Ha	711,000,000			
3	27	5	1	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	400			400 Ha	596,700,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Petani dan Petugas POPT	400 Ha	656,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
3	27	5	1	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	252			10 Ha	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Petani dan Petugas POPT	10 Ha	55,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						32,698,882,579								5,530,659,364		
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						23,161,414,739								3,806,750,814		
3	27	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100% %		n/a %	85% %										471,055,000	
3	27	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu	%		%	100 %	288,151,000									100 %	
3	27	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen		2 Dokumen	43,491,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Alkaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	2	Dokumen	126,250,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3	27	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		1 Dokumen	17,700,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Alkaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1	Dokumen	17,700,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3	27	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		1 Dokumen	16,950,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Alkaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Dinas Perkebunan dan Peternakan	1	Dokumen	16,950,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3	27	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		1 Dokumen	16,950,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Alkaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1	Dokumen	16,950,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3	27	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan		2 Laporan	16,500,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Alkaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	2	Laporan	16,500,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3	27	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan		1 Laporan	176,560,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Alkaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1	Laporan	276,705,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3	27	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	19,699,500,044								1 Dokumen	296,990,000	
3	27	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				175 Orang/ Bulan	19,454,860,044	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Alkaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	175 Orang/ Bulan	0	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	128	Dokumen		128 Dokumen	237,500,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Alkaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	128 Dokumen	237,500,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan		1 Laporan	7,140,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Alkaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Dinas Perkebunan dan Peternakan	1	Laporan	56,040,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3	27	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	%		%	100 %	117,240,000								100 %	232,042,500	
3	27	1	1	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen		1 Dokumen	3,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Alkaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1	Dokumen	3,442,500	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3	27	1	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6	Dokumen		6 Dokumen	40,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Alkaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	6	Dokumen	40,000,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3	27	1	1	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan		1 Laporan	74,240,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Alkaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Dinas Perkebunan dan Peternakan	1	Laporan	188,600,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
												Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Alkaya									
												Kota Singkawang, Semua Kecamatan,									
												Kab. Sekeloa, Semua Kecamatan,									
												Kab. Kubu Raya, Semua Kecamatan,									

3	27	1	1.1	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan perencanaan	%	%	100 %	193,986,250						100 %	194,846,250		
3	27	1	1.1	2	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			130 Paket	99,596,250	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	130 Paket	99,846,250	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1 Dokumen	30,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1 Dokumen	30,000,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			15 Orang	40,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	15 Orang	40,000,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			35 Orang	24,390,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	35 Orang	25,000,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan barang	%	%	90 %	482,610,500					90 %	466,835,500		
3	27	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5 Paket	5,372,300	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	5 Paket	5,372,300	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Paket	135,839,700	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	5 Paket	135,839,700	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			5 Paket	59,171,500	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	5 Paket	59,171,500	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1000 Paket	60,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1000 Paket	60,000,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			100 Paket	48,516,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	100 Paket	48,516,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			100 Dokumen	12,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	100 Dokumen	12,000,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			30 Laporan	151,475,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	30 Laporan	135,700,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			100 Dokumen	10,236,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	100 Dokumen	10,236,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas (kumulatif tahun berjalan)	%	%	100 %	104,288,500					100 %	274,483,364		
3	27	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			25 Unit	104,288,500	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	25 Unit	274,483,364	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	%	100 %	1,847,048,445					100 %	1,744,248,200		
3	27	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	5,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1 Laporan	5,000,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	634,782,365	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	12 Laporan	530,560,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			3 Laporan	1,207,266,080	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	3 Laporan	1,208,688,200	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	%	100 %	428,590,000					100 %	126,250,000		
3	27	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			5 Unit	222,840,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	5 Unit	0	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			50 Unit	79,500,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	50 Unit	0	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	71,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1 Unit	71,000,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	55,250,000	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1 Unit	55,250,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi perkebunan rakyat	Ton	Ton	1499600 Ton	3,899,190,500					1499600 Ton	0		
3	27	2	1		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Laporan	Laporan	1 Laporan	1,300,000,000					1 Laporan	0		
3	27	2	1	4	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan			4 Laporan	1,300,000,000	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Kelompok Tani Perkebunan Rakyat	4 Laporan	0	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	2	1		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Laporan	Laporan	1 Laporan	15,268,900					1 Laporan	0		
3	27	2	1	3	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan			2 Dokumen	15,268,900	Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	SDG Hewan dan Tanaman Pakan Ternak	2 Dokumen	0	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	2	1		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Peningkatan ketersediaan populasi ternak	Ekor	Ekor	2000000 Ekor	850,756,000					2000000 Ekor	0		
3	27	2	1	1	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			3 Dokumen	227,030,000	Kab. Melawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Kelompok Tani (Peternak) dan Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Pakan Ternak	3 Dokumen	0	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	









3	27	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan PerubahanRKA					1 Dokumen	779,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	UPT, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	780,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan DPA					1 Dokumen	1,329,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	UPT, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	1,330,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	1,458,100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	UPT, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	1,459,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	1,385,550	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	UPT, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	1,400,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
														PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran					
3	27	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya capaian kinerja keuangan yang efisien, efektif dan akuntabel	%		%	100 %		90,726,900							100 %	86,213,700	
3	27	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					17 Dokumen	83,880,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		0 17 Dokumen	80,360,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
														PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran					
3	27	1	1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1 Dokumen	1,010,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		0 1 Dokumen	0	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
														PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran					
3	27	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1,679,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		0 1 Laporan	1,679,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
														PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran					
3	27	1	1	6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					1 Dokumen	961,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		0 1 Dokumen	961,700	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
														PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran					
3	27	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					17 Laporan	2,363,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		0 17 Laporan	2,363,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
														PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran					
3	27	1	1	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1 Dokumen	833,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		0 1 Dokumen	850,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
														PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran					
3	27	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah SKPD	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Dokumen	100 %	1 Dokumen	30,800,300						1 Dokumen	52,829,600		
						Tersusunnya Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	%		%	100 %									100 %		
3	27	1	1	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	929,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		0 1 Dokumen	929,600	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
														PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran					
														PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran					
3	27	1	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					2 Dokumen	28,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		0 2 Dokumen	50,000,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	1,870,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		0 1 Laporan	1,900,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
														PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran					



3	27	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Tahun	195,698,880		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		1 Tahun	191,608,560	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68,576,663							73,000,000		
3	27	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				19 Unit	17,280,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		19 Unit	18,000,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
													PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran					
3	27	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	51,296,663	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		60 Unit	55,000,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
													PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran					
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						310,435,200							391,167,079		
3	27	2	1		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian						111,227,000							130,827,148		
3	27	2	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				2 Dokumen	111,227,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		2 Dokumen	130,827,148	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	2	1		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						154,869,600							194,870,031		
3	27	2	1	1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih				45 Sertifikat	52,086,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		45 Sertifikat	87,097,626	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	2	1	4	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				32 Laporan	102,783,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		32 Laporan	107,772,405	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	2	1		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan						44,338,600							65,469,900		
3	27	2	1	2	Penilaian Kulturvar SDG Tumbuhan dan Mikroorganism	Jumlah pelaksanaan sistem manajemen mutu SDG tumbuhan dan mikroorganism				1 laporan	44,338,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		1 laporan	65,469,900	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
															Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran					
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						109,427,860							109,427,860		
3	27	3	1		Penataan Prasarana Pertanian						109,427,860							109,427,860		
3	27	3	1	2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				20 dokumen	109,427,860		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		20 dokumen	109,427,860	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN						61,201,200							61,201,294		
3	27	6	1		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						61,201,200							61,201,294		
3	27	6	1	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota				15 Dokumen	61,201,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran		15 Dokumen	61,201,294	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1,938,650,751							2,000,000,511		
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu	%		%	100 %	1,089,437,701							100 %	1,095,286,961	
3	27	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis Dokumen Perencanaan OPD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	3,130,200							4 Dokumen	4,120,200	
3	27	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	255,800	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran UPT, Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Prov. Kalbar	1 Dokumen	255,800	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	437,500	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran UPT, Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Prov. Kalbar	2 Dokumen	437,500	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	418,500	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran UPT, Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Prov. Kalbar	1 Laporan	418,500	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2,018,400	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran UPT, Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Prov. Kalbar	1 Laporan	3,008,400	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lavanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	104,003,000							12 Bulan	104,003,000	
3	27	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	100,560,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pengelola Keuangan dan Barang UPT, Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Prov. Kalbar	1 Dokumen	100,560,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	3,443,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pengelola Keuangan dan Barang UPT, Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Prov. Kalbar	2 Laporan	3,443,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Tata Kelola Administrasi Barang Milik Daerah yang dikelola OPD	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	13,132,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah UPT, Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Prov. Kalbar	2 Dokumen	13,132,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	13,132,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah UPT, Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Prov. Kalbar	2 Dokumen	13,132,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1		Administrasi Kepagawalan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepagawalan Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	11,902,000							1 Laporan	13,902,000	

3	27	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	11,902,000	Semua Kab/Kota, Kota Pontianak, Kota Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berbasis Sains	Meningkatnya Kualitas SDM	Aparatur UPT, Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Prov. Kalbar	2 Orang	13,902,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	Jenis		Jenis	5 Jenis	66,363,055						5 Jenis	67,680,815		
3	27	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,503,215		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sarana dan Prasarana UPT, Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Prov. Kalbar	1 Paket	5,503,215	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	14,983,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sarana dan Prasarana UPT, Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Prov. Kalbar	3 Paket	14,983,800	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	20,550,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sarana dan Prasarana UPT, Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Prov. Kalbar	3 Paket	20,550,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12,407,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sarana dan Prasarana UPT, Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Prov. Kalbar	1 Paket	11,417,800	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	12,918,240		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas SDM	Sarana dan Prasarana UPT, Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Prov. Kalbar	1 Laporan	15,206,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin yang diadakan	Unit		Unit	8 Unit	238,022,700							8 Unit	238,022,700	
3	27	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	238,022,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPT, Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Prov. Kalbar	8 Unit	238,022,700	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Layanan Umum Kantor dan Jenis Jasa yang dibayarkan	Bulan		Bulan	12 Bulan	473,766,632							12 Bulan	473,766,632	
3	27	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPT, Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Prov. Kalbar	1 Laporan	3,000,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	195,761,372		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPT, Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Prov. Kalbar	3 Laporan	195,761,372	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	275,005,260		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPT, Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Prov. Kalbar	2 Laporan	275,005,260	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	179,118,114							1 Tahun	180,679,614	
3	27	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	13,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPT, Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Prov. Kalbar	1 Unit	13,000,000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				48 Unit	116,005,814		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPT, Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Prov. Kalbar	48 Unit	117,567,314	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	1	1.1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	50,112,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPT, Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan Prov. Kalbar	2 Unit	50,112,300	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah Jenis Penyakit Ternak/ Hewan yang dikendalikan	Jenis		Jenis	7 Jenis	849,213,050							7 Jenis	904,713,550	
3	27	4	1		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Ultras Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sampel Diagnostik Penyakit Hewan Menular dan Pengendalian Penyakit Hewan	Sampel		Sampel	3600 Sampel	509,797,300							3600 Sampel	560,667,800	
3	27	4	1	1	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				12 Laporan	509,797,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Ternak/ Hewan, Peternak, Kelompok Ternak, Pemilik Hewan di Kabupaten/Kota	12 Laporan	560,667,800	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3	27	4	1		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Sampel Pelaksanaan pengujian Uji Kualitas Produk Hewan	Sampel		Sampel	450 Sampel	339,415,750							450 Sampel	344,045,750	
3	27	4	1	3	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner				12 Dokumen	339,415,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Unit Usaha Produk Hewan, Pasar Tradisional, Peternak di Kabupaten/Kota	12 Dokumen	344,045,750	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
3															Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran					
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						28,094,159,925									0
3	29	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	24,480,076,625							100 Persen	0	
3	29	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	163,561,375							100 Persen	0	
3	29	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Dokumen	41,803,675		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	2 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	14,151,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12,539,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	

3	29	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12,420,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Laporan	27,633,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	3 Laporan	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	55,012,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Laporan	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi penatausahaan keuangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	20,488,914,335					100 Persen	0	
3	29	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	136 Orang/ Bulan	20,125,126,435	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	136 Orang/ Bulan	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1 Dokumen	285,035,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	17,058,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	61,693,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Laporan	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas (komulatif tahun berjalan)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	140,281,400					100 Persen	0	
3	29	1	1	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	18,154,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	95,901,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	11,281,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Laporan	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	14,945,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Laporan	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.1	1	Administrasi Keppegawalan Perangkat Daerah	Jumlah pelanggaran disiplin ASN	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	167,599,500					0 Persen	0	
3	29	1	1.1	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Unit	20,032,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Unit	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.1	2	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	48,592,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Paket	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian kinerja Pegawai	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	1 Dokumen	39,075,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	5 Orang	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	29,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	10 Orang	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan barang	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	726,098,950					100 Persen	0	
3	29	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	1 Paket	34,984,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Paket	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	1 Paket	35,824,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Paket	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	1 Paket	36,533,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Paket	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	54,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Paket	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	92,330,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Paket	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Dokumen	24,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	1 Paket	1 Laporan	280,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Laporan	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3	29	1	1	1.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Dokumen	68,443,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	1	1	1.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Website	1 Website	1 Website	1 Dokumen	99,983,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	1	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terpenuhinya barang sesuai RKB	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	304,982,400						100 Persen	0		
3	29	1	1	1.1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50,274,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Paket	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	1	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5 Unit	254,708,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	5 Unit	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	1	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1,796,590,665						100 Persen	0		
3	29	1	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Laporan	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Laporan	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	1	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1 Laporan	262,980,905	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Laporan	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	1	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1,523,609,760	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	1 Laporan	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	1	1	1.1		Pemeliharaan Borang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD yang aktif untuk operasional Kantor yang dipelihara	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	692,048,000						100 Persen	0		
3	29	1	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perincian	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	69,478,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	6 Unit	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	1	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	129,120,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	3 Unit	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	1	1	1.1	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Website	3 Website	3 Website	3 Unit	15,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	3 Unit	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	1	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	322,415,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	2 Unit	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	1	1	1.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	71,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	2 Unit	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	1	1	1.1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	1 Unit	2 Unit	84,675,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar	2 Unit	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	2				PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	ZONA KONSERVASI AIR TANAH YANG DITETAPKAN	Dokumen			Dokumen	261,208,000							1 Dokumen	0	
3	29	2	1			Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	JUMLAH LUAS PEMETAAN ZONASI ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI	Laporan			1 Laporan	132,932,000							1 Laporan	0	
3	29	2	1	1		Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Dokumen	132,932,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	2	1			Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	JUMLAH PENETAPAN NILAI AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI	Laporan			1 Laporan	128,276,000							1 Laporan	0	
3	29	2	1	1		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul				1 Dokumen	128,276,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	3				PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Prosentase Luas Wilayah yang telah direklamasi oleh pemegang IUP	Persen		Persen	45 Persen	266,749,700							45 Persen	0	
							TOTAL PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SEKTOR PERTAMBANGAN	Milyar Rupiah		Milyar Rupiah	125 Milyar Rupiah									125 Milyar Rupiah	
3	29	3	1			Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Perizinan Pertambangan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan		Laporan	2 Laporan	198,406,300							2 Laporan	0	
3	29	3	1	4		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				1 Laporan	198,406,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	1 Laporan	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	3	1.1			Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	JUMLAH KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Laporan		Laporan	1 Laporan	68,343,400								1 Laporan	0
3	29	3	1.1	2		Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan				1 Dokumen	68,343,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	5				PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	JUMLAH PENURUNAN EMISI GRK DI SEKTOR ENERGI	TON CO2 EQ		TON CO2 EQ	12 TON CO2 EQ	94,069,700								12 TON CO2 EQ	0
3	29	5	1			Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	JUMLAH BADAN USAHA YANG MENGGUNAKAN BIOFUEL DI KALBAR	Badan Usaha		Badan Usaha	6 Badan Usaha	94,069,700								6 Badan Usaha	0

3	29	5	1	3	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyelesaian sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyelesaian sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Laporan	94,069,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Masyarakat dan Pemerintah	1 Laporan	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	6			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Prosentase Beauran Energi (%) Prosentase Desa Berlistrik (%) Rasio Penyedia dan Pemanfaat TENAGA LISTRIK NON PLN YANG MEMILIKI PERIZINAN KETENAGALISTRIKAN (%)	Persen Persen Persen	10 Persen 93 Persen 69 Persen	2.992.055.900				10 Persen 93 Persen 69 Persen	0				
3	29	6	1		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	JUMLAH REKOMTEK DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN OPERASI (IO)	Rekomtek	Rekomtek	30 Rekomtek	371,094,500			30 Rekomtek	0				
3	29	6	1	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	371,094,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat dan Pemerintah	1 Laporan	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	6	1.1		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	JUMLAH REKOMTEK IUJPTL DAN TERLAKSANA PENGAWASANNYA	Rekomtek	Rekomtek	15 Rekomtek	299,930,800			15 Rekomtek	0				
3	29	6	1.1	2	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	1 Dokumen	99,930,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat dan Pemerintah	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	6	1.1	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	1 Laporan	199,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat dan Pemerintah	1 Laporan	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	6	1.1		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	JUMLAH PENERIMA MANFAAT KELOMPOK TIDAK MAMPU, DAN PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PERDESAAN	Kecamatan	Kecamatan	5 Kecamatan	2.321.030,600			5 Kecamatan	0				
3	29	6	1.1	3	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Laporan	108,548,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	1 Laporan	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	6	1.1	4	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen	881,730,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	6	1.1	6	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	400 Unit	1.330.751,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	400 Unit	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	30				JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3.945.678.380					0				
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang difasilitasi	100 Persen	N/A	100 Persen	100 Persen	48,665,800			100 Persen	0			
3	30	2	1		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	laporan penerbitan SKA	1 Laporan	N/A	1 Laporan	1 Laporan	48,665,800			1 Laporan	0			
3	30	2	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	4100 Sertifikat	N/A	4000 Sertifikat	1 Dokumen	48,665,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Inflasi Bahan Makanan (%)	3,50 Persen	3,50 Persen	3,50 Persen	3,50 Persen	1.942.944,580			3,50 Persen	0			
3	30	4	1		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	rekomendasi pejaminan ketersediaan bakop	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	342,314,200			1 Laporan	0			
3	30	4	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	170,892,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	1 Laporan	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	4	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1 laporan	N/A	N/A	1 laporan	171,421,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	1 laporan	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	4	1		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	rekomendasi penjaminan ketersediaan bahan pokok dan bahan penting	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.531.610,380			1 Laporan	0			
3	30	4	1	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	233.331,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	1 Laporan	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	4	1	2	Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	33 Kali	4 Kali	11 kali	14 Laporan	1.298.279,280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	14 Laporan	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	4	1		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	jumlah laporan pengawasan pupuk bersubsidi	1 Laporan	n/a	n/a	1 Laporan	69,020,000			1 Laporan	0			
3	30	4	1	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	n/a	n/a	1 Laporan	29,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	1 Laporan	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	4	1	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	1 Laporan	n/a	n/a	1 Laporan	39,320,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	1 Laporan	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Kalbar (US\$ Juta)	1200 US\$ Juta	1616 US\$ Juta	1100 US\$ Juta	1200 US\$ Juta	680.672.900			1200 US\$ Juta	0			
3	30	5	1		Penyenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah even yang diikuti baik langsung maupun online dan rekomendasi kebijakan perdagangan luar negeri	6 Event dan 3 Dokumen	2 Event dan 1 Dokumen	2 Event dan 1 Dokumen	2 Event	680,672,900			2 Event	0			
3	30	5	1	1	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 Event	1 Event	1 Event	16 Pelaku Usaha	284,291,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	16 Pelaku Usaha	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	5	1	4	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	29 UKM	10 UKM	10 UKM	20 Produk	257,502,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	20 Produk	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3	30	5	1	5	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	12 Pertemuan	4 Pertemuan	4 Pertemuan	90 Pelaku Usaha	138,879,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	90 Pelaku Usaha	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indek Keberdayaan Konsumen	42 Point/Nilai	48,24 Point/Nilai	41 Point/Nilai	42 Point/Nilai	1,096,095,500						42 Point/Nilai	0	
3	30	6	1		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	terfasilitasinya konsumen dalam penyelesaian sengketa	39 Konsumen	40 Konsumen	13 Konsumen	13 Konsumen	887,248,100						13 Konsumen	0	
3	30	6	1	1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	12 Badan	4 Badan	4 Badan	4 BPSK	887,248,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	4 BPSK	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	6	1		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten / kota yang dilayani	1 Kab/Kota	N/A	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	208,847,400						1 Kab/Kota	0	
3	30	6	1	1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	1 Dokumen	N/A	1 Laporan	1 Laporan	208,847,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	1 Laporan	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	7			PROGRAM PENGUNJAMAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah perjanjian kerjasama antar daerah (Provinsi)	3 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	178,299,600						3 Dokumen	0	
3	30	7	1		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	frekuensi pelaksanaan promosi produk lokal	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	81,300,000						1 Tahun	0	
3	30	7	1	1	Facilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Didasarkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	12 Produk	N/A	10 Produk	8 UMKM	81,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	8 UMKM	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30	7	1		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	frekuensi kampanye konsumsi komoditi lokal	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	96,999,600						1 Tahun	0	
3	30	7	1	1	Facilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Didasarkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	1 Produk	1 Produk	1 Produk	10 UMKM	96,999,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	10 UMKM	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						2,518,702,700							0	
3	31	2			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase kontribusi industri unggulan (RPIP) kalbar terhadap total kontribusi industri pengolahan pada	90,5 Persen	90 Persen	90,2 Persen	90,3 Persen	2,221,008,700						90,3 Persen	0	
3	31	2	1		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	laporan capaian pelaksanaan pembangunan industri sesuai amanat RPIP	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,221,008,700						1 Laporan	0	
3	31	2	1	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	3 Dokumen	N/A	3 Dokumen	3 Dokumen	149,856,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	3 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	2	1	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	4 Perwilayahan	4 Perwilayahan	4 Perwilayahan	1 Dokumen	184,993,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	2	1	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	160 Orang	27 Orang	30 Orang	1 Dokumen	94,438,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	2	1	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	18 Kerjasama	2 Kerjasama	6 Kerjasama	1 Dokumen	73,024,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	2	1	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	300 IKM dan 120 Unit Usaha Industri	120 IKM	100 IKM dan 40 Unit Usaha Industri	1 Dokumen	1,618,706,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	2	1	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	99,989,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat dan Pemerintah	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	laporan pengendalian izin usaha industri yang diterbitkan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	77,861,400						1 Laporan	0	
3	31	3	1		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	laporan rekomendasi teknis yang diterbitkan	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	77,861,400						1 Dokumen	0	
3	31	3	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	77,861,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pelaku Industri dan Pemerintah	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	sistem data dan informasi yang dikelola	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	219,832,600						1 Sistem	0	
3	31	4	1		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAs)	laporan (sistem) yang dikelola	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	219,832,600						1 Sistem	0	
3	31	4	1	1	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAs)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAs)	1 Data Set	0 Data Set	1 Data Set	1 Dokumen	79,965,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pelaku Industri dan Pemerintah	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	4	1	2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAs	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAs	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	39,882,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pelaku Industri dan Pemerintah	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	31	4	1	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAs	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAs	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99,985,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pelaku Industri dan Pemerintah	1 Dokumen	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3,845,699,280							6,410,000,000	
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan procedure/tepat waktu	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	2,705,754,680						100 persen	5,210,000,000	
3	30	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	115,000,000						100 persen	142,000,000	
3	30	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	23,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	UptSmb Disperindag ESDM Prov. Kalbar	1 Dokumen	32,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3	30	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Upt.Psmb Disperindag ESDM Prov. Kalbar	1 Dokumen	25,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	30	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	n/a	n/a	1 Dokumen	16,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Upt.Psmb Disperindag ESDM Prov. Kalbar	1 Dokumen	20,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	30	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Upt.Psmb Disperindag ESDM Prov. Kalbar	1 Dokumen	25,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	30	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	16,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Upt.Psmb Disperindag ESDM Prov. Kalbar	1 Dokumen	20,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	30	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	16,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Upt.Psmb Disperindag ESDM Prov. Kalbar	1 Laporan	20,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	30	1	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Penatausahaan keuangan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	188,100,000							100 persen	201,000,000	
3	30	1	1	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Durasi pemenuhan administrasi kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	7,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Upt.Psmb Disperindag ESDM Prov. Kalbar	12 bulan	10,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen								1 Dokumen		
3	30	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	130,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Upt.Psmb Disperindag ESDM Prov. Kalbar	1 Dokumen	131,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
						Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang								9 orang		
3	30	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	34,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Upt.Psmb Disperindag ESDM Prov. Kalbar	1 Laporan	40,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	30	1	1	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	n/a	n/a	1 Dokumen	16,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Upt.Psmb Disperindag ESDM Prov. Kalbar	1 Dokumen	20,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	30	1	1	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi penatausahaan barang	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	42,000,000							100 persen	50,000,000	
3	30	1	1	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	21,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Upt.Psmb Disperindag ESDM Prov. Kalbar	1 Dokumen	25,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	30	1	1	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	n/a	1 Dokumen	1 Laporan	21,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Upt.Psmb Disperindag ESDM Prov. Kalbar	1 Laporan	25,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	30	1	1.1	1	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawalan dan kompetensi pegawai	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	151,500,000							100 persen	315,000,000	
3	30	1	1.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	1 Dokumen	n/a	2 Dokumen	1 Dokumen	16,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Upt.Psmb Disperindag ESDM Prov. Kalbar	1 Dokumen	20,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	30	1	1.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	6 Orang	25 Orang	10 Orang	115,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Upt.Psmb Disperindag ESDM Prov. Kalbar	10 Orang	150,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	30	1	1.1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	45 Orang	45 Orang	50 Orang	5,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Upt.Psmb Disperindag ESDM Prov. Kalbar	50 Orang	20,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	30	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	15 Orang	15 Orang	3 Orang	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Upt.Psmb Disperindag ESDM Prov. Kalbar	0 Orang	50,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	n/a	n/a	n/a	n/a								3 Orang		
3	30	1	1.1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kelancaran Administrasi dan Penunjang Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	231,025,000							1 Tahun	282,000,000	
3	30	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14 Jenis	14 Jenis	1 Paket	24,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Upt.Psmb Disperindag ESDM Prov. Kalbar	1 Paket	30,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	30	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32 Jenis	32 Jenis	1 Paket	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Upt.Psmb Disperindag ESDM Prov. Kalbar	1 Paket	75,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	30	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10 Jenis	10 Jenis	1 Paket	41,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Upt.Psmb Disperindag ESDM Prov. Kalbar	1 Paket	45,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	30	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	360 Buah	360 Buah	1 Paket	33,840,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Upt.Psmb Disperindag ESDM Prov. Kalbar	1 Paket	35,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	30	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11 Jenis	11 Jenis	1 Paket	40,655,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Upt.Psmb Disperindag ESDM Prov. Kalbar	1 Paket	45,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	30	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Jenis	1000 Eksemplar	1 Dokumen	1,530,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Upt.Psmb Disperindag ESDM Prov. Kalbar	1 Dokumen	2,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	30	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Upt.Psmb Disperindag ESDM Prov. Kalbar	3 Laporan	50,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	



4	1	1	1	1	2	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	174,946,875	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Paket	175,196,875	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR		
4	1	1	1	1		Administrasi Umum Perangkat Daerah						2,722,210,160						2,750,209,710			
4	1	1	1	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	316,937,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Paket	316,937,850	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR		
4	1	1	1	1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	230,538,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Paket	225,442,400	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR		
4	1	1	1	1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	351,852,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 Paket	350,366,600	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR		
4	1	1	1	1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	274,680,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7 Paket	290,420,900	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR		
4	1	1	1	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	1,548,201,960	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Laporan	1,567,041,960	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR		
4	1	1	1	1	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						377,536,100						791,374,600			
4	1	1	1	1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	64,424,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Paket	64,496,900	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR		
4	1	1	1	1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				27 Unit	182,245,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27 Unit	182,245,500	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR		
4	1	1	1	1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	130,865,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Unit	130,866,400	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR		
4	1	1	1	1	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5,392,370,404						5,381,879,790			
4	1	1	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	31,264,004	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	15,628,950	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR		
4	1	1	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	3,243,200,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 Laporan	3,243,200,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR		
4	1	1	1	1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	124,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	109,700,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR		
4	1	1	1	1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,993,906,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	2,013,350,840	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR		
4	1	1	1	1	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4,680,535,766						4,699,382,363			
4	1	1	1	1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya				6 Unit	633,114,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6 Unit	642,535,359	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR		
4	1	1	1	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perincian				42 Unit	1,520,181,904	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			42 Unit	1,529,602,404	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR		
4	1	1	1	1	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	52,046,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Unit	52,047,800	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR		
4	1	1	1	1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	947,607,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Unit	947,612,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR		
4	1	1	1	1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1,046,518,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Unit	1,046,518,700	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR		
4	1	1	1	1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	481,066,062	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Unit	481,066,100	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR		
4	1	1	1	1	1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						4,457,698,841						4,458,698,841			
4	1	1	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	276,571,806	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Orang/Bulan	276,571,806	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR		
4	1	1	1	1	2	Penyediaan Pakalan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakalan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	131,380,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Paket	132,380,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR		
4	1	1	1	1	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8 Orang	48,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8 Orang	48,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR		
4	1	1	1	1	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/ Bulan	4,001,747,035	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Orang/ Bulan	4,001,747,035	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR		
4	1	1	1	1	1	Facilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						9,290,755,950						9,314,876,567			
4	1	1	1	1	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				20 Paket	1,837,566,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20 Paket	1,861,686,735	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR		
4	1	1	1	1	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				20 Paket	1,402,957,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20 Paket	1,402,957,485	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR		
4	1	1	1	1	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				100 Paket	6,050,232,050	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100 Paket	6,050,232,347	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR		
4	1	1	1	1	1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	1	1	1	1	1	SEKRETARIAT DAERAH						3,176,397,121						5,225,036,021			
4	1	1	1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						643,698,393						713,652,251			
4	1	1	1	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						128,071,700						138,610,670			
4	1	1	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	24,457,500	Seltda Prov. Kalba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan	1 Dokumen	25,142,810	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25,172,200	Seltda Prov. Kalba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan	1 Dokumen	26,713,280	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	24,933,600	Seltda Prov. Kalba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan	1 Dokumen	26,713,280	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR

4	1	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	27,523,100	Setda Prov. Kalba	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan	1 Laporan	31,667,020	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	25,985,300	Setda Prov. Kalba	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan	3 Laporan	28,374,280	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan tahunan					102,706,600							112,977,260	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	102,706,600	Setda Prov. Kalba	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan	2 Laporan	112,977,260	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan kepegawaian					57,602,000							37,019,840	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	2	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakalan dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	-	-	1 Paket	27,875,600	Setda Prov. Kalba	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Biro Pemerintahan	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	29,726,400	Setda Prov. Kalba	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Biro Pemerintahan	1 Dokumen	37,019,840	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum					151,852,173							219,185,441	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket			1 Paket	16,761,880	Setda Prov. Kalba	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan	1 Paket	20,168,600	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,085,993	Setda Prov. Kalba	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan	1 Laporan	160,512,111	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1	106	11 Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	35,004,300	Setda Prov. Kalba	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan	1 Dokumen	38,504,730	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	130,465,920							122,939,040	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	130,465,920	Setda Prov. Kalba	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan	1 Laporan	122,939,040	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	73,000,000							82,920,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	1	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	10 Buah	4 Unit	4 Unit	49,000,000	Setda Prov. Kalba	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan	4 Unit	56,520,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	1	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	60 Unit	60 Unit	60 Unit	60 Unit	24,000,000	Setda Prov. Kalba	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan	60 Unit	26,400,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	3			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						2,532,698,728							4,511,383,770	
4	1	3	1		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	629,375,200	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Provinsi, Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1,362,243,059	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	3	1	2	Facilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan pemerintahan umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	114,871,800	Pontianak	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Provinsi, Kabupaten/Kota	1 Dokumen	365,040,449	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	3	1	3	Facilitasi Penataan Wilayah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penataan wilayah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	119,389,100	Pontianak	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Provinsi, Kabupaten/Kota	3 Dokumen	363,555,675	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	3	1	1	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan otonomi daerah					1,198,788,228							1,820,105,286	
4	1	3	1	1	Facilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	278,286,800	Pontianak	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kementerian Terkait, Dinas/Instansi Provinsi Terkait, Dinas/Instansi Daerah Kab/Kota terkait	3 Dokumen	418,581,260	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	3	1	2	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah dokumen hasil pengembangan otonomi dan penataan urusan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	674,823,428	Pontianak	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kementerian Terkait, Dinas/Instansi Provinsi Terkait, Dinas/Instansi Daerah Kab/Kota terkait	4 Dokumen	969,657,142	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	3	1	3	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan hasil evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	245,678,000	Pontianak	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kementerian Terkait, Dinas/Instansi Provinsi Terkait, Dinas/Instansi Daerah Kab/Kota terkait	4 Dokumen	431,866,884	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	3	1	1	Facilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah laporan kerja sama daerah					704,535,300							1,329,035,425	
4	1	3	1	1	Facilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah kerjasama antar pemerintah yang difasilitasi	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	478,303,400	Pontianak	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kementerian Terkait, Dinas/Instansi Provinsi Terkait, Dinas/Instansi Daerah Kab/Kota terkait	15 Dokumen	811,900,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	3	1	2	Facilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah kerjasama badan usaha / swasta yang difasilitasi	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	112,491,900	Pontianak	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kementerian Terkait, Dinas/Instansi Provinsi Terkait, Dinas/Instansi Daerah Kab/Kota terkait	15 Dokumen	254,358,275	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	3	1	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah kerjasama yang dievaluasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	113,740,000	Pontianak	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kementerian Terkait, Dinas/Instansi Provinsi Terkait, Dinas/Instansi Daerah Kab/Kota terkait	1 Laporan	262,777,150	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH						3,176,397,121							5,225,036,021	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						643,698,393							713,652,251	
4	1	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						128,071,700							138,610,670	
4	1	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	24,457,500	Setda Prov. Kalba	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan	1 Dokumen	25,142,810	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25,172,200	Setda Prov. Kalba	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan	1 Dokumen	26,713,280	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	24,933,600	Setda Prov. Kalba	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan	1 Dokumen	26,713,280	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	27,523,100	Setda Prov. Kalba	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan	1 Laporan	31,667,020	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	25,985,300	Setda Prov. Kalba	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan	3 Laporan	28,374,280	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan tahunan					102,706,600							112,977,260	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	102,706,600	Setda Prov. Kalba	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan	2 Laporan	112,977,260	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan kepegawaian					57,602,000							37,019,840	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	2	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakalan dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	-	-	1 Paket	27,875,600	Setda Prov. Kalba	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Biro Pemerintahan	1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	29,726,400	Setda Prov. Kalba	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Biro Pemerintahan	1 Dokumen	37,019,840	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum					151,852,173							219,185,441	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket			1 Paket	16,761,880	Setda Prov. Kalba	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan	1 Paket	20,168,600	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,085,993	Setda Prov. Kalba	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan	1 Laporan	160,512,111	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1	106	11 Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	35,004,300	Setda Prov. Kalba	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan	1 Dokumen	38,504,730	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	130,465,920							122,939,040	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	130,465,920	Setda Prov. Kalba	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan	1 Laporan	122,939,040	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	



4	1	2	1	3	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				1 Dokumen	17,886,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		0	1 Dokumen		0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	2	1		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang D diselesaikan Tepat Waktu	%		%	100 %	326,556,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,					100 %		0		
4	1	2	1	1	Pembiayaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	84,002,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1 Dokumen		0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	2	1	2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				1 Dokumen	80,295,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1 Dokumen		0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	2	1	3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	71,758,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1 Laporan		0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	2	1	5	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				1 Dokumen	90,500,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1 Dokumen		0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	5			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Pelaksanaan Monev atas Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan Ketentuan	%		%	100 %	2,039,754,380						100 %		915,288,138		
						Persentase Peraturan Perundang-Undangan Provinsi yang di Terbitkan Sesuai SOP	%		%	100 %								100 %			
						Persentase Produk Hukum Daerah yang di Dokumentasikan dan di Publikasikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	%		%	100 %								100 %			
4	1	5	1		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perundang undangan	%		%	100 %	1,292,786,280							100 %		0	
4	1	5	1	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				80 Dokumen/Produk Hukum	287,142,880	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota		80 Dokumen/Produ k Hukum		0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	5	1	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				1700 Dokumen	164,105,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota		1700 Dokumen		0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	5	1	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasikan dan Dikelola Informasinya				7 Dokumen	347,657,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota		7 Dokumen		0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	5	1	4	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				139 Dokumen/Produ k Hukum	493,880,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota		139 Dokumen/Produ k Hukum		0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	5	1		Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Bantuan Hukum yang Difasilitasi	%		%	100 %	746,968,100							100 %		915,288,138	
4	1	5	1	1	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang D diselesaikan				17 Kasus	483,484,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Orang/Kelompok Masyarakat dan Organisasi		17 Kasus	651,804,120		SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	5	1	2	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang D diselesaikan				12 Kasus	263,483,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Orang/Kelompok Masyarakat dan Organisasi		12 Kasus	263,484,018		SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1				SEKRETARIAT DAERAH						88,791,796,206								48,275,534,341		
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu	persen		persen	100 persen	1,182,547,930							100 persen		1,305,012,687	
4	1	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu	%		%	100 %	82,788,500							100 %		94,544,219	
4	1	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (berupa dokumen RKA-SKPD dan dokumen perubahan RKA- SKPD)				2 Dokumen	21,607,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		2 Dokumen	23,768,888		SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (berupa DPA dan DPPA SKPD)				2 Dokumen	21,859,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		2 Dokumen	27,521,219		SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
														Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah							
4	1	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	39,322,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		5 Laporan	43,254,112		SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						132,341,700									132,379,148	
4	1	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	25,181,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1 Dokumen	27,699,870		SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	53,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1 Dokumen	52,339,639		SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	53,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			12 Laporan	52,339,639		SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		%		%	100 %	73,586,100							100 %		46,075,348	
4	1	1	1	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	20,943,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	barang milik daerah pada perangkat daerah		2 Laporan	23,037,674		SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	52,643,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	barang milik daerah pada perangkat daerah		12 Laporan	23,037,674		SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%		%	100 %	184,781,450							100 %		262,581,022	
4	1	1	1.1	2	Pengadaan Pakalan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya				0 Paket	90,454,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	administrasi kepegawaian perangkat daerah		0 Paket	163,243,168		SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
										93 Paket								93 Paket			
4	1	1	1.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				40 Dokumen	13,513,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	administrasi kepegawaian perangkat daerah		40 Dokumen	18,362,960		SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1.1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				35 Dokumen	59,870,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	administrasi kepegawaian perangkat daerah		35 Dokumen	57,937,220		SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian kinerja Pegawai				35 Dokumen	20,943,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	administrasi kepegawaian perangkat daerah		35 Dokumen	23,037,674		SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah						306,955,760								228,543,348		
4	1	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	217,974,460		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			12 Laporan	152,243,168		SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	16,693,600			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4 Dokumen	18,362,960		SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	

4	1	1	1	1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			12 Dokumen	72,287,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	57,937,220	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1	1	11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi yang baik	%	%	100 %	154,618,100			100 %	194,243,478	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1	1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			11 Unit	154,618,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	barang milik daerah	11 Unit	194,243,478	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	1	1.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	orang	orang	4 orang	138,995,720			4 orang	176,584,980	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1	1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	138,995,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PTT di lingkungan Perangkat Daerah	12 Laporan	176,584,980	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	1	1.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					108,480,600					170,061,144	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	1	1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 Unit	24,140,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		2 Unit	26,555,144	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			30 Unit	32,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		30 Unit	33,506,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	1	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			0 Unit	52,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		0 Unit	110,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	4				PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			2 Unit					2 Unit		
4	1	4					Persentase Rumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	persen	persen	100 persen	87,609,248,276				100 persen	46,970,521,654	
4	1	4	1			Facilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan Bidang Fasilitas Bina Mental Spiritual	Dokumen	Dokumen	8 Dokumen	67,615,299,600				8 Dokumen	32,628,024,272	
4	1	4	1	1		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola			500 Unit	63,080,908,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Kab/Kota, Dinas/Badan/Organisasi Terkait dan Masyarakat	500 Unit	27,324,583,772	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	4	1	2		Facilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi			6 Lembaga	4,534,391,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Kab/Kota, Dinas/Badan/Organisasi Terkait dan Masyarakat	6 Lembaga	5,303,440,500	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	4	1			Facilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Dokumen	Dokumen	5 Dokumen	11,709,837,850				5 Dokumen	13,034,798,425	
4	1	4	1	1		Facilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	7,230,684,750		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Kab/Kota, Dinas/Badan/Organisasi terkait dan masyarakat	1 Dokumen	8,045,479,805	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	4	1	2		Facilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	5 Dokumen		5 Dokumen	280,619,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Kab/Kota, Dinas/Badan/Organisasi terkait dan masyarakat	5 Dokumen	335,379,880	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	4	1	3		Facilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	2 Dokumen		2 Dokumen	4,198,533,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Kab/Kota, Dinas/Badan/Organisasi terkait dan masyarakat	2 Dokumen	4,653,938,740	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	4	1			Facilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Dokumen	Dokumen	7 Dokumen	8,284,110,826				7 Dokumen	1,307,698,956	
4	1	4	1	1		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1 Dokumen		1 Dokumen	7,441,011,426	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Kab/Kota, Dinas/Badan/Instansi/Organisasi Terkait dan Masyarakat	1 Dokumen	315,924,620	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	4	1	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6 Dokumen		6 Dokumen	843,099,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Kab/Kota, Dinas/Badan/Instansi/Organisasi Terkait dan Masyarakat	6 Dokumen	991,774,336	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH					1,867,300,922					2,054,031,014	
4	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Perencanaan kinerja dan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	%	%	100 %	458,078,332				100 %	503,886,165	
4	1	1	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	Dokumen	6 Dokumen	96,810,900				6 Dokumen	106,491,990	
4	1	1	1	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	22,665,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 1 Dokumen	24,931,940	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	16,274,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 1 Dokumen	17,901,840	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	16,274,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		0 1 Dokumen	17,901,840	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	17,139,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 1 Laporan	18,853,780	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Laporan	24,456,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 2 Laporan	26,902,590	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	Laporan	1 Laporan	38,148,800				1 Laporan	41,963,680	
4	1	1	1	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			1 Laporan	38,148,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 1 Laporan	41,963,680	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	Laporan	1 Laporan	15,160,800				1 Laporan	16,676,880	
4	1	1	1	6		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	15,160,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 1 Laporan	16,676,880	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Barang	%	%	100 %	127,004,872				100 %	139,705,959	
4	1	1	1	1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	19,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 3 Paket	21,312,500	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	13,199,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 2 Paket	14,519,340	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			33 Laporan	61,004,372	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 33 Laporan	67,104,809	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
												Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan,					
												Kec. Caturtunggal, Semua Kecamatan,					
												Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,					



4	1	6	1	2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	0 Dokumen	74,924,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Dokumen	82,416,840	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen						1	1 Dokumen		
4	1	6	1	4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD	1 Dokumen	93,871,700	Kota Singkawang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0	1 Dokumen	103,258,870	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	1				SEKRETARIAT DAERAH			7,664,275,216							16,076,166,795	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Tugas Sesuai Standar	%	100 %	1,264,822,556				100 %		2,136,166,795	
4	1	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Keuangan Tepat waktu, % Laporan Kinerja Yang Disusun Tepat	%	100 %	149,632,700				100 %		200,884,197	
4	1	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	22,106,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar	1	1	1 Dokumen	39,260,171	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20,536,100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar	1	1	1 Dokumen	37,077,622	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20,649,100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar	1	1	1 Dokumen	20,732,734	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20,644,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar	1	1	1 Dokumen	20,848,595	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20,433,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar	1	1	1 Dokumen	20,625,472	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	34,958,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar	2	2	2 Laporan	40,921,816	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	10,304,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar	2	2	2 Laporan	21,417,787	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan, % pemenuhan Tindakan/lanjutan hasil pemeriksaan	%	100 %	107,994,400				100 %		57,763,965	
4	1	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	21,686,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar	1	1	1 Laporan	21,593,243	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	86,307,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar	4	4	4 Laporan	36,170,722	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100 %	21,595,700				100 %		24,500,000	
4	1	1	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	21,595,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar	1	1	1 Laporan	24,500,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1.1		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	% Pelayanan Administrasi Kepegawalan Sesuai Prosedur, % ASN Yang Mengisi Data ASN, % ASN Yang Menyusun dan Melsaporkan Kinerja Tepat Waktu, % Pengembangan Kompetensi Pegawai Sesuai Dengan Perencanaan	%	100 %	54,145,700				100 %		46,688,633	
4	1	1	1.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	2 Dokumen	54,145,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar	2	2	2 Dokumen	46,688,633	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Barang, % Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Dikelola Dengan Baik, % Tertib Pengelolaan Arsip	%	100 %	509,063,362				100 %		543,000,000	
4	1	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21,552,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar	1	1	1 Paket	33,500,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	15,314,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar	3	3	3 Paket	18,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	28,800,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar	12	12	12 Paket	60,500,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10,442,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar	2	2	2 Paket	12,500,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	359,307,462	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar	32	32	32 Laporan	330,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1.1	11	Dukungan Peternakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Peternakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	73,647,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar	1	1	1 Dokumen	88,500,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas (Komulatif Tahun Berjalan)	%	100 %	100,792,600				100 %		689,800,000	
4	1	1	1.1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	7,500,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar	2	2	2 Paket	70,500,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	93,292,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar	18	18	18 Unit	619,300,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintahan Daerah	%	100 %	54,600,000				100 %		267,600,000	
4	1	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	54,600,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar	12	12	12 Laporan	267,600,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BMD Dalam Kondisi Baik	%	100 %	266,998,094				100 %		305,930,000	
4	1	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41,450,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar	1	1	1 Unit	41,450,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR

4	1	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	43,675,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar	4 Unit	45,180,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1.1	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			0 Unit	23,772,894	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar	0 Unit	24,800,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
						Jumlah Mebel yang Dipelihara			24 Unit							24 Unit		
4	1	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0 Unit	158,099,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar	0 Unit	194,500,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 Unit							5 Unit		
4	1	7			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Capaian Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	%		%	85 %	6,399,452,660					85 %	13,940,000,000	
						Persentase Capaian Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	%		%	7 %						7 %		
4	1	7	1		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelayanan Pemilih Penyedia Barang/Jasa Yang Tepat Waktu	%		%	70 %	538,553,780					70 %	2,100,000,000	
4	1	7	1	1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa			3 Laporan	136,633,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	3 Laporan	600,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	7	1	2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			300 Laporan	195,072,680	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	300 Laporan	900,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	7	1	3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa			12 Laporan	206,847,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	600,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	7	1		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Realisasi Pengadaan Barang/Jasa	Paket		Paket	10000 Paket	1,102,169,300					10000 Paket	7,440,000,000	
4	1	7	1	1	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik			1 Laporan	697,411,840	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	7	1	2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			1 Laporan	204,219,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	740,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	7	1	3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			1 Laporan	200,538,260	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	700,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	7	1		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kompetensi SDM PBI dan Pelaku Usaha yang dilakukan Pembinaan	UKPBJ		UKPBJ	14 UKPBJ	4,758,729,580					14 UKPBJ	9,400,000,000	
4	1	7	1	1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa			53 Orang	132,710,100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SDM Pengadaan Barang/Jasa, Pelaku Usaha & UKPBJ Kab/Kota	53 Orang	600,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	7	1	2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa			1 Dokumen	4,239,016,280	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SDM Pengadaan Barang/Jasa, Pelaku Usaha & UKPBJ Kab/Kota	1 Dokumen	8,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	7	1	3	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa			1 Dokumen	387,003,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SDM Pengadaan Barang/Jasa, Pelaku Usaha & UKPBJ Kab/Kota	1 Dokumen	800,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					1,853,995,443							2,231,657,736	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH													
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	453,470,642					100 Persen	565,948,966	
4	1	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	94,010,300					2 Dokumen	127,207,300	
4	1	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	20,052,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	44,886,600	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	13,991,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	16,463,480	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	13,726,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	16,775,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	13,402,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	16,225,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan	24,780,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	2 Laporan	22,951,280	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	8,056,000	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan	9,905,940	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Laporan		Laporan	5 Laporan	34,009,100					5 Laporan	32,035,960	
						Jumlah Laporan Keuangan	Laporan		Laporan	5 Laporan						5 Laporan		
4	1	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	1,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penatausahaan dan Pemenuhan Laporan Keuangan PD	1 Dokumen	1,980,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			5 Laporan	32,209,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penatausahaan dan Pemenuhan Laporan Keuangan PD	5 Laporan	30,055,960	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diamankan	Unit		Unit	1 Unit	22,349,300					1 Unit	26,894,450	
						Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen						100 Persen		
4	1	1	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana	1 Dokumen	3,300,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	19,349,300	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana	1 Laporan	23,594,450	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Barang Perangkat Daerah	Paket		Paket	360 Paket	150,963,800					360 Paket	241,756,570	
4	1	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			360 Paket	21,600,000	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	360 Paket	23,760,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	2,640,000	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	6,600,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	25,330,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	107,445,570	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR

4	1	1	1.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	31,327,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	15,950,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	70,066,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	88,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan pelayanan	Bulan		Bulan		12 Bulan	66,257,460						12 Bulan	72,054,686	
4	1	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	66,257,460	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	meningkatkan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	72,054,686	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	Unit		Unit		37 Unit	85,880,682						37 Unit	66,000,000	
4	1	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					2 Unit	27,138,682	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2 Unit	27,500,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					35 Unit	58,742,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	35 Unit	38,500,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	8			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Kab/Kota Dalam Ketepatan Sasaran Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Persen		Persen		100 Persen	1,400,524,800						100 Persen	1,665,708,770	
						Persentase Perangkat Daerah Dalam Ketepatan Sasaran Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persen		Persen		100 Persen								100 Persen	
						Persentase Perangkat Daerah Dalam Tingkat Kepuasan Pada Sistem Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persen		Persen		100 Persen								100 Persen	
4	1	8	1		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen		Dokumen		3 Dokumen	686,504,200						3 Dokumen	832,264,400	
4	1	8	1	1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD					1 Laporan	141,275,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	160,644,660	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	8	1	2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN					1 Laporan	134,965,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	158,973,320	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	8	1	3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah					3 Laporan	410,263,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat	3 Laporan	512,646,420	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	
4	1	8	1		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen		Dokumen		3 Dokumen	714,020,600						3 Dokumen	833,444,370	
4	1	8	1	1	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan					1 Dokumen	145,799,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Mewujudkan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Sasaran melalui Pelaporan yang Tepat Waktu	1 Dokumen	175,029,580	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	8	1	2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah					1 Laporan	317,578,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Mewujudkan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Sasaran melalui Pelaporan yang Tepat Waktu	1 Laporan	369,492,200	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	8	1	3	Facilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah					1 Dokumen	250,642,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Mewujudkan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan yang Tepat Sasaran melalui Pelaporan yang Tepat Waktu	1 Dokumen	288,922,590	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	1				SEKRETARIAT DAERAH							2,699,807,713							3,095,176,796	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							751,472,053							839,176,796	
4	1	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							109,217,250							182,002,596	
4	1	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	23,026,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	1 Dokumen	27,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR					
4	1	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	23,046,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	1 Dokumen	27,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR					
4	1	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,745,004	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	1 Dokumen	6,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR					
4	1	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,846,246	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	1 Dokumen	6,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR					
4	1	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	21,902,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	1 Dokumen	26,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR					
4	1	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	17,516,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	2 Laporan	75,002,596	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR					
4	1	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	12,133,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	1 Laporan	15,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR					
4	1	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							87,386,800							95,000,000	
4	1	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	87,386,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	5 Laporan	95,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR					
4	1	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							28,850,800							35,000,000	
4	1	1	1	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	28,850,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	5 Laporan	35,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR					
4	1	1	1.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							201,151,760							182,764,200	
4	1	1	1.1	3	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	11,394,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	2 Dokumen	12,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR					
4	1	1	1.1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	95,073,360	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	1 Dokumen	96,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR					
4	1	1	1.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian kinerja Pegawai	12 Dokumen	94,684,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	12 Dokumen	34,764,200	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR					
4	1	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah							202,705,443							303,000,000	
4	1	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1600 Paket	49,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	1600 Paket	48,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR					
4	1	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	2 Paket	11,178,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	2 Paket	10,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR					

4	1	1	1.1	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	1 Paket	25,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	72,026,643		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	19 Laporan	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	1 Dokumen	120,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					122,160,000							81,410,000	
4	1	1	1.1	2	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	3,600,000	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	2 Unit	2,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	111 Unit	111 Unit	111 Unit	111 Unit	118,560,000	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	111 Unit	79,410,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	2			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					1,948,335,660							2,256,000,000	
4	1	2	1		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					652,351,360							757,000,000	
4	1	2	1	1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Data Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang ter-update	0	1 Data Set Kelembagaan			202,614,800	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	1 Data Set Kelembagaan	260,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
						Jumlah Rancangan Peraturan daerah		1 Perda				Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	1 Raperda		
						Jumlah Rancangan Peraturan Gubernur Tupoksi Perangkat daerah Provinsi Kalbar yang disusun		46 Pergub	2 Rapergub	2 Rapergub		Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	2 Rapergub		
						Jumlah UPT yang dilakukan Penataan		33 Pergub UPT	2 Rapergub	2 Rapergub UPT		Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	2 Rapergub UPT		
4	1	2	1	2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan kelembagaan Kabupaten/Kota			1 Dokumen		240,157,200	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	0 Dokumen	248,500,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
						Jumlah Dokumen/Laporan Kesepakatan Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia		1 Dokumen		1 Dokumen		Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	1 Dokumen		
						Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan penataan Perangkat Daerah		14 Kabupaten/ Kota	14 Kabupaten/ Kota	14 Kabupaten/ Kota		Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	14 Kabupaten/ Kota		
						Jumlah Kab/ Kota yang dilakukan pengendalian penataan Perangkat Daerah		14 Kabupaten/ Kota	14 Kabupaten/ Kota	14 Kabupaten/ Kota		Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	14 Kabupaten/ Kota		
						Jumlah peserta yang mengikuti Rakortek bidang organisasi se Kalbar		80 Peserta	80 Peserta	80 Peserta		Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	80 Peserta		
						Jumlah Rekomendasi Penilaian Tingkat Kematangan Penataan Perangkat Daerah Kab/ Kota			8 Rekomendasi	1 Rekomendasi		Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	1 Rekomendasi		
						Jumlah Rekomendasi yang dilakukan evaluasi penataan Perangkat Daerah dan UPTD Kab/Kota			7 Rekomendasi	4 Rekomendasi		Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	4 Rekomendasi		
4	1	2	1	3	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	84 Dokumen	18 Dokumen	8 Dokumen		209,579,360	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	0 Dokumen	248,500,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
						Jumlah dokumen Peta Jabatan penyederhanaan birokrasi yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Administrasi Perangkat Daerah yang terverifikasi	4 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen			Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	6 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Standar Kompetensi JPT Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	4 Dokumen		
4	1	2	1		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					1,295,984,300							1,499,000,000	
4	1	2	1	1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			1 Dokumen		225,080,560	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	0 Dokumen	275,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
						Jumlah kab/kota yang di bina	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	5 Kabupaten/Kota			Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	5 Kabupaten/Kota		
						Jumlah Laporan Data Aplikasi Prima yang terupdate		1 Laporan	1 Laporan			Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	1 Laporan		
						Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	1 Laporan		
						Jumlah PD yang dibina	10 PD	46 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah			Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	15 Perangkat Daerah		
						Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi / Internalisasi Road Map RB Pemprov Kalbar	100 Peserta	100 Peserta	100 Peserta			Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	100 Peserta		
4	1	2	1	2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			1 Dokumen		278,130,480	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	0 Dokumen	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
						Jumlah dokumen perjakan Pemprov kalbar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	1 Dokumen		
						Jumlah kab/kota yang di bina	2 Kab/Kota	5 Kabupaten/ Kota	4 Kabupaten/Kota			Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	4 Kabupaten/Kota		
						Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemprov yang disusun		1 Laporan	1 Laporan			Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	1 Laporan		
						Jumlah perangkat daerah yang diasistensi	47 PD	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah			Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	45 Perangkat Daerah		
						Jumlah perangkat daerah yang di move	47 PD	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah			Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar	45 Perangkat Daerah		



4	1	1	1	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			100%		1 Laporan	51,586,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur Pemerintah Biro Umum Setda Prov. Kalbar	1 Laporan	51,594,483	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100%		3 Laporan	1,412,836,953	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur Pemerintah Biro Umum Setda Prov. Kalbar	3 Laporan	1,470,845,079	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	1	Facilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				100%			185,235,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur Pemerintah Biro Umum Setda Prov. Kalbar	1 Paket	185,237,486	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			100%		1 Dokumen	185,235,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur Pemerintah Biro Umum Setda Prov. Kalbar	1 Paket	185,237,486	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR
4	1	1	1		UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH							4,609,995,019							4,706,300,479	
4	1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							4,609,995,019							4,706,300,479	
4	1	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9 Dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	220,417,586		Provinsi Kalimantan Barat		243,653,523	
4	1	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	65,284,378		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		2 Dokumen	65,284,378	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4	1	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	31,171,642		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		4 Dokumen	31,466,973	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4	1	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		0 Dokumen	4,198,600	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4	1	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	69,224,021		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		2 Laporan	88,966,027	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4	1	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	53,737,545		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Laporan	53,737,545	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4	1	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							18,507,100							18,507,100	
4	1	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	17 Laporan	18,507,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		17 Laporan	18,507,100	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4	1	1	1	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							216,642,438							347,642,438	
4	1	1	1	3	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40 Dokumen	122,642,438		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		40 Dokumen	122,642,438	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4	1	1	1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		15 Orang	125,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4	1	1	1	11	Bimbingan Teknis (Implementasi Peraturan Perundang-Undangan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis (Implementasi Peraturan Perundang-Undangan)	60 Orang	19,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		60 Orang	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4	1	1	1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah							616,649,114							724,670,933	
4	1	1	1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	554.288 Paket	277,144,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		554.288 Paket	323,955,191	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4	1	1	1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5,041,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Paket	5,044,776	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4	1	1	1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1644 Dokumen	158,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1644 Dokumen	192,360,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4	1	1	1	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 Laporan	38,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		100 Laporan	38,400,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4	1	1	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	80,613,514		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		100 Laporan	95,613,514	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4	1	1	1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	57,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	69,297,452	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4	1	1	1	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							683,106,334							683,106,334	
4	1	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		12 Laporan	6,750,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4	1	1	1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	22 Laporan	676,356,334		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		22 Laporan	676,356,334	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4	1	1	1	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							64,278,000							64,578,000	
4	1	1	1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakajnya	1 Unit	34,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Unit	34,160,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4	1	1	1	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Unit	3,300,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4	1	1	1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	27 Unit	27,118,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		27 Unit	27,118,000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4	1	1	1	1	Facilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan							2,059,271,047							1,540,570,575	
4	1	1	1	1	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	150 Dokumen	126,347,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		150 Dokumen	272,408,800	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4	1	1	1	2	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	100 Laporan	1,106,190,247		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		100 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4	1	1	1	3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	110 Laporan	826,733,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		110 Laporan	1,268,161,775	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4	1	1	1	1	Facilitasi Keprotokolan							731,123,400							1,083,571,576	
4	1	1	1	1	Facilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi pelaksanaan Acara	150 Laporan	216,375,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		150 Laporan	314,675,705	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4	1	1	1	2	Facilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	150 Laporan	111,358,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		150 Laporan	180,634,557	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4	1	1	1	3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	150 Laporan	403,389,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		150 Laporan	588,261,314	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
4	1	1	1		UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD							126,238,628,350							133,062,242,853	
4	2	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu 2. Persentase Penyelenggaraan layanan dan Administrasi Keuangan DPRD	100%	93.08%	100%	100%	100%	67,353,969,000							69,681,923,423	
4	2	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	100.00%	100%	100%	100%	341,859,100							426,935,813	
4	2	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	77,531,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1 Dokumen	82,091,010	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	24,566,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1 Dokumen	25,762,589	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
4	2	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	25,816,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1 Dokumen	25,762,589	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				

4	2	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	26,207,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1 Dokumen	25,762,589	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	26,046,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	2 Dokumen	25,762,589	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	86,522,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	5 Laporan	136,286,858	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75,169,100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	12 Laporan	105,567,589	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan PD	100%	100%	100%	100%	10,374,823,810	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,						11,336,848,074	
4	2	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75/12 bulan	75/12 bulan	71/12 bulan	75/12 bulan	9,686,770,110	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	75 Orang/ Bulan	10,655,447,121	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	440,990,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1 Dokumen	379,563,020	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	76,689,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1 Dokumen	99,120,475	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	19,613,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1 Laporan	26,839,722	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1	6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	53,636,100	Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1 Dokumen	50,540,443	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	76,490,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	12 Laporan	98,549,287	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20,633,800	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	0 Dokumen	26,788,006	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	182,655,500							120,554,720	
4	2	1	1	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	53,693,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1 Dokumen	24,446,180	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	72,686,800	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1 Dokumen	48,341,480	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	56,274,900	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	5 Laporan	47,767,060	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur	100%	68.75%	100%	100%	421,243,650							442,716,151	
4	2	1	1.1	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	256 Item	100%	256 Item	256 Item	88,896,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1 Unit	55,533,830	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1	2	Pengadaan Pakain Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	278 Item	100%	278 Item	278 Item	102,436,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	2 Paket	168,971,141	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	128 orang	100%	128 orang	128 orang	38,235,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	3 Dokumen	17,216,540	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	22,419,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1 Dokumen	23,470,150	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	37,096,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1 Dokumen	23,381,490	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	0 Orang	5 orang	5 orang	91,770,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	10 Orang	69,333,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	1 Orang	5 orang	5 orang	40,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	10 Orang	42,405,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimtek		75 Orang					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS Sekretariat DPRD	150 Orang	42,405,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemerahan barang	100%	95%	100%	100%	2,182,700,400							2,547,651,310	
4	2	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	28,482,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	5 Paket	31,339,110	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 jenis	17 jenis	17 jenis	17 jenis	44,737,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	5 Paket	38,251,620	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 jenis	25 jenis	25 jenis	25 jenis	87,630,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	4 Paket	98,774,940	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	31018 Porsi	29018 Porsi	31018 Porsi	31018 Porsi	1,333,281,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	5 Paket	1,454,948,627	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 jenis	13 jenis	13 jenis	13 jenis	57,415,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	2 Paket	63,238,890	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	83,160,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	4 Dokumen	79,200,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	135,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1 Laporan	148,500,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	5 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	136,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1 Laporan	256,216,070	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	87,800,300	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1 Dokumen	118,924,300	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 paket	1 Paket	1 paket	1 paket	189,192,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	3 Dokumen	258,257,753	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	677,734,000							869,308,000	
4	2	1	1.1	02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	557,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	0 Unit	20,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

4	2	1	1.1	03	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 jenis	-	1 jenis	1 jenis	10,000,000	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	0 Unit	20,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	-	20 unit	20 unit	500,000,000	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	6 Jenis	479,308,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	-	2 unit	2 unit	167,176,600	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	3 Paket	350,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	3,019,070,212							3,089,756,922	
4	2	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	35,045,200	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1 Laporan	19,768,210	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	990,962,592	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1 Laporan	1,195,152,252	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1 Laporan	200,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,793,062,420	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1 Laporan	1,674,836,460	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terpenuhi Dengan Baik	100%	100%	100%	100%	1,746,982,400							2,337,310,936	
4	2	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	8 unit	6 Unit	6 Unit	384,213,400	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	3 Unit	400,406,380	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	200,000,000	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1 Unit	641,513,014	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	1 unit	2 unit	2 unit	1,162,769,000	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1 Unit	1,295,391,542	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.2		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase peningkatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	73.33%	100%	100%	47,291,750,928							47,244,012,417	
4	2	1	1.2	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65 orang/12 bulan	65 orang/12 bulan	65 orang/12 bulan	65 orang/12 bulan	46,722,968,428	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD Provinsi Kalbar	65 Orang/ Bulan	46,660,561,042	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.2	2	Penyediaan Pakalan Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakalan Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	416,422,500	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD Provinsi Kalbar	3 Paket	431,091,375	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.2	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 orang	13 Orang	65 orang	65 orang	152,360,000	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD Provinsi Kalbar	65 Orang	152,360,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.2		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Terlaksananya Layanan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%	100%	100%	1,115,149,000							1,266,829,080	
4	2	1	1.2	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	65 orang	1 Dokumen	1 Dokumen	38,713,700	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD Provinsi Kalbar	1 Dokumen	28,969,050	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.2	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	74,315,300	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD Provinsi Kalbar	8 Laporan	91,506,030	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.2	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	65 orang	1 Laporan	1 Laporan	230,482,000	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD Provinsi Kalbar	1 Laporan	297,420,200	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	1	1.2	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	771,638,000	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD Provinsi Kalbar	1 Paket	848,933,800	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Anggota DPRD	100%	92.48%	100%	100%	58,884,659,350							63,380,319,430	
4	2	2	1		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase pembentukan Perda dan Produk Hukum Lainnya yang Ditetapkan serta Kualitas Fungsi Legistasi	100%	84.44%	100%	100%	6,038,322,600							6,642,154,860	
4	2	2	1	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	16 Dokumen	11 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	1,373,030,200	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD Provinsi Kalbar	1 Dokumen	1,510,333,220	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	2	1	2	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	16 Dokumen	11 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	3,609,162,700	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD Provinsi Kalbar	1 Dokumen	3,970,078,970	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	2	1	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	801,919,400	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD Provinsi Kalbar	6 Dokumen	882,111,340	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	2	1	4	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	254,210,300	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD Provinsi Kalbar	2 Dokumen	279,631,330	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	2	1		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pelayanan Administrasi Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalbar	100%	100%	100%	100%	2,516,998,900							2,768,698,790	
4	2	2	1	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	379,677,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD Provinsi Kalbar	2 Dokumen	417,645,250	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	2	1	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	379,677,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD Provinsi Kalbar	2 Dokumen	417,645,250	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	2	1	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	406,392,800	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD Provinsi Kalbar	1 Dokumen	447,032,080	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	2	1	4	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	934,452,100	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD Provinsi Kalbar	1 Dokumen	1,027,897,310	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	2	2	1	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	32,922,900	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD Provinsi Kalbar	2 Dokumen	36,215,190	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

4	2	2	1	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	383,876,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPDR Provinsi Kalbar	1 Dokumen	422,263,710	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fungsi Pengawasan DPRD yang sesuai dengan Ketentuan Beraku	100%	100%	100%	100%	6,464,867,300							6,953,317,360	
4	2	2	1	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,064,584,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPDR Provinsi Kalbar	10 Laporan	1,198,252,660	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,484,259,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPDR Provinsi Kalbar	1 Laporan	1,641,675,860	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,204,402,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPDR Provinsi Kalbar	1 Laporan	1,356,628,460	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	920,042,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPDR Provinsi Kalbar	1 Laporan	1,032,131,760	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,142,052,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPDR Provinsi Kalbar	1 Laporan	1,277,212,310	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22,174,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPDR Provinsi Kalbar	1 Dokumen	30,551,730	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	627,351,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPDR Provinsi Kalbar	1 Dokumen	416,864,580	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fungsi dan Tugas DPRD yang terlaksana	100%	90.00%	100%	100%	6,491,823,050							8,933,887,520	
4	2	2	1	1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,123,262,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPDR Provinsi Kalbar	1 Dokumen	1,277,498,310	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	1,936,241,550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPDR Provinsi Kalbar	2 Dokumen	3,970,592,400	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,430,641,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPDR Provinsi Kalbar	1 Dokumen	1,489,082,430	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 Orang	7 Orang	12 Orang	12 Orang	1,476,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPDR Provinsi Kalbar	27 Orang	1,620,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	408,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPDR Provinsi Kalbar	8 Orang	422,400,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	97,178,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPDR Provinsi Kalbar	2 Dokumen	126,587,010	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20,499,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPDR Provinsi Kalbar	1 Dokumen	27,727,370	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1.1		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Pelayanan Penyampaian Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	100%	100%	100%	100%	34,202,339,500							34,580,905,240	
4	2	2	1.1	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,179,992,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPDR Provinsi Kalbar	1 Laporan	1,297,991,640	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1.1	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	33,022,347,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPDR Provinsi Kalbar	3 Dokumen	33,282,913,600	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1.1		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fungsi Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	100%	100%	100%	592,882,100							586,490,630	
4	2	2	1.1	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	33,890,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPDR Provinsi Kalbar	1 Dokumen	36,456,310	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1.1	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	558,991,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPDR Provinsi Kalbar	1 Laporan	416,079,180	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1.1		Pembahasan Kerja Sama Daerah	persentase pelaksanaan pembahasan kerjasama	100%	100%	100%	100%	77,246,900							66,977,570	
4	2	2	1.1	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	77,246,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPDR Provinsi Kalbar	2 Dokumen	66,977,570	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1.1		Fasilitasi Tugas DPRD	persentase pelaksanaan pembahasan kerjasama	100%	100%	100%	100%	2,500,179,000							2,847,887,460	
4	2	2	1.1	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,056,671,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPDR Provinsi Kalbar	1 Dokumen	1,216,700,650	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1.1	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22,156,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPDR Provinsi Kalbar	1 Laporan	29,553,150	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1.1	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Rapat Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,336,091,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPDR Provinsi Kalbar	35 Kali	1,487,124,540	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1.1	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	85,259,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPDR Provinsi Kalbar	1 Dokumen	114,509,120	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
5	1				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	1				PERENCANAAN					26,243,475,601									
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Sesuai Dengan Prosedur/tepat Waktu	%	%	95 %		16,786,829,295						95 %	20,877,691,231	

5	1	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Kinerja	Persen		Persen	100 Persen	189,366,500					100 Persen	967,425,683		
					Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Persen		Persen	100 Persen						100 Persen			
					Persentase Laporan Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	Persen		Persen	100 Persen						100 Persen			
					Persentase Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Persen		Persen	100 Persen						100 Persen			
5	1	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	47,132,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	2 Dokumen	42,350,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	15,400,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	1 Dokumen	71,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	15,679,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	1 Dokumen	17,475,546	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	21,191,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	1 Dokumen	37,886,781	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	18,792,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	1 Dokumen	26,214,408	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	3 Laporan	36,155,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	3 Laporan	75,720,711	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	1 Laporan	35,015,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	1 Laporan	696,278,237	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	13,058,777,525				100 Persen	15,106,824,974		
						Meningkatnya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen					100 Persen			
5	1	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12,700,017,025	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	12 Bulan	14,665,974,642	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	1	3	Relaksasi Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen		12 Dokumen	256,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	12 Dokumen	362,758,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	1	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 laporan		3 Dokumen	28,173,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	3 Dokumen	39,596,166	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan		19 Laporan	74,387,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	19 Laporan	38,496,166	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan BMD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	28,289,000					100 Persen	38,237,701		
5	1	1	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	28,289,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	1 Laporan	38,237,701	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	1	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian	Persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	693,516,800				100 Persen	488,286,150		
						Meningkatnya Pengelolaan Kinerja Pegawai	Persen		Persen	100 Persen					100 Persen			
5	1	1	1	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			2 Unit	10,429,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	2 Unit	38,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			4 Paket	167,954,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	4 Paket	218,181,150	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1 Dokumen	75,816,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	1 Dokumen	28,105,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			82 Dokumen	39,316,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	82 Dokumen	55,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			80 Orang	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	80 Orang	110,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
1	1	1	1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimtek/Workshop										38,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Barang	Persen		Persen	100 Persen	825,511,198				100 Persen	1,498,306,227		
						Persentase Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang Di Kelola Dengan Baik	Persen		Persen	100 Persen					100 Persen			
						Persentase Terbti Pengelolaan Arsip	Persen		Persen	95 Persen					95 Persen			
5	1	1	1	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan			1 Paket	13,462,450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	1 Paket	15,958,327	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1	2	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	60,081,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	4 Paket	71,720,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1	3	1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			8 Paket	38,631,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	8 Paket	99,605,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1	4	1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	108,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	2 Paket	124,058,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1	5	1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	64,450,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	3 Paket	33,550,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1	6	1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			2 Dokumen	49,707,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	2 Dokumen	77,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1	8	1	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			1 Laporan	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	1 Laporan	124,058,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1	9	1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25 Laporan	404,371,048	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	25 Laporan	759,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1	10	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1600 Dokumen	39,600,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	1600 Dokumen	99,856,900	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5	1	1	1.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	32,205,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	1 Dokumen	93,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas (Kumulatif Tahun Berjalan)	Persen	Persen	97 Persen	213,185,200						97 Persen	699,378,075	
5	1	1	1.1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah/Jenis Pengadaan Mebel yang Disediakan			3 Paket	56,991,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	3 Jenis	53,128,075	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			13 Unit	119,483,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	13 Unit	385,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
1	1	1	1.1	8	Pengadaan aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesinnya											107,250,000	
1	1	1	1.1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya											49,500,000	
5	1	1	1.1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			4 Unit	36,710,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	4 Unit	104,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Persen	100 Persen	1,073,203,072						100 Persen	1,103,000,382	
5	1	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	8,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	12 Laporan	3,000,382	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Laporan	503,805,312	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	3 Laporan	748,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			2 Laporan	561,397,760	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	2 Laporan	352,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	Persen	80 Persen	704,980,000						80 Persen	976,232,039	
5	1	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			7 Unit	83,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	7 Unit	125,203,729	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			213 Unit	299,780,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	213 Unit	300,368,310	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	1.1	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			3 Unit	115,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	3 Unit	550,660,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	177,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Bappeda Prov. Kalbar	1 Unit	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	1	1.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			8 Unit	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Prov. Kalbar	8 Unit	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Penjabaran Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	90 %	n/a %	90 %	3,275,343,320						90 %	4,898,422,280	
5	1	2	1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyempurnaan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang Disusun	90	90	90 90	1,925,931,400						90 90	2,473,733,865	
5	1	2	1	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD			1 Dokumen	69,500,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kab/Kota se Kalbar	1 Dokumen	134,990,168	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
						Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan)			0 Dokumen							0 Dokumen		
5	1	2	1	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			1 Dokumen	259,852,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kab/Kota se Kalbar	1 Dokumen	188,675,985	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	2	1	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik			1 Berita Acara	194,516,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Pajak Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kab/Kota se Kalbar	1 Berita Acara	67,670,485	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	2	1	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah			1 Berita Acara	261,198,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kab/Kota se Kalbar	1 Berita Acara	71,865,545	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	2	1	5	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi			1 Berita Acara	239,535,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kab/Kota se Kalbar	1 Berita Acara	368,097,490	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	2	1	6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)			2 Dokumen	901,327,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kab/Kota se Kalbar	2 Dokumen	1,642,434,192	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	2	1		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data e-Database yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	Persen	100 Persen	400,000,000						100 Persen	1,267,039,900	
5	1	2	1	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			0 Dokumen	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kab/Kota se Kalbar	0 Dokumen	138,083,993	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
						Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah			1 Masukan							1 Masukan		
5	1	2	1	2	Peminaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi			150 Orang	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kab/Kota se Kalbar	150 Orang	368,097,490	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	2	1	3	Peminaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			170 Orang	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kab/Kota se Kalbar	170 Orang	463,810,303	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	2	1	4	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan			60 Buku	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kab/Kota se Kalbar	60 Buku	297,048,114	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	2	1		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Dikendalikan dan Dievaluasi Sesuai Dengan	Persen	Persen	90 Persen	649,411,920						90 Persen	1,057,648,515	
5	1	2	1	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			4 Laporan	155,765,920	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Daerah Kab/ Kota se Kalbar	4 Laporan	250,945,805	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	2	1	2	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya			1 Kerja Sama	64,760,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		Perangkat Daerah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Daerah Kab/ Kota se Kalbar	1 Kerja Sama	190,315,620	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	2	1	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			1 Laporan	286,569,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Daerah Kab/ Kota se Kalbar	1 Laporan	109,450,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	2	1	4	Fasilitas/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi			14 Dokumen	142,316,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Daerah Kab/ Kota se Kalbar	14 Dokumen	506,937,900	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

5	1	2	1	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan SIPD Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Persen	Persen	100 Persen	300,000,000						100 Persen	300,000,000	
5	1	2	1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikebala			1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kab/Kota	1 Dokumen	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	2	1	2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kab/Kota	1 Dokumen	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	1	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi			1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kab/Kota	1 Dokumen	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3		PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Konsistensi Penjabaran Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan	100 %	NA %	100 %	6.181.302,986					100 %			
5	1	3	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Ketepatan Pelaporan Pelaksanaan / Hasil Rencana Pembangunan Bidang Perencanaan dan SDA	Persen	Persen	100 Persen	1,982,659,300					100 Persen			
5	1	3	1	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			8 Dokumen	86,706,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Lingkup Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, Pemerintah Pusat, Masyarakat dan Pihak terkait lainnya	8 Dokumen	379,852,628	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistinsi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan			8 Perangkat Daerah	106,755,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Lingkup Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, Pemerintah Pusat, Masyarakat dan Pihak terkait lainnya	8 Perangkat Daerah	142,777,559	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan			8 Perangkat Daerah	435,717,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Lingkup Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, Pemerintah Pusat, Masyarakat dan Pihak terkait lainnya	8 Perangkat Daerah	314,303,617	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pemerintahan			8 Laporan	97,244,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Lingkup Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, Pemerintah Pusat, Masyarakat dan Pihak terkait lainnya	8 Laporan	110,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			15 Dokumen	384,062,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Lingkup Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, Pemerintah Pusat, Masyarakat dan Pihak terkait lainnya	15 Dokumen	968,510,070	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistinsi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia			15 Perangkat Daerah	274,754,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Lingkup Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, Pemerintah Pusat, Masyarakat dan Pihak terkait lainnya	15 Perangkat Daerah	288,751,505	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia			15 Perangkat Daerah	435,321,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Lingkup Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, Pemerintah Pusat, Masyarakat dan Pihak terkait lainnya	15 Perangkat Daerah	1,609,712,262	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pembangunan Manusia			15 Laporan	162,096,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Lingkup Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, Pemerintah Pusat, Masyarakat dan Pihak terkait lainnya	15 Laporan	110,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1		Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Ketepatan Pelaporan Pelaksanaan / Hasil Rencana Pembangunan Bidang Perencanaan dan SDA	Persen	Persen	95 Persen	2,168,638,300				95 Persen	3,121,131,472		
					Persentase Penyempurnaan Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA	Persen	Persen	100 Persen						100 Persen			
5	1	3	1	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			9 Dokumen	623,883,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		OPD, KL, PemdaTerkait	9 Dokumen	1,551,871,072	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistinsi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan			9 Perangkat Daerah	296,850,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		OPD, KL, PemdaTerkait	9 Perangkat Daerah	152,522,441	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan			9 Perangkat Daerah	147,693,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		OPD, KL, PemdaTerkait	9 Perangkat Daerah	305,698,167	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Perencanaan			5 Laporan	375,529,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		OPD, KL, PemdaTerkait	5 Laporan		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			10 Dokumen	180,316,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		OPD, KL, PemdaTerkait	10 Dokumen	781,347,515	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistinsi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA			5 Perangkat Daerah	306,979,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		OPD, KL, PemdaTerkait	5 Perangkat Daerah	149,097,176	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA			5 Perangkat Daerah	126,924,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		OPD, KL, PemdaTerkait	5 Perangkat Daerah	180,595,101	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang SDA			6 Laporan	110,461,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		OPD, KL, PemdaTerkait	6 Laporan		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Ketepatan Pelaporan Pelaksanaan / Hasil Rencana Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	Persen	95 Persen	2,030,005,386				95 Persen	3,240,747,701		
					Persentase Penyempurnaan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	Persen	100 Persen						100 Persen			
5	1	3	1	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Dokumen	853,048,136	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Lingkup Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	1 Dokumen	1,056,295,429	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistinsi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur			4 Perangkat Daerah	125,166,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Lingkup Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	4 Perangkat Daerah	24,594,986	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur			4 Perangkat Daerah	151,593,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Lingkup Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	4 Perangkat Daerah	61,652,008	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Infrastruktur			1 Laporan	141,849,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Lingkup Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	1 Laporan		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			2 Dokumen	375,324,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Lingkup Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	2 Dokumen	1,242,786,446	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistinsi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan			3 Perangkat Daerah	84,709,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Lingkup Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	3 Perangkat Daerah	51,663,231	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5	1	3	1	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				3 Perangkat Daerah	133,435,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Lingkup Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	3 Perangkat Daerah	186,159,289	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	3	1	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	164,868,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah Lingkup Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	1 Laporan	617,596,312	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN						122,108,844,147							14,109,338,955		
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						118,304,419,056							10,589,303,745		
5	2	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						141,400,600							161,244,955		
5	2	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	34,873,300	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	34,873,300	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	13,035,300	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	13,035,300	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	9,602,600	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	8,402,815	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	9,002,500	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	8,359,100	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			1 Laporan	60,395,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Laporan	84,482,740	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			3 Laporan	14,491,700	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3 Laporan	12,091,700	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						100,429,089,962							478,897,961		
5	2	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan			200 Orang/ Bulan	99,973,799,041	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	200 Orang/ Bulan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Jenis			5 Dokumen	385,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	385,820,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Jenis			4 Laporan	69,470,921	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	4 Laporan	93,077,961	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						100,411,500							100,413,140		
5	2	1	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Jenis			2 Dokumen	100,411,500	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	100,413,140	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah						468,041,200							468,130,288		
5	2	1	1	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Jenis			12 Unit	148,401,400	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Unit	148,402,650	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	2	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Stel			0 Paket	73,315,100	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 Paket	73,375,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
						Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				4 Paket								4 Paket		
5	2	1	1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	1 Dokumen			1 Dokumen	6,478,600	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	6,480,112	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen			1 Dokumen	8,431,300	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	8,431,776	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	167 Orang			0 Orang	129,674,800	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 Orang	129,675,750	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				207 Orang								207 Orang		
5	2	1	1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang			343 Orang	101,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	343 Orang	101,765,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1		Administrasi Umum Perangkat Daerah						2,561,439,443							1,833,914,668		
5	2	1	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik untuk Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Jenis			1 Paket	33,167,675	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Paket	51,220,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	32 Jenis			3 Paket	114,102,900	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3 Paket	85,047,975	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				0 Paket								0 Paket		
5	2	1	1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Jenis			9 Paket	52,377,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	9 Paket	86,250,817	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1.000 Orang			2 Paket	79,710,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2 Paket	79,720,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	28 Jenis			4 Paket	1,999,992,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	4 Paket	1,135,568,762	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

					Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan		0 Paket						0 Paket		
5	2	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3 Jenis	1 Dokumen	32,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	32,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Kali	1 Laporan	244,034,818	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Laporan	358,049,800	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada (SKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	5,554,800	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	5,557,314	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,037,503,238					0	
5	2	1	1.1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Jenis	2 Paket	77,493,300	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2 Paket	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	900,009,938	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 Unit	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Bangunan	0 Unit	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 Unit	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12,567,664,916					6,856,645,258	
5	2	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000 Dokumen	1 Laporan	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Laporan	70,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	4 Laporan	1,336,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	4 Laporan	1,336,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1 Laporan	20,000,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Laporan	20,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	7 Laporan	11,141,664,916	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	7 Laporan	5,430,645,258	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				998,868,197					690,057,475	
5	2	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	14 Unit	205,591,975	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	14 Unit	205,591,975	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Jenis	10 unit	64,465,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Kota Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	10 unit	64,465,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara	4 Aplikasi	5 Unit	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	5 Unit	350,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Bangunan	1 Unit	200,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Unit	70,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Bangunan	2 Unit	178,810,722	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2 Unit	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				3,804,425,001					3,520,035,210	
5	2	4	1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				3,804,425,001					3,520,035,210	
5	2	4	1	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		2 Dokumen	644,741,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	691,307,573	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah		1 Dokumen	1,073,125,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	565,168,400	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah Dan Kebijakan Pajak Daerah		1 Laporan					1 Laporan		
5	2	4	1	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		1 Laporan	237,970,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Laporan	237,970,200	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Sistem Informasi	1 Sarana dan Prasarana	194,442,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Sarana dan Prasarana	194,442,700	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		1 Laporan	379,968,501	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Kota Pontianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Laporan	395,448,665	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti	10 Wajib Pajak	1 Laporan	60,609,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Laporan	66,829,560	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1	9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	54,751,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	54,751,900	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	10 Wajib Pajak	5 Dokumen	106,108,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	5 Dokumen	113,108,790	BADAN PENDAPATAN DAERAH
												Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			
5	2	4	1	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	1 Laporan	1 Laporan	254,227,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Laporan	297,847,100	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		1 Laporan					1 Laporan		
5	2	4	1	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah		6 Laporan	521,425,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	6 Laporan	608,637,222	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1	14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		1 Dokumen	277,055,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	294,523,100	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEGIATAN				2,936,389,168					0	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2,144,504,080					0	
5	2	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5,713,600					0	

5	2	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1,428,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,				1 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,428,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,				1 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1,428,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Kota Kelurahan				2 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen		1 Laporan	1,428,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						138,457,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,						0
5	2	1	1	3	Realisasi Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	95.22%			6 Dokumen	133,902,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	1,428,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,				2 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3,126,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Kota Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						9,900,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,						0
5	2	1	1.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	4,400,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Orang	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5,500,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Orang	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah						414,034,880	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,						0
5	2	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Jenis			1 Paket	14,424,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Paket	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Jenis			3 Paket	173,047,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Paket	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Jenis			3 Paket	36,640,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Paket	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	67,680,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Paket	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	94,712,380	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Paket	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Jenis			2 Dokumen	15,512,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	98.69%			1 Laporan	4,608,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	7,410,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						262,469,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,						0
5	2	1	1.1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Jenis			1 Paket	37,228,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Paket	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Jenis			3 Unit	88,241,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Unit	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Jenis			1 Unit	75,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Jenis			2 Unit	62,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Unit	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						555,280,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,						0
5	2	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	11,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan			4 Laporan	295,280,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%			2 Laporan	249,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						758,649,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,						0
5	2	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	2 Bangunan			22 Unit	318,268,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			22 Unit	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	255,381,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75 Unit	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	185,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Unit	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						791,885,088	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,						0
5	2	4	1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						791,885,088	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,						0
5	2	4	1	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				2 Laporan	13,452,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah			450000 Dokumen Ketetapan		441,761,088	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			450000 Dokumen Ketetapan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH

5	2	4	1	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				17000 Dokumen SSPD	336,672,000	Kab. Pematang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17000 Dokumen SSPD	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN						3,039,137,350							0
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan sesuai dengan Prosedur/ Tepat Waktu	%		%	100 %	2,622,586,950					100 %		0
5	2	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	%		%	100 %	6,315,800					100 %		0
5	2	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen		1 Dokumen	3,114,600	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Singkawang	1 Dokumen		0
5	2	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen		1 Laporan	3,201,200	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Singkawang	1 Laporan		0
5	2	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat	%		%	100 %	123,206,700					100 %		0
5	2	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		75%		1 Dokumen	118,640,000	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Singkawang	1 Dokumen		0
5	2	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan		19 Laporan	4,566,700	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Singkawang	19 Laporan		0
5	2	1	1.1		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai sesuai Perencanaan	%		%	100 %	46,698,000					100 %		0
5	2	1	1.1	2	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	26,250,000	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Singkawang	1 Paket		0
5	2	1	1.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	4,082,000	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Singkawang	2 Orang		0
5	2	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		6 Orang		8 Orang	16,366,000	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Singkawang	8 Orang		0
5	2	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	557,110,990					100 %		0
5	2	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8 Jenis		1 Paket	45,769,700	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dan ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Singkawang	1 Paket		0
5	2	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Jenis		3 Paket	227,114,100	Kab. Bengkulu, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dan ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Singkawang	3 Paket		0

5	2	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5 Paket	48,790,600	Kau. belkayang, Semua Kecamatan, Kau. belkayang, Semua Kecamatan, Kau. belkayang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dan ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Singkawang	5 Paket	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Jenis	1 Paket	10,800,000	Kau. belkayang, Semua Kecamatan, Kau. belkayang, Semua Kecamatan, Kau. belkayang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dan ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Singkawang	1 Paket	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Jenis	2 Paket	96,094,590	Kau. belkayang, Semua Kecamatan, Kau. belkayang, Semua Kecamatan, Kau. belkayang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dan ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Singkawang	2 Paket	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00%	1 Laporan	20,592,000	Kau. belkayang, Semua Kecamatan, Kau. belkayang, Semua Kecamatan, Kau. belkayang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dan ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Singkawang	1 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Kali	40 Laporan	107,950,000	Kau. belkayang, Semua Kecamatan, Kau. belkayang, Semua Kecamatan, Kau. belkayang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dan ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Singkawang	40 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	%	%	100 %	375,851,600				100 %	0	
5	2	1	1.1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Jenis	1 Paket	21,950,900	Kau. belkayang, Semua Kecamatan, Kau. belkayang, Semua Kecamatan, Kau. belkayang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dan ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Singkawang	1 Paket	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		18 Unit	353,900,700	Kau. belkayang, Semua Kecamatan, Kau. belkayang, Semua Kecamatan, Kau. belkayang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dan ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Singkawang	18 Unit	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang jasa surat menyurat, komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik serta Pelayanan Umum Kantor UPT PPD Wilayah	%	%	100 %	921,164,660				100 %	0	
5	2	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	340 Dokumen	1 Laporan	15,000,000	Kau. belkayang, Semua Kecamatan, Kau. belkayang, Semua Kecamatan, Kau. belkayang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Singkawang	1 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	4 Laporan	516,164,660	Kau. belkayang, Semua Kecamatan, Kau. belkayang, Semua Kecamatan, Kau. belkayang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Singkawang	4 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	5 Laporan	390,000,000	Kau. belkayang, Semua Kecamatan, Kau. belkayang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Singkawang	5 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH





5	2	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100%		1 Laporan	210,500,000	Kab. Lamak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pegawai Kantor dan Wajib Pajak di Lingkungan UPT PPD Wilayah Mempawah	1 Laporan		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1									Kab. Mempawah, Semua Kecamatan,								
5	2	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas sesuai Standar	%	%	100 %		202,387,150						100 %		0	
5	2	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		18 Unit		14 Unit	123,674,200	Kab. Lamak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah di Lingkungan UPT PPD Wilayah Mempawah	14 Unit		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1									Kab. Mempawah, Semua Kecamatan,								
5	2	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		11 Jenis		31 Unit	30,712,950	Kab. Lamak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah di Lingkungan UPT PPD Wilayah Mempawah	31 Unit		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1									Kab. Mempawah, Semua Kecamatan,								
5	2	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Bangunan		1 Unit	38,000,000	Kab. Lamak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah di Lingkungan UPT PPD Wilayah Mempawah	1 Unit		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1									Kab. Mempawah, Semua Kecamatan,								
5	2	1	1.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Jenis		1 Unit	10,000,000	Kab. Lamak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah di Lingkungan UPT PPD Wilayah Mempawah	1 Unit		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kontribusi Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	%	%	85 %		430,412,000						85 %		0	
5	2	4	1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Pendapatan Daerah	%	%	100 %		430,412,000						100 %		0	
5	2	4	1	5	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	24,650,000	Kab. Lamak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Wajib Pajak	1 Laporan		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1									Kab. Mempawah, Semua Kecamatan,								
5	2	4	1	7	Pemetan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		1 Jenis		141320 Dokumen Ketetapan	252,264,000	Kab. Lamak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Wajib Pajak	141320 Dokumen Ketetapan		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1									Kab. Mempawah, Semua Kecamatan,								
5	2	4	1	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		1 Jenis		253 Dokumen SSPD	153,498,000	Kab. Lamak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Wajib Pajak	253 Dokumen SSPD		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1,964,485,632									
5	2				KEUANGAN															
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan sesuai dengan Prosedur/ Tepat Waktu	%	%	100 %		1,445,006,082						100 %		1,613,688,144	
5	2	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	%	%	100 %		25,791,700						100 %		27,081,705	
5	2	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	13,012,600	Kab. Sanggau, Kapuas, Bunut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	13,663,440		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,566,800	Kab. Sanggau, Kapuas, Bunut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	11,095,245		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2,212,300	Kab. Sanggau, Kapuas, Bunut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan	2,323,020		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	%	%	100 %		121,522,800						100 %		123,819,150	
5	2	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100%		12 Dokumen	106,920,000	Kab. Sanggau, Kapuas, Bunut, Kota Pontianak,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penatausahaan Keuangan PD	12 Dokumen	108,486,000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				19 Laporan	14,602,800	Kab. Sanggau, Kapuas, Bunut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penatausahaan Keuangan PD	19 Laporan	15,333,150		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai sesuai dengan Perencanaan	%	%	100 %		7,238,000						100 %		7,599,900	
5	2	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		2 Orang		3 Orang	7,238,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	3 Orang	7,599,900		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Barang	%	%	100 %		425,649,600						100 %		469,493,640	
5	2	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8 Jenis		10 Paket	22,422,600	Kab. Sanggau, Kapuas, Bunut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	10 Paket	23,543,730		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		33 Jenis		18 Paket	114,323,600	Kab. Sanggau, Kapuas, Bunut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	18 Paket	120,028,965		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				16 Paket	66,325,100	Kab. Sanggau, Kapuas, Bunut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	16 Paket	69,641,355		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		43 Jenis		300 Paket	18,000,000	Kab. Sanggau, Kapuas, Bunut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	300 Paket	18,900,000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	52,263,800	Kab. Sanggau, Kapuas, Bunut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	10 Paket	54,876,465		BADAN PENDAPATAN DAERAH

5	2	1	1	1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Jenis		12 Dokumen	3,102,500	Kab. Sanggau, Kapuas, Bunut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Dokumen	3,257,625	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	1	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	99.89%			10 Laporan	9,000,000	Kab. Sanggau, Kapuas, Bunut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	10 Laporan	9,450,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Dokumen			48 Laporan	141,212,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	48 Laporan	169,795,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	1	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas (Komutatif Tahun Berjalan)	%	%	100 %		118,303,700						100 %	125,100,045		
5	2	1	1	1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	38,346,400	Kab. Sanggau, Kapuas, Bunut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas	4 Paket	41,144,880	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			7 Unit	42,956,900	Kab. Sanggau, Kapuas, Bunut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas	7 Unit	45,104,745	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				17 Unit	37,000,400	Kab. Sanggau, Kapuas, Bunut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas	17 Unit	38,850,420	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	1	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %		443,794,832						100 %	538,252,734		
5	2	1	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	353 Dokumen			12 Laporan	6,810,000	Kab. Sanggau, Kapuas, Bunut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Laporan	7,150,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan			12 Laporan	230,984,832	Kab. Sanggau, Kapuas, Bunut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Laporan	242,534,073	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	97.19%			12 Laporan	206,000,000	Kab. Sanggau, Kapuas, Bunut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Laporan	288,568,161	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	1	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	%	100 %		301,705,450						100 %	322,340,970		
5	2	1	1	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit			15 Unit	165,900,000	Kab. Sanggau, Kapuas, Bunut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	15 Unit	174,489,840	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	97 Unit			82 Unit	70,805,450	Kab. Sanggau, Kapuas, Bunut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	82 Unit	74,351,130	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Bangunan			1 Unit	65,000,000	Kab. Sanggau, Kapuas, Bunut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Unit	68,250,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					519,479,550								532,839,300		
5	2	4	1			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					519,479,550								532,839,300		
5	2	4	1	5	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	20 Laporan			20 Laporan	113,792,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		20 Laporan	114,017,400	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	1	7	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Jenis			96650 Dokumen Ketetapan	189,899,550	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		96650 Dokumen Ketetapan	197,032,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	1	10	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Jenis			350 Dokumen SSPD	215,788,000	Kab. Sanggau, Semua Kecamatan, Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		350 Dokumen SSPD	221,789,400	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	2					KEJANGSAN						1,899,999,778								0	
5	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1,462,495,778								0	
5	2	1	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28,385,500								0	
5	2	1	1	3	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD				1 Dokumen	25,785,600	Kab. Sintang, Sintang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen								0 Dokumen		
5	2	1	1	7	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen			1 Laporan	2,599,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						109,953,900								0	
5	2	1	1	3	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%			1 Dokumen	106,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	7	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan				19 Laporan	3,953,900	Kab. Sintang, Sintang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas SDM		19 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan								0 Laporan		
5	2	1	1	1	1	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah						75,608,800								0	
5	2	1	1	2	2	Pengadaan Pakalan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Berserta Atribut kelengkapan				17 Paket	21,590,000	Kab. Sintang, Sintang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		17 Paket	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

5	2	1	1.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	5 Orang	29,277,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	5 Orang	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	10 Orang	24,741,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	10 Orang	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah				402,320,150						0		
5	2	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Jenis	1 Paket	17,314,500	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Paket	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Jenis	2 Paket	80,680,900	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2 Paket	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Jenis	4 Paket	75,825,000	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	4 Paket	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Jenis	12 Paket	14,400,000	Kab. Sintang, Sintang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Paket	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	33,900,000	Kab. Sintang, Sintang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2 Paket	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Jenis	1 Dokumen	3,599,750	Kab. Sintang, Sintang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	1.1	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1 Laporan	7,200,000	Kab. Sintang, Sintang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Kali	0 Laporan	169,400,000	Kab. Sintang, Sintang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				129,696,028						0		
5	2	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Jenis	3 Unit	50,563,050	Kab. Sintang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3 Unit	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	1.1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Jenis	0 Unit	79,132,978	Kab. Sintang, Sintang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 Unit	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				410,765,882						0		
5	2	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 Dokumen	12 Laporan	8,512,500	Kab. Sintang, Sintang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Laporan	193,944,104	Kab. Sintang, Sintang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	1.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	1 Laporan	35,000,000	Kab. Sintang, Sintang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	99.35%	12 Laporan	173,309,278	Kab. Sintang, Sintang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				305,765,518						0		
5	2	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	5 Unit	234,952,974	Kab. Sintang, Sintang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	5 Unit	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Jenis	3 Paket	39,812,544	Kab. Sintang, Sintang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3 Paket	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Bangunan	1 Unit	31,000,000	Kab. Sintang, Sintang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Unit	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				437,584,000						0		
5	2	4	1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				437,504,000						0		
5	2	4	1	5	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	5 Laporan	5 Laporan	87,948,000	Kab. Sintang, Sintang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	5 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	4	1	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	150000 Dokumen Ketetapan		67,256,000	Kab. Sintang, Sintang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	150000 Dokumen Ketetapan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	4	1	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	3 Jenis	250 Dokumen SSPD	282,300,000	Kab. Sintang, Sintang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	250 Dokumen SSPD	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	2				KEUANGAN				1,509,324,000						1,176,055,000		
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan sesuai dengan Prosedur/ Tepat Waktu	%	%	1,155,780,500				100 %	842,040,200			
5	2	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4881640	Laporan	Laporan	5 Laporan	56,089,400			5 Laporan	53,746,440			
5	2	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25,636,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Putussibau	1 Dokumen	25,636,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	28,303,300	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Putussibau	2 Dokumen	25,449,040	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2,150,100	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Putussibau	1 Laporan	2,661,400	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	110,713,100				1 Dokumen	111,105,560		
5	2	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	88,100,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Putussibau	1 Dokumen	88,100,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

5	2	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	22,613,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bermanfaat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Putussibau	19 Laporan	23,005,560	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	18389500 Paket		500,134,500	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					5 Paket	407,771,300		
5	2	1	1.1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	18,388,600	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bermanfaat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dan ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Putussibau	5 Paket	18,389,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	216,432,900	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bermanfaat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dan ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Putussibau	4 Paket	108,843,600	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	26,850,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bermanfaat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dan ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Putussibau	3 Paket	32,020,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	18,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bermanfaat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dan ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Putussibau	3 Paket	21,600,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15,540,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bermanfaat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dan ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Putussibau	2 Paket	21,193,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3,120,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bermanfaat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dan ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Putussibau	2 Dokumen	3,840,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.1.1	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	2,640,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bermanfaat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dan ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Putussibau	1 Laporan	2,700,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 Laporan	199,163,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bermanfaat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dan ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Putussibau	47 Laporan	199,185,200	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100	%				100 %			100 %	210,216,900		
5	2	1	1.1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bermanfaat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Putussibau	1 Laporan	10,896,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	92,240,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bermanfaat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Putussibau	12 Laporan	83,078,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bermanfaat		ASN di Lingkungan UPT PPD Wilayah Putussibau	12 Laporan	116,242,900	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%				100 %			100 %	48,000,000		
5	2	1	1.1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	262,597,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bermanfaat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah	14 Unit	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	26,000,500	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bermanfaat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah	15 Unit	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung	48,000,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bermanfaat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah	2 Gedung	48,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kontribusi Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	%				100 %			100 %	334,014,800		
5	2	4	1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Pendapatan Daerah	%				100 %			100 %	334,014,800		
5	2	4	1	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	67,408,500	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bermanfaat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Wajib Pajak di Kota Putussibau, dan Kabupaten Kapuas Hulu	1 Laporan	68,726,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	1	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	120000 Dokumen Ketetapan	151,231,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bermanfaat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Wajib Pajak di Kota Putussibau, dan Kabupaten Kapuas Hulu	120000 Dokumen Ketetapan	64,349,600	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	1	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2600 Dokumen SSPD	134,904,000	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bermanfaat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Wajib Pajak di Kota Putussibau, dan Kabupaten Kapuas Hulu	2600 Dokumen SSPD	200,939,200	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2				INSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			2,726,566,915							0		
5	2				KELUANGAN										0		
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan sesuai dengan Prosedur/Tepat Waktu	%				100 %			100 %	0		
5	2	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	%				100 %			100 %	0		
5	2	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	17,456,100	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bermanfaat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Meningkatkan Kualitas Penyusunan Laporan Kinerja	2 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,838,500	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bermanfaat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Meningkatkan Kualitas Penyusunan Laporan Kinerja	1 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Tindak Lanjut Hasil	%				100 %			100 %	0		
5	2	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97.10%	1 Dokumen	121,120,500	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bermanfaat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penatausahaan Dokumen Perangkat Daerah Penganggaran Meningkatkan Laporan Keuangan	1 Dokumen	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	1 Laporan	5,278,900	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bermanfaat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Meningkatkan Pemenuhan Laporan Keuangan	1 Laporan	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pegawai sesuai dengan Perencanaan	%				100 %			100 %	0		
5	2	1	1.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Tahun	1 Orang	5,922,000	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bermanfaat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Pegawai	1 Orang	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH

5	2	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun		3 Orang	11,724,000	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi Pegawai	3 Orang		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang untuk Pelaksanaan Tugas UPT PPD Wilayah Ketapang	%	%	100 %	731,688,200	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %		0	
5	2	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Jenis		6 Paket	24,574,000	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum UPT PPD Wilayah Ketapang	6 Paket		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Jenis		17 Paket	139,240,200	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum UPT PPD Wilayah Ketapang	17 Paket		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Jenis		6 Paket	93,412,500	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum UPT PPD Wilayah Ketapang	6 Paket		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Jenis		41 Paket	17,280,000	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum UPT PPD Wilayah Ketapang	41 Paket		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Jenis		13 Paket	101,939,500	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum UPT PPD Wilayah Ketapang	13 Paket		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Jenis		36 Dokumen	5,760,000	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum UPT PPD Wilayah Ketapang	36 Dokumen		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Tahun		1 Laporan	15,136,000	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum UPT PPD Wilayah Ketapang	1 Laporan		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun		84 Laporan	334,346,000	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum UPT PPD Wilayah Ketapang	84 Laporan		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas (Kumulatif Tahun Berjalan) UPT PPD Wilayah Ketapang	%	%	100 %	463,809,800					100 %		0	
5	2	1	1.1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Jenis		1 Paket	7,389,200	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas	1 Paket		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			40 Unit	456,420,600	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas	40 Unit		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	443,098,315					100 %		0	
						Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %						100 %			
5	2	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	257 Dokumen		1 Laporan	9,809,344	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan		1 Laporan	238,765,280	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	99.79%		1 Laporan	194,523,691	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	%	%	100 %	274,185,900					100 %		0	
5	2	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perinciannya	3 Jenis		13 Unit	195,000,000	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	13 Unit		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			41 Unit	79,185,900	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	41 Unit		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kontribusi Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah	%	%	85 %	650,444,700					85 %		0	
5	2	4	1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Pendapatan Daerah	%	%	100 %	650,444,700					100 %		0	
5	2	4	1	5	Pendaftaran dan Pendaftaran Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			1 Laporan	82,601,600	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tersedianya Bahan Kebijakan yang akan Ditindaklanjuti Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Pendapatan Daerah	1 Laporan		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
											Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,							
5	2	4	1	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Laporan		101867 Dokumen	324,563,100	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tersedianya Bahan Kebijakan yang akan Ditindaklanjuti Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Pendapatan Daerah	101867 Dokumen		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
											Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
5	2	4	1	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Tahun		7000 Dokumen	243,280,000	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tersedianya Bahan Kebijakan yang akan Ditindaklanjuti Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Pendapatan Daerah	7000 Dokumen		0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
											Kab. Kayong Utara, Semua Kecamatan,							
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	2				KEUANGAN					1,365,815,892,352							21,937,616,488	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					22,478,398,752							5,402,296,566	
5	2	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					600,705,900							468,050,880	
5	2	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7 Dokumen	71,119,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7 Dokumen		92,753,200	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	36,010,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Dokumen		27,730,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	35,814,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Dokumen		24,270,780	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	34,546,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Dokumen		27,730,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5	2	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	29,971,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	20,460,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	189,488,400				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3 Laporan	150,111,400	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	203,756,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	4 Laporan	124,995,500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16,085,197,578						750,540,900		
5	2	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/ Bulan	14,369,699,178		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	120 Orang/ Bulan	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	145,839,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	24,709,500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1,198,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	616,284,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	50,810,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	7,933,320	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	29,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Laporan	10,220,280	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	102,188,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3 Dokumen	26,948,100	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	94,430,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	18 Laporan	51,139,500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	94,430,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	13,306,200	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			306,322,400						71,140,386		
5	2	1	1	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	72,620,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	22,423,200	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	37,652,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	26,075,706	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	101,620,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Laporan	15,877,500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	94,430,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Laporan	6,763,980	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			533,361,800						303,792,340		
5	2	1	1	1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	103,908,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 Paket	50,412,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	120 Stel						120 Stel			
5	2	1	1	1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	140,601,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	26,995,740	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	93,383,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	28,063,380	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	74,768,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	23,589,420	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang	59,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	90 Orang	33,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	30 Orang	50,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	30 Orang	33,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,579,536,613						660,305,578		
5	2	1	1	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	55,000,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	10 Paket	27,588,600	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	162,212,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	50 Paket	105,923,210	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	74,899,150		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	50 Paket	56,226,690	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	166,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	100 Paket	99,619,200	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15000 Paket	176,351,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	15000 Paket	70,114,740	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	27,180,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 Dokumen	16,020,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
						Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Jenis						5 Jenis			
5	2	1	1	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	80,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Laporan	47,976,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	618,598,963		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	24 Laporan	116,056,008	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	127,241,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	40,702,680	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	91,652,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	55,078,440	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			150,991,391						597,884,574		
5	2	1	1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	150,991,391		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2 Unit	564,590,454	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
								1,686,965,170						1,391,751,268		
5	2	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6,389,110		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Laporan	3,833,466	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	501,802,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Laporan	638,881,380	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1,178,773,760		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3 Laporan	749,036,422	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	58,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2 Unit	23,952,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	2	1	1	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3 Unit	9,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

5	2	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0 Unit	378,760,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 Unit	353,760,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			50 Unit					50 Unit					
5	2	1	1.1	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			0 Unit	765,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 Unit	625,971,660	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			5 Unit					5 Unit					
5	2	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	317,957,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Unit	146,146,980	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK RI		Opini BPK RI	WTP Opini BPK RI	1,334,855,350,300				WTP Opini BPK RI	11,339,535,678	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
5	2	2	1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen APBD dan APBD Perubahan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	7,014,260,000				2 Dokumen	7,026,910,100			
5	2	2	1	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	199,583,800	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat	2 Dokumen	201,883,800	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	199,583,800	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat	2 Dokumen	201,883,800	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				86 Dokumen	573,271,800	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat	86 Dokumen	575,171,800	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				86 Dokumen	202,925,000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat	86 Dokumen	201,725,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				86 Dokumen	222,389,800	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat	86 Dokumen	218,389,800	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				86 Dokumen	222,389,800	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat	86 Dokumen	218,389,800	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				5 Dokumen	2,243,817,900	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat	5 Dokumen	2,234,886,500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				3 Dokumen	1,267,422,900	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat	3 Dokumen	1,278,222,900	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				5 Dokumen	1,412,511,600	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat	5 Dokumen	1,412,411,600	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				2 Dokumen	68,007,500	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat	2 Dokumen	83,383,400	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				2 Dokumen	142,729,100	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat	2 Dokumen	123,570,700	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				2 Dokumen	62,287,500	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat	2 Dokumen	82,903,400	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1	13	Pembiinan Perencanaan Penganggaran Daerah Perencanaan Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi				200 Orang	197,339,500	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat	200 Orang	194,087,500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1		Pembiinan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Terbina	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota	3,007,858,600					14 Kabupaten/Kota	0		
5	2	2	1	1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				14 Laporan	144,713,300	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat	14 Laporan	0		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				0 Laporan	254,284,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat	0 Laporan	0		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				14 Laporan	312,172,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat	14 Laporan	0		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						331,703,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat		0		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1	5	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota						176,980,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat		0		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1	6	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah						588,328,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat		0		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1	7	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota						166,316,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat		0		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1	8	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota						197,213,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat		0		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1	9	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota						200,213,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat		0		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1	10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						200,305,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat		0		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5	2	2	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota					249,838,200	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah					185,789,300	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Naskah Kerjasama Pemda dengan Lembaga Lainnya	Laporan	Laporan	15 Laporan	2,842,166,700					15 Laporan	2,984,275,035
					Jumlah Surat Keputusan tentang Perhitungan dan Penetapan PAGU Uang Penderitaan (LUP)	SK	SK	70 SK						70 SK	
					Jumlah Surat Kelembagaan Penghentian Pembayaran	Dokumen	Dokumen	12500 Dokumen						12500 Dokumen	
5	2	2	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			12964 Dokumen	1,224,735,000	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	12964 Dokumen	1,285,971,750
5	2	2	1	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			1 Laporan	122,540,300	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	128,667,315
5	2	2	1	Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Pemberitaan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pemberitaan Anggaran Kas dan SPD			120 Dokumen	193,644,700	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	120 Dokumen	203,326,935
5	2	2	1	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah			1 SK	52,345,500	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 SK	54,962,775
5	2	2	1	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			43 Dokumen	275,815,000	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	43 Dokumen	289,605,750
5	2	2	1	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			2 Dokumen	203,364,500	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	2 Dokumen	213,532,725
5	2	2	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			24 Laporan	204,631,800	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	24 Laporan	214,863,390
5	2	2	1	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaran dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaran dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi			1 Dokumen	115,453,600	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	121,226,280
5	2	2	1	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			15 Laporan	391,582,600	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	15 Laporan	411,161,730
5	2	2	1	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			2 Pergub	58,053,700	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	2 Pergub	60,956,385
5	2	2	1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				3,051,213,800						1,328,350,543
5	2	2	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			2 Laporan	138,241,200	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		2 Laporan	80,510,220
5	2	2	1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			2 Dokumen	186,309,500	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		2 Dokumen	105,006,786
5	2	2	1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			18 Laporan	450,944,400	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		18 Laporan	280,336,056
5	2	2	1	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			7 Laporan	480,054,500	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		7 Laporan	288,032,940
5	2	2	1	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			2 Dokumen	604,229,300	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		2 Dokumen	362,194,620
5	2	2	1	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			1 Dokumen	292,916,100	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	112,269,921
5	2	2	1	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			1 Dokumen	161,880,300	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	0
5	2	2	1	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan			2 Dokumen	232,779,800	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		2 Dokumen	25,000,000
5	2	2	1	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			1 Dokumen	109,417,500	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	25,000,000
5	2	2	1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah			90 Orang	280,686,900	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		90 Orang	25,000,000
5	2	2	1	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina			3 Lembaga	113,754,300	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		3 Lembaga	25,000,000
5	2	2	1	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					1,318,762,199,400						0
5	2	2	1	1.1 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang Dikelola			1 Dokumen	43,947,900	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	0
5	2	2	1	1.2 Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah			1 Laporan	231,383,500	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Laporan	0
5	2	2	1	1.8 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			2 Laporan	69,476,843,400	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		2 Laporan	0
5	2	2	1	1.9 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			1 Laporan	30,121,853,700	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Laporan	0
5	2	2	1	1.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi			2 Laporan	1,218,888,170,900	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		2 Laporan	0
5	2	2	1	1.11 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah				177,651,800						0
5	2	2	1	1.1 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				47,333,600	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0
5	2	2	1	1.2 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah				59,818,200	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0
5	2	2	1	1.3 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah				70,500,000	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0





5	3	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	391,397,760	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	BKD Prov. Kalbar	1 Laporan	430,537,536	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	90 Persen	86 Persen	90 Persen	90 Persen	141,704,320					90 Persen	155,874,752	
5	3	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	2 Unit	3 Unit	3 Unit	2 Unit	50,010,000	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	BKD Prov. Kalbar	2 Unit	55,011,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	-	-	150 Unit	91,694,320	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	BKD Prov. Kalbar	150 Unit	100,863,752	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					4,317,081,800							4,748,767,980	
5	3	2	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					931,426,000							1,024,568,600	
5	3	2	1.01	1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	33,404,300	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	1 Dokumen	36,744,730	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	75,850,500	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	2 Dokumen	83,435,550	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.01	3	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	173,117,900	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	1 Dokumen	190,429,690	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	105,531,200	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	1 Dokumen	116,084,320	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.01	8	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	160,751,600	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	1 Lembaga	176,826,760	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.01	9	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	42,322,700	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	1 Dokumen	46,554,970	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	187,716,200	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	4 Dokumen	206,487,820	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	135,114,200	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	1 Dokumen	148,625,620	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	17,617,400	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	1 Laporan	19,379,140	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.02		Mutasi dan Promosi ASN					1,187,516,500							1,306,268,150	
5	3	2	1.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	7 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	81,974,000	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	7 Dokumen	90,171,400	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.02	2	Pengelolaan Naik Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Naik Pangkat ASN	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	299,003,400	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	6 Laporan	328,903,740	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	806,539,100	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	8 Dokumen	887,193,010	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN					1,715,470,900							1,887,017,990	
5	3	2	1.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	3 Orang	10 Orang	50 Orang	41,807,100	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	50 Orang	45,987,810	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	800 Dokumen	1010 Dokumen	400 Dokumen	800 Dokumen	250,890,200	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	800 Dokumen	275,979,220	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.03	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	3 Dokumen	10 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	639,486,400	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	3 Dokumen	703,435,040	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Diklat	4 Dokumen	30 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	488,691,100	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	4 Dokumen	537,560,210	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.03	5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama pelaksanaan Diklat	3 Dokumen	4 Dokumen	-	3 Dokumen	53,458,600	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	3 Dokumen	58,804,460	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	30 Orang	-	70 Orang	30 Orang	16,682,600	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	30 Orang	18,350,860	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	66,398,500	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	2 Laporan	73,038,350	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	200 Orang	1273 Orang	1200 Orang	200 Orang	52,835,000	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	200 Orang	58,118,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.03	14	Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	450 Dokumen	1273 Dokumen	2 Dokumen	450 Dokumen	105,221,400	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	450 Dokumen	115,743,540	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					483,648,400							530,913,240	
5	3	2	1.04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	13,145,000	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	1 Dokumen	14,459,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10000 Dokumen	9276 Dokumen	1 Dokumen	10000 Dokumen	81,793,900	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	10000 Dokumen	89,973,290	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5 Orang	254 Orang	-	5 Orang	52,338,300	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	5 Orang	57,572,130	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400 Orang	-	300 Orang	400 Orang	52,986,600	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	400 Orang	58,285,260	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	8755 Orang	8755 Orang	8577 Orang	8755 Orang	133,825,300	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	8755 Orang	147,207,830	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan	8 Laporan	1 Laporan	10 Laporan	84,647,000	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	10 Laporan	93,111,700	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.04	9	Pelayanan Proses Izin Percearaan Pegawai yang Ditayang	Jumlah Dokumen Proses Izin Percearaan Pegawai yang Ditayang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	33,631,100	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	1 Dokumen	36,994,210	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	2	1.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	-	-	1 Laporan	30,281,200	Prov. Kalbar	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN Prov. Kalbar	1 Laporan	33,309,320	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	4				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					28,760,628,200							310,006,516,262	
5	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					19,422,567,729							300,518,944,050	
5	4	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					158,091,300							195,932,500	
5	4	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	38,520,900			PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		2 Dokumen	59,577,300	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			3 Dokumen	32,907,800			PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		3 Dokumen	34,919,500	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	53,283,100			PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		4 Laporan	66,465,900	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	33,379,500			PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		4 Laporan	34,969,800	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					13,237,480,722							13,372,722,500	
5	4	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			85 Orang/ Bulan	12,890,538,222		Semua Kabupaten, Kota, Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		85 Orang/ Bulan	13,000,000,000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	5,560,000			PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	5,560,000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	294,120,000			PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		12 Dokumen	286,920,000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

5	4	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	47,262,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Laporan	80,242,500	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	4	1	1	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	dokumen		dokumen	3 dokumen	115,704,800		3 dokumen	140,685,900	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		49,000,000		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	49,000,000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	4	1	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Inventaris aset	1 Laporan	66,704,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Laporan	91,685,900	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
					Jumlah Laporan Pemeliharaan BMD		1				1				
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan				1 Laporan				
5	4	1	1	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		559,175,701					703,532,750			
5	4	1	1	1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	155,025,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	4 Paket	207,632,350	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	4	1	1	1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	87 Dokumen	116,091,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	87 Dokumen	126,300,400	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	4	1	1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	288,058,651	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	30 Orang	369,600,000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	4	1	1	1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		780,672,225				863,070,400			
5	4	1	1	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	73,744,825	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3 Paket	104,970,400	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	4	1	1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	83,974,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2 Paket	110,000,000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	4	1	1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	204,595,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3 Paket	290,000,000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	4	1	1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	90,402,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3 Paket	47,500,000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	4	1	1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	4 Paket	73,475,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	4 Paket	55,000,000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	4	1	1	6	Penyediaan Bahan Bacan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	742 Dokumen	33,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	742 Dokumen	33,600,000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	4	1	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	181,957,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	30 Laporan	182,000,000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	4	1	1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	38,923,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	40,000,000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	4	1	1	11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1,275,211,980					1,000,000,000			
5	4	1	1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	692,936,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Paket	350,000,000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	4	1	1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	473,203,180	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	20 Unit	650,000,000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	4	1	1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	109,072,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Unit	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	4	1	1	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2,187,625,821					2,320,000,000			
5	4	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	691,000,221	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Laporan	750,000,000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	4	1	1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,496,625,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1,570,000,000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	4	1	1	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,108,605,180					281,923,000,000			
5	4	1	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	176,870,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	9 Unit	280,000,000,000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	4	1	1	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	20 Unit	33,000,000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	4	1	1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	331 Unit	188,252,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	331 Unit	190,000,000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	4	1	1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	400,696,701	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3 Unit	1,250,000,000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	4	1	1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0 Unit	327,786,279	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	0 Unit	450,000,000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		9,338,060,471					9,487,572,212			
5	4	2	1		Pengembangan Kompetensi Teknis		2,918,002,200					2,991,890,241			
5	4	2	1	2	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri, Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri, Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	6 Dokumen	131,828,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	6 Dokumen	141	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	4	2	1	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1090 Orang	2,680,084,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1090 Orang	2,885,000,000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	4	2	1	4	Peminaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Peminaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	4 Dokumen	106,809,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	106,890,100	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	4	2	1		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		6,420,058,271					6,495,681,971			
5	4	2	1	3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	80 Orang	178,728,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	80 Orang	178,917,600	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	4	2	1	4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	8 Laporan	693,416,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	8 Laporan	780,000,000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	4	2	1	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	615 Orang	4,964,182,571	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	615 Orang	5,062,459,271	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	4	2	1	8	Peminaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Peminaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	7 Dokumen	583,730,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	7 Dokumen	474,305,100	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		



5	5	1	1	1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	75,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat	3 Unit	75,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	5	1	1	1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	25 Unit	30 Unit	5 Unit	46,720,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat	5 Unit	46,720,600	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	5	2				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan yang di sampaikan kepada Pemerintah Pusat Provinsi dan Kabupaten/ Kota	100 %	100%	100 %	100 %	1,483,385,300							100 %	1,483,385,300		
5	5	2	1			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	100 %	100 %	100 %	299,000,000								100 %	299,000,000	
5	5	2	1	5		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	2 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	136,170,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Praktisi	1 Laporan	136,170,400	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	5	2	1	12		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	2 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	51,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Praktisi	1 Dokumen	51,500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	5	2	1	13		Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	2 Rekomendasi	1 Rekomendasi	-	1 Rekomendasi	44,829,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Praktisi	1 Rekomendasi	44,829,600	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	5	2	1	15		Fasilitas Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	204 Rekomendasi	150 Rekomendasi	65 Rekomendasi	65 Rekomendasi	66,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Praktisi	65 Rekomendasi	66,500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	5	2	1			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang sosial dan kependudukan	100 %	100 %	100 %	100 %	197,650,000								100 %	197,650,000	
5	5	2	1	1		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Praktisi	1 Dokumen	100,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	2	1	6		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	97,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Praktisi	1 Dokumen	97,650,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	5	2	1			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 %	2 hasil	100 %	100 %	499,265,400								100 %	499,265,400	
5	5	2	1	1		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3 Dokumen	-	2 Dokumen	1 Dokumen	150,820,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Praktisi	1 Dokumen	150,820,300	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	2	1	2		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	98,518,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Praktisi	1 Dokumen	98,518,100	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	2	1	4		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	6 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	98,520,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Praktisi	1 Dokumen	98,520,500	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	2	1	9		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	5 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	151,406,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Praktisi	1 Dokumen	151,406,500	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	2	1			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 %	3 hasil	100 %	100 %	487,469,900								100 %	487,469,900	
5	5	2	1	1		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	249,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Praktisi	1 Dokumen	249,999,800	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	2	1	3		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	57,992,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Praktisi	1 Laporan	57,992,500	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	2	1	4		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	75,097,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Praktisi	1 Laporan	75,097,300	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	2	1	5		Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	3 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	104,380,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Praktisi	1 Laporan	104,380,300	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	2	1	4		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			1 Laporan		75,097,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Praktisi	1 Laporan	250,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	2	1	5		Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual			1 Laporan		104,380,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Praktisi	1 Laporan	250,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	6					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	6					PENGLOLAAN PERBATASAN						7,619,973,881									7,690,507,381	
5	6	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	%		%	100 %	6,488,507,381								100 %	6,488,507,381	
5	6	1	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	%		%	100 %	91,607,100								100 %	91,607,100	
5	6	1	1	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen		39,637,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	2 Dokumen	39,637,400	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH		
5	6	1	1	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen		6,683,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Dokumen	6,683,900	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH		
5	6	1	1	3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen		1,377,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Dokumen	1,377,600	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH		
5	6	1	1	4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen		7,510,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Dokumen	7,510,200	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH		
5	6	1	1	5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen		2,810,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Dokumen	2,810,200	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH		
5	6	1	1	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan		2,638,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Laporan	2,638,900	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH		
5	6	1	1	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Dokumen/Laporan		30,948,900	Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	4 Dokumen/Laporan	30,948,900	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH		
5	6	1	1			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	%		%	100 %	5,490,631,370								100 %	5,490,631,370	
5	6	1	1	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			33 orang/ bulan		5,285,246,170	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Tahun	5,285,246,170	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH		
5	6	1	1	2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen		2,450,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Dokumen	2,450,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH		
5	6	1	1	3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen		147,490,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Dokumen	147,490,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH		

5	6	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	6,666,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Laporan	6,666,400	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1	6	Pengelolaan dan Penyisihan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tidak Lanjut Pemeriksaan			1 Dokumen	1,800,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Dokumen	1,800,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			4 Laporan	23,542,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pontianak,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	4 Laporan	23,542,600	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			4 Dokumen	23,436,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	4 Dokumen	23,436,200	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	%	100 %	17,345,200						100 %	17,345,200	
5	6	1	1	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	1,200,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Dokumen	1,200,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			4 Laporan	2,645,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	4 Laporan	2,645,200	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	13,500,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Laporan	13,500,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1.1	1	Administrasi Kewagawaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	%	100 %	76,076,050						100 %	76,076,050	
5	6	1	1.1	2	Pengadaan Pakalan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya			32 Paket	41,711,050	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	32 Paket	41,711,050	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1 Dokumen	2,510,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Dokumen	2,510,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1.1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			1 Dokumen	2,455,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Dokumen	2,455,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1 Dokumen	2,400,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Dokumen	2,400,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			4 Orang	25,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	4 Orang	25,000,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			33 Orang	2,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	33 Orang	2,000,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1.1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	%	100 %	318,616,100						100 %	318,616,100	
5	6	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	5,814,100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Paket	5,814,100	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	29,653,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Paket	29,653,700	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	13,129,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Paket	13,129,200	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor			1 Tahun	41,160,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Tahun	41,160,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	10,859,100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Paket	10,859,100	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	13,200,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Dokumen	13,200,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1.1	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu			1 Laporan	4,800,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Laporan	4,800,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	200,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Laporan	200,000,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1.1	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	%	100 %	72,000,000						100 %	72,000,000	
5	6	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 Unit	72,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Unit	72,000,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	%	100 %	198,513,561						100 %	198,513,561	
5	6	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	59,544,041	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Laporan	59,544,041	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	4,500,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Laporan	4,500,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	134,469,520	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Laporan	134,469,520	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1.1	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	%	100 %	223,718,000						100 %	223,718,000	
5	6	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3 Unit	68,718,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	2 Unit	68,718,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1.1	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			2 Set	5,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Unit	5,000,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			16 Unit	25,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	0 Unit	25,000,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	6	1	1.1	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			24 Unit	25,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Tahun	25,000,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

5	6	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Unit	100,000,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH			
5	6	2			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Terlaksananya Program Pengelolaan Perbatasan	%	%	100 %		1.131.466.500							100 %	1.202.000.000			
5	6	2	1		Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	Terlaksananya Program Pengelolaan Perbatasan	%	%	100 %		627.357.700							100 %	600.000.000			
5	6	2	1	1	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				5 Dokumen	483,245,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kawasan Perbatasan, Stakeholder yang terkait	5 Dokumen	300,000,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH			
5	6	2	1	2	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun				1 dokumen	144,112,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kawasan Perbatasan, Stakeholder yang terkait	1 dokumen	300,000,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH			
5	6	2	1		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Terlaksananya Program Pengelolaan Perbatasan	%	%	100 %		187.108.800							100 %	250.000.000			
5	6	2	1	1	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	127,401,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat		1 Dokumen	150,000,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH			
												Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,								1 Dokumen		
												Kab. Sambas, Semua Kecamatan,										
												Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,										
												Kab. Sintang, Semua Kecamatan,										
5	6	2	1	2	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	59,707,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat		1 Dokumen	100,000,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH			
												Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,										
												Kab. Sambas, Semua Kecamatan,										
												Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,										
												Kab. Sintang, Semua Kecamatan,										
5	6	2	1		Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Program Pengelolaan Perbatasan	%	%	100 %		317.000.000							100 %	352.000.000			
5	6	2	1	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	102,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat		1 Dokumen	102,000,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH			
												Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,										
												Kab. Sambas, Semua Kecamatan,										
												Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,										
												Kab. Sintang, Semua Kecamatan,										
5	6	2	1	2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan				3 Laporan	215,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat		3 Laporan	250,000,000	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH			
												Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,										
												Kab. Sambas, Semua Kecamatan,										
												Kab. Sanggau, Semua Kecamatan,										
												Kab. Sintang, Semua Kecamatan,										
5	6	1	1.1	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	5,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	0 Unit	0	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH			
						Terpeliharanya Mebel				1 Tahun								1 Tahun				
5	6	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	25,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	0 Unit	0	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH			
5	6	1	1.1	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya				1 Tahun	25,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	1 Tahun	0	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH			
5	6	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	100,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Kalbar	0 Unit	0	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH			
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Tahun								1 Tahun				
5	6	2			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Terlaksananya Program Pengelolaan Perbatasan	%	%	100 %		1.131.466.500							100 %	0			
5	6	2	1		Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	Terlaksananya Program Pengelolaan Perbatasan	%	%	100 %		627.357.700							100 %	0			
5	6	2	1	1	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				5 Dokumen	483,245,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kawasan Perbatasan, Stakeholder yang terkait	5 Dokumen	0	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH			
5	6	2	1	2	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun				1 dokumen	144,112,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Masyarakat Kawasan Perbatasan, Stakeholder yang terkait	1 dokumen	0	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH			
5	6	2	1		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Terlaksananya Program Pengelolaan Perbatasan	%	%	100 %		187.108.800							100 %	0			
5	6	2	1	1	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan				0 Dokumen	127,401,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 0 Dokumen	0	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen		Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan,								1 Dokumen		



5	7	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	62,392,100		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	62,405,040	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5	7	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Tahun	24,588,200		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	24,591,771	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5	7	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Tahun	50,648,400		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	50,710,750	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5	7	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Tahun	41,537,110		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	41,541,875	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5	7	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Tahun	8,040,000		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	8,040,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5	7	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	126,957,788		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	126,957,788	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5	7	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Person		Person		154,779,600							226,608,309		
5	7	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Tahun	15,680,000		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	62,000,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5	7	1	1.1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Tahun	139,099,600		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	164,608,309	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5	7	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Person		Person		460,480,250							470,480,250		
5	7	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	6,980,250		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	6,980,250	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5	7	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun	440,000,000		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	450,000,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5	7	1	1.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	8,500,000		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	0 Laporan	8,500,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5	7	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	0 Laporan	5,000,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5	7	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Person		Person		593,587,025							593,900,000		
5	7	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya				0 Unit	250,000,000		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	0 Unit	250,000,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5	7	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	21,000,000		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	0 Unit	21,000,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5	7	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	54,997,025		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	0 Unit	55,000,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5	7	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	250,000,000		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	0 Unit	250,000,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5	7	1	1.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	15,000,000		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	0 Unit	15,000,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5	7	1	1.1	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang				0 Unit	2,590,000		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	0 Unit	2,900,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5	7	2			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		Person		Person		758,057,596							768,499,664		
5	7	2	1		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		Person		Person		758,057,596							768,499,664		
5	7	2	1	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				1 Laporan	198,379,803	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	198,379,803	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5	7	2	1	3	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan				0 Laporan	55,000,000		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	0 Laporan	55,000,000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
5	7	2	1	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				0 Laporan	504,677,793		PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	0 Laporan	515,119,861	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
6	1				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	1				INSPEKTORAT DAERAH						38,277,523,784							17,462,912,303		
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu	80%	100%	80%	80 Persen	28,363,365,784							80 Persen	6,572,797,793	
6	1	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Persentase/Jumlah) Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80%	32 Dokumen	80%	28 Laporan / Dokumen	405,635,181							28 Laporan / Dokumen	448,319,700	
6	1	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	1	1	1 Dokumen	36,884,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	1 Dokumen	25,634,200	INSPEKTORAT	
6	1	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	1	1	1 Dokumen	17,257,581	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	1 Dokumen	21,242,100	INSPEKTORAT	
6	1	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	1	1	1 Dokumen	17,235,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	1 Dokumen	21,285,900	INSPEKTORAT	
6	1	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	1	1	1 Dokumen	17,235,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	1 Dokumen	21,285,900	INSPEKTORAT	
6	1	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	1	1	1 Dokumen	18,099,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	1 Dokumen	22,149,800	INSPEKTORAT	
6	1	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	11	5	5 Laporan	110,065,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	5 Laporan	115,465,500	INSPEKTORAT	
6	1	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	12	12	14 Laporan	188,856,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	14 Laporan	221,256,300	INSPEKTORAT	
6	1	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Persentase/Jumlah) Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80%	48 Dokumen	80%	28 Laporan	23,193,769,627							28 Laporan	555,395,720	
6	1	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	12 bulan	120	120 Orang/Bulan	22,667,144,427	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	120 Orang/Bulan	0	INSPEKTORAT	
6	1	1	1	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	12	1	1 Dokumen	11,000,000				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	1 Dokumen	12,100,000	INSPEKTORAT	
6	1	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	12	1	1 Dokumen	417,508,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	1 Dokumen	414,577,790	INSPEKTORAT	
6	1	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	1	1	1 Laporan	13,261,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	1 Laporan	17,557,100	INSPEKTORAT	
6	1	1	1	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	0	2	2 Dokumen	21,950,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	2 Dokumen	24,145,990	INSPEKTORAT	

6	1	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	22	11	11	11 Laporan	62,904,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	11 Laporan	87,014,840	INSPEKTORAT	
6	1	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	(Persentase/Jumlah) Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	80%	18 Dokumen	80%	17 Dokumen / Laporan	108,152,100							17 Dokumen / Laporan	129,362,310	
6	1	1	1	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	1	1	1 Dokumen	16,051,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	1 Dokumen	22,111,650	INSPEKTORAT	
6	1	1	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20	9	10	10 Dokumen	51,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	10 Dokumen	56,100,000	INSPEKTORAT	
6	1	1	1	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	8	4	4	4 Laporan	21,454,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	4 Laporan	29,540,280	INSPEKTORAT	
6	1	1	1	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	2	2 Laporan	19,645,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	2 Laporan	21,610,380	INSPEKTORAT	
6	1	1	1.1		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	(Persentase/Jumlah) Dokumen Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	80%	7 Kegiatan	80%	123 ASN	672,422,300						123 ASN	754,418,720		
6	1	1	1.1	2	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	136	0	1 Paket	44,952,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	1 Paket	0	INSPEKTORAT	
6	1	1	1.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	24	12	12	12 Dokumen	35,497,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	12 Dokumen	47,957,030	INSPEKTORAT	
6	1	1	1.1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	2	12	1	1 Dokumen	25,172,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	1 Dokumen	33,629,640	INSPEKTORAT	
6	1	1	1.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	2	4	4 Dokumen	85,876,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	4 Dokumen	120,232,750	INSPEKTORAT	
6	1	1	1.1	6	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	4	5	1	3 Orang	37,525,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	3 Orang	41,278,050	INSPEKTORAT	
6	1	1	1.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	420	123	200	200 Orang	403,766,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	200 Orang	409,658,150	INSPEKTORAT	
6	1	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	234	215	117	117 Orang	77,157,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	117 Orang	101,663,100	INSPEKTORAT	
6	1	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80%	10 Kegiatan	80%	1 Tahun	1,595,051,348						1 Tahun	1,920,113,029		
6	1	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	12	1	1 Paket	80,065,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	1 Paket	88,072,050	INSPEKTORAT	
6	1	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	12	3	3 Paket	278,662,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	3 Paket	345,551,799	INSPEKTORAT	
6	1	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	6	6 Paket	94,311,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	6 Paket	137,292,980	INSPEKTORAT	
6	1	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4000	5000	2000	2000 Paket	120,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	2000 Paket	132,000,000	INSPEKTORAT	
6	1	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	12	3	3 Paket	177,960,348	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	3 Paket	196,512,140	INSPEKTORAT	
6	1	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96	12	48	48 Dokumen	45,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	48 Dokumen	49,500,000	INSPEKTORAT	
6	1	1	1.1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	12	1	1 Laporan	90,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	1 Laporan	99,000,000	INSPEKTORAT	
6	1	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	12	1	1 Laporan	525,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	1 Laporan	550,000,000	INSPEKTORAT	
6	1	1	1.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	235	118	118	118 Dokumen	94,226,100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	118 Dokumen	160,841,450	INSPEKTORAT	
6	1	1	1.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	12	1	2 Dokumen	89,825,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	2 Dokumen	161,342,610	INSPEKTORAT	
6	1	1	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Persentase/Jumlah) Tersedianya barang Milik Daerah/Pengadaan Barang Milik Daerah	80%	162 Pengadaan	80%	80%	81,194,500						9 Unit	157,154,140		
6	1	1	1.1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	210	105	105	105	42,214,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kegiatan	105	46,435,840	INSPEKTORAT	
6	1	1	1.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	57	10	10 Unit	81,194,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kegiatan	9 Unit	110,718,300	INSPEKTORAT	
6	1	1	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Persentase/Jumlah) Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80%	36 Dokumen	80%	80%	1,456,504,670						1 Tahun	1,639,207,735		
6	1	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	12	1	1 Laporan	12,768,750	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	1 Laporan	14,045,625	INSPEKTORAT	
6	1	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	12	12	12 Laporan	332,640,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	12 Laporan	378,116,310	INSPEKTORAT	
6	1	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26	12	13	13 Laporan	1,111,095,920	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	13 Laporan	1,247,045,800	INSPEKTORAT	
6	1	1	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Persentase/Jumlah) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80%	220 Pemeliharaan	80%	80%	850,636,058						1 Tahun	968,826,439		
6	1	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	1	1	1 Unit	59,995,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kegiatan	1 Unit	72,428,950	INSPEKTORAT	

6	1	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perincian	30	15	15	15 Unit	151,693,750	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kegiatan	15 Unit	167,816,000	INSPEKTORAT
6	1	1	1.1	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8	16	4	4 Unit	25,625,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kegiatan	4 Unit	34,375,000	INSPEKTORAT
6	1	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	376	181	188	188 Unit	224,737,500	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kegiatan	188 Unit	242,673,200	INSPEKTORAT
6	1	1	1.1	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10	2	5	5 Unit	3,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kegiatan	5 Unit	3,300,000	INSPEKTORAT
6	1	1	1.1	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4	1	2	2 Unit	25,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kegiatan	2 Unit	29,590,000	INSPEKTORAT
6	1	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	4	1	1 Unit	360,584,808	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kegiatan	1 Unit	418,643,289	INSPEKTORAT
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	80%	100%	80%	80%	6,791,196,700						80%	7,383,619,760	
6	1	2	1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	(Persentase/Jumlah) Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan	80%	136 Laporan	Laporan	80%	4,059,196,300						179 Laporan	4,501,057,110	
6	1	2	1	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	220	91	110	110 Laporan	2,192,407,100	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	129 Laporan	2,356,518,670	INSPEKTORAT
6	1	2	1	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	62	32	31	31 Laporan	510,901,000	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	31 Laporan	562,065,900	INSPEKTORAT
6	1	2	1	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4	2	2	2 Laporan	75,593,600	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	2 Laporan	83,152,960	INSPEKTORAT
6	1	2	1	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	6	3	3	3 Laporan	209,934,500	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	3 Laporan	230,927,950	INSPEKTORAT
6	1	2	1	5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	22	8	11	11 Laporan	553,999,000	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	11 Laporan	620,973,870	INSPEKTORAT
6	1	2	1	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6	0	3	3 Dokumen	516,361,100	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	3 Dokumen	582,651,410	INSPEKTORAT
6	1	2	1		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	(Persentase Jumlah) Laporan Hasil Audit, Reviu, Pemantau Dan Evaluasi Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	Laporan	57 Laporan	2,732,000,400						57 Laporan	2,882,562,650		
6	1	2	1	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2	10	1	1 Laporan	136,464,500	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	1 Laporan	186,300,950	INSPEKTORAT
6	1	2	1	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	108	98	54	54 Laporan	2,595,535,900	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	56 Laporan	2,696,261,700	INSPEKTORAT
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Kebijakan Teknis Pengawasan	80%		80%	80%	3,122,961,300						80%	3,506,494,750	
6	1	3				Persentase Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan		100%									80 Persen		
6	1	3	1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	(Persentase/Jumlah) Kebijakan Pengawasan	80%	4 Dokumen	80%	80%	361,825,600						17 Dokumen / Laporan	435,704,170	
6	1	3	1	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	8	3	4	4 Rekomendasi	156,283,500	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	4 Rekomendasi	168,684,450	INSPEKTORAT
6	1	3	1	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	26	1	13	13 Rekomendasi	205,542,100	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	13 Rekomendasi	267,019,720	INSPEKTORAT
6	1	3	1		Pendampingan dan Asistensi	(Persentase/Jumlah) Rekomendasi Hasil Konsultasi, Asistensi Dan Pendampingan	Laporan	Laporan	143 Laporan	2,761,135,700						143 Laporan	3,070,790,580		
6	1	3	1	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	184	84	92	92 Perangkat Daerah	533,744,000	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	45 Perangkat Daerah	391,294,420	INSPEKTORAT
6	1	3	1	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	180	92	90	90 Perangkat Daerah	307,444,200	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	45 Perangkat Daerah	474,464,760	INSPEKTORAT
6	1	3	1	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10	3	5	5 Kegiatan	719,394,900	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	6 Kegiatan	773,209,910	INSPEKTORAT
6	1	3	1	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	284	32	141	141 Perangkat Daerah	1,200,552,600	Semua kab/kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rencana Kerja	45 Perangkat Daerah	1,431,821,490	INSPEKTORAT
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	97,85 Persen	97,75 Persen	98,25 Persen	7,772,221,038						98,25 Persen	6,917,500,000	
8	1	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5 Dokumen	7 Dokumen	3 Dokumen	157,799,600						3 Dokumen	95,000,000	
8	1	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	79,799,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentrampilan dan Keterlibatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0	1 Dokumen	1 Dokumen	19,999,800	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentrampilan dan Keterlibatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0	1 Dokumen	1 Dokumen	28,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pontianak,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentrampilan dan Keterlibatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Laporan	30,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentrampilan dan Keterlibatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	6,375,458,323						1 Dokumen	6,396,000,000	
8	1	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12 Dokumen	12 Dokumen	38 Orang	6,074,911,823	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentrampilan dan Keterlibatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38 Orang	6,250,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	300,546,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentrampilan dan Keterlibatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	1	1	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	3,500,000					4 Dokumen	12,500,000		
8	1	1	1	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4 Unit	4 Dokumen	3,500,000		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	1.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	194,057,900					12 Dokumen	145,000,000		
8	1	1	1.1	2	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	38 Orang	0	160 Stel	102,858,500		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	160 Stel	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	1.1	3	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	12 Dokumen	2 Dokumen	34,999,800		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	1.1	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	12 Dokumen	12 Dokumen	9,199,600		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	15 Orang	47,000,000		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15 Orang	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	342,612,015					12 Dokumen	129,000,000		
8	1	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Paket	11,499,800		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Dokumen	1 Paket	1 Paket	45,998,000		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	1 Paket	1 Paket	99,920,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Dokumen	1 Paket	1 Paket	44,999,900		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Eksemplar	12,960,000		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Eksemplar	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.1	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0	1240 Porsi	12 Laporan	21,000,000		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	45 Kali	10 Laporan	91,504,715		Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Laporan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0		1 Dokumen	14,729,200		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	559,614,800					1 Dokumen	0		
8	1	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	40 Dokumen	30 Dokumen	600,000		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Dokumen	12 Bulan	1 Paket	109,080,000		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	10 Dokumen	1 Paket	449,934,800		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Paket	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	1.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		4 Unit	4 Unit	139,178,400					4 Unit	140,000,000		
8	1	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dipelihara Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dipelihara Pakainya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	78,336,500		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	1	1.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	4 Unit	4 Unit	60,841,900		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	1	2		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	Persen	97,85 Persen	100 Persen	100 Persen	413,730,900			Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat		100 Persen	4,000,000,000		
8	1	2	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	413,730,900			Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat		1 Dokumen	4,000,000,000		
					Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen		Persen	100 Persen				Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat		100 Persen			
8	1	2	1	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peringatan Hari Bela Negara	100 Orang	380 Orang	100 Orang	256,276,900		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang disusun	100 Orang	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Peringatan Hari Lahir Pancasila				100 Orang				Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat		100 Orang			
					Jumlah Orang yang Mengikuti Road Show Wabah Wasbang (Wajib Paham Wawasan Kebangsaan)				300 Orang				Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat		300 Orang			
					Jumlah Peserta yang Forum Pembauran Kebangsaan				80 Orang				Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat		80 Orang			
8	1	2	1	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Rapat Kerja Forum Pembauran kebangsaan	3 Dokumen	265 Orang	65 Orang	157,454,000		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang disusun	65 Orang	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Rapat Kerja Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa				50 Orang						50 Orang			
					Jumlah Orang yang Mengikuti Rapat Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan				35 Orang						35 Orang			
					Rapat Kerja Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental				100 Orang						100 Orang			
8	1	3		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pemahaman Masyarakat Terhadap Peranan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di	Persen	97,85 Persen	97,95 Persen	98,25 Persen	107,138,091,800			Meningkatkan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat		98,25 Persen	300,000,000		

8	1	3	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	107,138,091,800			Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	1 Dokumen	300,000,000			
					Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					1 Dokumen				
8	1	3	1	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		616 Orang, 12 Partai	0	265 Orang	107,084,881,900	Kab. Sanggau, Kapuas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	Pelajar SILTA Se Derajat, Mahasiswa, Organisasi Perempuan, Tokoh Masyarakat, Partai Politik dan Instansi terkait	265 Orang	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					Jumlah Partai Politik yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		0	0	12 Partai		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Partai			
											Kota Sangkayang, Semua Kecamatan, Kaw. Iweligawan, Semua Kecamatan,							
8	1	3	1	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	616 Orang, 12 Partai	407 Orang, 12 Partai	100 Orang	53,209,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	Pelajar SILTA Se Derajat, Mahasiswa, Organisasi Perempuan, Tokoh Masyarakat, Partai Politik dan Instansi terkait	100 Orang	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	97,85 Persen	97,95 Persen	98,25 Persen	299,554,000			Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	98,25 Persen	880,000,000		
8	1	4	1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	299,554,000			Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	1 Dokumen	880,000,000		
8	1	4	1	3	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Dokumen	180 Ormas/ Orang	3 Dokumen	299,554,000	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang disusun	3 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		70 Orang	180 Ormas/ Orang	50 Orang						50 Orang			
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	97,85 Persen	97,95 Persen	98,25 Persen	206,750,000			Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	98,25 Persen	2,620,000,000		
8	1	5	1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	206,750,000			Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	1 Dokumen	2,620,000,000		
8	1	5	1	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Fasilitas Pencegahan P4GN	200 Orang	180 Ormas/1 Lembaga	100 Orang	110,342,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Yang di Susun	100 Orang	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		180 Ormas/1 Lembaga	180 Ormas/1 Lembaga	50 Orang						50 Orang			
8	1	5	1	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			120 Orang	96,407,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Yang di Susun	0 Orang	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Forum Kerukunan umat Beragama				120 Orang		Kota Pontianak, Semua Kecamatan,				120 Orang			
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persen	97,85 Persen	Persen	98,25 Persen	1,600,432,400			Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	98,25 Persen	2,425,913,800		
8	1	6	1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,600,432,400			Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	1 Dokumen	2,425,913,800		
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Pemetaan Konflik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	205,163,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Pusat Komunikasi dan Informasi Daerah				1 Dokumen						1 Dokumen			
					Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Mahasiswa dan Generasi Muda sebagai Agen Pencegahan Konflik				80 Orang						80 Orang			
8	1	6	1	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	260 Orang	360	320 Orang, 1 Dok	215,457,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat	Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	0 Orang	2,040,913,800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					Jumlah Peserta yang Mengikuti Koordinasi Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat				40 Orang						40 Orang			
					Jumlah Peserta yang Mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial				140 Orang						140 Orang			



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai progres pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, disusun indikator kinerja daerah yang terdiri dari indikator-indikator makro daerah dan indikator-indikator kinerja pembangunan daerah.

**7.1. Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023**

Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 terdiri dari 11 indikator yang ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana pada RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Adapun target indikator kinerja utama pembangunan daerah tahun 2023 pada tabel 7.1 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Infrastruktur	57,15	68,29	71,24	71,24
2.	Indeks Reformasi	B	BB	A	A
3.	Nilai SAKIP	B	BB	A	A
4.	Indeks Pembangunan Manusia	66,26	70,29	71,25	71,25
5.	Pertumbuhan Ekonomi	5,06	4,71-5,46	5,02-5,68	5,02-5,68
6.	Gini Ratio	0,33	0,323-0,321	0,321-0,318	0,321-0,318
7.	Desa Mandiri	1	319	425	425
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,26	5,53 - 4,29	5,42 - 3,98	5,42 - 3,98
9.	Angka Kemiskinan	7,37	7,31-7,23	7,08-7,00	7,08-7,00
10.	Konflik Sosial	0	0	0	0
11.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,10	66,70	66,80	66,80

Sumber: RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

**7.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan akumulasi dari pencapaian indikator *outcome* dari program-program pembangunan daerah setiap tahunnya yang merupakan indikator sasaran pembangunan daerah. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel 7.2 berikut:

**Tabel 7.2**  
Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>			
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023
1	2	3	4	5
1.1	Indeks Infrastruktur	57,15	68,29	71,24
1.2	Indeks Reformasi Birokrasi	B	BB	A
1.3	Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat	B	BB	A
1.4	Indeks Pembangunan Manusia	66,26	70,29	71,25
1.5	Pertumbuhan Ekonomi	5,06	4,71-5,46	5,02-5,68
1.6	Gini Rasio	0,33	0,323-0,321	0,321-0,318
1.7	Desa Mandiri	1	319	425
1.8	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,26	5,53 - 4,29	5,42 - 3,98
1.9	Angka Kemiskinan	7,37	7,31-7,23	7,08-7,00
1.10	Konflik Sosial	0	0	0
1.11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,09	68,19	68,32
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>				
<b>LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>				
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>			
1.1	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,12	7,95	8,2
1.2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,55	13,03	13,2
1.3	Angka Melek Aksara	98,24	-	-
1.4	Skor Mutu Pendidikan Sekolah Menengah	-	5,84	6
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>			
2.1	Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	95	-	-
2.2	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	7	-	-
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	8	-	-
2.4	Angka Harapan Hidup (tahun)	69,92	70,87	70,99
2.5	BOR	60-80%	-	-
2.6	LOS	6-9 hari	-	-
2.7	TOI	1-3 hari	-	-
2.8	BTO	40-50	-	-
2.9	NDR	<50/1000	-	-
2.10	GDR	<75/1000	-	-
2.11	BOR	81,4	-	-
2.12	LOS	132	-	-
2.13	TOI	5,2	-	-
2.14	BTO	2,7	-	-
2.15	NDR	9,38	-	-
2.16	GDR	9,38	-	-
2.17	BOR	80	-	-
2.18	LOS	50	-	-
2.19	TOI	2	-	-
2.20	BTO	40-50	-	-
2.21	NDR	0	-	-
2.22	GDR	0	-	-
2.23	Status Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	Paripurna
2.24	Status Akreditasi Rumah Sakit	Utama	Paripurna	Paripurna
2.25	Status Akreditasi Rumah Sakit	Madya	Paripurna	Paripurna
2.26	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
3.1.	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Mantap	49,71%	72,18%	80%
3.2.	Persentase irigasi Provinsi dalam kondisi baik	46,76%	55,04%	61,21%
3.3.	Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir	46,76%	52,70%	52,81%
3.4.	Persentase Berkurangnya pantai kritis.	56,85%	28,42%	27,33%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023
1	2	3	4	5
3.5.	Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat	67,92%	72,01%	73,37%
3.6.	Presentase data yang tersedia di SIPJAKI	21,43%	78,57%	92,86%
3.7.	Persentase pelayanan mutu jasa konstruksi	66%	88%	100%
3.8	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	50%	70%	75%
3.9	Persentase penduduk yang berakses air minum	-	69%	70%
3.10	Persentase Penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	-	51%	52%
4	<b>Perumahan dan Kawasan Pemukiman</b>			
4.1	Persentase pengajuan proposal rumah korban bencana/relokasi program provinsi/Rumah Khusus/Rumah Susun/Rumah Swadaya dan PSUnya yang tertangani	-	100%	100%
4.2	Jumlah pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	-	1 kab	2 Kab
4.3	Jumlah Ketersediaan PSU di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Sesuai RTRW Provinsi Kalimantan Barat	-	14 PKL	14 PKL
5	<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>			
5.1	Indeks Resiko Bencana	138,49	128	127
5.2	Persentase masyarakat mendapat pelayanan ketenteraman dan dan ketertiban umum (%)	100	100	100
5.3	Indeks Pemahaman terhadap kesatuan Bangsa dan Politik	-	96,95	97,35
6	<b>Sosial</b>			
6.1.	Persentase PSKS yang diberdayakan	12,77	25%	30%
6.2.	Persentase Cakupan Layanan Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	100	100
6.3.	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi sosial	0,98	-	-
6.4.	Persentase peningkatan PPKS (tertentu) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	-	3,25	3,3%
6.5.	Cakupan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin	0,0033	-	-
6.6.	Persentase Peningkatan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilaksanakan	-	0,28	0,28
6.7.	Persentase Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Provinsi.	100	-	-
6.8.	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapatkan penanganan	-	100%	100%
6.9.	Persentase Kabupaten /Kota yang Terkoordinir dalam Sinergitas Program Kesejahteraan Sosial	66,67	-	-
6.10.	Persentase Cakupan Layanan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	-	100	100
6.11.	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial (UPT PSRLU Mulia Dharma)	-	100	100
6.12.	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (UPT PSRLU Mustika Dharma)	100	-	-
6.13.	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial (UPT PSRLU Mustika Dharma)	-	100	100
6.14.	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	-	-
6.15.	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial (UPT Panti Sosial Anak)	-	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023
1	2	3	4	5
<b>LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>				
<b>7</b>	<b>Tenaga Kerja</b>			
7.1	Persentase Tenaga Kerja yang Terlatih	-	-	-
7.2	Persentase Kualitas dan ketersediaan tenaga kerja	90%	91,75%	92,02%
7.3	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	64	90	90
7.4	Persentase Pelanggaran Perusahaan terhadap aturan ketenaga kerjaan	33	32,00%	31,00%
<b>8.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			
8.1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	68,5	80	80,5
8.2.	indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,46	66,96	67,46
8.3.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	100	100	100
<b>9</b>	<b>Pangan</b>			
9.1.	Indeks Ketahanan Pangan	-	59,04	60,91
<b>10.</b>	<b>Pertanahan</b>			
10.1	Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	100
<b>11.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>			
11.1	Indeks Kualitas Air	55,8	57,4	57,8
11.2	Indek Kualitas Air Laut (IKAL)	52,00	61,60	61,80
11.3	Indeks Kualitas Udara	87,9	87,956	87,97
11.4	Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	63.371	64.759	64.483
11.5	Indek Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	52,00	61,77	62,77
11.6	Indek Kualitas lahan (IKL)	54,57	52,14	62,90
<b>12.</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>			
12.1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan, akurasi data kependudukan, kerjasama dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Kalbar	48.66%	75.2%	79.29%
12.2	Persentase kepemilikan KTP-el		98,50%	99,00%
12.3	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)		35,00%	55,00%
12.4	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk	-	85%	95%
12.5	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun	-	95%	97%
12.7	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Yang dilaporkan	-	50%	75%
12.8	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Yang dilaporkan	-	100%	100%
12.9	Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan	-	50%	75%
12.10	Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid		92,00%	93,00%
12.11	Persentase Capaian Penyusunan Profil Kependudukan	-	100%	100%
12.12	Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalbar		85%	95%
<b>13.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>			
13.1	Persentase Status Perkembangan Desa/Kelurahan	66,86%	81,83%	88,77%
13.2	Persentase Indeks Desa Membangun	52,96	68,67%	73,89%
<b>14.</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>			
14.1	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program KB, KS dan Pengendalian Penduduk	13,35%	47%	53%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023
1	2	3	4	5
<b>15.</b>	<b>Perhubungan</b>			
15.1	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat (IKU1)	-	67%	71%
15.2	Persentase Jumlah Terminal Terhadap Penumpang Angkutan Umum (IKU3)	-	83%	72%
15.3	Persentase Jumlah Pelabuhan Terhadap Penumpang Angkutan SDP (IKU4)	-	87%	79%
<b>16.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>			
16.1	Persentase OPD dengan Zona Hijau / nilai 85 - 100	-	90%	100%
16.2	Persentase total bobot domain evaluasi SPBE	-	76%	92%
<b>17.</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>			
17.1.	Persentase Koperasi Berkualitas	23,00%	-	-
17.2.	Persentase Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Naik Kelas	0,00%	-	-
17.3.	Persentase Volume Usaha Koperasi	-	12%	13%
17.4.	Persentase Pertumbuhan UMKM	-	7,00%	9,00%
<b>18.</b>	<b>Penanaman Modal</b>			
18.1.	Jumlah Nilai Investasi	18,75 T		
18.3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	B		
18.2.	Laju Pertumbuhan Investasi (Persen)	-	3.5	3.5
<b>19.</b>	<b>Kepemudaan</b>			
19.1.	Indeks pembangunan pemuda	48	52	53
<b>20.</b>	<b>Olahraga</b>			
20.1	Angka Harapan Hidup (tahun)	69,92	70,86	70,97
<b>21.</b>	<b>Statistik</b>			
21.1	Persentase data statistik sektoral OPD yang terintegrasi	-	100%	100%
<b>22.</b>	<b>Persandian</b>			
22.1	Persentase OPD dengan kategori baik, cukup, perlu baik dan tidak layak.	-	Baik 0% Cukup 26% Perlu Perbaikan 38% Tidak Layak 36%	Baik 2% Cukup 32% Perlu Perbaikan 34% Tidak Layak 32%
<b>23.</b>	<b>Kebudayaan</b>			
23.1.	Jumlah peningkatan warisan budaya benda dan tak benda yang diapresiasi	3	-	-
23.2.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	44,88	45,2	45,28
<b>24.</b>	<b>Perpustakaan</b>			
24.1.	Cakupan Kunjungan Perpustakaan	-	12.800	141.570
24.2.	Koleksi Daerah yang dilestarikan	-	6392	6692
24.3.	Nilai Budaya Literasi	-	53,50	54,00
24.4.	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	C (cukup)	B (baik)	A (sangat baik)
24.5.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	13,26%	13,76%
<b>25.</b>	<b>Kearsipan</b>			
25.1.	Persentase Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Arsip dengan Kategori Cukup	6,67%	40,00%	53,30%
25.2.	Persentase Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Kearsipan dengan Kategori Cukup	20,00%	71,00%	86,00%
25.3.	Nilai pengawasan kearsipan kategori B ke atas	0%	2 LKD dan 18 OPD	3 LKD dan 14 OPD

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023
1	2	3	4	5
25.4.	Jumlah Penggunaan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	600 orang	650 orang	650 orang
25.5.	Jumlah Pemanfaatan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	350 arsip	450 arsip	450 arsip
25.6	Penerapan e-arsip terintegrasi	0%	3 LKD dan 3 OPD	4 LKD dan 4 OPD
25.7	Persentase Penerapan e-Arsip Terintegrasi	-	13,86%	18,53%
<b>URUSAN PILIHAN</b>				
<b>26.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>			
26.1	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan (Persen)	3,65	3,92 - 4,52	4,09 - 4,64
26.2	NTP Perikanan (%)	103,5	103,0	104,0
<b>27</b>	<b>Pariwisata</b>			
27.1	Pertumbuhan Sektor Pariwisata terhadap PDRB	4.17	-	-
27.2	Pertumbuhan jumlah pelaku ekonomi kreatif	90.649,00	-	-
27.3	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	-	3.47 - 3.97	3.68 - 4.13
<b>28.</b>	<b>Pertanian</b>			
28.1	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Peternakan (Persen)	5,51	6,06 - 6,98	6,19 - 7,26
28.2	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Tanaman Pangan (Persen)	9,8	4,14 - 4,82	4,39 - 5 ,20
28.3	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Tanaman Hortikultura (Persen)	4,96	6,76 - 8,95	7,17 - 9,43
28.4	NTP Peternakan	93,95	98,79	100
28.5	NTP Tanaman Pangan	94,41	95,14	95,17
28.6	NTP Hortikultura	101,02	101,9	102,4
<b>29</b>	<b>Perkebunan</b>			
29.1	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Tanaman Perkebunan (Persen)	7,75	6,09 - 9,27	6,45 - 9,67
29.2	NTP Perkebunan Raykat (Angka)	94,44	98,89	100
<b>30</b>	<b>Kehutanan</b>			
30.1	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Kehutanan (Persen)	-0,98	-0,88 - (-1,02)	-0,30 - (-0,73)
30.2	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	63,371	64,759	64,483
<b>31</b>	<b>Energi Sumber Daya Miineral</b>			
31.1	Rasio Elektrifikasi (%)	83,00	91	93
31.2	Daya Mampu Listrik di Kalbar (MW)	-	1193	1296
31.3	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan ADHK (Persen)	7,45	3.26 - 4.88	3.45 - 5.07
<b>32.</b>	<b>Perdagangan</b>			
32.1	Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	5,54	-	-
32.2	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	-	4.20 - 5.76	4.51 - 5.99
<b>33.</b>	<b>Perindustrian</b>			
33.1	Pertumbuhan Sektor Industri di dalam PDRB	7,49	-	-
33.2	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	-	7.74 - 7.75	7.83 - 7.86
<b>34.</b>	<b>Transmigrasi</b>			
34.1.	Persentase Luas Lahan Transmigrasi Yang Clear and Clean pada UPT Bina	32,04	4,47	4,47
<b>PENUNJANG URUSAN</b>				
<b>1.</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>			
1.1	Persentase Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023
1	2	3	4	5
1.2	Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (Status Hukum)	AMPRES	0,8	100% (1 Provinsi)
1.3	Pembentukan Kabupaten	3 AMPRES	0,8	100% (1 Kabupaten)
1.4	Segmen Batas Daerah	27	5	5
1.5	Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga di Dalam Negeri dan Luar Negeri	100	100	100
1.6	Persentase Penataan perundang-undangan (%)	100	100	100
1.7	Persentase Fasilitasi, Koordinasi dan Monev Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%
1.8	Jumlah Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang meningkat	5,28 %	-	-
1.9	Inflasi yang terkendali	3,60 %	-	-
1.10	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	-	85%	90%
1.11	Kualitas pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat	-	Baik	Baik Sekali
1.12	Persentase pelayanan pelayanan umum dan pimpinan (%)	100	100	100
1.13	Persentase pengelolaan administrasi keuangan dan aset di lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan (%)	100	100	100
1.14	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang ditata tepat fungsi dan tepat ukuran(%)	41	62	68
1.15	IKM Provinsi Kalimantan Barat (Baik/Sangat Baik)	80,33	84,2	84,5
1.16	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penataan system manajemen SDM Aparatur berdasarkan merit sistem (%)	20	80	100
1.17	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	10,28	10	10
1.18	Persentase Proses Pengadaan Memenuhi Prinsip- Prinsip Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-
1.19	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-	70%	80%
1.20	Persentase Dokumentasi dan Publikasi Pemberitaan melalui Media Cetak Elektronik, Online dan Media Luar Ruang (%)	77,5	98	100
1.21	Persentase Pelayanan pimpinan Pemerintah Provinsi kalbar dan Tamu Pimpinan sesuai Standart Pelayanan (%)	80	98	100
1.25	Nilai LPPD (persen)	-	100%	100%
1.26	Jumlah Peningkatan Penyebaran Informasi Melalui Media Ceta, Media Luar Ruang dan Online	-	89%	100%
1.27	Jumlah Pelayanan Tamu Pimpinan dan Pengaturan Acara	-	89%	90%
1.28	Persentase Kelembagaan Provinsi Yang Efektif dan Efesien Sesuai Dengan Kebutuhan dan Kemampuan Keuangan Daerah	41%	100%	100%
1.29	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota dengan Nilai Reformasi Birorasi 60 ke atas	-	100%	100%
1.30	Jumlah Pelaporan Kinerja Setda yang berkualitas	-	100%	100%
<b>2</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>			
2.1	Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD.	-	84	85

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	
			2022	2023
1	2	3	4	5
<b>3.</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>			
3.1	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	21,04	24	25
3.2	Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja	12,61	16	17
<b>4.</b>	<b>Keuangan</b>			
4.1	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP
4.2	Persentase Laporan BMD Sesuai Ketentuan	-	-	-
4.3	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Daerah	100%	-	-
4.4	Rasio PAD Terhadap APBD (Persen)	37.60%	35%	37%
<b>5.</b>	<b>Kepegawaian</b>			
5.1	Persentase Aparatur sesuai dengan Manajemen Karir	54%	-	-
5.2	Persentase Aparatur Sesuai Dengan Standar Kompetensi Jabatan ASN	54%	72%	79%
<b>6.</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan (BPSDM)</b>			
6.1	Persentase pelayanan pengembangan profesionalisme SDM Pemerintah Daerah	13,22%	15,57%	15,80%
<b>7.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>			
7.1	Persentase Rekomendasi Hasil yang ditindaklanjuti untuk mendukung kebijakan daerah.	-	90%	100%
7.2	Persentase Hasil Penelitian Bidang Sosial dan Pemerintahan	-	100%	100%
7.3	Persentase Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan yang berkualitas	-	100%	100%
7.4	Persentase Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang berkualitas	-	100%	100%
<b>8.</b>	<b>Pengelolaan Perbatasan</b>			
8.1	Ratio Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal Wilayah Perbatasan terhadap Seluruh Desa Wilayah Perbatasan	0,9036	0,0904	0,0301
<b>9.</b>	<b>Pengelolaan Penghubung</b>			
9.1	Persentase sistem pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta (%)	100	100	100
9.2	Persentase Penyelenggaraan Layanan Penghubung Sesuai Standar	98,63	100	100
<b>10.</b>	<b>Pengawasan</b>			
10.1	Persentase tindak lanjut hasil temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti (%).	88	-	-
10.2	Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti (%)	85%	93%	95%
10.3	Level maturitas SPIP	level 3	level 3	Level 4
10.4	Jumlah Partisipasi Kegiatan Prioritas Nasional	5	6	7
10.5	Level Kapabilitas APIP	level 3	level 3	Level 4
10.6	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja (Nilai)	13,72	16	16,5
10.7	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Kinerja (Nilai)	6,32	8,32	8,62
10.8	Nilai Persepsi Korupsi	5,79	6,5	6,6

## **BAB VIII PENUTUP**

### **8.1. Kaidah Pelaksanaan**

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun masyarakat termasuk dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan tahun 2023 sehingga tercapai sinergi antara unsur-unsur tersebut. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sebagaimana berikut ini.

1. Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya;
2. RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program maka setelah ditetapkannya pagu sementara Tahun 2023, masing - masing Perangkat Daerah perlu menyelaraskan dengan Renja PD dan selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD):

- a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2023, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda);
- b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2023, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di atas perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan dan menyesuaikan prioritas penggunaan anggaran untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* di tahun 2023 dalam kerangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah;
- d. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dari masing-masing Perangkat Daerah.

RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Perangkat Daerah telah menyempurnakan Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023 sesuai hasil pemetaan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan pihak swasta dapat berperan serta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama program-program pembangunan yang berfungsi untuk menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada tahun 2023. Selain itu, masyarakat luas juga dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.

## 8.2. Tindak Lanjut

Akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan. RKPD yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten jujur, transparan dan penuh tanggung jawab.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI